

# Dari Aural ke **ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

Lintasan Komunikasi, Agama,  
dan Isu-isu Kontemporer



Prof. Dr. Yeni Huriani, M.Hum.

Prof. Mohammad Taufiq Rahman, M.A., Ph.D.



GUNUNG DJATI PUBLISHING

2026

**Dari Aural ke Artificial Intelligence:  
Lintasan Komunikasi, Agama, dan Isu-isu  
Kontemporer**

**Prof. Dr. Yeni Huriani, M.Hum.,  
Prof. Mohammad Taufiq Rahman, M.A., Ph.D.**

**GUNUNG DJATI PUBLISHING**

**2026**

#### Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

# **Dari Aural ke Artificial Intelligence:**

## **Lintasan Komunikasi, Agama, dan Isu-isu Kontemporer**

### **Penulis:**

Prof. Dr. Yeni Huriani, M.Hum.,

Prof. Mohammad Taufiq Rahman, M.A., Ph.D.

### **Editor:**

M. Taufiq Rahman

### **Cover & Tata Letak:**

Muhammad Haikal As-Shidqi

Diterbitkan oleh:

### **Gunung Djati Publishing**

Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung

Email: [adminpuslitpen@uinsgd.ac.id](mailto:adminpuslitpen@uinsgd.ac.id)

Cetakan Pertama, Januari 2026

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya buku berjudul *Dari Aural ke Artificial Intelligence: Lintasan Komunikasi, Agama, dan Isu-isu Kontemporer* ini dapat diselesaikan dan dihadirkan kepada para pembaca. Buku ini merupakan ikhtiar akademik sekaligus reflektif untuk membaca kembali relasi panjang antara manusia, agama, dan teknologi komunikasi dalam lintasan sejarah yang terus bergerak dan mengalami transformasi mendasar.

Perjalanan peradaban manusia pada hakikatnya adalah perjalanan komunikasi. Dari budaya lisan yang mengandalkan suara dan ingatan kolektif, menuju tradisi tulis dan cetak yang meneguhkan visualitas serta teks sebagai pusat otoritas, hingga memasuki era digital dan kecerdasan buatan yang menghadirkan simulasi kehadiran, makna, dan bahkan relasi spiritual berbasis algoritma. Dalam setiap fase tersebut, agama tidak pernah berada di luar perubahan, melainkan senantiasa terlibat, beradaptasi, bernegosiasi, dan terkadang mengalami ketegangan yang mendalam dengan medium-medium komunikasi yang berkembang.

Buku ini disusun berangkat dari kesadaran bahwa perubahan teknologi komunikasi tidak semata-mata bersifat teknis atau instrumental, melainkan berdampak langsung pada cara manusia mengindra, memahami, dan menghayati realitas—termasuk realitas keagamaan. Pergeseran dari pengalaman aural menuju interaksi dengan kecerdasan buatan menandai perubahan sensorium religius yang signifikan, dari kebersamaan fisik menuju kehadiran virtual, dari otoritas berbasis tradisi menuju otoritas algoritmik, serta dari pengalaman komunal menuju personalisasi spiritual yang semakin ekstrem.

Melalui pendekatan interdisipliner yang memadukan kajian komunikasi, sosiologi agama, filsafat teknologi, dan teori media, buku ini berupaya menyajikan analisis yang komprehensif mengenai implikasi teologis, etis, sosial, dan kultural dari transformasi tersebut. Pembahasan tidak berhenti pada deskripsi fenomena, tetapi juga mengajukan refleksi kritis atas tantangan kontemporer seperti mediasi agama di ruang digital, krisis otoritas keagamaan, komodifikasi spiritualitas, hingga kehadiran kecerdasan buatan sebagai aktor nonmanusia dalam produksi dan distribusi makna keagamaan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini tidak dimaksudkan untuk memberikan jawaban final atas seluruh persoalan yang dibahas. Sebaliknya, buku ini diharapkan menjadi ruang dialog akademik dan refleksi kritis bagi para akademisi, mahasiswa, pemuka agama, praktisi media, serta masyarakat luas yang peduli terhadap masa depan kehidupan beragama di tengah percepatan teknologi. Dengan memahami lintasan historis dari budaya aural hingga kecerdasan buatan, diharapkan pembaca dapat mengembangkan sikap yang lebih bijaksana, kritis, dan humanis dalam merespons perubahan zaman.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada Gunung Djati Publishing atas dukungan penerbitan buku ini, serta kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi intelektual maupun moral dalam proses penyusunannya. Semoga buku ini memberikan manfaat, memperkaya khazanah keilmuan, dan menjadi sumbangsih bermakna bagi pengembangan studi komunikasi dan agama di era kontemporer.

Bandung, Maret 2026  
Para Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                          | <b>5</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                              | <b>6</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                       | <b>8</b>  |
| A. Latar Belakang dan Argumentasi Sentral.....                                                      | 8         |
| B. Kerangka Konseptual dan Teori Media.....                                                         | 10        |
| C. Struktur dan Kontribusi Buku .....                                                               | 13        |
| <b>BAB II LANDASAN HISTORIS TEORETIS EVOLUSI KOMUNIKASI MANUSIA &amp; AGAMA.....</b>                | <b>16</b> |
| A. Perspektif Evolusioner tentang Teknologi Komunikasi dan Budaya.....                              | 16        |
| B. Tahapan Perkembangan Komunikasi Manusia dan Sensorium .....                                      | 19        |
| C. Teori Sekularisasi, Desekularisasi, dan Mediasi Agama .....                                      | 22        |
| <b>BAB III REVOLUSI TIPOGRAFI AGAMA DALAM LINGKUNGAN VISUAL .....</b>                               | <b>27</b> |
| A. Transformasi Religiusitas dalam Revolusi Tipografi.....                                          | 27        |
| B. Individualisme, Reformasi, dan Otoritas Teks Cetak.....                                          | 30        |
| C. Komunikasi Religius dan Standardisasi Doktrin .....                                              | 34        |
| <b>BAB IV ERA PENYIARAN AWAL RADIO, TELEVISI, &amp; AGAMA MASSA.....</b>                            | <b>38</b> |
| A. Sejarah Penyiaran Religius di Masa-Masa Awal .....                                               | 38        |
| B. Lahirnya “Televangelisme” dan Agama Spektakel.....                                               | 40        |
| C. Strategi Umat Beragama Mengkomunikasikan Pesan Ajaran .....                                      | 44        |
| <b>BAB V KOMUNIKASI DALAM POSTMODERNITAS SEBAGAI FRAGMENTASI IDENTITAS RELIGIUS.....</b>            | <b>47</b> |
| A. Komunikasi dalam Situasi Religius Postmodernitas.....                                            | 47        |
| B. Komunikasi dan Transformasi Identitas Religius .....                                             | 49        |
| C. Kebangkitan Spiritual Non-Institusional.....                                                     | 51        |
| <b>BAB VI DIGITALISASI &amp; CYBERSPACE: BAGAIMANA SITUS PERSUASI DALAM RITUAL KEAGAMAAN? .....</b> | <b>54</b> |
| A. Internet sebagai Situs Persuasi Religius dan Ritual Keagamaan .....                              | 54        |
| B. Nasib Agama Tradisional di Lingkungan Elektronik .....                                           | 58        |
| C. Otoritas dan Distribusi Pesan.....                                                               | 61        |
| <b>BAB VII AGAMA &amp; ISU GENDER DALAM KOMUNIKASI DIGITAL .....</b>                                | <b>64</b> |
| A. Representasi Gender dalam Konten Religius Digital.....                                           | 64        |
| B. Ruang Aman Virtual bagi Gerakan Keagamaan Feminis .....                                          | 67        |

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C. Stigma dan <i>Hate Speech</i> (Ujaran Kebencian) di Media.....                   | 70         |
| <b>BAB VIII RADIKALISASI DIGITAL: KOMUNIKASI EKSTREMISME</b>                        |            |
| <b>KONTEMPORER.....</b>                                                             | <b>74</b>  |
| A. Evolusi Retorika Radikal dari Teks Cetak ke Video Viral .....                    | 74         |
| B. Lingkungan Gema ( <i>Echo Chambers</i> ) dan <i>Filter Bubbles</i> Religius..... | 76         |
| C. Kontra-Narasi dan Deradikalisasi Media .....                                     | 78         |
| <b>BAB IX AGAMA, SAINS, &amp; MASA DEPAN MANUSIA-MESIN .....</b>                    | <b>81</b>  |
| A. Masa Depan Agama Elektronik dan Spiritualitas <i>Cyborg</i> .....                | 81         |
| B. Implikasi Religius dari Hubungan Manusia-Mesin .....                             | 84         |
| C. Isu Bioetika (Kloning dan Genetik) dalam Media Digital .....                     | 86         |
| <b>BAB X PLURALISME, INTOLERANSI, &amp; DIALEKTIKA MEDIA.....</b>                   | <b>90</b>  |
| A. Mediasi Konflik dan Dialog Antar Agama .....                                     | 90         |
| B. Digitalisasi Isu Intoleransi.....                                                | 92         |
| C. Komunikasi Publik sebagai Jembatan.....                                          | 95         |
| <b>BAB XI KRITIK &amp; ETIKA MEDIA KEAGAMAAN .....</b>                              | <b>98</b>  |
| A. Komodifikasi dan <i>Pious Consumption</i> .....                                  | 98         |
| B. Literasi Media Keagamaan.....                                                    | 100        |
| C. Etika Otoritas Digital .....                                                     | 102        |
| <b>BAB XII PENUTUP.....</b>                                                         | <b>105</b> |
| A. Simpulan Argumentasi .....                                                       | 105        |
| B. Rekonstruksi Sensorium di Era <i>Ubiquitous Computing</i> .....                  | 106        |
| C. Implikasi Teologis dan Komunikasi .....                                          | 109        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                          | <b>112</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang dan Argumentasi Sentral

Evolusi peradaban manusia tidak dapat dipisahkan dari revolusi dalam cara kita berinteraksi yang esensinya adalah transformasi fundamental dalam cara kita mengindra, memahami, dan memaknai realitas. Jauh sebelum teknologi mentransformasi lanskap global, pengalaman keberagamaan dan sosial secara signifikan bertumpu pada pengalaman aural (ranah pendengaran). Dalam tradisi-tradisi keagamaan, suara memegang peranan krusial yang sakral, wahyu Ilahi yang didengarkan dan disebarkan menjadi prinsip penciptaan dan panduan hidup. Al-Qur'an yang bermakna "bacaan" yang dilafalkan, diturunkan secara lisan dan dihafalkan secara kolektif. Kitab Veda diwariskan melalui tradisi Sruti (yang didengar). Amanat Yesus di Bukit disampaikan secara lisan. Pada era tersebut, sensorium komunitas religius didominasi oleh indera pendengaran, yang membentuk epistemologi partisipatif, imajinatif, dan komunal. Kehadiran Ilahi dihayati melalui resonansinya dalam ruang ritual, kidung pujian, atau intuisi kalbu yang terinspirasi. Transisi dari budaya lisan ke budaya tulis kemudian ke budaya cetak telah mengubah panorama ini, namun signifikansi pengalaman mendengarkan yang transformatif tetap menjadi memori kolektif dan fondasi teologis. Konteks historis ini menjadi titik awal analisis kita untuk memahami bagaimana fondasi aural yang intim dan terinternalisasi ini kemudian berinteraksi, bahkan berkonfrontasi dengan arus teknologi komunikasi yang kian abstrak, visual, dan kini difasilitasi oleh kecerdasan buatan.

Perkembangan signifikan terjadi dengan bangkitnya budaya visual yang dipelopori oleh penemuan mesin cetak, fotografi, film, dan televisi. Indera penglihatan mulai mendominasi indera pendengaran sebagai pintu utama persepsi. Agama-agama pun beradaptasi, teks kitab suci yang dicetak menjadi otoritatif, representasi religius dan simbol-simbol visual disebarluaskan, dan televangelisme menjadikan citra sang pendakwah serta produksi artistik panggung yang megah sebagai bagian integral dari pengalaman beribadah. Sensorium keagamaan menjadi lebih tersebar, terstandarisasi, tetapi juga lebih individual, individu dapat "beragama" secara mandiri dengan buku. Akan tetapi, disrupsi yang sesungguhnya mencapai intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan kemunculan revolusi digital dan internet. Ruang siber bukan lagi sekadar ekstensi dari ruang visual, melainkan sebuah ekosistem media baru yang menghadirkan kelimpahan, interaktivitas, dan fragmentasi. Situs web, media sosial, dan aplikasi keagamaan mengubah cara komunitas dibentuk, otoritas dikonstruksi, dan ritual dilaksanakan. Umat beribadah bersama dalam ruang percakapan, mencari interpretasi ayat melalui mesin pencari, dan membentuk identitas religius melalui kurasi konten di platform seperti *YouTube* atau *Instagram*. Transformasi ini bukan hanya bersifat instrumental dengan memanfaatkan media baru untuk tujuan yang sama, tetapi secara fundamental mengubah cara keberagamaan itu sendiri diindra dan dihayati. Dunia digital menciptakan sensorium yang terhubung namun terpisah, personal namun termonitor, yang mendalam namun juga superfisial.

Perubahan fundamental yang saat ini tengah berlangsung dan berpotensi lebih mendalam dari gelombang transformasi sebelumnya, adalah kemunculan era kecerdasan buatan (AI) generatif dan algoritma otonom. Jika revolusi digital terdahulu menghubungkan individu melalui mediasi mesin, revolusi AI kali ini menghadirkan entitas mesin dengan kapasitas yang menyerupai agen, mampu berkomunikasi, mengambil keputusan, bahkan berkreasi. Aplikasi percakapan (*chatbot*) seperti ChatGPT atau asisten AI lainnya telah mendemonstrasikan kapabilitas untuk memberikan arahan pastoral elementer, menyusun pidato keagamaan (khotbah), menginterpretasi teks-teks sakral secara instan, atau menghasilkan visualisasi seni



religius yang mengesankan. Fenomena ini menandai tahapan paradoks dalam perkembangan komunikasi dengan beranjak dari pengalaman aural yang sangat personal dan terinternalisasi (*embodied*), kita bergerak menuju interaksi dengan entitas buatan, non-biologis, dan seringkali tidak terdeteksi. Indera kita dihadapkan pada realitas baru yang artinya kehadiran tanpa eksistensi. Kita dapat merasakan dampak dan menerima pesan dari sistem algoritmik tanpa kesadaran, pengalaman subjektif, atau sistem kepercayaan. Kondisi ini memicu kekhawatiran teologis dan filosofis yang signifikan, “*bagaimana konsep komunitas, otoritas, transendensi, bahkan suara Tuhan atau bisikan iblis dapat dipahami dalam ekosistem yang dianimasikan oleh kecerdasan buatan?*”. Urgensi telaah ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memetakan, menganalisis, dan merefleksikan transisi kualitatif sebelum kita sepenuhnya terlarut di dalamnya tanpa pemahaman kritis yang memadai.

Argumen sentral dalam penjabaran ini adalah bahwa setiap perkembangan teknologi komunikasi bukan sekadar memodifikasi cara penyampaian pesan-pesan religius, melainkan secara esensial mengonfigurasi ulang persepsi sensorik dan kognitif terhadap entitas Ilahi, yang pada gilirannya memodifikasi struktur keyakinan, praktik, dan komunitas religius itu sendiri. Dengan kata lain, medium tidak sekadar berperan sebagai wadah pesan yang netral, ia adalah lingkungan yang membentuk kembali realitas sosio-religius. Perkembangan dari pengalaman aural menuju AI merepresentasikan pergeseran dari *co-presensi* (kebersamaan dalam ruang dan waktu yang sama, mendengarkan suara dari entitas biologis yang hidup) menuju kehadiran yang terdistribusi dan tersimulasi. Ini adalah pergeseran dari pengalaman religius yang bersifat partisipatif dan berbasis hafalan menuju pengalaman yang dikurasi dan dipersonalisasi secara algoritmik. AI tidak hanya akan menjadi instrumen baru, melainkan mitra (atau bahkan rival) dalam proses konstruksi makna keagamaan. Ia menawarkan personalisasi spiritual yang ekstrim, setiap individu berpotensi memiliki mentor AI atau pendamping *do’a* AI yang disesuaikan dengan preferensi individual. Namun, secara simultan berpotensi mengikis dimensi komunal, ambiguitas, misteri, dan resistensi profetik yang kerap menjadi esensi pertumbuhan spiritual. Elaborasi ini berargumen bahwa memahami perkembangan ini adalah prasyarat untuk menghadapi tantangan kontemporer dengan bijaksana, bukan dengan nostalgia yang tidak reflektif atau penerimaan yang naif.

Argumentasi ini selanjutnya menggarisbawahi bahwa transformasi sensorik akibat teknologi digital memunculkan implikasi etis, politis, dan teologis yang krusial. Dalam era kecerdasan buatan (AI), algoritma yang mengelola linimasa media sosial berpotensi membentuk resonansi gema religius, memperparah polarisasi melalui diseminasi konten yang semakin ekstrem atau eksklusif berdasarkan rekam jejak interaksi pengguna. Tokoh agama tradisional seperti kyai, pendeta, pastor, dan ulama dihadapkan pada imperatif untuk berdialog dengan otoritas baru yang diemban oleh platform digital dan para insinyur perancang algoritma tersebut, yang berpotensi minim pemahaman atau sensitivitas terhadap kompleksitas teologis. Problematika kontemporer seperti *deepfake* dengan nuansa religius (video manipulatif yang meyakinkan tentang tokoh agama), komersialisasi pengalaman spiritual melalui aplikasi berbayar, atau optimalisasi AI untuk memprediksi dan memengaruhi perilaku keagamaan masyarakat merupakan tantangan riil. Sensorium kita dibombardir oleh stimulasi yang dikurasi oleh mesin yang berpotensi memproyeksikan pengalaman transendensi atau unifikasi buatan namun terasa autentik. Buku ini menegaskan bahwa studi agama kontemporer tidak lagi memadai jika hanya terfokus pada interpretasi teks, melainkan harus mencakup pemahaman komprehensif tentang algoritma, kode, bias data, serta rasionalitas ekonomi-politik yang melandasi platform yang kian mendominasi kehidupan beragama kita. Dari analisis ini kita dapat mengidentifikasi peluang emansipatoris maupun ancaman dehumanisasi yang diakibatkan oleh teknologi baru.

Di sisi lain, buku ini juga berupaya mengeksplorasi potensi rekonfigurasi dan resistensi. Sejarah menunjukkan bahwa agama-agama seringkali tidak hanya menerima teknologi secara

pasif, melainkan secara aktif memanfaatkan, mengadaptasi, dan bahkan menolaknya secara inovatif. Sebagaimana komunitas aural pada masa lampau mengadopsi tulisan dan percetakan sambil tetap melestarikan tradisi lisan dan hafalan, demikian pula komunitas beragama di era AI berpotensi menemukan cara-cara inovatif untuk memanusiakan teknologi. Sebagai ilustrasi, AI dapat dimanfaatkan untuk merekonstruksi bahasa-bahasa ritual yang hampir punah, atau menganalisis pola-pola dalam kitab suci untuk memperdalam pemahaman, atau menciptakan ruang virtual inklusif bagi individu difabel agar dapat berpartisipasi dalam ritual. Argumen sentral studi ini tidak bersifat deterministik-teknologis yang pesimistik, melainkan dialektis. Studi ini mengakui kekuatan transformatif teknologi, namun juga menyoroti peran proaktif manusia dan komunitas beragama dalam merespons, mereinterpretasi, dan memberikan makna teologis terhadap teknologi tersebut. Pertanyaan fundamental yang diajukan adalah, *“mampukah kita merancang dan mengarahkan perkembangan AI dengan berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang esensial, seperti keadilan, welas asih, kearifan, dan penghormatan terhadap martabat manusia?”*. Atau, *“akankah kita membiarkan logika pasar dan efisiensi teknis mendominasi dan mendefinisikan masa depan spiritualitas kita?”*. Studi ini berupaya membuka arena diskusi untuk pertanyaan-pertanyaan normatif yang krusial ini.

Berdasarkan fondasi tersebut, signifikansi penyusunan buku ini berpusat pada usaha untuk mengatasi kekosongan dalam diskusi sistematis yang menjembatani ekstremitas-ekstremitas dalam perkembangan komunikasi manusia, dari tradisi lisan sakral hingga simulasi kecerdasan buatan dalam relasinya dengan agama. Meskipun berbagai kajian telah menganalisis agama dan media, agama dan internet, atau etika kecerdasan buatan secara terpisah, sangat sedikit ditemukan inisiatif yang menelusuri kesinambungan dan diskontinuitas di sepanjang lintasan sensorium ini secara komprehensif. Oleh karena itu, buku ini berintensitas untuk menyediakan kerangka konseptual yang memungkinkan para cendekiawan, pemuka agama, mahasiswa, dan masyarakat awam untuk menavigasi transformasi yang sedang berlangsung dengan pemahaman yang lebih mendalam. Pemaparan konteks dan argumentasi primer yang telah dikonstruksi mengarah pada sebuah konklusi provisional, kita sedang dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan antropologis dan teologis fundamental mengenai esensi menjadi manusia yang berelasi dengan Yang Transenden di tengah kemunculan entitas mekanis yang semakin cerdas. Memahami evolusi dari budaya aural menuju kecerdasan buatan merupakan sebuah metode untuk merefleksikan kembali hakikat komunikasi itu sendiri, bukan sekadar aktivitas transmisi informasi, melainkan juga sebagai pembentuk komunitas, kehadiran entitas sakral, dan pencarian signifikansi. Hanya dengan pemahaman yang komprehensif inilah kita dapat berharap untuk membentuk masa depan di mana teknologi tidak mensubstitusi kedalaman pengalaman spiritual manusia, melainkan dalam skenario ideal dapat berfungsi sebagai fasilitator menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang diri, sesama, dan mungkin misteri Ilahi itu sendiri.

## **B. Kerangka Konseptual dan Teori Media**

Guna mengkaji lintasan transformatif dari ranah aural menuju kecerdasan buatan, diperlukan suatu kerangka konseptual mapan yang mampu menguraikan kompleksitas interkoneksi antara teknologi, persepsi manusiawi, dan konstruksi makna religius. Titik awal eksplorasi ini ialah konsep “Sensorium”, sebuah terminologi yang merujuk pada keseluruhan aparatus persepsi inderawi dan kognitif suatu budaya atau kurun waktu historis tertentu. Sensorium bukan sekadar agregasi indera pasif, melainkan sebuah ekologi persepsi yang secara aktif dikonstruksi oleh praktik kultural, teknologi komunikasi yang dominan, dan struktur sosial. Dalam konteks telaah ini, setiap era teknologi komunikasi (lisan, tulis, cetak, elektronik, digital, dan AI) dianggap telah membentuk serta dibentuk oleh suatu sensorium yang distingtif. Sensorium era aural, contohnya, memprioritaskan pendengaran, memori, partisipasi komunal,

dan pengalaman yang terinkorporasi dalam ruang dan waktu yang spesifik. Sementara itu, sensorium era digital cenderung menempatkan visualitas, kecepatan, fragmentasi, dan diskoneksi dari konteks fisik sebagai elemen utama. Konsep ini menjadi lensa kritis untuk memahami determinan dan mekanisme perubahan fundamental dalam pengalaman akan yang sakral, sebab perubahan dalam tata indera secara inheren memodifikasi cara merasakan kehadiran ilahi. Karenanya, penelusuran lintasan teknologi komunikasi pada hakikatnya ialah penelusuran evolusi sensorium manusia dalam upaya abadi untuk terhubung dengan yang transenden.

Gagasan fundamental kedua yang mendasari analisis buku ini ialah konsep terkenal Marshal McLuhan, *“media adalah ekstensi diri manusia”*. Pernyataan ini bukan sekadar metafora, melainkan sebuah tesis filosofis yang mendalam. Setiap teknologi media, dari alfabet paling sederhana hingga algoritma jaringan saraf yang paling kompleks berfungsi sebagai ekstensi dari salah satu fungsi inderawi, saraf, atau kognitif. Tulisan, misalnya, adalah ekstensi dari memori dan kesadaran visual yang memungkinkan penyimpanan pemikiran di luar batas pikiran biologis. Akan tetapi, dalam mengekspansi suatu kemampuan, media juga cenderung “mengamputasi” atau memarginalkan kemampuan lainnya. Peradaban tulis mengamputasi kelincuhan dan kompleksitas tradisi lisan. Dalam konteks religiusitas, muncul pertanyaan, *“aspek apa yang diekstensi dan aspek apa yang diamputasi ketika pengalaman beragama bermigrasi ke medium yang baru?, “apakah aplikasi Al-Qur’an digital mengekspansi aksesibilitas teks, namun secara simultan mengamputasi pengalaman haptik dan ritual membuka mushaf fisik serta konteks sosial di sekitarnya?”*. Konsep McLuhan ini menjadi instrumen yang tajam untuk tidak hanya mengobservasi dampak media terhadap agama, tetapi juga untuk memahami bagaimana setiap medium baru merestrukturisasi ekuilibrium sensorik dan kognisi. Kemunculan AI sebagai ekstensi inteligensi bukan sekadar tangan, kaki, atau mata, melainkan menandai fase baru yang radikal dalam sejarah ekstensi diri.

Selanjutnya, elaborasi gagasan mengenai ekstensi diri ini mengarah pada pemahaman tentang “ekologi media”. Media tidak pernah beroperasi sebagai instrumen yang terisolasi, media selalu membentuk suatu lingkungan yang komprehensif, memengaruhi cara individu berpikir, berinteraksi, dan menginterpretasikan realitas. Televisi tidak hanya menyajikan program keagamaan ke rumah kita, namun juga membangun suatu lingkungan hiburan dan spektakel yang selanjutnya mengubah ekspektasi kita terhadap bagaimana sebuah khotbah sebaiknya disajikan. Demikian pula, internet bukan sekadar jaringan kabel dan server, tetapi juga merupakan sebuah ekologi informasi yang didominasi oleh logika hipertaut, klik, viralitas, dan ekonomi atensi. Agama, ketika memasuki ekologi ini harus bernegosiasi dengan logika yang berlaku jika ingin mempertahankan relevansi dan visibilitasnya. Analisis ini memungkinkan kita untuk melewati pendekatan instrumental terhadap teknologi (sebagai instrumen netral) dan beralih ke pendekatan yang lebih kritis terhadap konstruksi sosial dan kultural yang dihasilkan oleh setiap ekologi media. Dengan kerangka ini, kita dapat mengajukan pertanyaan, *“seperti apa ekologi keagamaan yang dibentuk oleh algoritma media sosial yang mempromosikan konten emosional dan polarisasi?”*. Atau, *“ekologi spiritual seperti apa yang akan dibentuk oleh lingkungan metaverse atau augmented reality?”*. Pemahaman tentang media sebagai ekologi ini menjadi fondasi untuk menganalisis mengapa perubahan medium seringkali lebih berpengaruh dibandingkan perubahan pesan itu sendiri.

Kerangka konseptual ketiga yang menjadi dasar analisis buku ini adalah teori tentang “Revolusi Komunikasi”, sebagaimana dipetakan oleh para tokoh seperti Harold Innis, Walter Ong, dan Manuel Castells. Revolusi ini bukanlah perubahan yang linear dan mulus, melainkan sebuah proses dialektis yang ditandai oleh disrupsi, resistensi, dan rekonfigurasi. Buku ini mengadopsi periodisasi yang meninjau sejarah komunikasi melalui beberapa fase utama yang saling berkaitan, yaitu era oralitas primer (aural), era literasi/ manuskrip, era percetakan, era elektronik/ penyiaran, era digital/ jejaring, dan yang kini muncul era kecerdasan buatan/

simulasi. Setiap revolusi ini membawa serta pergeseran kekuasaan (dari penjaga tradisi lisan ke penulis teks, ke penerbit, ke jaringan televisi, ke platform digital, dan ke pemilik algoritma), perubahan dalam organisasi sosial (dari suku ke imperium, ke bangsa, ke masyarakat massa, ke jaringan, ke masyarakat yang tersegmentasi secara algoritmik), dan tentu saja transformasi dalam struktur kesadaran manusia. Dalam setiap fase, agama menghadapi tantangan untuk mendefinisikan ulang otoritas, komunitas, dan autentisitas pengalamannya. Revolusi komunikasi menyediakan peta historis luas yang memungkinkan kita untuk menempatkan transformasi terkini ke dalam perspektif jangka panjang, meninjau pola-pola yang berulang (seperti kekhawatiran akan teknologi baru) sekaligus memahami keunikan dan urgensi dari setiap lompatan zaman.

Integrasi antara sensorium, media sebagai ekstensi dan ekologi, serta revolusi komunikasi memfasilitasi pengembangan suatu pendekatan yang disebut hermeneutika media-teknologis. Pendekatan ini menganggap setiap teknologi komunikasi bukan sekadar instrumen penyampaian, melainkan sebagai prasyarat bagi pengalaman dan pemahaman religius. Sebuah kitab suci yang diturunkan dalam budaya aural akan memiliki ciri literatur lisan (repetitif, formulaik, mnemonik) berbeda dengan teks yang dikodifikasi dalam budaya tulis yang sangat visual. Interpretasi kita terhadap teks tersebut tidak dapat mengabaikan kondisi media-teknologis primordial tersebut. Demikian pula, di era kecerdasan buatan (AI), kita membutuhkan suatu hermeneutika yang mampu mengkritisi kondisi media-teknologis yang baru, algoritma sebagai penulis yang tidak sadar, data sebagai wahyu yang diproses, dan personalisasi sebagai manifestasi baru dari relasi intim dengan yang ilahi. Kajian ini menerapkan pendekatan tersebut untuk menganalisis bagaimana logika internal setiap medium, mulai dari irama suara dalam ritual, tata letak halaman dalam buku cetak, hingga arsitektur kode dalam program AI membentuk konten religius yang melewatinya. Dengan kata lain, kita tidak hanya menanyakan “*apa pesan agama di media baru?*”, melainkan lebih fundamental, “*bagaimana medium itu sendiri menjelma pesan bagi teologi dan praktik keagamaan?*”.

Untuk memperkaya analisis, kerangka konseptual juga akan bersinggungan dengan teori-teori sosial kontemporer, khususnya terkait biopolitik dan ekonomi perhatian. Dalam ekologi media digital dan AI, data pengguna termasuk data mengenai keyakinan, keraguan, dan ritual keagamaan berubah menjadi komoditas yang bernilai tinggi. Praktik keagamaan daring sering kali tidak terpisahkan dari logika datafikasi dan kapitalisme pengawasan. Konsep sensorium membantu kita mengamati bagaimana teknologi ini bukan semata-mata memengaruhi indera, melainkan juga menata dan mengelola kehidupan (bios), termasuk kehidupan spiritual kita. Ekonomi perhatian, di mana waktu dan fokus kita adalah sumber daya yang diperebutkan membentuk bagaimana konten keagamaan didesain agar menjadi viral, mengundang klik, dan menarik perhatian, sering kali dengan mengorbankan nuansa, kompleksitas, dan kedalaman refleksi. Buku ini akan memperlihatkan bahwa pemahaman tentang agama di era AI tidak komprehensif tanpa memahami bagaimana teknologi ini tertanam dalam matriks kekuatan ekonomi dan politik yang lebih luas. Karena itu, analisis kita tidak terbatas pada tataran teknis atau fenomenologis semata, melainkan mampu mengaitkan transformasi sensorium dan media dengan isu-isu mengenai kuasa, modal, dan kendali dalam masyarakat kontemporer.

Kerangka konseptual yang dikembangkan ini sengaja dirancang dengan orientasi heuristik dan kritis, alih-alih bersifat normatif atau deterministik. Ia menyediakan seperangkat instrumen analitis yang bermanfaat untuk menelaah sejarah, memahami kompleksitas kontemporer, dan memproyeksikan potensi-potensi di masa depan. Pendekatan ini menghindari baik nostalgia romantis terhadap era aural maupun euforia teknofilik yang mengabaikan implikasi negatif dari kecerdasan buatan (AI). Konstruksi-konstruksi utama yang telah dipresentasikan akan menjadi tema sentral yang mengintegrasikan berbagai bab dan studi kasus dalam buku ini. Setiap konstruksi akan memfasilitasi eksplorasi atas pertanyaan-pertanyaan fundamental, “*bagaimana sensorium religius bermetamorfosis dari ruang-ruang*

*ibadah tradisional seperti masjid, gereja, atau kuil menjadi layar telepon seluler dan antarmuka chatbot?, aspek-aspek apa yang mengindikasikan bahwa AI merepresentasikan ekstensi paling radikal dari inteligensi manusia, dan ablasi (penghilangan) apa yang berpotensi ditimbulkannya?, konteks media seperti apa yang dikonstruksi oleh platform AI generatif, dan bagaimana konteks tersebut memengaruhi subjektivitas religius?, di mana posisi kita dalam revolusi komunikasi yang sedang berlangsung ini, dan apa imperatif etis serta teologis yang kita miliki dalam meresponsnya?’. Berlandaskan pada kerangka tersebut, buku ini berupaya menyajikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai salah satu transformasi paling signifikan dalam sejarah relasi antara manusia, teknologi, dan dimensi sakral.*

### **C. Struktur dan Kontribusi Buku**

Buku ini dirancang sebagai upaya genealogi untuk memetakan evolusi komunikasi keagamaan, mulai dari akar aural yang fundamental hingga perkembangan mutakhir kecerdasan buatan. Narasi dibangun dengan pendekatan kronologis-tematis yang kompleks, diawali dengan fondasi teoretis yang menekankan bahwa setiap inovasi teknologi pada dasarnya merupakan revolusi dalam sensorium, yakni cara manusia mempersepsi dan menginterpretasi realitas, termasuk realitas sakral. Bagian awal buku ini secara spesifik menelaah basis historis perkembangan komunikasi manusia, menelusuri tahapan krusial dari budaya oralitas, literasi manuskrip, hingga dampak substansial mesin cetak. Telaah ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga analitis dengan mengkaji ulang teori-teori klasik seperti sekularisasi dalam konteks mediasi yang mengalami perubahan. Pemahaman mengenai tahapan-tahapan esensial ini menjadi pedoman yang penting, mengingat setiap era media berikutnya (penyiaran, digital, algoritmik) senantiasa memuat jejak dan pada saat yang sama menolak logika era pendahulunya. Maka, buku ini berargumen bahwa untuk memahami turbulensi spiritual di era media sosial dan AI, seseorang perlu memahami dampak awal yang diakibatkan oleh alfabet dan percetakan, yang telah mentransformasi pusat gravitasi keagamaan dari pendengaran ke penglihatan, dari ingatan kolektif ke teks yang terstandardisasi.

Berdasarkan landasan sejarah tersebut, pembahasan berlanjut dengan menelusuri dampak konkret setiap revolusi media terhadap agama. Revolusi tipografi, misalnya, tidak hanya mengubah cara produksi kitab suci, tetapi juga mengonfigurasi ulang otoritas keagamaan secara radikal. Otoritas yang sebelumnya berpusat pada suara penghafal atau penceramah dalam komunitas, beralih ke teks tercetak yang dapat diakses dan ditafsirkan secara individual. Peristiwa ini memunculkan paradoks, di satu sisi mendemokratisasi akses, di sisi lain memicu fragmentasi interpretasi yang mendorong konflik. Pergeseran sensorium dari aural ke visual ini menjadi fondasi bagi modernitas religius. Gelombang perubahan berikutnya muncul seiring berkembangnya media penyiaran elektronik. Radio dan televisi memperkenalkan logika spektakel dan massa, mengubah khotbah menjadi tontonan dan menciptakan umat yang terhubung secara imajiner melalui gelombang udara. Karisma tidak lagi hanya dinilai dari kedalaman ilmu, tetapi dari kemampuan performatif di depan kamera. Transisi menuju ekologi media yang lebih cair dan terfragmentasi kemudian dianalisis melalui perspektif postmodernitas yang mengamati kemunculan spiritualitas personal, hibrida, dan terlepas dari batasan institusi konvensional. Tahapan-tahapan ini memperlihatkan pola yang konsisten, teknologi baru membawa serta ekologi media baru yang kemudian menuntut adaptasi, negosiasi, dan sering kali transformasi mendalam dalam praktik dan ekspresi keberagamaan.

Analisis kontemporer dalam buku ini memusatkan perhatian pada kajian mendalam mengenai lanskap digital serta proyeksi masa depan pasca digital. Dunia maya tidak sekadar ditelaah sebagai perluasan ruang ibadah, melainkan sebagai arena baru yang menghasilkan

logika sosial, otoritas, dan ritual tersendiri. Aktivitas seperti *live streaming* ibadah, do'a bersama di ruang *chat*, atau konsultasi keagamaan via aplikasi menciptakan pengalaman kehadiran bersama yang baru bersifat simultan namun tersebar secara geografis. Dalam ekologi digital ini, isu-isu spesifik muncul dengan karakteristik yang khas. Dinamika gender, contohnya, diteliti bagaimana platform media sosial menjadi sarana amplifikasi stereotip patriarki sekaligus wahana perlawanan bagi gerakan feminis keagamaan. Mekanisme radikalisme juga mengalami transformasi, di mana retorika ekstremis berevolusi dari pamflet bawah tanah menjadi video viral yang dikurasi oleh algoritma, mewujudkan *echo chamber* yang memperkuat keyakinan eksklusif. Lebih lanjut, buku ini mengeksplorasi batas terdepan pertemuan agama dan teknologi dengan menelisik pertanyaan teologis seputar kesadaran buatan, etika bioetika dalam perdebatan daring, serta prospek spiritualitas *cyborg*. Setiap pembahasan dihubungkan oleh benang merah pemahaman tentang algoritma sebagai aktor nonmanusia yang semakin menentukan apa yang disaksikan, diyakini, dan dilakukan oleh pemeluk agama.

Selain analisis deskriptif, buku ini secara sengaja mengintegrasikan dimensi kritis dan normatif sebagai bagian integral dari strukturnya. Setelah mengkaji tantangan konkret seperti intoleransi yang terdigitalisasi dan komodifikasi simbol-simbol sakral, sebuah bab khusus didedikasikan untuk merumuskan kerangka etika dan kritik. Di sini konsep seperti literasi media keagamaan dikemukakan sebagai kompetensi esensial di era limpaan informasi, sebuah kemampuan untuk membedakan antara pesan agama autentik dengan yang sekadar dirancang untuk meningkatkan keterlibatan dan keuntungan. Tanggung jawab etis para "*influencer*" keagamaan, pengelola platform, dan konsumen konten keagamaan ditelaah secara seksama. Bagian tersebut berfungsi sebagai momentum refleksi, mengajak pembaca untuk tidak menjadi pengamat pasif dari perubahan teknologi, melainkan menjadi agen yang kritis dan bertanggung jawab dalam membentuk ekologi media keagamaan yang lebih kondusif. Refleksi ini kemudian diringkas dan diproyeksikan ke depan dalam bab penutup yang tidak hanya merangkum seluruh argumentasi, tetapi juga merekonstruksi kemungkinan pengalaman keagamaan di masa depan, sebuah dunia di mana komputasi merata, realitas campuran, dan kecerdasan buatan mungkin akan menawarkan pengalaman transendensi yang sepenuhnya baru, sekaligus menantang definisi paling fundamental tentang komunitas, ritual, dan keyakinan itu sendiri.

Kontribusi fundamental buku ini terletak pada kemampuannya menyajikan narasi komprehensif dan koheren, dikombinasikan dengan analisis yang mendalam. Secara keilmuan, buku ini menjadi jembatan antardisiplin ilmu yang lazimnya beroperasi secara terpisah, yakni sejarah media, sosiologi agama, kajian komunikasi, dan filsafat teknologi, sehingga mendorong dialog yang konstruktif. Secara aplikatif, kerangka kerja yang dipaparkan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi tokoh masyarakat, aktivis, dan pengambil kebijakan untuk memahami akar digital dari berbagai permasalahan aktual, memungkinkan intervensi yang bernuansa dan antisipatif, alih-alih sekadar responsif. Akan tetapi, sumbangsih filosofis buku ini yang paling esensial terletak pada penekanan berkelanjutan terhadap pertanyaan mengenai hakikat kemanusiaan, komunitas, dan upaya pencarian makna dalam lintasan sejarah di mana kekuatan mediasi menjadi semakin kompleks dan mandiri. "*Dari Aural Ke Artificial Intelligence: Lintasan Komunikasi, Agama, & Isu-Isu Kontemporer*" merefleksikan kontinuitas sekaligus diskontinuitas, benang merah yang terus menerus menghubungkan hasrat manusia untuk terhubung dengan yang transenden, meskipun benang itu sendiri telah bertransformasi dari suara yang beresonansi dalam ruang fisik menjadi sinyal digital yang diproses oleh jaringan saraf. Bersamaan dengan alur yang dibangun untuk bergerak dari masa lalu hingga masa depan yang spekulatif, buku ini pada akhirnya mengajak pembaca untuk merefleksikan secara mendalam mengenai nilai-nilai kemanusiaan yang patut dipertahankan, serta batasan etis yang perlu ditetapkan, dalam perjalanan kolektif kita menuju lingkungan sensorik yang belum sepenuhnya dipahami.





## **BAB II**

### **LANDASAN HISTORIS TEORETIS EVOLUSI KOMUNIKASI MANUSIA & AGAMA**

#### **A. Perspektif Evolusioner tentang Teknologi Komunikasi dan Budaya**

Pemahaman mendalam mengenai hubungan antara agama dan teknologi komunikasi kontemporer menuntut adanya suatu kerangka teoretis yang tidak memposisikan teknologi sebagai instrumen netral, melainkan sebagai entitas formatif yang secara aktif membentuk budaya dan pola pikir. Perspektif evolusioner mengemukakan bahwa setiap transformasi teknologi komunikasi, mulai dari bahasa lisan, aksara, cetak, hingga digital tidak sekadar memperluas jangkauan informasi, melainkan secara fundamental merekonstruksi tatanan kognitif dan sosial suatu masyarakat. Dalam konteks ini, medium komunikasi dipahami sebagai suatu lingkungan yang menyeleksi dan memperkuat mode-mode spesifik dalam menginterpretasi realitas, mengorganisasi pengetahuan, serta membentuk interaksi sosial. Sebagaimana diutarakan dalam karya Finnegan (2023), komunikasi antarmanusia secara inheren bersifat multimoda, artinya komunikasi bukanlah sekadar pertukaran verbal, melainkan sebuah praktik komprehensif yang meliputi aspek auditori, gestural, spasial, materialitas objek, serta konteks sosiokultural yang melekat. Perspektif ini menggeser titik berat analisis dari konten pesan menuju modus atau cara pesan itu disampaikan dan dihayati. Ketika suatu masyarakat beralih dari satu modus komunikasi dominan ke modus lainnya, yang terjadi adalah pergeseran dalam ekologi simbolik. Agama, sebagai sistem simbolik dan praksis yang kompleks secara intrinsik terjalin erat dalam ekologi ini. Agama diwujudkan, dialami, dan diinterpretasikan melalui moda-moda komunikasi yang tersedia, sekaligus seringkali berperan sebagai kekuatan yang menanggapi serta memberikan signifikansi baru terhadap moda-moda tersebut.

Gagasan bahwa media membentuk cara berpikir memperoleh landasan kokoh dalam tradisi pemikiran *media ecology*, yang antara lain dikembangkan oleh Silverstone (2017). Dalam kajiannya tentang teknologi dan kehidupan sehari-hari di Eropa, Silverstone menggarisbawahi bahwa media dan teknologi komunikasi telah terintegrasi secara mendalam ke dalam rutinitas domestik dan sosial sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terlihat, namun pada saat yang sama paling signifikan dalam membentuk kerangka pengalaman. Televisi, telepon, dan selanjutnya komputer, bukanlah sekadar perangkat rumah tangga, melainkan telah berperan sebagai agen yang secara halus meregulasi waktu, ruang, dan atensi keluarga, membentuk ritual-ritual baru, serta memodifikasi corak interaksi. Silverstone menyatakan bahwa domestikasi teknologi adalah proses integrasi budaya teknologi (Silverstone, 2017), suatu proses di mana teknologi diintegrasikan ke dalam nilai-nilai dan praktik budaya yang telah mapan, namun secara simultan melalui proses dialektis mengubah nilai dan praktik tersebut dari internal. Proses asimilasi kultural ini sangat relevan untuk dikaji dalam domain keagamaan. Ketika suatu inovasi teknologi misalnya radio pada abad ke-20 atau *smartphone* pada abad ke-21 merasuk ke dalam ranah domestik dan komunitas religius, terjadi sebuah proses negosiasi yang kompleks. Teknologi tersebut didomestikasi, diserap ke dalam ritual (contohnya mendengarkan khotbah melalui radio saat makan malam), namun juga membawa serta logika inheren dan struktur pengalamannya, yang secara gradual dapat memodifikasi ekspektasi dan sensitivitas religius individu.

Pendekatan evolusioner menolak anggapan bahwa teknologi selalu berkembang secara lurus, mulus, dan pasti. Jika kita melihat perkembangan teknologi komunikasi, jalannya sering kali kacau, ada tarik-ulur, penyesuaian yang tidak pernah selesai, bahkan kerap muncul efek

samping yang sama sekali tidak direncanakan sejak awal. Setiap teknologi baru pasti membawa kecenderungan atau bias sendiri. Media yang berat dan tahan lama, seperti prasasti batu biasanya memperkuat sentralisasi kekuasaan dan budaya yang menekankan kesinambungan waktu. Sebaliknya, media yang ringan dan mudah didistribusikan, seperti kertas justru mendorong ekspansi wilayah dan pola pikir yang berfokus pada ruang. Kini, di era digital kita hidup dalam dunia yang didominasi internet dan digitalisasi. Ada bias baru yang muncul, kecepatan, keterhubungan global, dan arus informasi yang hampir tanpa henti. Ironisnya, justru karena koneksi dan kelimpahan informasi perhatian kita mudah terpecah dan ingatan budaya cepat memudar. Sayago (2023) menegaskan satu hal penting, bahwa teknologi tidak pernah benar-benar netral. Teknologi selalu lahir dari konteks budaya tertentu, membawa asumsi dan nilai-nilai dari lingkungan asalnya. Saat teknologi tersebut masuk ke masyarakat lain, misalnya komunitas agama tradisional, gesekan hampir tidak bisa dihindari. Namun, di situ pula sering muncul kreativitas untuk beradaptasi. Contohnya aplikasi keagamaan, dengan desain antarmuka dan algoritmenya seringkali didasarkan pada logika individualisme dan efisiensi, yang kadang bertentangan dengan nilai kebersamaan atau refleksi mendalam dalam beberapa tradisi keagamaan.

Lalu, *apa makna semua ini untuk studi agama?*, pergeseran medium ternyata bukan hanya soal alat atau format, melainkan benar-benar dapat mengubah dasar pengetahuan dan kepercayaan. Dalam budaya lisan, pengetahuan agama hidup melalui partisipasi, konteks, dan ingatan kolektif. Kebenaran agama bukan sekadar kata-kata yang dihafalkan, melainkan cerita yang diwariskan, lagu yang dinyanyikan bersama, serta pengalaman yang dibagikan dalam komunitas. Finnegan (2023) pernah mengatakan bahwa komunikasi bukanlah fenomena sekunder, melainkan merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan pemikiran manusia itu sendiri. Cara kita berkomunikasi telah membentuk masyarakat dan pola pikir. Ketika budaya tulis dan cetak muncul, pengetahuan agama perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang objektif, tercetak, dan dapat diakses siapa saja, tidak lagi terikat pada komunitas asalnya. Kitab suci menjadi sumber otoritas yang stabil dan dapat ditafsirkan secara individual. Dari sinilah teologi sistematis tumbuh, ortodoksi berbasis teks menguat, dan individualisme religius perlahan muncul. Otoritas pun bergeser dari narator karismatik yang berbicara langsung di tengah komunitas ke para penafsir teks yang ahli. Perubahan bukan hanya formatnya, tetapi juga cara manusia mengalami yang sakral, dari pengalaman bersama yang penuh indera menjadi pengalaman yang lebih visual, mental, dan personal.

Dalam realitas kehidupan kontemporer yang didominasi oleh media, logika media massa dan digital telah mengadopsi peran formatif yang baru. Menurut Silverstone (2017), media menghadirkan aliran simbol dan narasi berkesinambungan yang menjadi bahan dasar bagi individu dalam mengkonstruksi identitas serta pemahaman mereka tentang realitas, termasuk dimensi supernatural. Narasi religius kini tidak lagi eksklusif berasal dari mimbar keagamaan, melainkan berkompetisi dan berinteraksi dengan konten hiburan, iklan, berita, serta budaya pop dalam satu ruang media yang sama. Fenomena ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai “banjir simbolik”, di mana distingsi antara yang sakral dan profan semakin tidak jelas. Seseorang mungkin mengakses ayat-ayat suci melalui aplikasi ponsel pintar di sela menonton konten hiburan sambil merespons pesan pekerjaan. Konteks sakral dan sikap penghormatan yang melekat pada praktik keagamaan tradisional perlahan tergerus oleh logika multitasking dan konvergensi media. Kondisi ini mentransformasi hakikat apresiasi keagamaan itu sendiri menjadi lebih terpecah, personal, dan tunduk pada mekanisme perhatian yang diatur oleh platform digital. Agama dituntut untuk mampu berkomunikasi dalam ekosistem media baru ini, yang sering kali berarti mengadaptasi estetika media populer dan strategi komunikasi kontemporer agar tetap relevan.

Studi Sayago (2023) tentang interaksi manusia-komputer menawarkan perspektif mikro yang berharga dalam memahami persinggungan antara agama dan teknologi digital. Teknologi

pada hakikatnya tidak pernah benar-benar universal, tetapi selalu merupakan produk budaya tertentu yang mengandung bias kultural para perancangannya. Nilai-nilai dan praktik budaya membentuk, dan dibentuk oleh desain serta penggunaan teknologi interaktif. Tentu prinsip ini terwujud nyata dalam desain aplikasi keagamaan. Aplikasi Al-Qur'an yang dikembangkan dengan antarmuka minimalis dan fitur pencarian instan mencerminkan nilai efisiensi dan aksesibilitas informasi. Namun, nilai-nilai tersebut bisa jadi bertolak belakang dengan filosofi tadabbur, penghayatan, dan proses pembelajaran bertahap yang menjadi ciri tradisi dalam pesantren. Ketika teknologi ini diadopsi, pengguna tidak sekadar pasif melakukan proses domestikasi sebagaimana dikemukakan Silverstone (2017), yaitu memodifikasi pola penggunaan untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Seorang santri mungkin menggunakan aplikasi untuk menghafal, tetapi tetap melakukannya dalam tradisi sorogan bersama guru. Di sini terlihat proses dialektis, dimana teknologi menawarkan struktur baru, sementara budaya pengguna (dalam hal ini budaya religius) memberikan makna dan praktik baru yang tidak selalu terprediksi oleh perancangannya. Proses inilah yang menjadi inti evolusi budaya di era digital.

Pandangan evolusioner juga mendorong kita untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan tidak terantisipasi dari suatu teknologi. Awalnya, radio dianggap sebagai medium yang mampu mempersatukan masyarakat melalui siaran bersama. Dalam ranah keagamaan, radio memfasilitasi penyebaran dakwah hingga ke pelosok desa, membentuk komunitas pendengar maya yang melintasi batas wilayah. Namun seiring waktu, media penyiaran turut berperan dalam penyeragaman bahasa dan dialek keagamaan, serta menciptakan ketergantungan terhadap figur sentral yang karismatik (pengkhotbah) di udara. Begitu pula, internet pada masa awal dielu-elukan sebagai ruang demokratis untuk dialog teologis yang setara. Namun, transformasinya menjadi platform komersial telah mengubahnya menjadi medan pertarungan di mana materi keagamaan harus bersaing demi mendapatkan reaksi seperti *like*, *share*, dan *comment*. Logika keterlibatan ini mendorong terciptanya konten yang provokatif, emosional, dan memecah belah, yang pada akhirnya dapat memicu radikalisasi atau setidaknya mengubah diskursus keagamaan menjadi semacam pertunjukan. Integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari sering kali membuat kita abai untuk mempertanyakan struktur politik-ekonomi yang melandasinya (Silverstone, 2017). *Siapa pemilik platform tempat diskusi keagamaan berlangsung? Algoritme apa yang menentukan konten yang kita akses?*, pertanyaan-pertanyaan krusial ini esensial untuk memahami kekuatan sesungguhnya yang membentuk wacana keagamaan masa kini.

Kerangka evolusioner ini menawarkan landasan kokoh untuk menelaah fase disrupsi terkini, yaitu kecerdasan buatan. AI, khususnya model bahasa berskala besar, tidak lagi sekadar perangkat komunikasi, melainkan mitra komunikasi yang menirukan kecerdasan manusia. Perkembangan ini merupakan lompatan kualitatif. Jika media sebelumnya memperluas indra dan ingatan manusia, AI berpotensi memperluas bahkan menggantikan proses kognitif seperti penalaran, penafsiran, dan kreativitas. Dalam ranah keagamaan, *chatbot* AI telah mampu berfungsi sebagai penasihat spiritual, penafsir kitab suci, atau pengarang khotbah. Menurut Sayago (2023), interaksi manusia-komputer selalu melibatkan negosiasi makna dalam konteks budaya. Negosiasi dengan entitas AI akan jauh lebih kompleks, karena AI dapat menampilkan kesan empati dan pemahaman tanpa benar-benar memiliki kesadaran atau pengalaman subjektif. Hal ini memunculkan pertanyaan filosofis dan teologis yang mendasar, *bisakah nasihat berbasis algoritma dianggap otentik?, di manakah letak otoritas ketika penafsiran kitab suci dihasilkan oleh mesin yang dilatih menggunakan miliaran data kata dari internet, yang mungkin sarat bias dan noise?*. Evolusi komunikasi hingga kini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya membentuk budaya dan pola pikir, melainkan mulai menantang batas-batas paling fundamental dari pemahaman, kebijaksanaan, dan mungkin transendensi itu sendiri.

Dapat dipahami bahwa sudut pandang evolusioner tentang teknologi komunikasi dan budaya menawarkan landasan kokoh untuk meneliti jejak historis agama. Pendekatan ini menampilkan penyederhanaan teknologi sekadar sebagai alat pasif bagi pesan-pesan keagamaan yang statis. Alih-alih telah menempatkan teknologi sebagai partisipan aktif dalam proses koevolusi bersama budaya dan kepercayaan. Setiap media dominan mulai dari lisan, tulisan, cetak, elektronik, digital, hingga AI menciptakan ekologi kognitif dan persepsi khas, yang memunculkan peluang-peluang baru sekaligus membatasi cara-cara lama manusia menjalani pengalaman religius. Pembahasan pada bagian-bagian selanjutnya akan mengkaji bagaimana agama, sebagai salah satu manifestasi budaya manusia yang paling mendasar dan bertahan lama terus mengalami perubahan bentuk dan substansi seiring setiap revolusi cara kita berkomunikasi. Transisi dari kecerdasan aural menuju kecerdasan buatan merupakan narasi tentang metamorfosis kesadaran manusia itu sendiri, di mana agama bukanlah pihak yang pasif, melainkan salah satu pelaku utama yang terus-menerus dibentuk dan membentuk kembali oleh lingkungan media yang mengitarinya.

## **B. Tahapan Perkembangan Komunikasi Manusia dan Sensorium**

Untuk membahas lompatan besar menuju era digital dan kecerdasan buatan, penting untuk menelusuri kembali tahap paling mendasar dalam perkembangan komunikasi manusia, yakni budaya lisan primer. Dalam masyarakat pra-literasi, interaksi sosial sepenuhnya bersifat auditif-oral, mengandalkan suara, ingatan, dan kehadiran fisik dalam komunitas yang nyata. Saat ini, sensorium (seluruh sistem indera dan persepsi) didominasi sepenuhnya oleh pendengaran. Namun, ini bukan sekadar proses pasif, melainkan suatu bentuk kognisi dan interaksi sosial yang aktif. Sebagaimana dikemukakan Pace (2016), agama pada fase ini pada hakikatnya merupakan “pembicaraan Tuhan”, suatu dialog dinamis yang terwujud melalui bunyi. Yang transendental dikomunikasikan dan dialami sebagai suara yang hadir secara nyata, gemuruh petir, desau angin, wahyu yang diterima nabi atau dukun, serta nyanyian pujian dari suatu komunitas. Sistem sensorik pendengaran bersifat holistik dan partisipatoris, artinya pengetahuan religius bukan sekadar bahan bacaan atau analisis teks eksternal, melainkan sesuatu yang didengar, dirasakan, diulang, dan dialami secara kolektif melalui tubuh. Alam semesta dipahami bukan sebagai entitas diam untuk diamati, tetapi sebagai sesuatu yang hidup untuk didengarkan. Setiap ritual, mitos, dan formula bergantung pada bunyi kata-kata yang diucapkan serta diyakini memiliki kekuatan untuk mengubah realitas. Struktur auditif fondasional ini membentuk kesadaran religius paling purba, di mana batas antara kata dan tindakan, suara dan kekuatan, hampir tidak ada.

Hegemoni sensorium aural dalam religiositas awal menciptakan ekologi komunikasi yang jauh berbeda dari dunia tekstual. Pengetahuan dan otoritas keagamaan terikat pada memori kolektif. Smith (2018) mencatat bahwa dalam tradisi lisan wewenang kata-kata yang diucapkan tidak dapat dipisahkan dari wewenang pembicara dan konteks pembicaraan. Wewenang berbicara bersifat sakral bagi para pemegangnya, seperti kepala suku, dukun, atau nabi, terutama dalam konteks tempat sakral ucapan itu disampaikan. Sabda ilahi bukan objek independen, tetapi merupakan peristiwa yang terjadi dalam ruang waktu tertentu, dan kekuatannya bergantung pada kehadiran serta kharisma pembawanya. Repetisi dan hafalan bukan aktivitas mekanis, melainkan ritus untuk mempertahankan suara penuh kuasa agar tetap hidup dan tidak menyimpang. Proses ini melibatkan seluruh tubuh dan emosi melalui nyanyian, tarian, serta irama berulang. Dalam konteks ini, sebagaimana ditunjukkan Ibrahim (2024), praktik keagamaan merupakan bagian *real* (terwujud) dari rutinitas sehari-hari, mulai dari bercocok tanam hingga merawat keluarga. Praktik religius berkaitan dengan pengalaman bersama, bukan sekadar pembelajaran dari teks semata. Sensorium aural dengan demikian

bersifat komunal dan performatif, di mana kebenaran agama divalidasi melalui pengalaman partisipatif dalam lingkaran komunitas yang saling mendengar dan merespons.

Struktur sensorium aural ini membentuk suatu konsep khas tentang waktu dan ruang. Dalam tradisi lisan, waktu lebih sering dipersepsikan secara sirkuler, berlandaskan pada irama alam dan pengulangan ritual yang terus menerus. Masa lalu yang sakral tidak tercatat dalam alur sejarah yang linear, namun terdengar kembali setiap kali mitos penciptaan dilantunkan atau upacara leluhur dijalankan. Ruang suci juga memiliki penanda tersendiri melalui karakteristik akustiknya, suatu gua, bukit, atau hutan dianggap keramat karena suara bergema secara unik di sana, atau karena tempat itu merupakan lokasi pertama kali wahyu didengar. Komunikasi keagamaan dalam budaya lisan menciptakan apa yang dinamakan pemandangan suara tempat suci, yakni pemetaan ruang geografis dan sosial melalui lanskap bunyi yang penuh makna (Pace, 2016). Dalam hal ini, aktivitas mendengar bukanlah tindakan pasif, melainkan proses aktif yang memerlukan penafsiran. Pendengar terhubung dengan kekuatan kosmis melalui pendengaran tersebut. Pengetahuan disampaikan melalui kisah dan perumpamaan yang mudah diingat, bukan lewat proposisi logis kaku. Menurut pengamatan Smith (2018), narasi-narasi tersebut berfungsi sebagai pedoman hidup bagi tindakan kolektif masyarakat, kebijaksanaan di sini tidak berasal dari definisi yang rigid, melainkan dari penerapan cerita untuk menyelesaikan persoalan praktis. Sensorium aural membentuk suatu rasionalitas yang bersifat naratif, kontekstual, dan sangat aplikatif, sangat kontras dengan rasionalitas abstrak dan analitis yang berkembang dalam budaya tulis.

Transisi dari budaya lisan primer ke budaya tulis, selanjutnya ke budaya cetak menandai revolusi sensorium yang sangat besar. Revolusi ini pada hakikatnya merupakan peralihan dari dunia suara ke dunia visual, dari ingatan yang tersimpan dalam pikiran ke rekaman yang berada di luar diri. Ketika firman suci mulai diukir pada lempengan tanah liat, kulit binatang, atau lembaran papirus, terjadi proses objektifikasi sekaligus distansiasi. Sabda ilahi yang sebelumnya merupakan peristiwa hidup dan kontekstual mulai berubah menjadi teks yang bisa dilihat, dipelajari kembali, bahkan dibawa ke mana-mana tanpa kehadiran pembicara aslinya. Perubahan medium ini secara fundamental mengubah relasi antara bahasa dan otoritas. Otoritas beralih dari sang penutur kepada kekuatan penuntun dari kata yang terukir itu sendiri (Smith, 2018). Kitab suci tertulis menjadi patokan yang tetap dijadikan tolok ukur kebenaran ajaran. Namun, stabilitas ini membawa konsekuensi dengan hilangnya kelenturan, nuansa, dan konteks emosional langsung yang melekat pada komunikasi lisan. Ritual pun tidak lagi sekadar mendengar dan merespons bersama, tetapi juga membaca dan menafsirkan dengan cermat. Penelitian tentang agama dalam praktik sehari-hari menunjukkan bahwa meskipun teks tertulis telah menjadi pusat perhatian, praktik lisan dan aural tetap bertahan dan beradaptasi. Keduanya hidup berdampingan, kadang dalam bentuk pembacaan lantang kitab suci di depan publik, suatu praktik yang menghidupkan kembali dimensi aural sebagai bagian dari otoritas baru yang melekat pada teks tertulis (Ibrahim, 2024).

Dominasi tulisan dan media cetak terhadap indera penglihatan tidak sepenuhnya mengikis peran pendengaran dalam kesadaran religius. Ingatan akan kekuatan suara yang sakral tetap bertahan, bahkan mengejawantah dalam bentuk-bentuk baru yang beragam. Seperti diamati Pace (2016), berbagai tradisi keagamaan kerap menghidupkan kembali teks tertulis ke dalam ranah auditori melalui pembacaan khidmat, pelafalan ritmis, atau pengkajian melodi. Al-Qur'an, misalnya, merupakan teks yang otoritasnya sangat ditentukan oleh keindahan dan presisi dalam pelafalan atau tilawah. Sementara dalam tradisi Yahudi, pembacaan Taurat di sinagoge bukan sekadar aktivitas literer, melainkan pertunjukan suara yang bernilai sakral. Praktik-praktik semacam ini membuktikan bahwa indera pendengaran tidak pernah benar-benar punah, tetapi tetap eksis sebagai elemen residual yang terus melawan dominasi budaya teks yang lebih bersifat visual dan abstrak. Fenomena sensorium ini mengingatkan kita bahwa pengalaman religius yang holistik tidak hanya melibatkan pemahaman kognitif, tetapi juga

resonansi emosional, irama tubuh, dan keterlibatan afektif yang dihadirkan melalui suara. Berbagai studi etnografis mencatat bagaimana dalam kehidupan sehari-hari umat beragama, praktik seperti do'a pribadi yang dilisankan, pengulangan dzikir, hingga nyanyian spiritual di lingkup domestik menunjukkan ketahanan indera pendengaran di tengah dunia yang kian didominasi teks dan visual (Ibrahim, 2024). Karenanya, yang terjadi bukanlah substitusi total sensorium, melainkan transformasi dalam konfigurasi dan hierarki indera yang dominan dalam pengalaman kesakralan.

Pemahaman terhadap evolusi sensorium ini penting untuk membaca realitas religiositas kontemporer secara lebih jernih. Masyarakat digital kerap digambarkan sebagai dunia yang didominasi visual (layar, ikon, gambar, dan video menjadi sarana utama). Namun, terdapat paradoks menarik, budaya digital justru menghidupkan kembali beberapa aspek auditori, meski dalam bentuk yang telah mengalami transformasi signifikan. Platform seperti *TikTok* dan *podcast*, misalnya, sangat mengandalkan modalitas suara dan musik untuk menciptakan pengalaman yang imersif dan emosional. Konten keagamaan di media ini sering memanfaatkan narasi personal yang intim melalui *podcast*, atau repetisi musik dan jingle dakwah yang mudah diingat, semacam gema modern dari teknik mnemonik dan tradisi lisan masa lalu. Smith (2018) mungkin akan menyebut fenomena ini sebagai bentuk baru panduan melalui bahasa, di mana otoritas tidak lagi berasal dari teks kanonik atau institusi agama, tetapi dari daya pikat performatif suara dan kisah para konten kreator. Menariknya, konteks komunitas yang melekat pada pengalaman auditori fisik telah berubah menjadi khlayak yang tersebar dan anonim di balik layar *smartphone* masing-masing. Pengalaman mendengarkan bersama yang dulu membentuk solidaritas organik dalam komunitas aural tradisional, kini berubah menjadi mendengarkan paralel yang melahirkan solidaritas imajiner dan bersifat sementara. Sensorium di era digital hadir sebagai entitas hibrid dan terfragmentasi, perpaduan antara stimulasi visual yang cepat, residu suara yang terkekaya, dan absennya kehadiran fisik yang konkret.

Transformasi sensorium yang semula bersifat aural, kemudian berevolusi ke visual, dan kini memasuki ranah digital memberikan pengaruh mendalam terhadap pemahaman kita mengenai komunitas keagamaan, seperti ummah, gereja, atau sangha. Menelusuri kembali sensorium aural dalam tradisi kuno, komunitas terbentuk melalui pertemuan fisik sekelompok pendengar. Ikatan sosial terjalin melalui getaran suara serupa yang tidak sekadar ditangkap oleh indera pendengaran, melainkan juga dialami secara fisik. Sebagaimana dikemukakan Pace (2016), komunikasi religius membentuk komunitas dengan menciptakan ruang auditori bersama. Komunitas dan komunikasi merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan. Kemunculan teks tertulis dan cetak kemudian mengubah lanskap ini, komunitas tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan menjadi konstruksi konseptual dibangun melalui keterikatan pada teks yang sama. Walau dua individu mungkin tidak pernah berjumpa secara langsung, mereka dapat merasakan ikatan persaudaraan melalui pembacaan kitab suci yang sama. Komunitas semacam ini acap kali disebut sebagai komunitas imajiner. Di era digital kontemporer, komunitas keagamaan lebih menyerupai jejaring cair dan dinamis, dibentuk oleh algoritma yang menyambungkan orang berdasarkan minat dan interaksi virtual. Riset mengenai praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari di era digital mengungkapkan bahwa pengalaman religius cenderung bersifat personal dan terkurasi secara individual. Setiap orang memilah suara-suara tertentu dari banjir konten yang tersedia (Ibrahim, 2024). Ini merupakan bentuk individualisasi sensorium aural, kendali atas apa yang didengar kini berada di tangan setiap individu. Namun di sisi lain, elemen tekanan sosial dan kejutan yang kerap muncul dalam pengalaman aural komunitas fisik menjadi hilang. Dalam *setting* komunitas nyata, kita biasanya menerima segala suara baik yang menyenangkan maupun tidak sebagai bagian integral dari keseluruhan pengalaman.

Ketika kita mengeksplorasi perkembangan sensorium ini ke depan, khususnya dalam relasi antara manusia dengan kecerdasan buatan, analisisnya menjadi semakin kompleks. AI



*generatif*, terutama yang berbasis model bahasa dengan kemampuan berbicara (seperti asisten virtual atau *chatbot* audio) sebenarnya menciptakan simulasi sensorium aural yang cukup canggih. Kita kembali berbincang dan mendengarkan suatu entitas. Namun, suara AI pada dasarnya berbeda secara fundamental. AI bukan ekspresi kesadaran atau subjektivitas manusia yang hidup, bukan pula pengalaman yang berwujud fisik, atau otoritas karismatik yang melekat pada suara manusia. Suara ini hanyalah produk dari pola statistik yang dipelajari dari data pelatihan. Contohnya, ketika seorang penganut agama mengajukan pertanyaan teologis kepada *chatbot*, situasi ini dapat dipandang sebagai parodi dari “*God's talk*” sebagaimana dijelaskan Pace (2016). Respons AI mungkin koheren dan informatif, tetapi sama sekali tidak bersumber dari pengalaman personal, keyakinan, atau tanggung jawab moral. Sebagaimana ditekankan Smith (2018), otoritas (khususnya dalam konteks bimbingan verbal) selalu melibatkan pertanggungjawaban dan relasi kuasa yang dapat dipertanyakan. Namun, *bagaimana mungkin kita mempertanyakan atau menuntut pertanggungjawaban dari suatu algoritma?*, sensorium aural yang dihadirkan AI dengan demikian merupakan bentuk sensorium yang terpisah dari tubuh, sejarah, dan komunitas. Ia menawarkan ilusi kedekatan dan pemahaman melalui suara, namun pada hakikatnya hampa dari kehadiran yang otentik. Ini merupakan puncak dari proses distansiasi yang sebelumnya dimulai dengan objektifikasi teks tertulis dan kini mencapai tahap di mana sang pembicara itu sendiri hanyalah simulasi semata.

Perkembangan komunikasi dan sensorium sejatinya dapat dihubungkan melalui suatu benang merah yang cukup terlihat, walau jalurnya tidak selalu lancar atau linear. Transisi dari sensorium aural primer menuju era digital dan kecerdasan buatan bukan sekadar kemajuan berurutan yang menawarkan efisiensi lebih baik. Melainkan serangkaian perubahan mendasar dalam cara manusia berada di dunia yang bersifat religius. Setiap periode (aural, literal atau visual, maupun digital) memiliki ciri khas tersendiri dalam struktur kesadaran, otoritas, komunitas, serta pengalaman spiritual. Pemahaman mendalam tentang fase aural menjadi krusial untuk mengapresiasi aspek-aspek yang hilang, bertahan, maupun berubah pada tahap selanjutnya. Ingatan akan magisnya suara yang dianggap keramat, ikatan sosial yang lahir dari pengalaman mendengarkan bersama, serta pengetahuan yang dibangun melalui cerita dan ritme, tetap menjadi dasar yang bergema dalam peradaban berbasis teks dan visual. Dalam konteks kekinian, keraguan kita terhadap otoritas digital, kerinduan akan komunitas yang sungguh otentik, serta kebingungan menghadapi suara kecerdasan buatan, sebenarnya berakar pada ketegangan lama antara warisan sensorium aural kita dan lingkungan media yang kian *artifisial*. Maka, menelusuri evolusi tahapan sensorium ini bukan hanya urusan mempelajari masa lalu. Lebih dari itu, ini merupakan semacam arkeologi media sebagai upaya mendalam untuk mengungkap dasar psikologis dan sosial di balik krisis makna religius yang kita hadapi kini. Secara paralel, hal ini juga memupuk kesadaran kritis bahwa setiap teknologi komunikasi yang kita gunakan pada dasarnya turut membentuk kembali jiwa kita dan cara kita beriman.

### **C. Teori Sekularisasi, Desekularisasi, dan Mediasi Agama**

Teori sekularisasi klasik yang meramalkan bahwa agama akan semakin tersingkir dari ruang publik dan hanya menjadi persoalan pribadi seiring kemajuan modernisasi nyatanya menghadapi ujian berat di abad ke-21. Jika kita amati melalui transformasi media komunikasi, narasi umum tentang kemerosotan agama yang linier terasa terlalu simplistik untuk menggambarkan dinamika yang sesungguhnya kompleks. Bermula dan tumbuh di era masyarakat yang bergantung pada media cetak serta siaran massal, teori ini luput memprediksi bagaimana platform digital justru membuka kanal baru bagi ekspresi keagamaan, pertarungan wacana, bahkan kebangkitan agama dalam bentuk yang tidak terantisipasi. Dalam pengantar yang cukup mendalam, Mahan & Thrall (2025) menekankan bahwa relasi antara media, agama, dan budaya tidak pernah bersifat tetap, namun sebagai situs dinamis untuk negosiasi dan

perubahan. Negosiasi ini kian menguat ketika media digital mulai mengaburkan batasan konvensional antara ruang privat dan publik, serta antara yang sakral dan yang profan. Agama tidak semata mundur ke ranah personal atau terhalang oleh pemikiran sekuler dari ruang publik, melainkan agama mengalami semacam remediasi. Artinya, agama dihadirkan dan dialami kembali melalui format, logika, serta ekonomi yang dibentuk oleh platform seperti *YouTube*, *Instagram*, dan *TikTok*. Proses ini tidak serta merta bermakna sekularisasi atau desekularisasi, melainkan transformasi mendalam tentang cara agama itu sendiri dikonstruksi, dikonsumsi, dan diperdebatkan.

Untuk memahami perlunya pembaruan teori sekularisasi, konsep mediasi agama menjadi krusial. Hoover (2025) dalam karyanya berargumen bahwa media bukan sekadar saluran penyampai pesan keagamaan, tetapi bagian esensial dari proses produksi dan pengalaman makna agama. Agama semakin banyak dipraktikkan, dialami, dan dipahami melalui media. Pernyataan ini mengalihkan fokus dari pertanyaan “*apakah agama masih eksis?*” menjadi “*bagaimana agama muncul dan dimaknai dalam ekosistem media tertentu?*”. Dalam budaya siaran massal sebelumnya, agama biasanya dimediasi secara monologis, institusional, dan dikendalikan oleh regulator profesional seperti jaringan televisi dan produser. Bentuk mediasi semacam ini cenderung mendorong sekularisasi, karena membatasi keragaman lokal dan menempatkan agama dalam bingkai waktu yang kaku (acara religi). Namun, di era digital kini mediasi berubah menjadi lebih partisipatoris, terdistribusi, dan beroperasi berdasarkan algoritma. Siapapun dapat menjadi konten kreator agama, membangun teologi mikro mereka sendiri melalui media sosial. Fenomena ini yang terkadang dipandang sebagai indikator desekularisasi di ruang publik digital juga memicu fragmentasi otoritas keagamaan yang dapat melemahkan kekuatan sosial agama yang sebelumnya lebih terpadu. Platform komunikasi baru ini tidak menyangkal teori sekularisasi, melainkan menuntut pemahaman yang lebih nuansatif, sekularisasi dan desekularisasi dapat berlangsung secara simultan, namun di ranah berbeda dan berdasar pada logika mediasi yang juga berlainan.

Memahami kerumitan ini sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari pengamatan terhadap agama sebagai sebuah praktik yang dinamis dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dikemukakan Ibrahim (2024), agama tidaklah terbatas pada ruang ibadah atau sekadar teks-teks doktriner. Agama justru merembes ke dalam beragam dimensi kehidupan, mulai dari kebiasaan sehari-hari, konsumsi media, hingga relasi di lingkup domestik. Di titik inilah teori sekularisasi klasik kerap kehilangan relevansi, pendekatan itu cenderung menilai vitalitas agama semata dari kehadirannya di ruang publik atau lembaga formal, sehingga luput melihat bagaimana agama tetap eksis dan beradaptasi dengan dinamika bawah permukaan kehidupan sehari-hari yang kian terpaut dengan media. Misalnya, seorang ibu rumah tangga yang menyimak ceramah keagamaan di *YouTube* sambil memasak, atau pemuda yang menjelajahi tafsir ayat Al-Qur'an lewat *Google* ketika menghadapi persoalan pribadi. Bentuk praktik keagamaan semacam ini mungkin tidak tergambar dalam statistik kehadiran di gereja atau masjid, tetapi jelas memperlihatkan fenomena religiositas yang bersifat personal dan adaptif. Ini bukanlah sekularisasi dalam arti lenyapnya agama, melainkan lebih pada transformasi agama menjadi sesuatu yang tersebar luas, akrab dengan teknologi personal, dan karenanya sukar diukur melalui metode sosiologis konvensional. Keberadaan media digital justru membuka kanal baru bagi agama dalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini menguji anggapan lama yang menyatakan modernitas akan otomatis mengikis dimensi spiritual masyarakat.

Tidak kalah penting, teori juga perlu dikaji ulang ketika membahas representasi agama di media massa. Pencitraan agama serta aspek sakral dan sekuler telah mengidentifikasi kecenderungan media untuk memosisikan agama secara dikotomis. Agama sering ditampilkan sebagai entitas bermasalah, kaku, atau bahkan dikaitkan dengan terorisme, sementara nilai-nilai sekuler dihubungkan dengan rasionalitas, kesederhanaan, dan kemajuan (Knott & Poole,

2016). Representasi seperti ini pada akhirnya dapat berfungsi sebagai instrumen sekularisasi karena membentuk narasi publik yang memposisikan agama sebagai biang keributan, bukan jawaban. Namun, di era media sosial, kendali atas citra agama bukan lagi dominasi mutlak media arus utama. Komunitas agama kini memiliki peluang untuk melawan stereotip negatif tersebut melalui kreasi konten mandiri yang menampilkan wajah agama lebih inklusif, kontekstual, dan progresif. Contohnya, gerakan keagamaan feminis yang memanfaatkan *Instagram* untuk mengkritik penafsiran patriarkal, atau kelompok muda muslim yang memproduksi video *TikTok* yang menjembatani sains dan Islam. Fenomena ini yang dapat disebut sebagai desekularisasi melalui kontra-representasi, menunjukkan upaya merebut ruang definisi diri dari kendali media sekuler mainstream. Proses ini sekaligus menandakan bahwa mediasi agama bukanlah jalur satu arah menuju sekularisasi, melainkan sebuah medan pergulatan dan negosiasi tiada henti antara berbagai pandangan tentang peran agama di masyarakat.

Konsep *sekular sacred* yang dikemukakan oleh Knott & Poole (2016) menjadi cukup relevan untuk menelaah fenomena budaya digital kontemporer. Dalam konteks masyarakat modern, pengalaman dan nilai-nilai yang dipersepsikan sebagai sakral tidak terbatas pada ranah agama formal. Sebaliknya, dimensi sekuler semacam nasionalisme, konsumerisme, hingga pengalaman personal terhadap alam dan seni pun dapat memperoleh status kesakralan. Dalam dinamika ini, media (khususnya platform digital) memainkan fungsi krusial dalam mengkonstruksi dan mendistribusikan apa yang disebut sebagai “yang sakral sekuler”. Contohnya, kapitalisme platform bisa dipandang sebagai semacam agama kontemporer, dengan ritus-ritus digital seperti *refresh feed*, *like*, dan *share*, serta figur-figur profetik modern seperti *influencer* dan pakar teknologi yang menawarkan janji keselamatan berupa pencapaian kesuksesan dan pengakuan sosial. Kondisi ini memaksa konten keagamaan konvensional untuk bersaing dalam ekonomi perhatian yang sama sengitnya dengan konten *sekular sacred* tersebut. Akibatnya, para pendakwah kerap harus beradaptasi, bahkan mengadopsi gaya dan taktik komunikasi ala budaya populer sekuler demi mempertahankan daya tariknya di hadapan audiens. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk sekularisasi internal, di mana ekspresi keagamaan mulai mengadopsi karakteristik ekspresi sekuler di sekitarnya. Namun di sisi lain, muncul pula fenomena di mana pengguna justru menemukan pengalaman kesakralan yang mendalam melalui konten non-agamis, seperti tayangan keindahan alam atau kebaikan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi digital telah membuat pemahaman tentang kesakralan menjadi lebih cair dan kompleks, tidak lagi dapat dibagi secara rigid ke dalam kategori agama atau sekuler semata.

Transformasi platform komunikasi juga memberikan dampak signifikan terhadap relasi antara agama dan otoritas. Dalam teori sekularisasi klasik, kemunduran otoritas agama sering dikaitkan dengan proses rasionalisasi dan diferensiasi sosial. Namun dalam konteks digital, krisis otoritas agama lebih banyak bersumber pada demokratisasi produksi simbolik. Mahan & Thrall (2025) mengemukakan bahwa media baru memberdayakan individu maupun komunitas untuk menciptakan dan menyebarkan makna keagamaan secara mandiri, lepas dari kendali institusi tradisional. Siapa pun yang memiliki perangkat digital dapat tampil sebagai penafsir, juru dakwah, atau pembimbing spiritual bagi pengikutnya. Situasi ini pada satu sisi mendesakralisasi otoritas hierarkis lama, sekaligus melahirkan berbagai otoritas baru yang bersifat karismatik dan berbasis jumlah pengikut (*followers-based*), bukan pada posisi formal. Proses ini dapat dibaca sebagai bentuk desekularisasi, karena wacana keagamaan kembali muncul di ruang publik dalam format baru, tetapi sekaligus mencerminkan sekularisasi ketika otoritas keagamaan menjadi relatif dan terkomodifikasi. Ketika otoritas mulai diukur melalui parameter *like* dan *share*, pada dasarnya logika pasar telah menyusup ke dalam domain yang semula dianggap paling sakral. Namun demikian, sebagaimana terungkap dalam penelitian tentang praktik keseharian, otoritas tradisional seperti kyai, pendeta, atau pastor tidak serta-

merta lenyap. Mereka justru berupaya beradaptasi dengan memasuki dunia digital, meski harus menyesuaikan diri dengan logika platform yang tidak selalu *familier* bagi mereka (Ibrahim, 2024). Negosiasi semacam ini acap kali melahirkan bentuk otoritas hibrid yang memadukan tradisi lama dengan metode-metode baru berbasis digital.

Transformasi yang tengah berlangsung ini memberikan implikasi cukup signifikan terhadap teori sekularisasi. Sudah waktunya kita meninggalkan perspektif yang menganggap agama sebagai faktor tunggal fluktuatif semata. Sebaliknya, agama perlu dipahami sebagai ranah praktik dan pemaknaan yang terus menerus mengalami proses negosiasi ulang. Pendapat Hoover (2025) tampak relevan ketika ia menyatakan bahwa Yang ‘suci’ bukanlah kategori Yang tetap, melainkan terbentuk dalam dan melalui proses komunikasi. Esensi kesakralan itu sendiri terbentuk melalui mekanisme komunikasi. Ketika medium komunikasi berevolusi dari mimbar ke televisi, kemudian beralih ke media sosial, karakter dan lokus kesakralan pun turut berubah. Ekspresi agama mungkin tampak lebih sekuler saat dihadirkan melalui filter do’a di *Instagram*, namun bagi penggunanya fitur tersebut justru menjadi alat untuk mengukuhkan identitas sekaligus menjalin relasi dengan komunitas beriman secara transparan. Pada dasarnya, proses mediasi telah menjadi unsur integral dalam pengalaman keberagamaan masa kini. Teori sekularisasi yang mengabaikan dimensi mediasi ini akan terus mengalami kesulitan dalam memahami realitas di mana agama justru menemukan dinamika baru dalam bentuk-bentuk yang seringkali tidak terdeteksi oleh teori konvensional. Dinamika ini bukan sekadar kebangkitan agama dalam bentuk formal atau institusional, melainkan lebih pada meluasnya spiritualitas, pencarian makna eksistensial, serta pembentukan komunitas yang dinamis dan terbentuk oleh logika platform digital.

Lantas, *bagaimana seharusnya kita memposisikan teori sekularisasi dan desekularisasi dalam konteks ini?* Pertama, kita perlu menyadari bahwa kedua proses tersebut berjalan secara simultan dan dialektis. Platform komunikasi digital menciptakan ruang baru yang memungkinkan desekularisasi melalui beberapa cara: (1) menyediakan wadah bagi beragam ekspresi agama di ruang publik, (2) mendorong terbentuknya komunitas keagamaan lintas batas yang memiliki pengaruh substansial, dan (3) memfasilitasi kehadiran agama dalam keseharian melalui perangkat mobile. Di sisi lain, platform yang sama juga mendorong sekularisasi, antara lain melalui: (1) menjadikan agama sebagai salah satu konten yang bersaing dengan beragam hiburan sekuler, (2) memicu komodifikasi simbol-simbol keagamaan, (3) mengikis otoritas tunggal, dan (4) membaurkan unsur sakral dan profan hingga batas keduanya menjadi kabur. Knott & Poole (2016) mengidentifikasi fenomena ini sebagai pergeseran menuju lanskap keyakinan dan praktik yang lebih kompleks dan ambigu. Kedua, fokus analisis seyogianya diarahkan pada praktik-praktik mediasi spesifik, misalnya adaptasi ritual ke format digital, negosiasi otoritas di *X*, atau akses kitab suci melalui aplikasi daripada terlibat dalam perdebatan teoretis abstrak mengenai kemunduran atau kebangkitan agama. Ketiga, penting pula untuk mengintegrasikan wawasan dari studi kehidupan sehari-hari guna memahami bagaimana transformasi besar ini sebenarnya dihayati oleh individu dalam rutinitas yang paling sederhana sekalipun.

Diskursus antara teori sekularisasi dan desekularisasi dalam konteks kajian media-agama menawarkan pemahaman yang lebih dinamis dan relevan secara kontekstual. Teori-teori klasik tersebut tidak serta merta usang, melainkan direvitalisasi dengan memfokuskan pada realitas bahwa setiap medium membawa muatan pesan yang turut membentuk dinamika sosial keagamaan. Asumsi awal tentang kepunahan agama terbukti prematur. Sebaliknya, agama memperlihatkan ketangguhannya dalam beradaptasi, bahkan mampu bertransformasi dan menemukan bentuk baru sesuai dengan lanskap media yang terus berkembang. Di era dominasi teknologi seperti algoritma dan kecerdasan buatan saat ini, pola interaksi kita dengan dimensi sakral tengah mengalami metamorfosis yang signifikan. Kecerdasan buatan tidak sekadar berfungsi sebagai mediator agama, melainkan berpotensi menjadi entitas kepercayaan atau

bahkan partisipan dalam perjalanan spiritual individu. Transformasi ini secara nyata mengaburkan garis demarkasi antara proses sekularisasi dan desekularisasi. Oleh karena itu, kerangka teoretis yang dirumuskan mengintegrasikan perspektif evolusi media, analisis sensorium, serta perkembangan teori sekularisasi melalui lensa mediasi berperan sebagai fondasi krusial untuk memahami pembahasan pada bab-bab berikutnya. Dalam bagian-bagian selanjutnya, akan diuraikan secara mendalam bagaimana setiap revolusi komunikasi, mulai dari era tipografi hingga zaman kecerdasan buatan, secara terus menerus merekonfigurasi narasi tentang relasi antara manusia, teknologi, dan ranah transendental.

### **BAB III**

## **REVOLUSI TIPOGRAFI AGAMA DALAM LINGKUNGAN VISUAL**

### **A. Transformasi Religiusitas dalam Revolusi Tipografi**

Revolusi tipografi yang dipelopori oleh Johannes Gutenberg pada pertengahan abad ke-15 tidak hanya menandai kemajuan teknologi dalam reproduksi teks. Peristiwa ini memiliki arti penting yang mendalam karena mengubah orientasi pengalaman manusia, dari domain pendengaran menuju domain penglihatan. Sebelum keberadaan mesin cetak, pengetahuan dan otoritas keagamaan sangat terkait dengan tradisi lisan dan manuskrip yang bersifat aural-somatis. Sabda ilahi, contohnya, benar-benar terasa hidup melalui pelafalan, nyanyian, dan ingatan kolektif. Yeo (2021) mengemukakan bahwa dalam masyarakat pra-cetak, pencatatan dan transmisi pengetahuan sangat bergantung pada ingatan, ritual, dan performa yang terwujud. Dengan kemunculan mesin cetak yang mampu memproduksi salinan identik dalam skala besar, kata-kata yang sebelumnya hidup dan sangat kontekstual berubah menjadi objek visual yang stabil, mudah dibawa, dan terstandarisasi. Dalam hal ini, Füssel (2020) menegaskan bahwa temuan Gutenberg ini bukan sekadar tentang efisiensi, melainkan penciptaan media komunikasi baru yang secara fundamental mengubah persepsi dan penyebaran gagasan. Transformasi dari fenomena suara menjadi objek visual ini merupakan perubahan sensorium yang krusial dalam sejarah Barat. Imbasnya sangat luas, tidak hanya mengubah pola komunikasi, tetapi juga memengaruhi cara berpikir, berkeyakinan, serta memaknai hubungan antara manusia dan yang ilahi.

Perubahan sensorium ini tampak jelas ketika menelusuri evolusi status kitab suci. Sebelum era percetakan, Alkitab maupun Al-Qur'an merupakan benda langka dan bernilai tinggi. Umumnya, kitab-kitab tersebut berbentuk manuskrip beriluminasi yang hanya dapat diakses oleh kalangan elit keagamaan. Otoritas berada di tangan ulama atau rohaniwan yang bertugas membacakan dan menafsirkan teks bagi masyarakat yang kebanyakan buta huruf. Namun, ketika kitab suci mulai dicetak dan tersedia dalam bahasa vernakular, akses terhadap teks sakral menjadi lebih terbuka dan terdemokratisasi. Meski demikian, demokratisasi ini membawa konsekuensi berupa perubahan mendasar dalam praktik beragama. Pengalaman keagamaan yang sebelumnya bersifat komunal, imersif, dan melibatkan banyak indera, seperti mendengar, merasakan kehadiran, dan bernyanyi bersama perlahan bergeser menjadi pengalaman yang lebih individual, tenang, pribadi, dan visual. Percetakan menghadirkan jenis ruang publik baru yang berbasis pada aktivitas membaca dan perenungan pribadi (Lamal et al., 2021). Ibadah tidak lagi sekadar partisipasi dalam liturgi bersama, melainkan juga mencakup pembacaan dan perenungan pribadi terhadap teks cetak di rumah. Sensorium keagamaan yang sebelumnya berfokus pada pendengaran dan suara komunitas, kini bergeser dengan semakin mengedepankan penglihatan dan refleksi individual yang terpisah.

Perubahan yang berlangsung ini turut mengakibatkan pergeseran mendasar dalam konsepsi tentang otoritas keagamaan. Pada masa sebelumnya, dalam masyarakat yang berbasis pada tradisi lisan dan naskah tulisan tangan, otoritas bersifat karismatik dan terpusat pada figur seperti penceramah, penghafal, atau lembaga yang merawat teks asli. Kebenaran dijaga melalui mata rantai transmisi lisan yang disebut *isnad*, maupun lewat keahlian menulis indah yang dipandang suci. Namun, dengan kemunculan mesin cetak yang mampu memproduksi banyak salinan serupa, pusat otoritas berpindah dari individu atau institusi menuju teks itu sendiri sebagai entitas material. Misalnya, Alkitab cetakan Wittenberg bisa dianggap setara otoritasnya dengan Alkitab cetakan Roma, selama kandungan teksnya identik. Sebagaimana diungkapkan Bar-Levav & Rebhun (2020), dalam konteks Yahudi, teknologi cetak mendorong peralihan

dari budaya menghafal dan transmisi lisan menuju keterikatan pada teks dan standarisasi. Teks menjadi acuan mandiri yang bisa dibaca, dikutip, atau diperdebatkan oleh siapapun yang memiliki salinannya. Situasi ini membuka ruang bagi verifikasi sekaligus kritik terhadap teks, tetapi juga memicu pertentangan penafsiran yang tidak terelakkan, sebab setiap pembaca kini dapat berinteraksi langsung dengan firman Tuhan tanpa perantara yang disepakati.

Dampak revolusi visual ini tidak hanya menyentuh teks, melainkan juga citra keagamaan. Hunter (2016) mengilustrasikan bagaimana teknik cetak gambar seperti *woodcut* dan *engraving* membuat ikonografi religius yang sebelumnya hanya terdapat di gereja atau manuskrip mewah menjadi lebih terjangkau, mudah disebarluaskan, bahkan dimiliki secara personal. Gambar-gambar cetak yang memvisualisasikan penyaliban, para santo, atau kisah Alkitab kemudian berfungsi sebagai alat efektif untuk katekese dan devosi pribadi. Citra-citra ini membentuk imajinasi visual kolektif tentang narasi suci, yang pada gilirannya mengubah cara masyarakat mempersepsikan agama. Namun, penyebaran gambar-gambar tersebut juga memicu perdebatan teologis, khususnya pada masa Reformasi, terkait kekhawatiran akan praktik penyembahan berhala. Kontroversi ini pada hakikatnya merefleksikan pergumulan mengenai sensorium baru, *apakah pengalaman keagamaan yang otentik hanya bisa dicapai melalui pendengaran (menerima Firman), atau penglihatan (mengamati representasi visual) juga merupakan jalan yang sah?* Pada akhirnya, dominasi medium visual turut mengubah estetika dan afeksi religius, di mana keyakinan semakin terkait dengan apa yang dilihat dan dibaca, bukan semata apa yang didengar dan dialami dalam ruang komunal.

Pergeseran fokus menuju sensorium visual ini turut menghadirkan transformasi mendalam dalam relasi antara tubuh, ruang, dan praktik keagamaan. Berbeda dengan budaya aural yang melibatkan tubuh secara aktif (mulut melafalkan kata-kata, telinga menyerap suara, dan gerak fisik mengikuti ritus), budaya cetak justru cenderung membuat tubuh lebih statis, hanya berpusat pada satu indera (mata yang tekun menelusuri baris-baris teks). Sebagai contoh, kegiatan religius seperti membaca buku do'a tidak lagi sekadar rutinitas, melainkan sebuah bentuk pengabdian yang diakui secara formal. Setiap teknologi rekaman membawa perubahan fundamental dalam cara manusia menghasilkan, menyimpan, dan memanfaatkan catatan (Yeo, 2021). Buku do'a tercetak ini pun berperan sebagai rekaman yang memungkinkan seseorang mengulangi ritus kapan pun dan di mana pun, tanpa kehadiran fisik dalam komunitas liturgis. Fenomena ini memperkuat kecenderungan individualisasi keyakinan. Ruang sakral sendiri mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan, dari gereja atau masjid yang desain akustiknya mengutamakan suara, menuju ruang domestik sederhana seperti rak buku dan meja baca yang berfungsi sebagai altar pribadi. Revolusi tipografi tidak hanya mengubah medium penyampaian pesan religius, tetapi juga mendefinisikan kembali lokasi dan cara pengalaman sakral dihayati, secara bertahap beralih dari ruang publik yang hiruk pikuk menuju ruang privat sunyi dan dipenuhi teks.

Dampak kumulatif dari perubahan sensorium ini melahirkan sebuah lanskap epistemologis baru dalam beragama. Dalam budaya lisan, pengetahuan keagamaan bersifat cair, adaptif, dan kontekstual, mampu menyesuaikan dengan situasi tertentu. Namun, dengan dominasi teks cetak, pengetahuan berubah menjadi entitas yang dapat dipatenkan, distandardisasi, dan disebarluaskan sebagai komoditas tetap yang bisa direproduksi. Füssel (2020) mengemukakan bahwa kemunculan percetakan memungkinkan reproduksi yang presisi terhadap argumen rumit, peta, serta diagram, yang pada gilirannya membentuk budaya akademik baru yang mengutamakan ketepatan dan kritik. Di sinilah kritik teks, perbandingan naskah, serta upaya menentukan edisi paling valid menjadi sangat krusial dan justru memicu perkembangan filologi serta hermeneutika modern. Namun di sisi lain, pendekatan ini mempersempit ruang bagi bentuk-bentuk pengetahuan religius non-tekstual, seperti mistisisme berbasis pengalaman langsung atau kearifan lisan yang diturunkan secara turun temurun. Pengetahuan yang dianggap sah akhirnya semakin terikat pada apa yang tertulis dan tercetak,

bukan pada apa yang dialami secara personal dan disampaikan secara lisan. Transformasi inilah yang menjadi landasan berbagai perdebatan doktrinal di era Reformasi, ketika pihak-pihak yang berseteru saling mengutip bukti tekstual dari Alkitab cetak mereka dengan mengandalkan otoritas visual-tekstual untuk menggeser klaim otoritas tradisional yang selama ini berlangsung secara lisan dan institusional.

Revolusi tipografi dalam beberapa aspek turut mempercepat sekaligus mengintensifkan proses sekularisasi. Kemampuannya dalam mematerialkan kitab suci sebagai objek fisik yang dapat diakses berbagai kalangan, termasuk para pemikir dan akademisi secara bertahap melepaskan teks-teks religius dari monopoli penafsiran yang selama ini dipegang oleh otoritas keagamaan. Alih-alih, teks tersebut berubah menjadi bahan penelitian historis, kajian sastra, dan pemikiran rasional. Fenomena ini dapat dipandang sebagai titik awal berkembangnya sikap kritis modern terhadap agama. Namun di sisi lain, teknologi percetakan juga memberikan peluang bagi desekularisasi dalam bentuk lain, yaitu distribusi literatur keagamaan secara luas, yang pada gilirannya memicu kebangunan rohani dan gerakan reformasi. Dikotomi fungsi percetakan ini sebagai instrumen kritik sekaligus sarana penyebaran iman mengungkap bagaimana penguasa dan kelompok agama bersaing memanfaatkan kekuatan pers untuk membentuk opini publik dan identitas keagamaan (Lamal et al., 2021). Karenanya, mesin cetak bukanlah aktor tunggal dalam proses sekularisasi maupun desekularisasi. Lebih tepat disebut sebagai katalis yang memperhebat dan mempercepat dinamika serta konflik yang telah ada dalam masyarakat religius.

Perubahan mendasar dalam cara manusia mempersepsikan realitas melalui indera membawa dampak sosial yang sangat signifikan, khususnya dalam konteks peralihan dari budaya lisan ke budaya baca-tulis. Kemampuan literasi yang pada dasarnya membuka pintu menuju dunia visual dan tekstual yang sebelumnya asing, berkembang menjadi semacam modal simbolis yang mengandung nilai budaya dan religius yang sangat krusial. Fenomena ini menciptakan disparitas yang jelas antara kelompok terdidik yang mampu mengakses teks-teks otoritatif secara mandiri dengan masyarakat awam yang masih bergantung pada transmisi pengetahuan secara lisan. Dalam konteks Reformasi Protestan, tokoh seperti Luther secara cerdas memanfaatkan revolusi percetakan dengan strategi penyebaran massal melalui dua pendekatan utama, yakni penerjemahan kitab suci ke bahasa sehari-hari dan produksi selebaran-selebaran ringkas yang terjangkau. Langkah ini bukan sekadar adaptasi teknologi semata, melainkan suatu upaya sistematis untuk menciptakan ruang publik alternatif melalui medium visual baru (Füssel, 2020). Menariknya adalah bahwa meskipun menggunakan medium cetak sebagai sarana utama, materi tertulis ini seringkali dikonsumsi secara auditori melalui praktik pembacaan keras di ruang publik, sehingga membentuk suatu paradoks budaya. Di satu sisi, teknologi percetakan yang bersifat visual dan stabil memungkinkan standarisasi pesan, namun di sisi lain tetap berfungsi dalam kerangka tradisi lisan yang sudah mapan. Interaksi kompleks antara sistem persepsi tradisional yang berbasis suara dengan sistem baru yang berbasis teks tercetak ini menunjukkan bagaimana transformasi media tidak pernah bersifat tunggal, melainkan selalu melibatkan negosiasi antara unsur-unsur lama dan baru, antara yang visual dan auditori, serta antara elite terdidik dan masyarakat umum dalam proses rekonstruksi pengalaman kolektif.

Dalam konteks tradisi keagamaan di luar dunia Barat, transformasi signifikan terkait aspek visual dan teknologi percetakan turut terjadi, meskipun dengan ciri khas yang sedikit berbeda. Sebagai contoh, kajian Bar-Levav & Rebhun (2020) tentang transmisi teks dalam budaya Yahudi kontemporer mengungkapkan bahwa meskipun metode cetak telah diadopsi, otoritas tradisi lisan tidak sepenuhnya lenyap. Alih-alih, tercipta relasi yang rumit kadang bahkan terkesan kontradiktif antara kestabilan teks tercetak dan fleksibilitas penafsiran lisan. Catatan-catatan rabbinik yang terpampang di margin kitab suci seperti Talmud menjadi elemen visual krusial yang mengarahkan pemahaman pembaca. Namun demikian, diskusi lisan atau

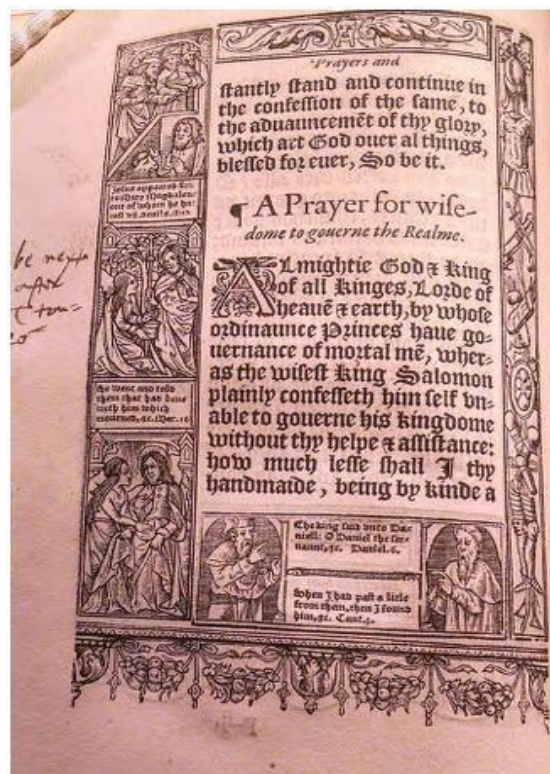


*shiur* tetap mempertahankan peran sentral dalam proses pembelajaran agama. Sementara itu, dalam tradisi Islam, meski seni kaligrafi naskah tangan tetap dihormati, keberadaan Al-Qur'an cetak beserta literatur keagamaan pendampingnya telah menggeser metode pembelajaran. Meski hafalan tetap dipandang esensial, unsur visual dari teks tercetak semakin mengambil peran utama. Revolusi tipografi ini bukan sekadar tentang homogenisasi, melainkan tentang berbagai bentuk adaptasi di mana indera pendengaran dan penglihatan saling berinteraksi, membentuk praktik keagamaan yang khas sesuai konteks budayanya.

Transformasi religiositas akibat revolusi tipografi pada dasarnya mencerminkan pergeseran paradigma sensorium yang mendalam dan bersifat permanen. Dunia yang sebelumnya didominasi oleh ritme suara, memori kolektif, dan kehadiran komunal perlahan berganti menjadi ranah yang lebih terstruktur secara visual, halaman-halaman yang dibalik, serta perenungan individual yang lebih sunyi. Proses ini membuka jalan bagi tumbuhnya individualisme dalam beragama, krisis otoritas tradisional, standarisasi doktrin, sekaligus percepatan pertukaran gagasan yang dapat mendukung baik ortodoksi maupun heterodoksi. Percetakan sendiri sesungguhnya bukan sekadar instrumen pendukung Reformasi, tetapi merupakan medium baru yang mentransformasi tatanan psikologis dan sosial dalam pengalaman beragama. Dari sini, kita dapat menarik pelajaran penting dalam sejarah, bahwa perubahan teknologi komunikasi tidak hanya menyangkut permukaan belaka. Ini merupakan transformasi yang mengubah cara indera kita berinteraksi dengan realitas. Karena agama selalu berkaitan dengan cara manusia mengalami hal-hal yang dianggap transenden, maka perubahan sensorium akibat mesin cetak pada hakikatnya adalah perubahan struktur kesadaran religius masyarakat Barat. Dampaknya masih terasa hingga kini bahkan di era kecerdasan buatan sekalipun.

## B. Individualisme, Reformasi, dan Otoritas Teks Cetak

Gambar 1. Do'a dan Meditasi Kristen (1569) di Perpustakaan Katedral St. Paulus



*Sumber: Lamal et al. (2021)*

Pengaruh paling mendasar dari penemuan mesin cetak dalam dunia keagamaan terletak pada hancurnya sentralisasi otoritas penafsiran yang sebelumnya berlaku. Fenomena ini kemudian memicu timbulnya individualisme religius dalam bentuk yang belum pernah terwujud sebelumnya. Pada era pra-Gutenberg, pemaknaan kitab suci secara efektif dikuasai oleh hierarki gereja beserta para rohaniwan yang menguasai bahasa Latin. Minimnya akses terhadap Alkitab yang langka dan berharga mahal menyebabkan masyarakat awam sepenuhnya bergantung pada penjelasan lisan dari otoritas tradisional tersebut. Dalam konteks ini, mesin cetak secara tak terelakkan meruntuhkan hegemoni tersebut. Sebagaimana dikemukakan Lamal et al. (2021), proses pencetakan mengguncang tatanan pengetahuan yang mapan karena teks menjadi lebih mudah diakses. Ketika Alkitab mulai diterjemahkan ke bahasa vernakular (khususnya versi Luther) dan dapat diproduksi massal serta dimiliki secara pribadi, setiap orang yang melek huruf berpeluang menjadi penafsir independen. Otoritas tidak lagi bersifat hierarkis dari institusi kepada umat, melainkan muncul melalui interaksi langsung antara pembaca dengan teks tercetak di tangan mereka. Peristiwa inilah yang menandai kelahiran hak penafsiran individu (*private judgment*) sebagai landasan Reformasi Protestan. Martin Luther sendiri menyadari betul potensi media cetak ini, menjadikannya sebagai senjata utama Reformasi untuk melawan dominasi Roma (Füssel, 2020).

Namun, individualisme yang muncul ini tidak lantas bermakna fragmentasi sederhana. Justru dibangun di atas dasar baru, yakni otoritas teks itu sendiri sebagai entitas material yang stabil. Dalam tradisi manuskrip, variasi teks dan kesalahan penyalinan kerap terjadi, sehingga otoritas tetap berada pada tradisi lisan dan lembaga yang menetapkan keaslian naskah. Mesin cetak dengan kemampuannya menghasilkan ribuan salinan identik, menciptakan kesan dan memang realitas bahwa teks bersifat tetap, dapat direproduksi, dan dirujuk secara pasti. Yeo (2021) menguraikan bagaimana teknologi rekaman baru ini membentuk perasaan akan ketetapan yang tidak dimiliki tradisi lisan. Pembaca di pusat-pusat pemikiran seperti Wittenberg, Zurich, dan Geneva dapat berdebat dengan merujuk pada kata, ayat, bahkan halaman yang sama dalam edisi cetak mereka. Akibatnya, pusat otoritas beralih dari figur Paus atau konsili menuju literalitas teks cetak itu sendiri. Prinsip yang tertulis menjadi penentu tertinggi (*sola scriptura*), namun pertanyaan mengenai “*siapa yang berwenang menafsirkan tulisan tersebut*” justru memicu konflik baru. Otoritas lama memang runtuh, tetapi tidak digantikan oleh satu otoritas baru yang tunggal, melainkan oleh beragam klaim otoritas tekstual dari berbagai penafsir, baik perorangan maupun kelompok.

Reformasi Protestan pada hakikatnya tidak hanya merupakan sebuah gerakan teologis belaka, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu transformasi dalam ranah komunikasi yang dimungkinkan oleh keberadaan media cetak. Para pihak yang berseteru menyadari bahwa konflik tersebut terjadi dalam dua dimensi sekaligus, dimensi teologis dan dimensi opini publik yang terbentuk melalui perantara percetakan. Berbagai risalah, pamflet, serta karya-karya kartun polemis dicetak dan diedarkan dengan kecepatan tinggi bahkan sangat cepat sehingga memunculkan gelombang diskusi publik mengenai agama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hunter (2016) mencatat bahwa gambar cetak memainkan peran penting dalam membentuk persepsi populer sekaligus wacana polemis. Gambar-gambar satir yang mengejek Paus atau ilustrasi dramatis yang menggambarkan kebenaran Protestan digunakan sebagai sarana visual untuk memengaruhi pemikiran dan emosi umat. Dalam konteks perjuangan semacam ini, kharisma dan wibawa para tokoh reformis seperti Luther sulit dipisahkan dari kecakapan mereka dalam memanfaatkan medium baru ini. Pengaruh mereka tidak hanya berasal dari khotbah di mimbar gereja, melainkan juga dari dominasi nama mereka pada sampul berbagai buku dan pamflet. Inilah yang kemudian dapat disebut sebagai kemunculan otoritas karismatik yang dimediasi cetak, di mana kekuatannya bergantung pada seberapa luas

penyebaran karya tulis mereka dan seberapa efektif mereka dalam membentuk serta menjangkau pembaca baru.

Di sisi lain, maraknya penafsiran individual justru menciptakan kebutuhan baru akan standardisasi dan pengawasan. Sungguh ironis, mesin cetak yang awalnya membebaskan interpretasi, pada akhirnya berubah menjadi alat paling efektif untuk mengontrol dan menyelaraskan berbagai penafsiran tersebut. Setelah melewati fase awal polemik yang tidak terkendali, gerakan Reformasi dengan cepat memanfaatkan percetakan untuk merumuskan doktrin mereka dalam bentuk katekismus, pengakuan iman, serta buku pedoman yang seragam. Langkah ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjinakkan individualisme yang sebelumnya mereka sebar. Pengakuan iman yang dicetak dalam jumlah besar dan disebarkan ke seluruh jemaat menjadi alat disiplin doktrinal yang melahirkan ortodoksi baru berbasis teks tertulis. Dalam tradisi Yahudi yang tidak mengalami Reformasi, percetakan menimbulkan ketegangan antara demokratisasi pengetahuan dan sentralisasi versi resmi (Bar-Levav & Rebhun, 2020). Otoritas rabinik kemudian mengambil peran untuk mengonsolidasikan interpretasi yang dianggap benar melalui penerbitan luas komentar dan respons, berusaha mencegah anarki penafsiran yang dapat muncul dari akses mudah terhadap teks-teks cetak.

Transformasi konsep komunitas keagamaan merupakan konsekuensi yang tidak terelakkan dari menguatnya paham individualisme berbasis teks. Pada era sebelumnya, komunitas ini umumnya diartikan melalui keterlibatan kolektif dalam liturgi dan kehadiran jasmani di lingkungan gereja. Akan tetapi, dengan kemunculan Alkitab versi pribadi, terciptalah apa yang dinamakan komunitas imajiner pembaca. Sebagai ilustrasi, seorang pembaca di pedalaman Jerman yang memegang Alkitab terjemahan Luther secara tidak langsung merasa terhubung dengan pembaca lain maupun sang reformator, meski mereka tidak pernah berjumpa secara fisik. Komunitas semacam ini bersifat maya dan berpusat pada teks, bertolak belakang dengan komunitas nyata yang lazimnya terikat pada lokasi dan praktik ritual bersama. Lamal et al. (2021) mengemukakan bahwa kemajuan teknologi percetakan memungkinkan pembentukan identitas kolektif baru di luar batas-batas lokal. Fenomena inilah yang menjadi cikal bakal denominasionalisme modern, lahirnya kelompok-kelompok yang membangun identitas berdasarkan cara penafsiran tertentu terhadap teks yang sama dengan pengukuhan identitas melalui literatur denominasi cetakan mandiri. Keanggotaan dalam apa yang sering disebut “gereja yang tak terlihat” oleh pembaca setia menjadi suatu cita-cita, meski pada praktiknya justru terjadi perpecahan akibat perbedaan pemahaman atas teks yang sama.

Aspek lain dari individualisme ini tampak dalam proses internalisasi suara moral. Karena setiap individu kini dapat mengakses langsung hukum dan perintah dalam kitab suci, mereka merasa memikul tanggung jawab lebih besar untuk memahaminya sekaligus mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Suara hati atau *conscience* berubah menjadi semacam hakim batin, yang sumbernya bukan lagi sekadar bimbingan pastoral, melainkan pembacaan pribadi terhadap teks suci. Perubahan ini turut mendorong tumbuhnya spiritualitas yang lebih reflektif dan berpusat pada dialog internal. Buku harian rohani dan otobiografi religius menjadi genre populer, memberikan ruang bagi individu untuk mendokumentasikan dan merenungkan perjalanan iman mereka dalam bingkai panduan tekstual kitab suci. Sebagaimana dikatakan Yeo (2021), teknologi pencatatan memungkinkan bentuk-bentuk baru refleksi diri dan pertanggungjawaban. Namun, perlu diperhatikan bahwa tekanan baru semacam ini terkadang juga memunculkan kegelisahan dan keraguan mendalam terkait agama. Beban untuk memperoleh pemahaman yang benar kini sepenuhnya berada di pundak individu. Berbeda dengan masa lampau ketika keselamatan dipahami sebagai hasil partisipasi dalam sakramen gereja, kini keselamatan semakin dipandang sebagai buah dari penafsiran dan keyakinan pribadi yang dianggap benar terhadap teks kitab suci.

Di luar ranah Kristen, efek serupa sebenarnya dapat dijumpai dalam berbagai tradisi keagamaan. Dalam konteks Yudaisme, misalnya, penyebaran Talmud dalam bentuk cetak serta kodifikasi hukum Yahudi seperti Shulchan Aruch oleh Rabbi Yosef Karo telah menetapkan standar praktik baru yang cukup berpengaruh. Wewenang para rabi memang tetap dominan, namun akses masyarakat (khususnya kalangan terdidik) terhadap teks-teks utama memungkinkan mereka berpartisipasi dalam diskusi hukum, bahkan mempertanyakan keputusan pemimpin agama lokal. Di era modern, proses digitalisasi sebenarnya melanjutkan fenomena ini, namun akar transformasinya bermula dari revolusi cetak yang pertama kali membuat teks-teks inti Yudaisme tersebar luas (Bar-Levav & Rebhun, 2020). Pola yang mirip terlihat dalam Islam, walaupun Al-Qur'an cetak tidak menggantikan peran ulama, kehadirannya memperluas kesempatan umat untuk mempelajari kitab suci secara independen. Percetakan juga mendorong penyatuan *qira'at* (bacaan) Islam dan mempermudah distribusi berbagai tafsir, suatu perkembangan yang tidak hanya memperkaya pemahaman agama tetapi juga memperumit lanskap otoritas keagamaan, karena semakin banyak suara penafsir resmi yang dapat dijangkau publik.

Dinamika ini pada akhirnya melahirkan metode baru dalam mengklaim dan mengukuhkan otoritas keagamaan. Dalam dunia literasi cetak, klaim otoritas diwujudkan melalui berbagai cara, kata pengantar buku, persembahan kepada patron berpengaruh, perolehan izin resmi, serta yang terpenting adalah sistem rujukan silang dan kutipan yang presisi. Melalui pendekatan ini, seorang penulis membangun argumennya dengan merujuk pada halaman dan ayat tertentu dari edisi kitab suci yang baku. Hal ini memungkinkan pembaca untuk mengecek langsung keakuratan dan relevansi kutipan tersebut. Praktik semacam ini melahirkan tradisi keilmuan dan perdebatan agama baru, yang relatif transparan dan dapat dipertanggungjawabkan selama pembaca memiliki akses terhadap literatur yang diperlukan. Menurut pengamatan Füssel (2020), buku cetak menciptakan jejaring referensi baru beserta budaya catatan kaki yang sebelumnya tidak dikenal. Kini, otoritas tidak lagi cukup hanya bersandar pada klaim jabatan atau warisan tradisi; ia harus dibangun melalui argumentasi tekstual yang terdokumentasi dan terbuka untuk diverifikasi. Situasi ini mendorong perkembangan teologi yang lebih sistematis dan rigor, namun sekaligus membuka peluang bagi kritik yang lebih metodis terhadap klaim-klaim teologis, karena setiap pernyataan kini dapat diverifikasi oleh siapapun yang memiliki akses terhadap teks-teks terkait.

Namun, perlu dipahami bahwa munculnya individualisme dan otoritas baru ini tidak secara otomatis mendorong sikap toleransi. Justru, seringkali terjadi kecenderungan sebaliknya, anggapan bahwa seseorang telah mencapai penafsiran yang benar melalui pembacaannya sendiri kerap diyakini sebagai hasil ilham Roh Kudus dapat melahirkan bentuk fanatisme baru. Setiap golongan atau aliran merasa memperoleh mandat langsung dari teks yang dianggap paling otentik. Situasi ini menyulitkan upaya kompromi, terlebih ketika kelompok lain juga mengklaim hal serupa. Kehadiran mesin cetak, yang memungkinkan penyebaran pandangan secara masif kerap justru mengukuhkan perbedaan dan memperlebar polarisasi. Media baru ini dapat berfungsi sebagai sarana, baik kesatuan maupun fragmentasi untuk membangun dan mendekonstruksi kekuasaan (Lamal et al., 2021). Konflik agama dan persekusi sektarian pada abad ke-16 dan 17 menjadi dampak kelam dari kebebasan penafsiran individual tersebut, terutama karena tidak ada otoritas pemersatu yang masih diakui bersama. Otoritas teks yang seharusnya menjadi mediator malah berubah menjadi senjata yang digunakan oleh berbagai pihak.

Mengkaji pengaruh mesin cetak terhadap individualisme, reformasi, dan otoritas teks cetak mengungkap sebuah paradoks mendalam. Mesin cetak adalah instrumen yang sekaligus membebaskan dan membelenggu, mempersatukan dan memecah. Di satu sisi, ia membebaskan individu dari cengkeraman monopoli penafsiran tradisional, tetapi di sisi lain membebani mereka dengan tanggung jawab dan kegelisahan baru dalam menafsirkan teks, sesuatu yang

sebelumnya tidak mereka hadapi. Selain itu, teknologi ini melahirkan otoritas baru berbasis teks dan nalar rasional, sekaligus memicu klaim otoritas yang saling berbenturan. Ia menjadi alat vital bagi Reformasi dan pembaruan iman, namun juga menjadi sarana standardisasi dogma dan pengawasan doktrinal yang lebih ketat. Perubahan ini bukanlah peristiwa tunggal yang sederhana, melainkan proses dialektis panjang di mana kekuatan yang dibawa teknologi baru berinteraksi dengan struktur sosial dan keyakinan yang telah mapan. Memahami dialektika ini sangat penting, sebab memberikan landasan historis berharga untuk melihat bagaimana otoritas dan individualisme religius berubah, khususnya di era internet dan media sosial saat ini, di mana akses terhadap teks kembali didemokratisasi, tetapi hasilnya tetap ambivalen dan sarat implikasi besar.

### **C. Komunikasi Religius dan Standardisasi Doktrin**

Transformasi revolusi tipografi tidak hanya memperluas ruang bagi pemaknaan individual, melainkan juga menyediakan alat baru yang belum pernah ada sebelumnya untuk menstandarisasi doktrin dan mengorganisasi ajaran secara massal. Berbeda dengan tradisi lisan dan naskah tulisan tangan yang cenderung menghasilkan keragaman serta adaptasi lokal, teknologi cetak memungkinkan pembuatan ribuan replika teks yang sama persis. Kemampuan ini turut mengubah cita-cita keagamaan, karena untuk pertama kalinya muncul kemungkinan membayangkan dan mewujudkan komunitas beriman yang tersebar luas namun memiliki keyakinan yang identik berkat penggunaan buku pedoman yang seragam. Percetakan menjadi alat utama bagi negara dan gereja untuk memaksakan keseragaman dan mengukuhkan kontrol atas sistem kepercayaan di seluruh wilayah mereka (Lamal et al., 2021). Proyek standarisasi ini merupakan jawaban atas kekacauan penafsiran yang justru muncul akibat keberadaan mesin cetak itu sendiri. Buku cetak lalu berfungsi sebagai alat pendisiplinan, sebuah cara untuk mengendalikan makna dan menetapkan ortodoksi yang bisa menjangkau hingga jemaat di daerah terpencil sekalipun. Di titik inilah dimulainya upaya sistematis menciptakan keseragaman pemikiran dalam skala besar, yang diwujudkan melalui kitab katekismus, buku do'a umum, dan pengakuan iman terstandar sebagai kurikulum wajib untuk mempertahankan doktrin yang benar.

Katekismus cetak merepresentasikan manifestasi paling konkret dari proses standarisasi doktrin keagamaan, di mana teks-teks seperti Katekismus Heidelberg dan Katekismus Roma tidak hanya menyederhanakan penyampaian ajaran melalui format tanya jawab yang sistematis, tetapi juga menjamin konsistensi konten secara universal, terlepas dari lokasi penerbitan atau penggunaannya. Metodologi ini mentransformasi paradigma edukasi agama yang semula bersifat dinamis, berbasis interaksi dialogis dan adaptasi kontekstual antara pendeta dengan jemaat menjadi sistem transmisi pengetahuan yang terinstitusionalisasi, di mana pesan-pesan doktriner dialihkan secara langsung dari medium tercetak kepada kesadaran individu tanpa modifikasi. Lebih dari sekadar instrumen pedagogis dasar, katekismus terpolat ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengkristalkan keyakinan kolektif lintas generasi (Füssel, 2020), sekaligus berperan ganda sebagai kanon resmi doktrin yang wajib dianut dan alat verifikasi ortodoksi personal. Dalam kerangka ini, buku cetak naik status dari wahana pasif menjadi agen aktif yang memfasilitasi proses normalisasi doktrin melalui pembentukan sistem referensi yang rigid, sebuah kerangka epistemik yang memungkinkan identifikasi dan koreksi terhadap deviasi pemikiran. Pergeseran otoritas ini bersifat fundamental, dari figur pendeta yang rentan terhadap subjektivitas dan kesalahan interpretasi, menuju teks terstandarisasi yang telah mengalami sakralisasi sebagai entitas yang absah dan infalibel, sehingga menciptakan hierarki baru dalam ekosistem pengetahuan agama di mana otentisitas diukur melalui kesesuaian literal dengan teks tertulis yang telah dilembagakan.

Standardisasi melalui media cetak turut memengaruhi ranah liturgi dan praktik devosi. Salah satu contoh terkemuka ialah *Book of Common Prayer* yang diterbitkan tahun 1549 dalam tradisi Anglikan. Menetapkan format ibadah seragam untuk seluruh kerajaan dan mencetaknya guna didistribusikan ke setiap gereja, buku ini tidak hanya menyelaraskan ritual keagamaan, melainkan juga membentuk pengalaman religius yang konsisten dan homogen di seluruh Inggris. Menariknya, penggunaan buku yang identik dengan susunan kata sama dan letak halaman serupa menjadikan ibadah sebagai ritual nasional yang terstandarisasi tinggi. Teknologi pencatatan ini memungkinkan stabilisasi prosedur sekaligus pembentukan model otoritatif untuk tindakan (Yeo, 2021). Dalam konteks ini, buku do'a cetak berperan sebagai rekaman dan sekaligus naskah bagi aktivitas keagamaan kolektif. Dampaknya jelas terlihat, yakni berkurangnya variasi lokal dan terbatasnya kebebasan klerus setempat, sementara otoritas pusat, baik negara maupun gereja justru menguat karena memegang kendali atas definisi resmi tata ibadah. Ibadah yang sebelumnya mungkin bersifat spontan berubah menjadi terikat pada teks tertulis, menandai peralihan sensorik dari partisipasi lisan yang fleksibel menuju ketergantungan visual pada tulisan tercetak.

Tidak hanya teks, gambar cetak pun memainkan peran krusial dalam pembakuan imajinasi religius. Hunter (2016) mencatat bagaimana gambar cetak yang memvisualisasikan peristiwa Alkitab, para santo, atau diagram teologis (seperti pohon dosa dan keselamatan) membentuk kosakata visual bersama bagi umat beriman. Sebelumnya, gambar religius yang menghiasi gereja cenderung beragam, bergantung pada keterampilan seniman atau tradisi lokal masing-masing. Namun, dengan produksi massal, gambar tertentu menjadi kanonik dan dikenal luas, sehingga cara umat memvisualisasikan narasi suci pun menjadi lebih seragam. Kebanyakan gambar ini tidak berdiri sendiri, melainkan disertai teks penjelas, sehingga pesan visual dan verbal saling memperkuat, menciptakan penyebaran doktrin yang terkendali. Bahkan pada masa Kontra-Reformasi, Gereja Katolik secara aktif memanfaatkan seni cetak dan pamflet bergambar untuk mempromosikan devosi kepada Maria dan para santo, sekaligus menyebarkan kisah mukjizat dan martir secara terstandar. Percetakan tidak hanya membakukan aspek kognitif seperti doktrin, tetapi juga menstandarisasi dimensi afektif dan imajinatif dalam praktik keagamaan.

Dalam tradisi Yahudi, dampak dari standarisasi cetak sangat terlihat, khususnya dalam proses kodifikasi hukum. Sebagai ilustrasi, penyusunan dan penerbitan *Shulchan Aruch* (Meja Tersaji) oleh Rabbi Yosef Karo pada abad ke-16 menjadi tonggak sejarah yang signifikan. Sebelum karya ini muncul, penerapan hukum Yahudi atau Halakha cenderung bervariasi berdasarkan adat setempat dan responsa dari para rabi. Kehadiran *Shulchan Aruch* yang dicetak secara sistematis dan komprehensif memunculkan harapan untuk menjadikannya sebagai pedoman hukum yang seragam bagi masyarakat diaspora. Menurut Bar-Levav & Rebhun (2020), pencetakan memfasilitasi aspirasi untuk praktik halakhik yang terpadu, meskipun kenyataannya tetap beragam. Buku ini kemudian menjadi rujukan utama, di mana keputusan-keputusannya dapat dijadikan acuan oleh rabi di berbagai komunitas. Meski perdebatan terus berlanjut, adanya teks standar yang tercetak jelas mengubah hierarki otoritas menjadikan kitab tersebut menjadi dasar bersama dalam diskusi agama, secara tidak langsung mendorong praktik yang lebih seragam. Hal ini menunjukkan bagaimana cetakan mampu mengubah tradisi lisan yang kompleks dan terfragmentasi menjadi sistem tertulis yang lebih terstruktur dan mudah disebarkan.

Mengenai mekanisme distribusi buku-buku standar tersebut, hal ini patut dianggap sebagai pencapaian logistik dan ekonomi yang luar biasa. Seluruh proses bergantung pada jaringan percetakan dan perdagangan buku yang sedang tumbuh pesat pada masa itu. Buku-buku doktrinal sering kali memperoleh hak monopoli cetak (*privilege*) dari penguasa, sebuah upaya untuk memastikan konsistensi isi sekaligus mengatur produksinya. Jaringan distribusi ini menjamin bahwa edisi katekismus atau buku do'a yang sama bisa sampai ke tangan pendeta,

baik di kota metropolitan maupun daerah terpencil. Dari sudut pandang kekuasaan, penguasaan atas percetakan merupakan aspek kunci dari kekuasaan negara dan gereja pada periode modern awal (Lamal et al., 2021). Dengan mengendalikan produksi dan penyebaran teks standar, otoritas dapat melakukan rekayasa sosial berbasis teks dalam skala yang sebelumnya sulit terwujud. Proses ini juga menciptakan ketergantungan baru, yakni otoritas lokal seperti rabi atau pendeta di pedesaan harus merujuk pada buku cetak yang diterbitkan di pusat-pusat keagamaan utama seperti Roma, Wittenberg, atau Istanbul untuk memperoleh panduan yang dianggap sah. Akibatnya, kekuasaan keagamaan semakin terpusat, meskipun secara geografis tersebar luas.

Standarisasi bahasa melalui publikasi cetak nyatanya menimbulkan efek yang cukup multidimensi dari perspektif kebahasaan. Ketika naskah-naskah religius dan literatur doktrinal dialihbahasakan ke dalam bahasa daerah, proses ini tidak sekadar bersifat translatif, melainkan turut berperan dalam kodifikasi bahasa tersebut. Contoh nyata dapat dilihat pada terjemahan karya Luther yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembakuan bahasa Jerman kontemporer. Publikasi tercetak yang tersebar luas akhirnya berfungsi sebagai acuan gramatikal dan leksikal bagi komunitas penutur bahasa tersebut. Dalam ranah komunikasi religius, fenomena ini memungkinkan konsep-konsep teologis yang kompleks dapat diekspresikan melalui kosakata dan struktur kalimat yang konsisten di berbagai wilayah dengan bahasa yang sama. Sebagaimana dikemukakan Füssel (2020), buku cetak menjadi kekuatan utama dalam unifikasi bahasa dan pembentukan kesadaran nasional. Pembakuan bahasa ini menjadi pilar penting dalam konstruksi identitas keagamaan kolektif yang kokoh melampaui variasi dialektal setempat. Namun yang patut dicermati, proses ini sekaligus dapat berfungsi sebagai instrumen marginalisasi terhadap kelompok yang mempertahankan bahasa atau dialek minoritas, sehingga standarisasi doktrin berjalan paralel dengan proses homogenisasi kultural.

Tentu saja, dampak dari pembakuan ini tidak selalu berjalan linear dan diterima secara universal. Terdapat banyak contoh dimana penyebaran literatur doktrin baku justru memicu perlawanan dari komunitas yang masih berpegang teguh pada tradisi lisan dan praktik lokal. Ketegangan antara agama resmi yang terwakili melalui media cetak dengan agama rakyat yang hidup dalam tradisi verbal kerap kali muncul. Buku cetak sering dipersepsikan sebagai simbol otoritas eksternal yang bersifat impersonal dan menuntut konformitas. Namun dalam perspektif jangka panjang, ketahanan dan kapasitas reproduksi media cetak hampir selalu unggul dibanding tradisi lisan. Ketahanan dan portabilitas informasi yang terekam memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan tradisi lisan dalam banyak konteks penyebaran informasi (Yeo, 2021). Ajaran yang terkodifikasi dalam bentuk cetakan dan didistribusikan secara luas memiliki probabilitas lebih tinggi untuk bertahan dan bahkan menjadi norma dominan, dibandingkan varian lokal yang hanya diwariskan secara oral. Karena itu, teknologi percetakan tidak hanya berperan dalam penyebaran ajaran secara seragam, tetapi juga secara aktif menyeleksi dan menginstitusionalisasi varian tertentu sebagai standar, sementara varian lainnya secara bertahap tersisihkan dan mungkin punah.

Di era kontemporer, pengaruh standarisasi melalui teknologi percetakan masih sangat terasa. Berbagai aliran Kristen modern tetap mengandalkan versi cetak resmi dari kitab suci, buku nyanyian, dan dokumen pengakuan iman sebagai pedoman utama. Fenomena ini jelas telah menciptakan stabilitas doktrinal yang berkelanjutan sekaligus menjadi fondasi identitas bagi denominasi-denominasi tersebut. Namun, sebagaimana dikemukakan Bar-Levav & Rebhun (2020), hasrat untuk mempertahankan standar ini harus berhadapan dengan realitas bahwa interpretasi dalam praktik senantiasa bersifat dinamis, terutama di tengah gempuran era digital. Jika pada masa percetakan kontrol atas produksi teks sangat ketat melalui penerbitan, penyensoran, dan hak eksklusif, maka di dunia digital sekarang, pengawasan tersebut jauh lebih minimal bahkan cenderung hampir tidak ada. Alat cetak yang dahulu berfungsi sebagai instrumen sentralisasi dan pengendali kini digantikan oleh internet yang bersifat desentralistik

dan kerap mengacaukan tatanan yang ada. Walaupun demikian, cita-cita untuk menyebarkan ajaran secara seragam yang pertama kali dimungkinkan secara teknis oleh Gutenberg masih melekat pada berbagai otoritas keagamaan, hanya saja mereka kini harus beradaptasi dengan lanskap media yang berubah secara radikal.

Peran buku cetak dalam meneguhkan doktrin dan mengorganisir ajaran sebenarnya memiliki dimensi paradoks, di satu sisi memantapkan keseragaman, di sisi lain justru memicu individualisme dan fragmentasi. Revolusi tipografi membuka peluang bagi rekayasa kesadaran kolektif secara terpusat dalam skala masif. Dengan hadirnya infrastruktur material seperti buku standar dan jaringan distribusi, serta aspek kognitif seperti bahasa baku dan katekismus, proyek homogenisasi keagamaan menjadi mungkin dilaksanakan oleh berbagai aktor, mulai dari negara, gereja, hingga gerakan pembaruan. Konsekuensinya, agama yang sebelumnya merupakan jaringan praktik dan keyakinan lokal yang cair, bertransformasi menjadi sistem kepercayaan yang lebih terdefinisi, terdokumentasi, dan bahkan dapat diverifikasi. Proses standardisasi ini kemudian menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya apa yang disebut agama-agama dunia dalam bentuk modernnya terlembagakan dengan batas doktriner yang jelas dan dapat diajarkan secara metodis. Dengan demikian, mesin cetak tidak sekadar mengubah cara seseorang membaca kitab suci, tetapi lebih mendasar lagi, mengubah cara agama memaknai dan mendefinisikan dirinya sebagai suatu sistem makna yang terstruktur. Warisan historis ini terus membentuk persepsi kita tentang bagaimana agama yang benar seharusnya dirumuskan dan disampaikan, meskipun kini kita berada dalam pusaran desentralisasi yang dihadirkan oleh dunia digital.



## **BAB IV**

### **ERA PENYIARAN AWAL RADIO, TELEVISI, & AGAMA MASSA**

#### **A. Sejarah Penyiaran Religius di Masa-Masa Awal**

Pada awal abad ke-20, transformasi besar terjadi dalam dunia komunikasi dengan hadirnya media penyiaran seperti radio yang kemudian diikuti oleh televisi. Jika sebelumnya mesin cetak mendominasi ruang visual dan mempertegas keterpisahan antarindividu, media siaran ini menghadirkan kembali dimensi audio-visual ke dalam ruang domestik secara massal dan serempak. Radio sebagai perintis memperkenalkan suatu hal yang revolusioner, yakni vokal manusia (baik dalam bentuk khotbah, lagu rohani, maupun do'a) yang mampu menembus batas fisik gereja hingga masuk ke ruang privat rumah tangga. Kehadirannya terasa begitu langsung dan personal di tengah keluarga yang terpencar secara geografis. Merujuk pada pandangan Dinwiddie (2016), siaran keagamaan di Inggris pada fase awal justru dianggap sebagai perluasan dari pelayanan publik. Sebagai contoh, BBC menerapkan pendekatan yang matang dan beretika, di mana penyiaran keagamaan dirancang sebagai bentuk layanan publik, bertujuan untuk mengangkat dan mendidik masyarakat nasional. Suara-suara tersebut kemudian tersebar ke seantero negeri, membentuk suatu komunitas imajiner yang bersatu secara nasional, berkumpul secara simultan di sekitar perangkat radio mereka. Perubahan ini bersifat radikal dalam cara memaknai komunitas religius, batas geografis tidak lagi menjadi penentu, melainkan tergantikan oleh frekuensi elektromagnetik dan keseragaman jadwal siaran. Aksesibilitas ibadah pun meningkat bagi mereka yang sakit, terisolasi, atau berada jauh dari gereja, sekaligus memungkinkan agama menjadi bagian yang lebih organik dalam keseharian.

Karakter radio yang mengandalkan audio dinilai sangat sesuai untuk menyampaikan pesan religius, mengingat agama sendiri berlandaskan pada tradisi lisan dan transmisi verbal. Melalui medium ini, jemaat dapat merasakan pengalaman mendengarkan khotbah tanpa kehadiran fisik pendeta, namun tetap merasakan keintiman karena suara tersebut seolah ditujukan secara personal kepada setiap pendengar di ruang privatnya. Radio menciptakan teater dalam pikiran, di mana imajinasi pendengar turut membentuk makna yang disampaikan (Esslin, 2017). Dalam konteks keagamaan, hal ini memungkinkan pendengar membayangkan suasana sakral di sebuah katedral atau momen ibadah hanya melalui suara, musik, dan efek audio yang diproduksi. Namun, pada masa awal, pendekatan siaran keagamaan cenderung kaku dan sepihak, mencerminkan model komunikasi yang berpusat pada otoritas lembaga agama mapan. Otoritas tetap dipegang oleh narasumber resmi yang direstui (biasanya dari denominasi utama), sementara peran pendengar umumnya pasif sebagai penerima pesan. Meski demikian, radio telah membuka babak baru dalam ekosistem media, memungkinkan agama menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam dibandingkan pertemuan fisik atau media cetak.

Keberadaan televisi memperkenalkan perspektif baru yang lebih rumit dan holistik. Televisi tidak sekadar radio dengan tambahan visual, televisi merupakan medium audiovisual yang utuh menawarkan pengalaman lebih imersif sekaligus terorganisir. Engell (2025) menyatakan bahwa televisi mengubah persepsi terhadap realitas, karena medium ini menyajikan aliran gambar dan suara yang kontinu dan temporer serta menyatu dengan rutinitas keseharian. Ketika konten keagamaan muncul dalam aliran ini harus bersaing dengan berbagai materi seperti informasi, tontonan, hingga promosi. Di fase permulaan, tayangan religius di televisi kerap mencontoh pola kebaktian gereja dengan kamera diposisikan statis untuk mengabadikan rangkaian ibadah secara lengkap. Bruce (2019) mengungkapkan bahwa saat itu ibadah mingguan sekadar dipindahkan ke layar tanpa eksplorasi mendalam terhadap struktur

visual maupun naratif yang khas media baru tersebut. Visualisasi ini memiliki dualitas, di satu sisi, menciptakan kesan pengalaman religius yang lebih nyata dibanding radio, namun di sisi lain, dimensi transenden dan misteri agama berisiko tereduksi menjadi sajian dua dimensi yang bisa dihentikan sewaktu-waktu dengan menekan tombol.

Perkembangan awal siaran televisi keagamaan juga memunculkan dinamika antara misi pelayanan publik dan potensi komersialisasi. Di Amerika Serikat, sistem siaran komersial memungkinkan pihak individu atau organisasi keagamaan membeli slot waktu yang kelak menjadi fondasi televangelisme modern. Sementara itu, di beberapa negara Eropa dengan model layanan publik seperti BBC, konten agama lebih diarahkan sebagai bentuk pelayanan bagi kepentingan publik yang majemuk. Televisi tidak pernah bersifat netral, media ini berspekulasi terhadap keinginan audiens dan membentuk imajinasi keagamaan sesuai dengan preferensi tersebut (Erickson, 2022). Pada masa awal, siaran keagamaan telah berupaya berspekulasi, *apakah penonton menginginkan ibadah formal yang khidmat, atau justru mengincar inspirasi, hiburan, dan penjelasan yang lebih dinamis?*. Maka, bermunculan berbagai eksperimen format, mulai dari dialog dengan teolog, film dokumenter tentang situs suci, hingga diskusi panel mengenai isu moral. Agama secara bertahap harus belajar berkomunikasi dalam bahasa televisi, tentu dengan mempertimbangkan pencahayaan, komposisi visual, durasi segmen, serta daya tarik visual untuk mempertahankan fokus penonton yang rentan teralihkan.

Adaptasi keyakinan religius terhadap logika televisi terlihat nyata dalam representasi otoritas. Berbeda dengan radio yang mengandalkan suara penuh wibawa, televisi menuntut visualisasi yang memikat. Aspek fisik, mimik wajah, daya pikat visual, serta keluwesan berperforma di depan kamera menjadi elemen krusial. Tak jarang, pendeta yang mahir berkhutbah di mimbar justru kurang optimal ketika tampil di layar kaca. Fenomena ini bukan sekadar asumsi, di mana televisi menganut logika *faith in late capitalism* yang menilai segala sesuatu berdasarkan daya tarik dan kemampuannya mempertahankan perhatian pemirsa (Einstein et al., 2018). Fokus beralih dari kedalaman pemikiran teologis menuju performativitas dan resonansi emosi yang spontan. Contoh konkretnya adalah siaran langsung perayaan keagamaan besar (seperti Misa Natal di Vatikan atau buka puasa bersama) yang memanfaatkan televisi untuk menciptakan peristiwa media massal, memungkinkan jutaan orang mengalami partisipasi simbolis secara serempak. Peristiwa semacam ini dapat dipandang sebagai ritual media kontemporer, di mana keterlibatan hanya membutuhkan aksi menonton bersama.

Respons komunitas beragama terhadap media baru ini pun bervariasi. Sebagian memandang radio dan televisi sebagai anugerah ilahi sekaligus alat misi efektif untuk menyentuh jiwa-jiwa yang tersesat meski mereka berada dalam ranah privat. Di pihak lain, ada kelompok yang curiga dan menolak, mengkhawatirkan komersialisasi dan reduksi agama menjadi sekadar tontonan akan menggerus kesakralan dan substansi spiritualnya. Sebagaimana Bruce (2019) mencatat bahwa di Amerika, polarisasi ini melahirkan dua arus utama, yakni siaran agama *mainline* yang bersifat lebih tenang dan terintegrasi dengan jaringan besar, serta siaran *evangelikal* yang lebih dinamis, emosional, dan mandiri melalui pembelian slot siaran. Kelompok kedua diduga lebih sukses mengadopsi logika komersial televisi karena keberanian mereka menggunakan teknik produksi dan persuasi yang nyaris identik dengan industri hiburan. Namun, terlepas dari perbedaan pendekatan, kedua kubu sepakat pada satu poin penting, yaitu penyiaran telah mengubah paradigma. Agama tidak lagi bisa mengabaikan keberadaan audiens yang tersebar di ruang privat dengan kendali penuh untuk memilih saluran atau mematikan perangkat sesuai keinginan.

Efek berkelanjutan dari sejarah awal penyiaran agama memunculkan suatu pembiasaan terhadap kehadiran agama di ruang domestik, yang kemudian berkembang menjadi salah satu bentuk konten dalam arus media. Sebagaimana dikemukakan Esslin (2017), televisi telah

berperan sebagai lembaga kebudayaan pusat pada masa kini. Melalui integrasi agama ke dalam ranah budaya yang dimediasi ini, agama mengalami transformasi menjadi unsur budaya populer. Figur-figur religius muncul sebagai selebritas yang citra dan suaranya mudah diingat. Bahkan, terminologi dan ikon-ikon keagamaan mulai diadopsi ke dalam beragam format, mulai dari iklan, serial komedi, hingga program *talk show*. Proses ini melakukan apa yang dapat disebut sebagai *doing and undoing* agama, di satu sisi agama menjadi semakin terlihat dan terasa dekat, namun di sisi lain kehilangan dimensi komunal dan kedalaman maknanya. Alhasil, agama berubah menjadi sumber daya kultural yang dikonsumsi secara pasif (Erickson, 2022). Fase awal ini menciptakan preseden krusial, karena untuk pertama kalinya pengalaman religius yang sepenuhnya termediakan terpisah dari rumah ibadah dan komunitas fisik menjadi mungkin dan bahkan umum. Ini merupakan lompatan besar yang membuka jalan menuju era di mana realitas virtual dan ibadah daring tidak lagi dianggap aneh.

Secara esensial, sejarah penyiaran religius awal ini merupakan narasi tentang negosiasi dan penyesuaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga agama tradisional terhadap logika teknis dan ekonomi yang dibawa oleh medium baru. Radio dan televisi tidak hanya memperluas jangkauan pesan keagamaan, tetapi juga menciptakan kondisi bagi kelahiran agama sebagai fenomena media massa. Medium-medium ini menggeser otoritas, mentransformasi komunitas, sekaligus mengubah pola partisipasi keagamaan. Dari pendekatan pelayanan publik yang tenang dan khidmat yang diusung radio BBC, hingga munculnya bibit-bibit televangelisme komersial di Amerika, periode awal ini menetapkan fondasi yang kemudian berkembang pesat di dekade-dekade berikutnya. Lebih jauh, era ini mengajarkan pelajaran yang kerap terlupakan, bahwa setiap medium membawa kecenderungannya sendiri dimana radio lebih menekankan keintiman suara dan daya imajinasi pendengar, sementara televisi mengedepankan aspek visual yang dramatis serta personalisasi karisma. Untuk memahami manifestasi agama di layar kaca saat ini yang seringkali menghibur, emosional, dan berfokus pada persona, menelusuri sejarah penyiaran awal menjadi kunci penting. Bentuk-bentuk tersebut bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil evolusi panjang dari adaptasi terhadap logika yang dirintis oleh radio dan televisi sejak pertama kali mereka menyapa audiens yang tersebar, namun merasa terhubung.

## **B. Lahirnya “Televangelisme” dan Agama Spektakel**

Kemunculan televangelisme menandai kulminasi suatu proses transformasi di mana agama perlahan berubah menjadi komoditas sekaligus hiburan dalam ekonomi perhatian media. Fenomena yang berkembang pesat, khususnya di Amerika Serikat pada periode kedua abad 20 bukan sekadar siaran keagamaan konvensional. Ia menjelma menjadi genre hibrida yang sepenuhnya menginternalisasi logika produksi dan strategi persuasi televisi komersial. Jika kita menelusuri siaran agama awal di BBC, sebagaimana dikaji oleh Dinwiddie (2016), masih sangat kental dengan etika pelayanan publik dan kesakralan formatnya. Televangelisme justru melakukan inversi terhadap paradigma tersebut. Ia secara sadar menyadari bahwa dalam ekosistem media yang padat dan kompetitif, agama harus berkompetisi untuk meraih rating dan sumbangan. Bruce (2019) pernah menyatakan bahwa televangelisme merupakan sebuah fenomena khas Amerika yang menggabungkan teologi Protestan konservatif dengan teknik pemasaran massal dan hiburan. Ritual keagamaan yang pada dasarnya khidmat dan tenang, kemudian direkonstruksi dalam studio yang didesain menyerupai gereja megah. Gerakan kamera yang dinamis, pencahayaan dramatis, serta musik pengiring yang emosional, semuanya dirancang untuk mengubah ibadah menjadi tontonan yang memikat, baik secara visual maupun emosional.

Esensi dari agama sebagai tontonan ini terletak pada personalisasi karisma melalui medium televisi. Televangelisme melahirkan figur-figur bintang agama seperti Billy Graham,

Oral Roberts, Jimmy Swaggart, atau Pat Robertson yang karismanya dibentuk dan diperkuat oleh televisi itu sendiri. Mereka bukan sekadar pendakwah dengan pemahaman teologis mendalam, melainkan juga praktisi media yang mahir. Mereka menguasai seni berbicara di depan kamera, seolah berkomunikasi langsung dengan setiap penonton di rumah. Pendekatan ini memanfaatkan apa yang kerap disebut sebagai keintiman semu yang khas televisi. Televisi memiliki kemampuan unik untuk menciptakan rasa kedekatan yang personal, sehingga penonton merasa seolah-olah sedang diajak bicara secara langsung (Esslin, 2017). Para televangelis benar-benar menguasai teknik ini, dengan memadukan nada suara persuasif, ekspresi wajah yang empatik, serta bahasa tubuh yang inklusif, untuk membangun hubungan parasosial yang kuat dengan audiens. Otoritas mereka tidak hanya bersumber pada klaim teologis, tetapi juga pada performa media yang mereka sajikan.

Perubahan mendasar dalam ekspresi keagamaan yang beralih menjadi tontonan populer terlihat jelas melalui dramatisasi mukjizat dan fenomena penyembuhan ilahiah. Acara-acara seperti *The 700 Club* atau *The Hour of Power* tidak sekadar menyajikan khotbah tradisional, tetapi juga mengemas narasi kesaksian pribadi, intervensi ilahi dalam penyembuhan, serta ramalan-ramalan profetik dalam format produksi yang canggih dan atraktif. Sebagaimana dijelaskan Erickson (2022), media spekulatif secara sistematis membentuk pemahaman publik tentang yang adikodrati melalui teknik narasi dan penyajian visual yang dirancang khusus. Misalnya, teknik pengambilan gambar *close-up* pada ekspresi wajah yang diliputi emosi, sudut pengambilan gambar yang dramatis ketika menampilkan ritual penumpangan tangan, serta pengiring musik yang dibangun untuk menciptakan ketegangan, semua elemen ini bersama-sama mengubah pengalaman spiritual yang bersifat personal menjadi suatu pertunjukan yang termodifikasi oleh media. Proses mediasi ini tidak hanya menyuguhkan ilusi partisipasi bagi pemirsa di rumah, seakan mereka turut merasakan gelora religiuitas yang terjadi di lokasi syuting, tetapi juga memunculkan pertanyaan kritis, *apakah pengalaman keagamaan yang otentik masih dapat dipertahankan, atau justru tergerus oleh tuntutan produksi konten yang mengutamakan stimulasi emosional yang instan dan mudah direplikasi?* Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara spiritualitas yang murni dengan komodifikasi iman dalam industri hiburan, di mana unsur-unsur sakral sering kali dikorbankan demi menciptakan daya tarik yang spektakuler namun dangkal secara substansial. Kritik terhadap praktik semacam ini berpusat pada kekhawatiran bahwa esensi transendental dari pengalaman beragama mungkin terdistorsi ketika dikemas sebagai produk konsumsi massa yang lebih mementingkan efek dramatis daripada kedalaman makna.

Fenomena ini secara intrinsik terkait dengan dinamika ekonomi yang berperan sebagai faktor penggerak utama dalam spektakel keagamaan kontemporer. Mekanisme pendanaan menjadi tulang punggung keberlangsungan berbagai acara, di mana sebagian besar bergantung pada kontribusi spontan dari jemaat, sehingga konten khotbah dan setiap segmennya secara strategis dirancang untuk memaksimalkan pengumpulan dana. Konsep donasi atau metafora menabur benih iman telah berevolusi menjadi mekanisme finansial yang tidak terpisahkan dari ritual keagamaan, menciptakan simbiosis antara spiritualitas dan transaksi ekonomi dalam kerangka kapitalisme modern (Einstein et al., 2018). Persaingan dalam menampilkan narasi kesuksesan, baik melalui angka kesembuhan, penambahan jumlah pengikut, maupun gaya hidup mewah para pemimpin rohani telah mendorong produksi konten yang semakin spektakuler dan hiperbolis. Prosesi mukjizat penyembuhan maupun janji kemakmuran duniawi tidak hanya berfungsi sebagai pembuktian kuasa ilahi, tetapi juga sebagai alat legitimasi untuk mempertahankan siklus ekonomi dalam industri media keagamaan ini. Lebih jauh, tekanan untuk terus menghasilkan bukti-bukti empiris keberhasilan menciptakan spiral ekspektasi di kalangan pemirsa, yang pada gilirannya memperkuat siklus produksi konten yang semakin bombastis. Dalam ekosistem ini, nilai-nilai iman secara paradoks berpadu dengan logika pasar, di mana tingkat kesalehan diukur melalui kemampuan finansial dalam berpartisipasi,

sementara kesuksesan pelayanan diukur melalui parameter materialistik. Fenomena ini mencerminkan bagaimana kapitalisme tidak hanya mengkooptasi ruang-ruang sakral, tetapi juga mentransformasikannya menjadi arena pertukaran simbolis yang kompleks, di mana transendensi spiritual dan imperatif ekonomi saling berkelindan dalam hubungan yang saling menguatkan.

Televangelisme dalam penerapannya cenderung mengaburkan batas antara yang sakral dan yang profan secara cukup ekstrem, yaitu dengan mengintegrasikan sepenuhnya estetika budaya populer. Tata panggung, riasan, busana, serta elemen desain visual yang dipakai acapkali menyerupai gaya acara bincang-bincang atau bahkan pertunjukan musik pop. Engell (2025) pernah menyatakan bahwa televisi pada dasarnya berpikir melalui proses asimilasi berkelanjutan dari berbagai muatan ke dalam bentuknya yang khas dan mengalir secara domestik. Dalam konteks ini, televangelisme dapat dikatakan sebagai ilustrasi sempurna dari mekanisme asimilasi tersebut, pesan yang sejatinya abadi justru dikemas dalam format yang sangat temporal dan mengikuti tren televisi kontemporer. Praktik keagamaan yang bersifat sakral berubah menjadi sajian hiburan yang dapat disisipi iklan, di “*channel surfing*”, atau sekadar direkam untuk ditonton di lain waktu. Meskipun pendekatan ini berhasil memperluas cakupan penyebaran ajaran agama, secara bersamaan ia juga mengikis dimensi kesakralan pengalaman religius karena telah menjadi salah satu pilihan dalam menu hiburan pemirsa. Semula dipandang sebagai sesuatu yang ilahi, kini hadir sebagai tontonan spektakuler, mudah diakses, dan disesuaikan dengan preferensi penonton.

Pada segi dampak sosial, agama yang dihadirkan dalam kemasan spektakel ini melahirkan bentuk komunitas baru yang dapat disebut sebagai jemaat imajiner tersebar. Para penonton yang menyaksikan program yang sama merasa menjadi bagian dari suatu komunitas, meskipun interaksi nyata di antara mereka hampir tidak terjadi. Komunitas ini bersifat parasosial dan berporos pada figur televangelis yang muncul di layar. Bruce (2019) mencatat bahwa loyalitas penonton lebih tertuju pada persona di layar ketimbang pada gereja lokal atau denominasi yang seharusnya mereka anut. Hal ini melemahkan otoritas dan kohesi institusi keagamaan tradisional, sebab seseorang dapat merasa terhubung secara spiritual tanpa perlu berpartisipasi secara fisik, sosial, maupun finansial dalam komunitas nyata. Aktivitas menonton pun dianggap sebagai bentuk partisipasi yang memadai. Karenanya, televangelisme tidak sekadar mengubah ritual menjadi tontonan, tetapi juga menggeser konsep keanggotaan dan keterlibatan dalam komunitas beragama. Fenomena ini dalam beberapa hal telah mendahului apa yang kini kita kenal sebagai komunitas daring.

Transfigurasi yang mengarah pada pertunjukan ternyata juga berdampak pada substansi teologis itu sendiri. Untuk mempertahankan daya tarik dan relevansi bagi penonton massal, televangelisme cenderung mereduksi kompleksitas doktrin menjadi formula yang mudah dipahami dan menjanjikan hasil cepat. Teologi kemakmuran (*prosperity gospel*) muncul sebagai ciri khas dari banyak program semacam ini. Di sini, iman diperlakukan mirip instrumen investasi yang diyakini akan menghasilkan keuntungan materi baik itu kesehatan, kekayaan, maupun keberhasilan. Erickson (2022) mendeskripsikan fenomena ini sebagai *speculative theology* berfungsi layaknya iklan yang menjanjikan imbalan di masa depan melalui investasi emosional atau finansial saat ini. Sementara itu, dimensi salib, penderitaan, atau keraguan yang sejatinya fundamental dalam banyak tradisi religius kerap diabaikan karena dianggap tidak menarik dan bertentangan dengan narasi kemenangan yang dramatis. Dalam kerangka ini, ritual tidak lagi berperan sebagai sarana menjumpai Yang Transenden, melainkan berubah menjadi transaksi spiritual di layar kaca, di mana iman ditukar dengan janji berkat yang bersifat divisualisasikan dan dikonsumsi.

Namun, eksistensi agama dalam bentuk spektakel ini bukannya tanpa tentangan. Banyak kalangan dari agama mainstream maupun akademisi mengkritik televangelisme sebagai distorsi terhadap esensi spiritualitas. Mereka berpendapat bahwa ketika agama direduksi

menjadi tontonan, unsur komunitas, tanggung jawab etis, serta kedalaman permenungan dan refleksi menjadi terkikis. Lebih jauh, kasus-kasus skandal moral dan finansial yang melibatkan sejumlah televangelis ternama menjadi cerminan kelam dari model yang menyatukan otoritas agama yang tampak absolut dengan sistem bisnis media ambigu (Bruce, 2019). Skandal-skandal ini menyingkap kontradiksi intrinsik, *bagaimana mungkin seorang pengkhotbah tentang kesucian hidup justru terlibat dalam gaya hidup hedonis dan tidak etis?*. Kritik-kritik tersebut mengisyaratkan bahwa logika spektakel yang menuntut citra sempurna dan narasi tanpa cacat pada akhirnya rentan melahirkan kemunafikan ketika realita di balik layar terkuak.

Pengaruh televangelisme telah menciptakan fenomena budaya yang melintasi batas-batas tradisional denominasi Kristen Evangelikal, menetapkan standar baru dalam representasi keagamaan di media massa. Pola penyajian spektakuler yang khas dari televangelisme ini telah menginspirasi adaptasi serupa di berbagai tradisi keagamaan lain, termasuk dalam program dakwah Islam kontemporer yang kini banyak menampilkan pendakwah karismatik dengan penguasaan media yang baik, didukung oleh tata panggung modern dan elemen visual canggih untuk menciptakan daya tarik audiovisual. Transformasi serupa juga dapat diamati dalam konten-konten spiritual populer seperti horoskop, gerakan *New Age*, atau praktik meditasi yang sama-sama mengadopsi pendekatan produksi media yang terinspirasi televangelisme. Proses ini mengaburkan demarkasi konseptual antara konten keagamaan murni dengan hiburan bernuansa spiritual, keduanya kini harus mematuhi konvensi naratif dan estetika televisi yang sangat dipengaruhi logika industri budaya populer sebagaimana dikemukakan Einstein et al. (2018). Perkembangan ini merepresentasikan perubahan mendasar dalam praktik ritual kontemporer, di mana pengalaman spiritual direkonfigurasi menjadi beragam bentuk pertunjukan media yang dirancang untuk membangkitkan sensasi transendensi, memberikan inspirasi, atau menawarkan ketenangan psikologis, terlepas dari ortodoksi teologis yang mendasarinya. Media televisi dalam konteks ini berfungsi sebagai ruang amalgamasi di mana pluralitas ekspresi spiritualitas mengalami proses komodifikasi, diubah menjadi produk tontonan yang sesuai dengan selera massa dan tuntutan pasar media. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan mediatisasi agama di era modern tetapi juga mengungkap dinamika kompleks antara spiritualitas, teknologi media, dan ekonomi budaya dalam masyarakat kontemporer.

Pada tataran filosofis yang lebih mendalam, fenomena ini mendorong kita untuk merenungkan kembali hubungan antara keaslian (*authenticity*) dan proses mediasi. Televangelisme menciptakan pengalaman religius yang bisa disebut *hyperreal*, yaitu suatu realitas yang terasa lebih nyata daripada kenyataan sebenarnya berkat kecanggihan teknologi produksinya. Apa yang ditampilkan kepada penonton merupakan versi paling ideal dari sebuah ibadah, dilengkapi dengan reaksi penonton studio yang tampak sempurna, tata cahaya yang memukau, serta penyampaian pesan yang terstruktur rapi tanpa gangguan. Sebagaimana dikemukakan Engell (2025), televisi membentuk realitas baru bernama *tele-realitas*, yang berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip khas yang melekat pada medium tersebut. Dalam ruang *tele-realitas* ini, praktik keagamaan mengalami metamorfosis menjadi sesuatu yang segar sekaligus dramatis. Persoalan mendasar yang muncul kemudian, *dapatkah pengalaman spiritual yang dihadirkan melalui mediasi yang sangat terkontrol ini masih dianggap sungguh-sungguh otentik?*, atau, *perluakah makna keaslian itu sendiri diredefinisikan sebagai kemampuan performa media dalam membangkitkan reaksi emosional dan spiritual yang jujur dari audiens, meskipun situasinya jelas-jelas bersifat buatan?*

Maka, dapat dikatakan bahwa kemunculan televangelisme dan fenomena agama sebagai tontonan spektakuler menandai momen penting dalam evolusi komunikasi religius. Fase ini dengan gamblang menunjukkan bagaimana logika kapitalisme mutakhir dan media massa mampu mengambil alih ranah yang konvensionalnya dianggap suci. Ritual keagamaan tidak lagi sekadar diabadikan oleh media, melainkan dirancang khusus untuk dan oleh media itu sendiri. Pengaruh periode ini masih terasa hingga kini, tidak hanya dalam program-program

keagamaan di televisi, tetapi juga dalam estetika dan taktik komunikasi para pendakwah di media sosial serta platform digital lainnya. Estetika yang bersifat personal, dramatis, dan berpusat pada interaksi atau engagement sesungguhnya merupakan penerus langsung dari warisan televangelisme. Memahami era ini menjadi krusial apabila kita ingin mengkaji bagaimana agama dipertunjukkan pada zaman algoritma sekarang, di mana tontonan spektakuler tidak lagi dikendalikan oleh produser televisi, melainkan oleh logika viralitas dan ekonomi perhatian yang jauh lebih rumit dan terdesentralisasi. Di tengah segala kontroversinya, televangelisme mengajarkan bahwa dalam masyarakat yang didominasi media, agama yang ingin didengar dan diperhitungkan harus pula pandai menghadirkan diri sebagai tontonan yang menarik.

### C. Strategi Umat Beragama Mengkomunikasikan Pesan Ajaran

Strategi komunikasi yang dikembangkan oleh komunitas religius pada masa media konvensional, seperti siaran radio dan televisi analog tidaklah terbentuk secara instan. Lahir dari proses negosiasi yang mendalam antara keinginan menyampaikan pesan dengan keterbatasan teknis, regulasi, serta nilai-nilai budaya yang melekat pada medium tersebut. Dalam konteks radio, khususnya model penyiaran publik ala BBC, pendekatan yang dominan cenderung bersifat edukatif dan khidmat. Seperti dicatat Dinwiddie (2016), strategi penyiaran religius BBC dirancang dengan visi menginformasikan, mendidik, sekaligus mengangkat pendengar dalam kerangka layanan publik. Manifestasinya terwujud dalam format yang terstruktur dan formal, semisal siaran langsung khotbah lengkap dari gereja, renungan pendek (epilog), atau sandiwara radio bernuansa moral. Gaya retorika yang dipakai bersifat satu arah dan otoritatif, mengadopsi dinamika mimbar dimana pendeta bertindak sebagai sumber kebenaran mutlak, sementara umat berperan sebagai pendengar pasif. Keunikan radio dimanfaatkan melalui teknik vokal yang bijak dan tenang, meski tetap menjaga jarak hierarkis. Pendekatan ini bertujuan mempertahankan wibawa agama sekaligus menghindari sensasionalisme, sambil memperkuat peran agama sebagai penstabil sosial di tengah arus modernisasi.

Perpindahan ke medium televisi mengharuskan perumusan strategi yang lebih kompleks, terutama karena melibatkan dimensi visual yang sebelumnya absen dalam radio. Pada fase awal, muncul strategi dokumentasi yang berusaha mentransfer ibadah utuh ke studio atau gereja menggunakan kamera statis. Tujuannya adalah memungkinkan partisipasi bagi mereka yang terbaring sakit atau terisolasi secara geografis. Namun, strategi ini dinilai kurang efektif karena tidak mempertimbangkan karakteristik esensial televisi. Sebagaimana dijelaskan Engell (2025), televisi mempersepsikan realitas sebagai aliran gambar dan narasi yang terfragmentasi, bukan representasi utuh dan kontinu. Kesadaran ini mendorong evolusi strategi penyiaran dengan format acara mulai dipecah menjadi segmen-segmen pendek. Simbol-simbol religius seperti salib, lilin, atau kitab suci sengaja disisipkan secara strategis. Teknik penyutradaraan pun berkembang dengan menyertakan *cutaway* wajah jemaat yang tersentuh atau grafis teks untuk menegaskan pesan khotbah. Retorika visual kini tidak hanya mengandalkan kata-kata, melainkan juga memanfaatkan komposisi gambar dan teknik penyuntingan yang dirancang untuk memengaruhi emosi pemirsa. Karenanya, badah tidak lagi sekadar didokumentasikan, melainkan dibangun ulang secara visual untuk menciptakan dampak yang lebih kuat bagi penonton.

Strategi yang paling berdampak sekaligus menuai berbagai pendapat pro dan kontra sesungguhnya berakar dari dunia siaran komersial televisi di Amerika, yaitu pendekatan hibridisasi dan personalisasi. Figur televangelis semacam Oral Roberts atau Pat Robertson memahami bahwa demi menarik minat pemirsa, konten religius perlu dipadukan dengan format hiburan yang sedang digemari, semisal *talk show*, *variety show*, maupun program infotainment.

Mereka kemudian menerapkan standar produksi profesional lengkap dengan set yang megah serta iringan musik yang dinamis. Transformasi juga terlihat pada gaya komunikasi yang digunakan. Esslin (2017) pernah mengemukakan bahwa televisi mentransformasikan komunikasi menjadi suatu drama, dimana setiap figur yang muncul sesungguhnya berperan sebagai aktor. Dalam konteks ini, para televangelis menjelma menjadi protagonis dalam drama keagamaan mereka sendiri. Mereka mengemas pesan menggunakan narasi personal, mengisahkan lika-liku kehidupan, tantangan, hingga pencapaian dengan maksud menciptakan keterikatan emosional yang mendalam. Seruan untuk bertobat maupun beriman pun dikemas dalam alur cerita yang memikat, dilengkapi dengan tensi dramatis serta penyelesaiannya. Meski disampaikan secara masif, metodenya terasa intim, sang pengkhotbah menyapa jutaan orang, namun seakan-akan berbicara secara privat dengan setiap individu yang menyaksikan dari rumah mereka.

Gambar 2. Salah Satu Adegan Penyaliban dalam Serial TV “*Good Omens*” dengan Judul *Hard Times*



Sumber: Erickson (2022)

Aspek strategis lainnya adalah teknik interaktivitas semu. Walaupun media penyiaran pada dasarnya bersifat linier, televangelisme sukses menghadirkan ilusi interaksi dan komunitas *real-time*. Hal ini diwujudkan melalui berbagai metode, seperti menayangkan surat dan testimoni pemirsa secara langsung, menyediakan saluran telepon untuk konseling atau do'a yang kemudian ditayangkan *live*, atau mengadakan acara pengumpulan dana dimana donasi masuk melalui telepon sambil menampilkan perkembangan terkini di layar. Fenomena ini bagian dari televisi spekulatif yang menghasilkan rasa kedekatan dan kebersamaan sebagai komoditas yang dapat dikonsumsi (Erickson, 2022). Retorika yang dipakai menekankan aspek keterlibatan dan momentum, contohnya dengan seruan seperti “*Hubungi kami sekarang!*” atau “*Kisah Anda bisa menjadi inspirasi!*”. Taktik ini cerdas dalam menyiasati keterbatasan medium satu arah dengan menyajikan umpan balik simbolis, mengubah pemirsa yang awalnya pasif menjadi partisipan dalam sebuah acara yang terasa dinamis dan interaktif. Secara bersamaan, hal ini juga memperkuat ikatan emosional dan finansial mereka terhadap program tersebut.

Di samping format televangelisme yang bersifat formal, terdapat pula strategi yang dapat dikategorikan sebagai naturalisasi dan infiltrasi. Dalam pendekatan ini, unsur religius tidak hanya disampaikan melalui program khusus, melainkan diintegrasikan ke dalam konten televisi biasa. Contohnya dapat dilihat pada tayangan spesial hari raya keagamaan di stasiun televisi umum, diskusi tema moral dalam drama atau sitkom, maupun keterlibatan figur agama sebagai



narasumber dalam program berita dan diskusi. Strategi ini bertujuan menampilkan agama sebagai elemen yang wajar dan alami dalam lanskap budaya televisi (Einstein et al., 2018). Penyampaiannya pun tidak lagi bersifat eksplisit dan dogmatis, melainkan lebih implisit serta berbasis nilai-nilai. Konsep seperti pengampunan, harapan, atau prinsip etika disisipkan secara halus dalam alur cerita yang menghibur. Agama telah meresap ke alam bawah sadar penonton tanpa kesan menggurui, sebuah pendekatan yang lebih subtil dan potensial lebih efektif, khususnya di tengah masyarakat modern yang semakin plural dan sekuler.

Secara lebih luas, kajian terhadap berbagai strategi komunikasi religius di era klasik ini memberikan banyak *insight* berharga. Para aktor keagamaan, mulai dari produser BBC hingga televangelis Amerika menyadari bahwa setiap medium memiliki *grammar* atau struktur bahasanya sendiri. Keberhasilan penyampaian pesan tidak hanya ditentukan oleh konten, tetapi juga oleh pengemasan yang sesuai dengan karakteristik medium, mulai dari teknik audio yang khas di radio, visualisasi dramatis di televisi, narasi personal, hingga ilusi partisipasi kolektif. Penyiar agama paling sukses adalah mereka yang sepenuhnya memahami dan mengadaptasi konvensi medium, bukan yang berusaha melawannya (Bruce, 2019). Dampak dari eksperimen strategis ini masih terlihat hingga kini. Format *talkshow* religius, testimoni visual dramatis, serta pengembangan *personal branding* pendakwah di media sosial merupakan evolusi dari inovasi yang dimulai di era radio dan televisi. Fondasi ini membentuk etos komunikasi keagamaan kontemporer bahwa untuk didengar dan diterima, agama harus mampu menampilkan diri sebagai tontonan yang menarik dan relevan secara personal.

## BAB V

### KOMUNIKASI DALAM POSTMODERNITAS SEBAGAI FRAGMENTASI IDENTITAS RELIGIUS

#### A. Komunikasi dalam Situasi Religius Postmodernitas

Situasi komunikasi agama di era postmodern memperlihatkan fenomena utama berupa keruntuhan narasi-narasi besar (*grand narratives*) yang sebelumnya menjadi pondasi kokoh dan memiliki otoritas kuat dalam membentuk keyakinan serta makna. Narasi seperti kemajuan sejarah melalui ilmu pengetahuan, dogma agama yang dianggap absolut, atau ideologi politik totaliter kini semakin sulit untuk mempertahankan klaim kebenaran mutlak di tengah keragaman pengalaman dan perspektif yang muncul dari proses globalisasi serta perkembangan media yang masif. Kramer (2019) dalam karyanya menggambarkan kondisi postmodern sebagai ketidakpercayaan terhadap metanarasi, yakni suatu sikap skeptis yang mendalam terhadap klaim kebenaran yang mengaku mampu menjelaskan segalanya secara universal. Dalam konteks keagamaan, hal ini berdampak pada melemahnya otoritas tunggal, baik itu kitab suci, hierarki keagamaan, maupun tradisi yang dahulu dianggap mutlak, dan kini tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Agama-agama institusional yang selama ini bertumpu pada narasi besar seperti penciptaan, keselamatan, dan tatanan moral final, kini harus beroperasi di tengah medan sosial yang semakin mendorong pemahaman kebenaran plural, konstruktif, bahkan sangat personal. Ini menjadi tantangan serius bagi komunikasi agama, *bagaimana menyampaikan pesan-pesan keagamaan ketika fondasi bersama yang dahulu stabil kini mulai memudar atau bahkan hilang?*

Kompleksitas ini semakin meningkat dengan hadirnya ekologi media digital dan fenomena hiperrealitas. Media kontemporer tidak lagi sekadar merefleksikan realitas, melainkan secara aktif menciptakan berbagai realitas yang kompleks, berlapis, dan seringkali bersifat simulatif. Dalam konteks ini, pesan keagamaan hanyalah salah satu dari sekian banyak konten yang beredar, setara dengan iklan komersial, berita sensasional, atau hiburan belaka. Stout (2013) mengemukakan bahwa media tidak lagi berfungsi sebagai saluran pasif, melainkan telah menjadi lingkungan yang membentuk pemahaman dan praktik keagamaan. Di tengah dunia digital yang terfragmentasi ini, tidak ada lagi pusat otoritas yang mampu memusatkan perhatian publik. Sebaliknya, yang muncul adalah semacam multiverse naratif di mana berbagai varian Islam, Kristen, spiritualitas *New Age*, hingga ateisme hadir secara berdampingan dengan klaim-klaimnya masing-masing, sementara setiap individu mengonsumsinya secara selektif. Komunikasi agama saat ini harus berhadapan dengan apa yang Jean Baudrillard sebut sebagai *hyperrealitas*, di mana tanda-tanda dan simulakra yang tidak memiliki referensi asli, melainkan hanya reproduksi justru kerap memiliki daya pengaruh lebih besar daripada realitas yang seharusnya diwakilinya. Lantas, *bagaimana mungkin kita dapat membicarakan Yang Transenden jika yang sakral itu sendiri sering direduksi menjadi sekadar efek visual Instagram yang menarik atau bahkan meme penuh ironi?*

Akibat paling nyata dari kolapsnya narasi besar ialah timbulnya relativisme epistemologis dan kegoncangan otoritas. Ketika kebenaran metafisik absolut tidak lagi bisa dijadikan pegangan, klaim-klaim kebenaran menjadi bergantung pada sudut pandang, latar budaya, atau komunitas penafsir. Dalam hal ini, Pace (2016) mengemukakan bahwa dalam kondisi semacam ini, agama-agama dipaksa beralih dari pola monolog ke pola dialog. Mereka tidak bisa lagi sekadar menyatakan “*Demikian firman Tuhan*” dengan mengharapkan kepatuhan mutlak. Sebaliknya, mereka harus terlibat dalam ruang percakapan yang lebih terbuka, siap diuji, dibandingkan, serta dikaitkan dengan konteks klaim kebenarannya. Otoritas

tidak lagi diperoleh secara instan melalui posisi formal atau kelembagaan, melainkan harus diperjuangkan lewat persuasi, daya pikat personal, serta kesesuaian dengan dinamika wacana publik. Hal ini tentu menjadi ujian berat bagi agama-agama tradisional yang selama ini bersifat hierarkis dan monologis. Komunikasi berubah menjadi proses negosiasi makna yang tiada henti, di mana pesan keagamaan harus terus-menerus ditafsirkan ulang dan diverifikasi kembali di hadapan khalayak yang kritis dan memiliki akses pada beragam sumber pengetahuan alternatif.

Di sisi lain, era postmodern tidak hanya membawa kesulitan tetapi juga membuka peluang baru dalam mengekspresikan pengalaman spiritual. Runtuhnya narasi besar justru membebaskan individu dari kewajiban menganut satu sistem kepercayaan yang kaku dan tertutup. Muncul ruang bagi apa yang disebut *bricolage* spiritual, yakni praktik merangkai dan mengombinasikan unsur-unsur dari berbagai tradisi agama, filsafat, psikologi, hingga budaya populer untuk menciptakan sistem makna personal yang relevan. Di banyak masyarakat modern, identitas keagamaan lebih berkaitan dengan penyusunan narasi pribadi dari berbagai sumber daripada sekadar menjadi bagian dari satu tradisi tunggal (Lehmann, 2021). Karenanya, hakikat komunikasi keagamaan pun berubah, dari sekadar penyampaian doktrin menjadi penyediaan kumpulan simbol dan praktik yang dapat dipilih, dimodifikasi, dan dikombinasikan oleh para pencari spiritual. Pendakwah, literatur, atau konten keagamaan yang efektif bukanlah yang menuntut loyalitas mutlak, melainkan yang berfungsi sebagai sumber daya lentur dalam proyek pembentukan diri (*self-making*) ini.

Salah satu karakteristik yang sering muncul dalam era postmodern adalah kuatnya pengaruh estetika dan penampilan eksternal. Dalam suatu budaya yang sangat terfokus pada pencitraan visual dan gaya, pengalaman keagamaan kerap dinilai berdasarkan daya tarik visualnya, kesan yang dihasilkan, atau sejauh mana pengalaman itu dirasakan otentik secara pribadi. Agama dalam situasi ini dapat berubah menjadi sekadar bagian dari gaya hidup, semacam label identitas, atau bahkan komponen dari penyusunan citra diri secara estetis di platform media sosial. Dalam postmodernitas, kedalaman telah tergeser oleh permukaan, dan sejarah pun tercerabut oleh sebuah masa kini yang abadi dari gambar-gambar (Kramer, 2019). Fenomena semacam ini menciptakan problem komunikasi yang cukup pelik, *bagaimana membahas konsep-konsep seperti kedalaman teologis, komitmen berkelanjutan, serta pengorbanan etis dalam sebuah budaya yang lebih mengutamakan kepuasan instan, kemudahan, dan penampilan semata?*. Dalam realitas seperti ini, komunikasi agama tidak jarang tergoda untuk mengadopsi logika permukaan, misalnya dengan menyajikan pesan-pesannya dalam kemasan yang menarik, menghibur, dan mudah dikonsumsi, namun risiko yang muncul adalah pesan tersebut kehilangan inti tantangan radikalnya yang seharusnya mampu mengubah hidup. Sebagai contoh, ritual keagamaan bisa direduksi menjadi sekadar pertunjukan yang *instagramable*, hanya untuk dibagikan di media sosial, sehingga aspek komunal dan transformasi spiritual yang mendalam menjadi terabaikan.

Pada intinya, komunikasi dalam ranah religius postmodern menghadapi paradoks dan ketegangan yang tampaknya tiada henti. Di satu sisi, terdapat kerinduan mendalam akan makna, kebersamaan, dan transendensi yang sejati. Namun, kerinduan itu harus diungkapkan dalam konteks yang dipenuhi relativisme, fragmentasi media, dan budaya konsumsi spiritual yang semakin meluas. Tantangan mendasarnya adalah merancang komunikasi yang mampu mengakui pluralitas dan keraguan khas postmodern tanpa terjebak dalam apatisme relativistik yang tetap dapat terlibat dalam wacana publik tanpa kehilangan esensi pesan yang hendak disampaikan, serta mampu memanfaatkan bahasa dan estetika kontemporer tanpa terjajah olehnya. Agama di masa kini mungkin perlu menemukan bentuk komunikasi yang lebih menyerupai tawaran makna dalam dialog yang terus terbuka, bukan sebagai jawaban mutlak yang bersifat monolog. Kemampuan untuk hidup dalam ketegangan semacam inilah yang tampaknya akan menentukan relevansi agama-agama dalam lanskap kebudayaan yang terus

berubah. Pada akhirnya, hal ini sekaligus mengantarkan kita pada pembahasan bagaimana identitas religius yang cair dan spiritualitas non-institusional muncul sebagai respons langsung terhadap situasi komunikasi yang kompleks ini.

## **B. Komunikasi dan Transformasi Identitas Religius**

Perubahan identitas keagamaan di zaman postmodern memang erat kaitannya dengan konsep *pastiche* dalam budaya media. Berbeda dengan parodi yang umumnya mengandung kritik, *pastiche* lebih menekankan pada penggabungan gaya, lambang, dan cerita dari beragam referensi tanpa pretensi orisinalitas atau konsistensi sikap ironis. Dalam lingkungan media yang begitu hiruk pikuk, kita kerap menjumpai fenomena semacam ini, misalnya visual dewa-dewi Hindu yang muncul dalam karya seni populer, ayat suci Al-Qur'an yang dibagikan bersandingan dengan kutipan pengembangan diri, atau praktik meditasi Buddhis yang diadaptasi menjadi fitur aplikasi kesehatan. Budaya postmodern ibarat permainan penanda yang terlepas dari konteks aslinya, lalu digabungkan secara bebas ke dalam bentuk-bentuk baru (Kramer, 2019). Interaksi dengan media tidak lagi bersifat pasif, melainkan berperan aktif dalam membentuk konstruksi diri. Identitas religius kini tidak lagi diterima secara mentah sebagai warisan keluarga atau kelompok, tetapi lebih sebagai hasil seleksi individu atas berbagai tanda dan simbol keagamaan yang tersaji di layar perangkat mereka. Agama yang dahulu mungkin dianggap sebagai takdir, kini menjelma menjadi proyek pribadi, di mana setiap orang berperan sebagai perangkai yang menyusun mozaik keyakinannya sendiri dari fragmen-fragmen budaya yang tersebar secara digital dan global.

Media digital telah merevolusi praktik *pastiche* spiritual dengan intensitas dan kemudahan yang belum pernah terwujud dalam era sebelumnya, menciptakan transformasi mendalam dalam cara individu mengonsumsi dan mengonstruksi identitas keagamaan. Platform seperti *Instagram* dan *YouTube* tidak hanya berperan sebagai repositori tidak terbatas bagi konten religius, melainkan juga berfungsi sebagai arena kompleks di mana berbagai tradisi spiritual, mulai dari ajaran Rabinik, filsafat Zen, hingga teologi Kristen kontemporer bercampur secara *fluid*. Algoritma rekomendasi tidak sekadar memperluas akses terhadap beragam simbol keagamaan, tetapi juga mengaburkan batas-batas tradisional antar-sistem keyakinan, memfasilitasi eklektisisme yang sering kali bersifat acak dan tidak sistematis. Fenomena ini mengarah pada situasi paradoks di mana media tidak lagi menjadi saluran pasif bagi transmisi nilai-nilai keagamaan, melainkan berubah menjadi ruang konstruksi aktif di mana identitas spiritual dibangun, ditampilkan, dan dinegosiasikan secara performatif (Stout, 2013). Dalam konteks ini, identitas keagamaan individu menjadi semakin hibrid dan kontekstual, dimanifestasikan melalui praktik-praktik yang bersifat modular, seperti menerapkan teknik *mindfulness* Buddhisme untuk mengatasi kecemasan, berpartisipasi dalam ritual Natal sebagai bentuk pelestarian ikatan keluarga, atau menginternalisasi etos kerja Calvinis untuk mendorong ambisi profesional. Proses performativitas ini semakin diperkuat melalui kurasi konten digital, mulai dari unggahan, *like*, hingga *follow* yang tidak hanya merefleksikan identitas religius yang cair, tetapi juga secara aktif membentuknya dalam siklus umpan balik yang terus-menerus. Maka, identitas keagamaan dalam era digital bukanlah entitas statis atau final, melainkan proyek dinamis yang terus berevolusi melalui interaksi konstan antara agensi individu dan struktur algoritmik platform media.

Konsekuensi dari identitas *pastiche* ini adalah lahirnya suatu bentuk hibriditas religius yang bersifat baru dan sangat personal. Perlu dipahami bahwa hal ini bukanlah sinkretisme dalam artian percampuran sistematis antara dua sistem kepercayaan. Melainkan yang terjadi adalah seleksi elemen-elemen tertentu yang dianggap bermakna atau bermanfaat bagi kehidupan individu. Pace (2016) mengemukakan fenomena ini sebagai dampak dari agama yang berfungsi sebagai medium komunikasi dalam pasar makna yang bebas dan terbuka.

Ketika komunikasi keagamaan lepas dari kendali institusi sentral, maka pesan-pesan agama tersebut berubah menjadi modul-modul yang dapat dirakit kembali oleh individu sesuai kebutuhan personalnya. Sebagai ilustrasi, seseorang mungkin menyatakan diri sebagai penganut Katolik yang rutin berlatih yoga dan tertarik mempelajari Kabbalah, atau muslim yang menerapkan prinsip stoisisme untuk menenangkan pikiran. Identitas semacam ini mungkin tampak paradoksal dari perspektif ortodoksi, tetapi sebenarnya cukup konsisten jika kita memahami logika narasi diri pascamodern yang lebih menekankan pengalaman dan utilitas pribadi daripada ketaatan doktriner. Dalam kerangka ini, agama mengalami pergeseran dari sistem kebenaran absolut menjadi sumber daya untuk kehidupan yang bermakna.

Namun, transformasi semacam ini tentu tidak lepas dari persoalan maupun kecemasan. Identitas *pastiche* justru dapat memunculkan perasaan tidak autentik dan keterpisahan. Ketika simbol-simbol sakral dilepaskan dari konteks komunal, historis, serta praktik disipliner yang memberikan kedalaman makna, simbol tersebut berpotensi menjadi komoditas hampa atau ornamen spiritual belaka. Lehmann (2021) mengobservasi bahwa meskipun hibriditas menawarkan kebebasan, juga dapat menciptakan perasaan kehilangan akar dan kerinduan akan komunitas yang autentik dan konkret. Individu yang mengadopsi pendekatan ini mungkin merasa seperti pelancong di dunia spiritual, menjelajahi berbagai tradisi tanpa komitmen mendalam atau pemahaman utuh terhadap satu tradisi tertentu. Lebih jauh, identitas *pastiche* cenderung bersifat sangat personal dan kurang teruji dalam konteks sosial maupun tanggung jawab komunal. Tingkat subjektivitas yang tinggi ini seringkali melemahkan kemampuannya untuk membangun solidaritas atau mengkritisi ketidakadilan struktural. Karena itu, muncul tantangan komunikasi yang kompleks, *bagaimana menghargai keragaman dan kreativitas individu tanpa mengabaikan kedalaman transformasi dan ikatan sosial yang menjadi esensi dari banyak tradisi keagamaan?*

Media sosial ternyata memiliki peran ambivalen dalam mempersulit sekaligus mempermudah ketegangan seputar identitas keagamaan. Di satu pihak, platform digital ini menjadi panggung utama bagi pertunjukan identitas *pastiche* yang dibentuk secara sengaja melalui konten terpilih. Namun di pihak lain, ruang digital tersebut juga memunculkan komunitas interpretatif baru yang berkembang di sekitar berbagai bentuk hibriditas. Contoh nyata dapat dilihat pada grup *Facebook* semacam “*Spiritual but Not Religious*”, “Muslimah Pecinta K-Pop dan Tafsir Feminis”, serta “Kristen yang Mempraktikkan Meditasi”. Dalam komunitas-komunitas seperti ini, orang dengan identitas campuran atau hibrid menemukan wadah untuk mendapat pengakuan sekaligus melakukan diskusi. Di ruang interaktif ini, mereka bersama-sama merundingkan kembali makna dari perpaduan keyakinan yang kemudian melahirkan norma baru serta otoritas horizontal antaranggota. Kramer (2019) mengidentifikasi fenomena ini sebagai *tribalisme postmodern*, di mana ikatan sosial tidak lagi dibangun melalui tradisi turun temurun, melainkan berdasar kesamaan pilihan dan gaya hidup. Komunikasi dalam kelompok semacam ini bersifat dialogis dan dibangun bersama, sangat berbeda dengan model komunikasi satu arah yang khas pada lembaga agama tradisional. Dalam konteks ini, identitas tidak hanya menjadi bahan konsumsi, tetapi juga terus diperdebatkan dan diperbaharui melalui interaksi sosial yang dinamis.

Secara ringkas, transformasi dan komunikasi identitas religius dalam kerangka *pastiche* media menandai pergeseran paradigma, dari identitas yang ditentukan (*ascribed*) menjadi identitas yang dibentuk (*achieved*). Pergeseran ini dipicu oleh melimpahnya simbol-simbol keagamaan di media serta hancurnya otoritas tunggal yang dulu mengendalikan makna-makna tersebut. Akibatnya, lanskap spiritual yang muncul menjadi sangat personal, cair, dan kreatif, meskipun tidak bebas dari risiko kerapuhan, seperti penyempitan makna, komodifikasi, serta kemungkinan isolasi. Sebagaimana ditegaskan Pace (2016), agama dalam konteks ini lebih menyerupai sebuah bahasa yang dipelajari individu secara unik dan tak lazim dibandingkan sebuah naskah baku yang harus dibaca. Oleh karena itu, tantangan komunikasi keagamaan ke

depan adalah bagaimana berinteraksi secara berarti dengan para *bricoleur* spiritual ini, bukan dengan mengkritik atau menolak fleksibilitasnya. Sebaliknya, diperlukan upaya untuk menawarkan kedalaman pengalaman, komunitas, dan kebijaksanaan autentik yang dapat menyatu dengan pencarian makna mereka. Hal ini sekaligus membuka peluang untuk transformasi dan komitmen yang melampaui sekadar logika konsumsi. Pemahaman semacam ini memberikan landasan bagi analisis lebih mendalam tentang manifestasi nyata kebangkitan spiritual non-institusional sebagai hasil akhir dari proses transformasi identitas tersebut.

### C. Kebangkitan Spiritual Non-Institusional

Kebangkitan spiritualitas yang tidak terikat pada non-institusional sering dikategorikan dalam istilah seperti *New Age*, *Spiritual But Not Religious* (SBNR), atau *wellness spirituality* dapat dipandang sebagai dampak alami dari fragmentasi identitas religius di era postmodern. Fenomena ini bukan sekadar penolakan terhadap agama terstruktur, melainkan lebih pada transformasi mendasar terhadap pusat dan otoritas pengalaman transendental. Sementara agama konvensional menempatkan otoritasnya di luar individu melalui kitab suci, struktur hierarkis, atau adat spiritualitas non-institusional justru memindahkan fokus tersebut ke ranah internal, pengalaman subjektif, emosi pribadi, dan otonomi individu menjadi tolak ukur utama. Dalam konteks ini, yang sakral berubah menjadi bahasa yang sangat personal, bukan lagi ditafsirkan oleh para pendeta, melainkan oleh kompas emosional dan pengalaman pribadi individu itu sendiri (Pace, 2016). Komunikasi religius pun mengalami pergeseran fundamental, tidak lagi terbatas pada penyebaran doktrin dari lembaga kepada jemaat, tetapi menjadi pertukaran pengalaman dan sumber daya antarindividu yang mencari pemaknaan. Pasar spiritual menjadi sangat demokratis sekaligus terpecah, menawarkan beragam produk mulai dari batu penyembuhan, platform meditasi digital, hingga program yoga, di mana setiap orang bebas memilih dan mengombinasikan sesuai keinginan pribadi.

Media kembali memainkan peran sentral sebagai saluran sekaligus penguat bagi spiritualitas yang sangat personal ini. Ruang digital tidak hanya menghubungkan orang dengan berbagai ajaran, tetapi juga menciptakan wadah di mana spiritualitas individu dapat dipamerkan, divalidasi, dan dinikmati dalam lingkup sosial. *Instagram* dipenuhi kutipan inspiratif dari beragam tradisi, *TikTok* menjadi wadah penyampaian tips spiritual secara ringkas, sementara podcast menyajikan pembahasan mendalam tentang perjalanan spiritual. Stout (2013) menyebut bahwa media kontemporer memfasilitasi pasar kepercayaan yang mengemas spiritualitas sebagai komoditas, diberi merek, dan dikonsumsi sebagai bagian dari gaya hidup yang dirancang secara sadar. Di pasar ini, unsur-unsur dari tradisi Timur seperti Buddhisme dan Hindu dipadukan dengan psikologi humanis, ekologi, dan fisika kuantum, membentuk narasi unik tentang kesadaran, holisme, dan aktualisasi diri. Personalisasi spiritual terjadi secara mendalam seseorang bisa berlangganan ramalan horoskop harian, mengikuti kelas daring bersama dukun urban, atau menggunakan aplikasi untuk melatih *mindfulness*, semuanya tanpa perlu mengunjungi tempat ibadah manapun.

Karakteristik utama kebangkitan spiritual ini terletak pada fokus terhadap penyembuhan dan pengaktualisasian diri. Dalam konteks spiritualitas yang tidak terikat lembaga formal, diskursus mengenai dosa, penghakiman akhir, atau kepatuhan pada hukum ketuhanan jarang ditemui. Sebaliknya, pusat perhatian lebih tertuju pada proses pemulihan (*healing*), upaya mencapai ketenangan jiwa, optimalisasi potensi pribadi, serta penciptaan harmoni hidup. Kramer (2019) bahkan mengidentifikasi gejala ini sebagai ciri postmodernitas, di mana proyek diri menggantikan proyek keselamatan. Konsep-konsep transendental sering kali didefinisikan menjadi istilah seperti energi kosmis atau kesadaran universal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup saat ini. Komunikasi spiritual dalam paradigma ini bersifat sangat praktis dan berorientasi hasil. Contohnya, praktik meditasi dipromosikan dengan janji

dapat meredakan kegelisahan, dan kristal diperdagangkan dengan klaim dapat mendatangkan kemujuran. Intinya, spiritualitas harus memberikan dampak konkret dan menimbulkan rasa nyaman. Pendekatan seperti ini cukup menarik bagi masyarakat perkotaan modern yang kerap menghadapi tekanan psikologis, kegalauan eksistensial, dan kerinduan akan makna dalam kehidupan yang sangat duniawi dan materialistik.

Di sisi lain, komersialisasi spiritualitas non-institusional ini tidak lepas dari berbagai kritik pedas. Banyak pengamat memandang fenomena ini sebagai manifestasi kapitalisme spiritual, sebuah kondisi di mana pencarian makna hakiki justru dieksploitasi demi keuntungan ekonomi belaka. Industri *wellness* global yang bernilai miliaran dolar dengan berbagai produk seperti retreat eksklusif, perlengkapan ritual mahal, hingga program daring berbayar semakin mempertegas dilema ini. Lehmann (2021) pernah mempertanyakan secara kritis, *apakah dialog autentik tentang yang sakral masih mungkin tercipta ketika pertukaran spiritual terutama dimediasi melalui transaksi pasar dan pemasaran influencer?*. Kritik lain juga menyoroti aspek individualisme yang berlebihan, spiritualitas yang terlalu terpusat pada diri sendiri berpotensi mengabaikan dimensi kemasyarakatan, tanggung jawab sosial, dan keadilan struktural. Pada akhirnya, bisa berubah menjadi pelarian individual dari problem publik, sebuah bentuk perawatan diri yang terisolasi, bukan seruan untuk perubahan kolektif. Jika durenungkan, ketika spiritualitas menjelma menjadi komoditas yang dikonsumsi secara privat, ia cenderung kehilangan daya profetik untuk mengkritik sistem yang mapan atau membangun solidaritas yang mendalam.

Walau tidak berada di bawah naungan non-institusional, gejala ini pada dasarnya tetap memunculkan komunitas-komunitas baru yang berbasis pada jejaring dan kesamaan minat. Komunitas-komunitas tersebut tidak terikat oleh batasan wilayah atau doktrin tertentu, melainkan terhubung melalui keserupaan minat dan aktivitas yang dilakukan. Misalnya dapat berupa kelompok meditasi yang bertemu secara langsung, forum *online* seputar astrologi atau perkumpulan pembaca literatur spiritual tertentu. Dalam komunitas seperti ini, struktur kepemimpinan umumnya fleksibel dan berbasis pada meritokrasi, penghargaan diberikan berdasarkan pengalaman pribadi, pengetahuan yang diungkapkan, atau keterampilan memandu kegiatan, bukan melalui pengangkatan formal atau legitimasi kelembagaan. Konsep semacam ini oleh Pace (2016) disebut sebagai otoritas keagamaan cair yang memang khas dalam masyarakat jejaring. Pola komunikasi yang terbentuk bersifat setara, melibatkan partisipasi aktif, dan kerap bersifat eksploratif. Namun, relasi yang terjalin dalam komunitas semacam ini pada umumnya lebih longgar dan bersifat sementara dibandingkan dengan ikatan dalam tradisi keagamaan mapan. Anggota dapat dengan leluasa bergabung atau keluar dari komunitas tersebut, sementara keterikatan mendalam jarang terjadi. Hal ini menggambarkan sifat postmodern dari spiritualitas itu sendiri, yakni terdapat keterlibatan tetapi tidak bersifat kaku secara mendalam pada momen tertentu, namun selalu terbuka untuk fase pencarian berikutnya.

Secara garis besar, munculnya spiritualitas non-institusional dengan keyakinan yang dapat disesuaikan ini dapat dilihat sebagai manifestasi sekaligus tanggapan terhadap kondisi komunikasi di era postmodern. Gejala ini timbul sebagai hasil dari terfragmentasinya pasar makna, melemahnya otoritas konvensional, serta hasrat manusia akan makna yang kini harus diperoleh melalui media konsumsi dan usaha pengembangan diri. Fenomena ini secara simultan memuaskan sekaligus menyingkap paradoks dalam postmodernitas, keinginan akan pengalaman autentik di tengah budaya yang sepenuhnya terkomodifikasi. Ia menawarkan kebebasan, keluwesan, serta makna personal yang sering kali sulit diperoleh dalam agama terinstitusi. Namun di sisi lain, hal ini juga memunculkan pertanyaan kritis mengenai kedalaman ajaran, akuntabilitas, dan keberlangsungan spiritualitas yang dikonsumsi secara individual. Memahami dinamika tersebut sesungguhnya penting, karena fenomena ini bukan merupakan titik akhir perjalanan spiritual, melainkan sebuah fase baru dalam sejarah panjang komunikasi keagamaan. Fase ini juga mempersiapkan kita untuk menelaah lebih jauh

bagaimana agama-agama tradisional akan bernegosiasi dan beradaptasi dalam lingkungan digital serta algoritmik yang semakin kompleks di masa mendatang.



## BAB VI

### DIGITALISASI & CYBERSPACE: BAGAIMANA SITUS PERSUASI DALAM RITUAL KEAGAMAAN?

#### A. Internet sebagai Situs Persuasi Religius dan Ritual Keagamaan

Internet telah mengalami evolusi yang cukup drastis, berubah dari sekadar infrastruktur penyedia data menjadi sebuah wadah yang kompleks untuk praktik persuasi dan ekspresi religius. Ruang digital saat ini tidak lagi berfungsi sebagai medium pasif, melainkan telah menjelma menjadi panggung tempat ritus-ritus keagamaan dijalankan, dirasakan, serta dimaknai secara berbeda. Sebagai ilustrasi, kegiatan seperti salat berjamaah via *Zoom*, tayangan langsung ibadah dari rumah ibadah, atau kuliah agama yang ditampilkan di platform daring telah menjadi gejala yang melintasi batasan fisik dan temporal. Proses digitalisasi menghasilkan suatu dimensi ritual baru yang bersifat immaterial namun sangat terhubung, mengusik pemahaman konvensional tentang kehadiran yang sakral (Isetti et al., 2020). Pada ranah ini, elemen persuasi tidak hanya bertumpu pada retorika lisan, tetapi juga pada kapasitas untuk menciptakan pengalaman kebersamaan melalui antarmuka digital. Konteks ritual pun mengalami pergeseran, altar dan mimbar fisik beralih ke dalam *frame* kamera, sementara umat yang hadir secara fisik berbaur dengan partisipan virtual membentuk suatu komunitas hibrida yang terasa maya namun berdampak nyata.

Siaran langsung ibadah merepresentasikan transformasi signifikan dalam praktik keagamaan kontemporer, di mana teknologi digital memungkinkan partisipasi dalam ritual sakral tanpa kehadiran fisik. Fenomena ini memperoleh urgensi khusus selama krisis kesehatan global COVID-19 dan tetap bertahan sebagai alternatif yang *viable* meskipun kondisi telah normalisasi. Perlu ditekankan bahwa meskipun memberikan aksesibilitas, modus partisipasi virtual ini mengandung keterbatasan esensial yang membedakannya secara kualitatif dari pengalaman ritual konvensional. Dalam hal ini, Brissman et al. (2024) mengidentifikasi bahwa transmisi digital ritual keagamaan melibatkan proses mediatisasi kompleks yang secara radikal mengubah dimensi spasial, temporal, dan sensorik dari pengalaman keagamaan. Dalam konteks ini, persepsi inderawi peserta mengalami transformasi mendalam, penglihatan terbatas pada *framing* kamera, pendengaran dimodulasi oleh pengaturan volume perangkat, sementara gangguan dari lingkungan domestik (seperti notifikasi ponsel) secara konstan menginterupsi intensitas pengalaman spiritual. Tantangan epistemologis muncul ketika peserta harus secara simultan mengelola perhatian mereka antara ruang sakral yang direpresentasikan secara digital dan realitas profan ruang fisik mereka. Dinamika ini melahirkan paradoks kontemporer, sebuah bentuk keterlibatan religius yang bersifat polifonik (*multitasking*) dan terdispersi secara spasial, namun justru melalui kompleksitas inilah banyak umat beragama menemukan strategi adaptif untuk mempertahankan kontinuitas praktik keagamaan dan solidaritas komunal di era digital. Transformasi ini sekaligus mengundang refleksi kritis tentang redefinisi konsep-konsep sakralitas, kehadiran, dan partisipasi dalam konteks religiositas yang semakin terdigitalisasi, di mana batas antara pengalaman langsung dan mediasi teknologi menjadi semakin kabur namun tetap mengandung makna teologis yang dalam bagi para penganutnya.

Dalam konteks ritual daring, daya persuasif yang dihasilkan sesungguhnya bersumber dari serangkaian strategi produksi media yang dirancang secara spesifik, di mana setiap elemen teknis berperan sebagai komponen krusial dalam membangun pengalaman emosional dan spiritual peserta. Penggunaan teknik kamera ganda, misalnya, bersama dengan penyisipan *grafis* teks ayat suci serta pengambilan sudut kamera yang secara sengaja menekankan aspek afektif seperti *close-up* wajah yang berkaca-kaca atau gestur tangan yang penuh pengharapan

secara sistematis mengarahkan reaksi psikologis penonton menuju respons yang diharapkan. Perlu dipahami bahwa perangkat teknologi dalam konteks ini tidak berfungsi sebagai instrumen yang pasif, melainkan sebagai entitas yang secara aktif membentuk dinamika pengalaman religius, sebagaimana diungkapkan oleh Kok (2022), di mana setiap keputusan produksi mulai dari fokus kamera yang memilih antara menonjolkan figur pengkhotbah secara tunggal atau menyertakan gambaran komunitas jemaat secara implisit mengkonstruksi narasi tentang identitas kelompok, otoritas keagamaan, maupun hierarki spiritual. Proses persuasi ini terjadi dalam tingkat yang hampir tidak terdeteksi, meresap melalui estetika visual dan auditif yang dirancang sedemikian rupa sehingga ruang virtual mampu menghadirkan intensitas pengalaman layaknya interaksi fisik, dengan narasi yang dibangun secara multimodal untuk menciptakan ilusi kehadiran dan kedekatan. Efektivitas ritual daring tidak lagi diukur semata-mata melalui konten verbal, melainkan melalui kemampuan produksi media dalam menciptakan simulakra pengalaman religius yang terasa otentik, mengharukan, dan pada akhirnya menggerakkan partisipasi aktif suatu pencapaian yang mensyaratkan harmonisasi antara kekuatan naratif, kecanggihan teknis, dan pemahaman mendalam tentang psikologi audiens.

Dalam konteks kontemporer, ranah digital telah melahirkan bentuk-bentuk ritual yang inovatif dan hanya dapat terealisasi dalam ruang virtual, menciptakan paradigma baru dalam praktik spiritual. Fenomena ini mencakup berbagai aktivitas seperti pelaksanaan doa kolektif melalui platform *chat* yang dilaksanakan pada waktu bersamaan, praktik ziarah spiritual menggunakan teknologi seperti *Google Earth* atau perangkat realitas virtual untuk mengunjungi situs-situs sakral, serta ritual pembakaran dupa yang diadaptasi dalam lingkungan game online. Menurut Natale & Pasulka (2019), media digital tidak sekadar berperan sebagai medium pasif, melainkan memiliki kapasitas transformatif untuk membingkai dan memediasi keyakinan serta praktik supernatural, sehingga mengaburkan batas-batas konvensional antara yang material dan imaterial, antara dimensi hiburan dan kesakralan. Praktik-praktik semacam ini secara fundamental mentransformasi pemahaman tradisional mengenai ritual, karena eksis dalam ruang maya yang memiliki ontologi berbeda dari realitas fisik. Ritual-ritual *digital-native* ini meskipun tidak melibatkan elemen material atau interaksi fisik secara langsung, diyakini keabsahan dan efektivitasnya oleh para pelaku, menunjukkan bagaimana teknologi mampu menciptakan ruang sakral baru. Keyakinan terhadap daya ungkap do'a virtual, misalnya, merepresentasikan suatu evolusi spiritual di era digital, di mana iman tidak lagi terikat pada bentuk fisik namun merambah ke ranah virtual dengan segala dinamika dan kerumitannya. Transformasi ini tidak hanya memperluas konsep ritual tetapi juga memicu diskusi filosofis mengenai hakikat spiritualitas dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, di mana pengalaman religius dapat terwujud melalui medium yang sebelumnya dianggap sekuler. Akhirnya, ruang digital tidak hanya mereplikasi ritual konvensional tetapi juga menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru yang mendefinisikan ulang relasi antara manusia, teknologi, dan dimensi transendental.

Walaupun kehadiran situs-situs digital yang bersifat religius ini menawarkan beragam peluang, tidak dapat diabaikan bahwa terdapat pertentangan mendasar di dalamnya. Di satu pihak, platform-platform tersebut memberikan kemudahan akses yang sangat demokratis, siapapun dengan koneksi internet dapat mempelajari ajaran para ahli spiritual, mengikuti ritual keagamaan yang biasanya dilaksanakan di tempat ibadah mewah, atau menjalin relasi dengan kelompok-kelompok keagamaan khusus dari berbagai belahan dunia. Namun demikian, di sisi lain, platform yang sama juga memungkinkan terjadinya komersialisasi dan pengaturan algoritmik terhadap pengalaman yang seharusnya bersifat sakral. Sebagai contoh, layanan seperti *YouTube* atau *Instagram* yang menjadi wadah penyiaran ritual-ritual ini pada hakikatnya dioperasikan berdasarkan prinsip keterlibatan dan monetisasi. Algoritma yang bekerja di belakang layar dapat sangat memengaruhi penonton yang akhirnya menyaksikan

siaran ibadah tersebut, berpotensi mengedepankan konten-konten yang lebih provokatif atau mencolok semata-mata demi meningkatkan interaksi. Dalam konteks inilah, Zimmermann (2023) memperingatkan bahaya bahwa pencarian akan Yang Transenden justru dapat secara halus dikendalikan oleh logika komersil *Silicon Valley*. Ada kemungkinan ritual yang dilaksanakan tanpa disadari berubah menjadi komoditas konten, dan partisipasi spiritual pada akhirnya dinilai berdasarkan parameter seperti jumlah *viewers* atau *like*.

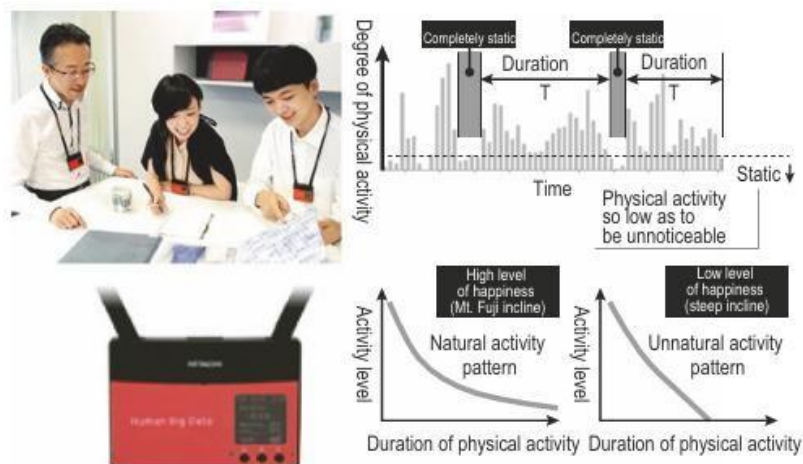
Masalah lain yang tidak kalah krusial terkait dengan fenomena krisis fokus dan kehadiran yang sejati dalam konteks praktik keagamaan di era digital. Ketika ibadah dilakukan secara virtual melalui perangkat elektronik, partisipan menjadi lebih mudah teralihkan perhatiannya oleh berbagai stimulus digital, termasuk dorongan kuat untuk beralih ke aplikasi atau konten lain yang tersedia di perangkat tersebut. Kondisi semacam ini pada dasarnya bertentangan dengan esensi kebanyakan tradisi religius yang menekankan pentingnya ketekunan, ketenangan batin, serta fokus total dalam menyelami pengalaman spiritual. Lingkungan *online* cenderung memecah konsentrasi menjadi fragmen-fragmen pendek, suatu pola yang bertolak belakang dengan kesatuan pikiran dan keheningan kontemplatif yang menjadi ciri khas ritual keagamaan konvensional (Roessler & Steeves, 2025). Dalam konteks ini, ibadah virtual menuntut penguatan kapasitas pengendalian diri secara signifikan, di mana individu harus secara aktif menahan diri dari gangguan dunia maya untuk mencapai kehadiran mental yang utuh. Namun demikian, terdapat perspektif alternatif yang melihat tantangan ini sebagai momen transformatif bagi perkembangan spiritualitas kontemporer, di mana beberapa komunitas religius mulai merumuskan kerangka etis khusus untuk praktik ibadah daring, termasuk pengembangan format *do'a* yang lebih singkat namun intensif, dirancang khusus sesuai dengan karakteristik psikologis dan kemampuan fokus generasi yang tumbuh di era digital. Pendekatan inovatif ini berupaya menjembatani kesenjangan antara tuntutan spiritual tradisional dengan realitas kognitif masyarakat modern yang terbiasa dengan stimulasi digital berkelanjutan, sekaligus membuka ruang bagi bentuk-bentuk baru penghayatan religius yang tetap mempertahankan esensi sakralitas meski dilakukan dalam medium digital.

Transmisi digital ibadah secara langsung telah menciptakan transformasi mendasar dalam dinamika interaksi antara figur otoritatif keagamaan dengan komunitas beriman. Dalam *setting* konvensional, seorang rohaniawan mampu menangkap respons emosional jemaat melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan atmosfer kolektif yang tercipta dalam ruang sakral, memungkinkan penyesuaian pesan spiritual secara organik dan kontekstual. Sebaliknya, dalam ekosistem siaran langsung, umpan balik bersifat terfragmentasi terbatas pada teks pendek dalam kolom komentar atau ikon grafis emosional yang muncul secara asinkron, menciptakan relasi komunikatif yang hierarkis dan terinterupsi oleh latensi teknologi. Imam atau pendeta pada hakikatnya berhadapan dengan perangkat rekam mekanis, sementara proses adaptasi khotbah sangat bergantung pada perantara manusiawi berupa operator digital yang menyaring dan menerjemahkan tanggapan audiens virtual. Evolusi peran-peran pendukung seperti fasilitator daring yang bertugas menjembatani kesenjangan antara pemimpin ritual dengan partisipan jejaring, sekaligus mengkurasi alur diskusi sakral (Isetti et al., 2020). Transformasi ini mengakibatkan ritual keagamaan tidak lagi merupakan monolog sakral, melainkan produk simbiosis antara aktor utama di depan kamera, tim teknis yang mengoperasikan infrastruktur siaran, serta kongregasi digital yang berpartisipasi melalui platform interaktif, baik melalui diskusi teks maupun kontribusi finansial simbolis. Konsekuensinya, otoritas keagamaan mengalami redistribusi yang bersifat polisentris, tersebar melalui node-node dalam jaringan teknologi-digital, di mana kekuasaan ritual tidak lagi terpusat melainkan menjadi properti kolektif yang dinegosiasikan secara terus-menerus dalam ruang virtual yang cair dan terdesakralisasi. Proses ini sekaligus merekonfigurasi hakikat partisipasi religius menjadi bentuk engagement yang teratomisasi, terukur, dan tunduk pada logika platform digital yang mengatur visibilitas dan algoritma interaksi.

Di tengah perkembangan teknologi digital, timbul permasalahan mendasar dalam ranah teologi mengenai kemungkinan mengalami kehadiran ilahi (*divine presence*) secara penuh melalui platform virtual, yang kemudian memicu diskusi intensif tentang validitas pelaksanaan sakramen-sakramen seperti Ekaristi dalam konteks daring. Persoalan ini menjadi semakin kompleks mengingat dalam berbagai tradisi Kristen, Ekaristi tidak hanya mensyaratkan partisipasi fisik dan material, tetapi juga kehadiran komunitas nyata sebagai unsur esensial yang tidak terpisahkan dari hakikat sakramen tersebut. Dalam hal ini, Kok (2022) secara tegas menyatakan bahwa polemik ini melampaui sekadar persoalan teknis atau metodologis, melainkan menyentuh aspek teologis paling fundamental yang berkaitan dengan konsep rahmat ilahi, mekanisme mediasi sakral, serta manifestasi konkret dari yang transenden. Respons berbagai tradisi Kristen terhadap masalah ini ternyata sangat beragam, sebagian aliran menolak secara mutlak validitas ritual virtual karena dianggap tidak memenuhi syarat ontologis dan eklesiologis yang esensial, sementara kelompok lain menunjukkan sikap lebih inklusif dengan memandang kehadiran digital sebagai bentuk partisipasi yang sah meskipun memiliki karakteristik berbeda dari kehadiran fisik. Perdebatan yang muncul sesungguhnya mengungkapkan dimensi transformatif internet yang tidak sekadar mempengaruhi praktik ritual secara eksternal, tetapi lebih mendalam lagi, mendorong proses reinterpretasi doktriner yang menyeluruh mengenai hakikat ritual keagamaan, konsep komunitas iman, serta pemaknaan ulang terhadap esensi kehadiran sakral dalam konteks masyarakat kontemporer yang semakin terdigitalisasi, di mana batas-batas antara yang fisik dan virtual semakin kabur namun tetap mempertahankan relevansi teologisnya.

Lebih dari sekadar ritual yang ditayangkan, internet juga dipenuhi dengan platform yang menawarkan bentuk persuasi lebih halus, yakni situs do'a dan permohonan online. Platform ini memungkinkan pengguna mengirimkan permohonan do'a, menghidupkan lilin virtual, atau berpartisipasi dalam aktivitas amal digital, sehingga menciptakan mekanisme persuasi dan partisipasi yang berkesinambungan. Natale & Pasulka (2019) mengamati bahwa praktik semacam ini mengandalkan logika interaksi antarmuka yang memberikan rasa berdaya dan bermakna bagi pengguna. Secara sekilas, klik *mouse* atau sentuhan layar tampak sebagai tindakan sederhana, namun dipercaya memiliki dampak ritualistik dalam dimensi spiritual. Karenanya, ini merupakan bentuk persuasi yang sangat personal dan langsung, di mana individu merasa memiliki peran aktif untuk memengaruhi takdir melalui interaksi digital yang sederhana. Platform semacam itu biasanya menggabungkan bahasa religius dengan desain pengalaman pengguna yang menarik, sehingga menawarkan pengalaman spiritual yang mulus dan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari di dunia digital.

Gambar 3. Contoh Aktivitas Fisik yang Dapat Diukur Menggunakan Teknologi Digital  
*Wearable Sensors*



*Sumber: Deguchi et al. (2020)*

Tidak dapat dipungkiri, keberadaan internet sebagai ruang ritual tidak terlepas dari berbagai situasi pertentangan dan perdebatan. Sebagai contoh, tayangan langsung ceramah agama kerap dipotong menjadi cuplikan singkat, lalu disebar tanpa mempertimbangkan konteks aslinya. Fenomena ini acap kali memicu perselisihan yang meluas dengan cepat. Kolom komentar pada siaran ibadah, meski dapat berfungsi sebagai wadah dukungan, sekaligus juga berisiko menjadi media penyebaran ujaran kebencian dan pemicu perpecahan. Karakter publik dan mudahnya replikasi ritual digital menjadikannya sangat rentan terhadap tindakan *trolling*, pengaburan makna, serta pertentangan ideologis (Brissman et al., 2024). Ritual yang sejatinya bertujuan mempersatukan umat justru terkadang berbalik menjadi penyebab perpecahan baru, khususnya ketika dipindahkan ke ruang publik digital yang sangat terkoneksi namun sarat polarisasi. Kondisi ini melahirkan kebutuhan baru bagi komunitas religius, baik dari aspek pastoral maupun teknis dalam menjaga keamanan dan mengelola ruang ritual digital.

Pada hakikatnya, apabila internet dipandang sebagai medium persuasi religius sekaligus ranah ritual keagamaan, kita akan menemukan transformasi yang kompleks dan penuh paradoks. Internet memberikan akses lebih luas, melahirkan berbagai bentuk ritual baru, serta menghubungkan komunitas melampaui batasan geografis. Namun di sisi lain, ia juga menghadirkan dinamika komodifikasi, gangguan terhadap fokus, dan tantangan teologis yang tidak sederhana terkait kehadiran dan keaslian ritual. *Apakah lingkungan digital ini pada akhirnya mendukung human flourishing dalam konteks spiritual, atau justru merusak fondasi dasar yang diperlukan bagi perkembangan tersebut?* Jawabannya tentu tidak sesederhana itu, namun satu hal yang pasti, ritual dan persuasi keagamaan kini telah tertanam kuat dalam lanskap digital yang permanen. Pemahaman mendalam tentang dinamika ini menjadi kunci penting untuk membahas masa depan agama tradisional serta perubahan otoritas keagamaan di ruang elektronik.

## **B. Nasib Agama Tradisional di Lingkungan Elektronik**

Dunia digital menciptakan tantangan besar bagi agama-agama konvensional yang selama ini dibangun atas struktur terstruktur (meliputi hierarki, praktik ritual yang teratur, serta otoritas pusat yang mapan). Contohnya, upaya seperti siaran langsung ibadah atau *podcast* khotbah mungkin tampak sebagai bentuk adaptasi, namun sejatinya terjadi transformasi yang lebih mendasar dan, tidak jarang justru mengikis fondasi kelembagaan yang ada. Migrasi ke ruang digital bukan sekadar transformasi bentuk, melainkan ujian bagi integritas struktur keagamaan tradisional (Isetti et al., 2020). Sebagai ilustrasi, ketika misa ditayangkan secara daring, aktivitas tersebut secara alami berubah menjadi tontonan yang harus menyesuaikan estetika dan logika platform digital, sangat berbeda dengan tradisi liturgis aslinya. Lembaga keagamaan juga terpaksa berhadapan dengan logika pasar, seperti algoritma dan metrik keterlibatan yang asing dan mungkin bertentangan dengan nilai-nilai spiritual mereka. Otoritas kelembagaan pun tidak lagi absolut, bukan semata wewenang dewan gereja atau majelis ulama, melainkan juga tergantung pada kebijakan insinyur perangkat lunak dan perusahaan teknologi.

Salah satu tantangan terbesar adalah fenomena disintermediasi, yakni kondisi ketika peran perantara kelembagaan menjadi kurang relevan. Internet memungkinkan individu mengakses teks-teks suci, tafsir, atau ajaran secara langsung tanpa bergantung pada penjelasan resmi. Dalam hal ini, Kok (2022) menyebutkan bahwa akses langsung ini meratakan pengetahuan agama sekaligus meruntuhkan monopoli interpretasi yang selama ini dipegang kalangan elite agama. Pencari makna spiritual kini bisa membandingkan ajaran resmi

lembaganya dengan pandangan *blogger* teologi atau mentor spiritual dari tradisi berbeda. Akhirnya, terciptalah semacam pasar bebas pemaknaan keagamaan, di mana otoritas tradisional harus bersaing untuk menjaga relevansi dan kredibilitasnya. Mereka tidak lagi bisa mengandalkan posisi sosial atau kendali atas akses informasi semata. Jika suatu lembaga bersikap defensif dan menghindari dialog, risikonya adalah dianggap ketinggalan zaman dan kehilangan daya tarik, khususnya bagi generasi yang tumbuh di era digital.

Di era kontemporer, teknologi digital telah menghadirkan berbagai instrumen inovatif yang mampu menguatkan sekaligus memperluas ekspresi keberagaman. Organisasi-organisasi keagamaan utama kini dapat memanfaatkan sistem basis data modern untuk pengelolaan umat yang lebih efektif, mengembangkan aplikasi khusus pembelajaran teks-teks suci, maupun memanfaatkan platform media sosial sebagai medium strategis dalam membangun wacana kontra radikalisme. Namun demikian, optimalisasi perangkat-perangkat teknologi ini tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan sumber daya dan kompetensi teknis, melainkan memerlukan transformasi mendasar dalam pola komunikasi keagamaan dari pendekatan monologis yang bersifat hierarkis (dari institusi ke jemaah) menuju model komunikasi partisipatoris berbasis jejaring dan dialog interaktif. Problematika mendasar muncul ketika adopsi teknologi dilakukan tanpa didahului oleh refleksi teologis yang komprehensif, sehingga berpotensi menyederhanakan persoalan menjadi sekadar solusi teknis pragmatis yang gagal menanggapi tantangan esensial mengenai rekonstruksi identitas komunal dan transformasi spiritual di tengah realitas masyarakat modern yang semakin terfragmentasi secara spasial (Zimmermann, 2023). Institusi-institusi keagamaan pun menghadapi dilema kompleks, di satu sisi, mereka dituntut untuk melakukan modernisasi digital guna mempertahankan relevansi di era disruptif, sementara di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa transformasi digital berisiko mengikis makna sakral dari komunitas religius yang selama ini menjadi fondasi utama berbagai tradisi transenden. Konteks ini menuntut keseimbangan yang hati-hati antara adaptasi teknologi dan pemeliharaan nilai-nilai inti, di mana pendekatan hermeneutik terhadap teks-teks suci perlu diintegrasikan dengan pemahaman kritis tentang dampak sosio-teknologis dalam konteks spiritualitas kontemporer.

Persoalan lain yang muncul terkait pengelolaan komunitas hibrida, di mana sebagian umat hadir secara fisik, sementara lainnya terhubung melalui platform digital. Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan mendasar tentang hak keanggotaan, derajat keterlibatan, serta beban pastoral. Sebagai contoh, *dapatkah seseorang yang selama bertahun-tahun hanya aktif menyaksikan siaran langsung dianggap sebagai anggota jemaat yang seutuhnya?, bagaimana implementasi pelayanan pastoral dan administrasi sakramen (termasuk pengakuan dosa, perjamuan kudus, maupun ritus pemakaman) dalam ranah digital?* Problematika ini mendorong institusi keagamaan untuk meninjau kembali definisi komunitas dan parameter partisipasi yang sah (Brissman et al., 2024). Banyak organisasi masih berupaya merumuskan kebijakan yang tetap setia pada ajaran namun mampu mengakomodasi realitas keterlibatan digital. Pada akhirnya, ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan polarisasi antara kelompok yang memandang kehadiran fisik sebagai syarat mutlak dengan mereka yang menganggap konektivitas digital sebagai bentuk partisipasi yang valid dan kontemporer.

Di sisi lain, aspek ekonomi kelembagaan juga menghadapi tantangan unik. Sumber pendapatan konvensional, seperti persembahan melalui kotak kolekte yang tidak mudah diadaptasikan secara efektif di ruang virtual. Meskipun donasi digital menjadi solusi alternatif, pendekatan ini mengubah relasi ekonomi menjadi lebih transaksional dan kurang bernuansa personal, tidak jarang menciptakan ekspektasi tertentu dari penyumbang, serupa dengan pola yang terjadi pada platform *crowdfunding*. Lebih lanjut, partisipasi *online* cenderung memiliki komitmen rendah dan dapat memicu sikap konsumtif terhadap afiliasi keagamaan, di mana individu cenderung memilih-milih pengalaman spiritual tanpa berinvestasi nyata dalam keberlangsungan komunitas institusional (Roessler & Steeves, 2025). Dampaknya, banyak

jemaat mungkin merasa telah berkontribusi cukup dengan sekadar menonton dan berinteraksi dengan konten, tanpa memberikan dukungan finansial maupun partisipasi aktif yang vital bagi pemeliharaan infrastruktur fisik, program pendidikan, dan layanan sosial yang menjadi unsur-unsur fondasi organisasi keagamaan.

Dalam era digital kontemporer, agama-agama institusional menghadapi tantangan serius dari berbagai bentuk spiritualitas alternatif yang muncul melalui medium teknologi. Fenomena ini ditandai dengan kemunculan platform-platform digital seperti aplikasi *mindfulness Headspace*, kursus spiritual berbasis web, serta komunitas maya yang terbentuk di sekitar tokoh-tokoh spiritual berpengaruh, semuanya menawarkan pengalaman religius yang sangat personal, adaptif, dan bebas dari struktur dogma atau kewajiban kelembagaan yang kaku. Menurut Natale & Pasulka (2019), transformasi digital ini telah melahirkan paradigma baru dalam beragama yang bersifat cair, berpusat pada pengalaman subjektif, serta selaras dengan nilai-nilai individualisme modern. Berbeda dengan lembaga keagamaan konvensional yang sering kali terjebak dalam birokrasi dan struktur hierarkis yang kompleks, berbagai alternatif spiritual digital ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dalam merespons dinamika kebutuhan pemakai secara *real-time*, didukung oleh antarmuka yang intuitif dan desain pengalaman pengguna yang menarik. Keunggulan kompetitif ini mencakup aspek fleksibilitas dalam konten, personalisasi layanan, dan kecepatan inovasi, dimensi-dimensi dimana agama terorganisir sering kali tampak lamban dalam beradaptasi. Problematika ini semakin mengemuka ketika menyangkut persaingan memperebutkan keterikatan emosional dan komitmen spiritual generasi *digital native* yang cenderung mengutamakan pengalaman langsung, kebebasan memilih, dan kemudahan akses dibandingkan loyalitas kepada institusi tradisional. Dalam konteks ini, agama-agama mapan perlu melakukan rekonfigurasi strategis baik dalam aspek penyampaian pesan, mekanisme pengalaman beragama, maupun struktur kelembagaan agar tetap relevan di tengah perubahan lanskap spiritualitas digital yang terus berevolusi secara dinamis.

Meskipun demikian, terdapat peluang nyata untuk inovasi. Sejumlah lembaga keagamaan telah berhasil memanfaatkan ranah digital sebagai media untuk memperkaya pembinaan rohani sekaligus memperluas cakupan pelayanan. Misalnya, melalui pemanfaatan grup *WhatsApp* sebagai sarana diskusi harian kitab suci, penggunaan platform *streaming* khusus untuk menyajikan materi teologis yang mendalam, hingga penerapan analisis data dengan tetap memperhatikan aspek etika guna memahami kebutuhan pastoral jemaat lebih baik. Kunci kesuksesan ini terletak pada konsep *strategic hybridization*, yaitu kemampuan menyatukan kelebihan platform digital dengan kekayaan tradisi dan interaksi fisik tanpa mengorbankan salah satu aspek (Isetti et al., 2020). Lembaga-lembaga yang bertahan tampaknya berhasil berperan sebagai pusat jaringan, alih-alih menara gading yang terisolasi. Mereka berfungsi sebagai penyaring kebijaksanaan, penggerak komunitas nyata maupun virtual, sekaligus pemelihara identitas kolektif di tengah banjir informasi, sambil tetap menyediakan ruang fisik untuk ritual dan pertemuan yang tidak tergantikan.

Pada dasarnya, masa depan agama tradisional di era digital tidak bersifat mutlak atau seragam. Berbagai kemungkinan terbuka, keterpinggiran, perubahan mendasar, atau inovasi kreatif. Tantangannya bersifat multidimensi, mencakup aspek struktural, teologis, dan finansial. Keberhasilan tidak sekadar diukur dari kehadiran di media sosial, melainkan dari kedalaman refleksi, *apa hakikat komunitas, otoritas, dan ritual di zaman yang serba terhubung namun terfragmentasi ini?* Seperti dinyatakan Zimmermann (2023), pertanyaan mendasarnya adalah *apakah tradisi-tradisi ini mampu menawarkan visi yang meyakinkan tentang kesejahteraan manusia secara jasmani dan komunal, atau sebuah respons terhadap kerinduan dan kecemasan mendalam manusia di dunia digital?* Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah suatu tradisi akan menjadi museum spiritual yang beku atau tetap menjadi kekuatan yang hidup dan relevan. Pemahaman akan tantangan ini mengantarkan kita pada

diskusi selanjutnya tentang rekonfigurasi otoritas dan distribusi pesan yang merupakan inti kekuatan kelembagaan oleh algoritma dan logika platform digital.

### C. Otoritas dan Distribusi Pesan

Dalam konteks dunia digital, struktur otoritas keagamaan mengalami transformasi yang signifikan seakan beralih dari dominasi lembaga hierarkis ke dalam mekanisme algoritmik platform yang cenderung kompleks. Individu yang meraih visibilitas, didengar, atau dianggap kredibel dalam ranah diskursus keagamaan kini sangat ditentukan oleh sistem rekomendasi yang dirancang bukan untuk menilai validitas teologis atau kedalaman makna spiritual, melainkan untuk mengoptimalkan engagement pengguna. Media sosial kini berfungsi sebagai *gatekeeper* baru bagi visibilitas keagamaan yang beroperasi berdasarkan logika komersial dan kerap tidak dipahami sepenuhnya oleh aktor-aktor keagamaan (Isetti et al., 2020). Contohnya, pendakwah dengan gaya komunikasi yang bombastis dan emosional cenderung diunggulkan oleh algoritma karena memicu banyak interaksi, sementara konten bernuansa reflektif dan kompleks kerap terpinggirkan akibat dinilai kurang menarik oleh mesin. Dengan kata lain, otoritas keagamaan kini tidak semata ditentukan oleh kapasitas intelektual, kesalehan, atau legitimasi formal, melainkan juga oleh kecakapan memenuhi parameter teknis platform, sebuah bentuk otoritas baru yang dapat disebut sebagai *algorithmic authority*.

Penyebaran pesan keagamaan di era kontemporer sangat bergantung pada apa yang dikenal sebagai personal *scalable curation*. Algoritma, seperti yang terdapat pada *feed Facebook* atau halaman *For You* di *TikTok* menciptakan realitas keagamaan yang berbeda bagi tiap pengguna berdasarkan riwayat *klik*, *like*, dan durasi tonton. Kok (2022) mendeskripsikan fenomena ini sebagai terbentuknya ekosistem spiritual yang terpersonalisasi, memperkuat keyakinan dan bias eksisting, sehingga mempersulit individu untuk menjumpai perspektif keagamaan yang beragam atau kritis. Jika seseorang sering berinteraksi dengan konten kelompok fundamentalis tertentu, algoritma akan terus menyuguhkan materi serupa yang berpotensi memperdalam radikalisasi. Sementara itu, pengguna yang mengakses konten meditatif akan terus dijejali konten sejenis. Pada akhirnya, mekanisme ini mempersempit ruang publik keagamaan yang bersifat kolektif dan menggantikannya dengan miliaran *filter bubble* atau *echo chamber* individual, di mana kebenaran lebih dinilai berdasarkan keselarasan dengan preferensi pribadi ketimbang melalui diskursus komunal atau verifikasi bersama.

Dampaknya terhadap otoritas tradisional sangatlah signifikan. Seorang ulama atau pendeta yang dihormati di komunitas lokalnya bisa jadi tidak terlihat sama sekali di platform digital jika kontennya tidak dioptimalkan untuk algoritma. Sebaliknya, *influencer* karismatik yang memahami teknik pembuatan konten viral mampu mengumpulkan jutaan pengikut dan menjadi narasumber yang lebih berpengaruh dalam wacana keagamaan. Media digital memungkinkan kemunculan otoritas karismatik baru berbasis jaringan yang dapat melampaui jalur institusional konvensional (Natale & Pasulka, 2019). Otoritas kini menjadi lebih cair, bergantung pada performa media dan kuantitas audiens. Pergeseran ini memang membuka peluang bagi demokratisasi suara, namun sekaligus menciptakan pasar yang hiperkompetitif dan kerap bersifat dangkal, di mana kemasan acap kali lebih diperhatikan daripada esensi, sementara konten yang sensasional namun minim kedalaman sering kali mengalahkan pemikiran yang substantif namun memerlukan perenungan.

Platform digital memainkan peranan krusial melalui kebijakan konten dan praktik moderasi yang mereka jalankan. Definisi mengenai apa yang tergolong sebagai ucapan kebencian, informasi menyesatkan, atau ekstremisme kekerasan secara langsung memengaruhi penyebaran pesan-pesan religius. Namun kerap kali, standar tersebut dirumuskan oleh korporasi teknologi global tanpa melibatkan cukup banyak ahli teologi maupun pemuka agama



dari berbagai tradisi. Muncul kekhawatiran bahwa kewenangan untuk menetapkan batasan wacana keagamaan yang diperbolehkan semakin berada di bawah kendali entitas swasta yang bertanggung jawab kepada para pemegang saham, bukan kepada komunitas religius atau kepentingan umum (Roessler & Steeves, 2025). Sebuah rekaman ceramah yang dianggap sah dalam suatu tradisi keagamaan bisa saja diberi tanda peringatan atau kehilangan *monetisasi* karena dinilai ofensif berdasarkan standar platform berskala global. Situasi ini secara implisit menyerahkan kewenangan untuk mendefinisikan ortodoksi dan heterodoksi kepada perusahaan teknologi, hal yang problematis baik dari perspektif teologis maupun prinsip demokrasi.

Lebih jauh, logika algoritmik dalam distribusi konten cenderung mengubah karakter pesan keagamaan. Untuk memperoleh jangkauan lebih luas, konten kreator agama sering terdorong memakai format dan taktik yang terbukti viral, seperti *thumbnail* sensasional, judul provokatif (*clickbait*), atau materi yang mengundang respons emosional seperti kemarahan dan ketakutan. Hal ini dapat memunculkan semacam religiositas pertunjukan yang lebih menekankan pada kemudahan penyebaran daripada esensi, serta mengedepankan spektakel ketimbang kedalaman spiritual (Brissman et al., 2024). Ritual dan khutbah akhirnya dirancang untuk menciptakan momen yang mudah dibagikan. Dalam prosesnya, pesan-pesan tersebut kerap mengalami reduksi atau bahkan distorsi demi menyesuaikan diri dengan tuntutan algoritma. Agama tidak sekadar disebarluaskan melalui platform, tetapi juga dibentuk kembali oleh ekonomi perhatian yang menguasainya. Otoritas spiritual pada akhirnya harus tunduk pada otoritas tingkat keterlibatan.

Meskipun dominasi platform digital besar cenderung menggeser otoritas tradisional, komunitas agama belum sepenuhnya kehilangan daya regulasi terhadap distribusi konten keagamaan. Berbagai inisiatif strategis terus dikembangkan untuk membangun ekosistem distribusi alternatif yang lebih otonom, seperti pengembangan aplikasi gereja khusus, platform *streaming* independen, serta jaringan *podcast* berbasis komunitas. Kendati harus bersaing ketat dengan raksasa digital dalam memperebutkan audiens, solusi-solusi ini memberikan keunggulan strategis berupa kontrol penuh terhadap manajemen audiens dan pengalaman pengguna religius. Zimmermann (2023) dalam analisisnya memperkenalkan konsep *technological askesis* sebagai paradigma baru, yakni sebuah pendekatan yang menekankan pemanfaatan teknologi secara selektif dan reflektif. Esensinya terletak pada kemampuan komunitas agama untuk secara proaktif memilih infrastruktur digital dan metodologi penyebaran konten yang secara intrinsik selaras dengan prinsip teologis mereka, alih-alih sekadar mengadopsi tren mainstream secara tidak kritis. Pendekatan ini mencakup perancangan ekosistem digital yang dirancang khusus untuk memfasilitasi diskursus keagamaan yang substantif, mengimplementasikan protokol keamanan data yang ketat untuk melindungi ranah privat umat, serta memelihara nilai-nilai komunal dalam interaksi virtual. Walaupun lingkup penyebarannya mungkin tidak seluas platform komersial, model ini justru menawarkan ruang yang lebih terukur dan terfokus untuk pengalaman beragama yang autentik, di mana kualitas interaksi lebih diutamakan daripada kuantitas jangkauan semata. Komunitas agama tidak hanya menjadi konsumen pasif dalam revolusi digital, melainkan aktor yang secara sadar membentuk lanskap teknologi sesuai dengan kebutuhan spiritual kolektif mereka.

Efek jangka panjang dari otoritas algoritmik terhadap keragaman dan dinamika keagamaan masih menimbulkan berbagai pertanyaan mendalam. Di satu sisi, kecenderungan ini dapat meminggirkan pandangan-pandangan moderat dan malah menguatkan arus pemikiran ekstrem yang sarat emosi. Namun di sisi lain, fenomena ini mungkin juga memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan dalam tradisi keagamaan, seperti para feminis religius atau kalangan pembaharu, untuk menjalin komunikasi dengan khalayak global tanpa terikat pada struktur otoritas konvensional. Ranah digital ini membentuk suatu ruang paradoks yang secara bersamaan memisahkan sekaligus menyatukan dengan cara yang tidak terduga, di mana mekanisme yang pada dasarnya memecah belah

khalayak justru mampu menciptakan solidaritas transnasional berdasarkan interpretasi keagamaan yang khas (Isetti et al., 2020). Maka, salah satu tantangan utama bagi komunitas beragama adalah mengembangkan apa yang disebut literasi algoritmik, yaitu pemahaman menyeluruh tentang operasional platform digital agar mampu mengarungi, mengkritisi, dan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan baru yang mengendalikan distribusi pesan, tanpa harus mengorbankan substansi pesan tersebut.

Dalam konteks perkembangan zaman digital kontemporer, kita menyaksikan suatu fenomena transformasi radikal dalam struktur otoritas dan mekanisme distribusi pesan-pesan keagamaan. Hierarki tradisional yang selama ini didominasi oleh lembaga-lembaga teologis formal sebagai penjaga gawang (*gatekeeper*) kebenaran religius kini mengalami pergeseran fundamental ke wilayah algoritma digital yang secara inherent didesain untuk memenuhi logika kapitalistik platform media sosial. Dinamika ini melahirkan sebuah realitas baru di mana visibilitas doktrin agama justru dikondisikan oleh kompetisi dalam ekonomi perhatian (*attention economy*) yang cenderung mendorong munculnya narasi-narasi simplistik dan konten sensasional, sehingga pada gilirannya berpotensi memperdalam fragmentasi sosial dan polarisasi pandangan keagamaan. Namun demikian, di balik tantangan tersebut terselip peluang transformatif berupa kemunculan ruang otonom bagi aktor-aktor keagamaan untuk membangun kapasitas kemandirian intelektual sekaligus membentuk jejaring pengetahuan alternatif yang bersifat *bottom-up*. Prospek ke depan dalam lanskap digital ini sangat bergantung pada kemampuan tradisi-tradisi agama untuk melakukan reposisi strategis, tidak sekadar menjadi konsumen pasif teknologi digital, melainkan berfungsi sebagai subjek kritis yang secara proaktif mengembangkan paradigma keterlibatan berbasis nilai-nilai transendental. Hal ini mencakup upaya sistematis untuk merancang infrastruktur komunikasi alternatif yang independen dari logika komodifikasi, sekaligus membangun komunitas interpretatif yang memiliki ketahanan epistemologis terhadap tekanan viralitas dangkal dan mampu mempertahankan kedalaman diskursus keagamaan dalam ruang digital yang seringkali didominasi oleh konten serba cepat dan fragmentaris. Dengan demikian, agama-agama dituntut untuk tidak hanya bereaksi terhadap perubahan teknologi, tetapi secara visioner membentuk arah perkembangan ekosistem digital itu sendiri.

## **BAB VII**

### **AGAMA & ISU GENDER DALAM KOMUNIKASI DIGITAL**

#### **A. Representasi Gender dalam Konten Religius Digital**

Representasi gender dalam konten keagamaan digital menciptakan ranah yang kompleks, di mana nilai-nilai konvensional berinteraksi dengan bentuk ekspresi baru yang dimungkinkan oleh media partisipatif. Pada satu sisi, penyampaian dakwah digital sering kali mempertahankan dan memperkuat struktur gender patriarkal yang sudah mengakar dalam berbagai praktik keagamaan. Umumnya, posisi laki-laki ditonjolkan sebagai pemilik pengetahuan dan otoritas berperan sebagai penceramah, ulama, atau pemimpin diskusi spiritual. Di sisi lain, perempuan lebih banyak ditampilkan dalam peran pasif sebagai pendengar, pengikut, atau sasaran ajaran yang menekankan kesucian, tugas domestik, dan kepatuhan. Media digital memiliki potensi untuk memperkuat dan menyebarkan pandangan gender tertentu yang kerap bersifat konservatif dengan mengatasnamakan kemurnian religius (Starkey & Tomalin, 2021). Konten semacam ini tidak hanya merefleksikan bias gender yang ada, tetapi juga turut membentuk persepsi global sehingga menciptakan anggapan bahwa struktur gender tertentu merupakan bagian esensial dari keyakinan ortodoks. Narasi visual dan verbal ini saling berpadu membentuk realitas keagamaan di mana ruang publik dan otoritas keagamaan cenderung didominasi oleh figur maskulin.

Analisis terhadap representasi perempuan dalam konten digital menunjukkan pola yang bersifat dikotomis dan terbatas. Perempuan kerap digambarkan dalam peran-peran stereotip sebagai ibu yang religius dan pengurus rumah tangga, anak perempuan yang penurut, atau sebagai sumber godaan yang perlu dikontrol (fitnah). Jarang ditemukan representasi perempuan sebagai penafsir kitab suci yang independen, pemimpin komunitas, atau teolog yang aktif menghasilkan pengetahuan. Dalam konteks Islam, sebagaimana dikaji oleh Duderija et al. (2020), wacana gender di dunia maya umumnya didominasi oleh perspektif literalisme konservatif yang mengutamakan otoritas interpretasi laki-laki dan membatasi peran perempuan dalam ranah keagamaan hanya pada lingkup domestik. Gambaran visual yang menyertainya pun konsisten, yaitu perempuan berhijab dengan sikap menunduk, mengasuh anak, atau beraktivitas di lingkungan rumah. Meskipun representasi ini mungkin dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan, dalam praktiknya justru membatasi kemungkinan peran perempuan dalam ranah keagamaan dan publik. Pesan implisit yang muncul adalah bahwa kesalahan perempuan dinilai berdasarkan pemenuhan peran domestik dan penampilan, bukan berdasarkan kapasitas intelektual atau kepemimpinan spiritualnya.

Sementara itu, representasi laki-laki dalam dakwah digital juga dibentuk oleh ekspektasi gender yang kaku. Maskulinitas religius sering diidentikkan dengan otoritas, ketegasan, perlindungan, serta tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. Penceramah laki-laki biasanya ditampilkan dengan ekspresi penuh keyakinan, sering kali berdiri di mimbar atau di depan latar perpustakaan yang dipenuhi buku seolah melambangkan penguasaan ilmu. Narasi yang muncul kerap menekankan kewajiban laki-laki sebagai pencari nafkah, pelindung kehormatan perempuan dalam keluarganya, dan penjaga moralitas. Dalam tradisi Kristen Ortodoks, konstruksi maskulinitas suci berkaitan erat dengan figur biarawan atau uskup yang memiliki pengendalian diri dan memimpin dengan kewibawaan, citra yang juga banyak dihadirkan dalam konten digital mereka (Kupari & Vuola, 2019). Namun, representasi ini hampir tidak pernah menyentuh aspek kerentanan emosional, peran pengasuhan, atau pergulatan spiritual laki-laki. Gambaran maskulinitas religius yang ditampilkan cenderung

kaku dan heroik, yang dapat membebani laki-laki dengan tuntutan ideal yang sulit dicapai sekaligus mengaburkan kompleksitas pengalaman spiritual mereka yang sebenarnya.

Gambar 4. Seniman Ina Colliander Sedang Melukis Ikon Bunda Allah dari Kazan pada Tahun 1968 (Wujud Bahasa Ikonografi Kuno Dipelajari Melalui Sejarah Seni)



*Sumber:* Kupari & Vuola (2019)

Diskursus mengenai kesenjangan representasi gender tidak sekadar berdampak pada ranah simbolis semata. Seperti yang diuraikan oleh le Roux & Pertek (2022), narasi keagamaan yang menempatkan perempuan pada posisi inferior sementara laki-laki diagungkan dapat berperan sebagai pemicu utama terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, sekaligus menciptakan legitimasi struktural bagi praktik-praktik penindasan. Fenomena ini semakin diperparah oleh maraknya konten digital yang secara sistematis menanamkan doktrin kepatuhan istri secara mutlak terhadap suami, mengaitkan martabat keluarga dengan dominasi atas tubuh perempuan, ataupun menyematkan stigma perempuan sebagai sumber godaan. Pola narasi semacam ini tidak hanya memfasilitasi terjadinya kekerasan dalam beragam bentuk, baik psikologis, emosional, maupun fisik, tetapi juga membentuk ekosistem yang mempermudah reproduksi kekerasan tersebut. Aksesibilitas dan sifat anonim dari materi-materi tersebut semakin memperkuat kapasitasnya untuk menormalisasi sikap represif, baik dalam ranah domestik maupun ruang publik yang lebih luas. Lebih mendasar lagi, wacana yang memposisikan laki-laki sebagai pemegang otoritas tunggal atas perempuan pada hakikatnya merampas hak-hak fundamental perempuan atas otonomi tubuh dan kebebasan menentukan jalan hidupnya sendiri. Adapun yang patut dicermati, seluruh konstruksi opresif ini seringkali dibungkus dengan interpretasi keagamaan yang dipaksakan sebagai kebenaran mutlak tanpa ruang untuk dialog kritis. Situasi paradoks ini tidak hanya mencerminkan distorsi pemahaman keagamaan, tetapi juga menciptakan sistem yang secara struktural melanggengkan ketidakadilan gender melalui mekanisme sosialisasi yang tersistematiskan dan penguatan norma-norma patriarkal yang bersifat *self-perpetuating*.

Namun demikian, ekosistem media digital sejatinya mengandung paradoks. Di balik dominasi representasi patriarkal, platform yang sama juga menyediakan celah untuk perlawanan dan representasi alternatif. Perempuan yang kian melek teknologi memanfaatkan perangkat produksi yang terjangkau seperti *smartphone* dan aplikasi penyunting sederhana untuk menciptakan konten mereka sendiri. Mereka memasuki ranah yang selama ini dikuasai

laki-laki dengan membahas isu dari sudut pandang perempuan, memberikan interpretasi berbeda terhadap teks-teks agama yang kerap digunakan untuk merendahkan mereka, serta memaparkan keberagaman pengalaman perempuan beragama. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital dapat bersifat ambivalen, sekaligus memperkuat struktur kekuasaan tradisional dan menyediakan instrumen untuk mengubahnya (Starkey & Tomalin, 2021). Konten buatan perempuan ini sering kali mengadopsi estetika dan bahasa yang lebih personal serta relasional, menghubungkan doktrin agama dengan pengalaman dan tantangan keseharian mereka. Jadi, meski representasi dominan masih sarat bias gender, di balik permukaan terdapat gerakan bawah tanah yang giat mengkritik dan mendekonstruksi narasi tersebut mempersiapkan landasan penting bagi perkembangan ruang aman virtual dalam gerakan keagamaan feminis.

Selain bentuk perlawanan yang muncul secara individual, terdapat pula representasi tandingan yang lebih terstruktur melalui saluran digital yang dikelola kolektif oleh perempuan berlatar pendidikan agama. Saluran *YouTube*, *podcast*, atau akun *Instagram* yang berfokus pada penafsiran feminis dan perspektif inklusif gender dalam agama mulai mendapat tempat yang cukup berarti. Mereka secara sistematis menyajikan narasi alternatif, merujuk pada metodologi ilmiah serta tradisi interpretatif yang selama ini terabaikan. Dalam konteks Islam, misalnya, konten-konten tersebut mengangkat karya pemikir feminis muslim seperti Amina Wadud dan Asma Barlas, sembari menafsirkan kembali ayat-ayat tentang poligami atau warisan dengan memperkaya konteks historisnya. Upaya semacam ini berusaha merebut kembali hermeneutik keagamaan dari monopoli patriarkal sekaligus menunjukkan kesesuaian iman dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender (Duderija et al., 2020). Representasi visual pun turut berubah, perempuan kini tidak lagi hanya tampil sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang memandu diskusi, menulis di papan tulis, atau berbicara di depan khalayak umum. Perubahan representasi ini bukan sekadar persoalan citra, melainkan perjuangan epistemologis untuk memperluas hak memproduksi pengetahuan agama sekaligus cara pengetahuan itu ditampilkan di ruang publik digital.

Dalam konteks representasi yang beragam, peran platform digital dan algoritmanya sangat memengaruhi visibilitas suatu konten. Namun sayangnya, algoritma yang berbasis *engagement* kerap kali secara tidak langsung lebih memprioritaskan konten-konten provokatif dan bernuansa konservatif dalam perspektif gender. Konten yang menegaskan hierarki gender tradisional, dengan penyampaian tegas dan emosional, umumnya memicu respons lebih besar sehingga lebih banyak dipromosikan oleh platform. Sementara itu, konten yang bersifat reflektif, subtil, dan egaliter cenderung kurang mendapat reaksi, sehingga jangkauannya pun lebih sempit. Fenomena ini menciptakan distorsi persepsi massal, publik mungkin menganggap pandangan patriarkal sebagai perspektif dominan, atau bahkan satu-satunya, dalam konteks keagamaan, karena itulah yang kerap muncul di *feed* mereka. Arsitektur platform digital dapat membentuk konsensus semu, yang menguatkan narasi-narasi paling ekstrem atau emosional tentang gender, sambil meminggirkan suara moderat maupun progresif (Starkey & Tomalin, 2021). Karenanya, representasi gender di ruang digital tidak hanya merefleksikan bias budaya dan teologis yang sudah ada, tetapi juga diperkuat secara sistematis oleh logika tekno-komersial yang mengatur arus informasi.

Satu lagi tantangan representasi muncul dalam bentuk komodifikasi citra perempuan saleh. Di tengah hegemoni representasi patriarkal, muncul pula pasar khusus yang menjual estetika kesalehan perempuan (misalnya melalui hijab bergaya tertentu, busana muslimah modern, atau riasan berlabel halal) yang dipromosikan oleh *influencer* perempuan religius. Fenomena ini memang membuka ruang bagi ekspresi diri dan peluang ekonomi bagi perempuan, tetapi di sisi lain, ada risiko besar bahwa identitas keagamaan itu sendiri berubah menjadi sekadar gaya hidup atau komoditas. Citra kesalehan menjadi sangat terikat dengan penampilan fisik yang terkurasi sempurna, sehingga justru dapat menciptakan standar baru

yang tidak realistis. Hal ini juga mengaburkan dimensi spiritual dan intelektual dalam praktik keimanan. Kupari & Vuola (2019), dalam pandangannya tentang Kristen Ortodoks, mengamati fenomena serupa yang memungkinkan ketegangan antara ekspresi keagamaan otentik dengan tuntutan performatif budaya *influencer*. Dengan kata lain, representasi yang tampaknya memberdayakan perempuan bisa saja terjebak dalam logika pasar, di mana nilai seorang perempuan beriman diukur dari daya tarik visual dan kapasitasnya sebagai pemasaran, bukan kedalaman spiritual atau kontribusi intelektualnya.

Jika ditarik ke akar persoalan, analisis representasi gender dalam konten religius digital ini mengungkap medan penuh paradoks dan ketegangan. Di satu sisi, ada kekuatan mapan yang terus mereproduksi norma-norma gender patriarkal yang mendapatkan legitimasi baru melalui platform digital. Dampaknya nyata, mulai dari membatasi imajinasi tentang peran keagamaan hingga dalam kasus ekstrem menjadi pembenaran bagi kekerasan. Namun di sisi lain, sifat partisipatif dan relatif demokratis dari media digital juga membuka peluang untuk dekonstruksi, resistensi, dan penciptaan representasi tandingan yang biasanya digerakkan oleh perempuan atau kelompok pro-keadilan gender. Perjuangan ini sesungguhnya bukan sekadar persoalan citra, melainkan soal kuasa untuk menafsirkan kitab suci, mendefinisikan kesalehan, serta mengatur tubuh dan kehidupan. Memahami mekanisme representasi ini merupakan langkah krusial jika kita ingin membahas pembentukan ruang virtual yang aman sebagai respons terhadap bias representasi. Lebih dari itu, ini juga terkait dengan bagaimana stigma dan ujaran kebencian digunakan untuk mempertahankan *status quo* gender yang timpang di dunia maya. Karenanya, bagian ini bukanlah penutup, melainkan pintu masuk penting untuk mengeksplorasi upaya-upaya transformasi dan bentuk-bentuk perlawanan yang akan dibahas lebih mendalam selanjutnya.

## **B. Ruang Aman Virtual bagi Gerakan Keagamaan Feminis**

Menanggapi bias gender yang kerap timpang dan bersifat opresif, gerakan keagamaan berparadigma feminis semakin giat membangun ruang aman virtual (*virtual safe spaces*) di beragam platform digital. Wadah-wadah seperti grup *Facebook* privat, forum *online*, server *Discord*, atau akun media sosial khusus ini berfungsi sebagai tempat berlindung bagi perempuan untuk berdialog, mengkritisi, serta mentransformasi penafsiran dan praktik keagamaan yang bernuansa patriarkal. Di sini, mereka dapat berpendapat tanpa langsung berhadapan dengan ejekan, intimidasi, atau pembatasan dari otoritas konvensional. Ruang-ruang ini menyediakan platform yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat solidaritas, dan mengembangkan narasi alternatif yang menantang ortodoksi patriarkal dari dalam kerangka agama (Starkey & Tomalin, 2021). Pengalaman personal mengenai ketimpangan gender dalam komunitas religius dapat diungkapkan dan divalidasi, mengubah persoalan yang semula dianggap personal menjadi landasan analisis kolektif dan aksi politis-spiritual.

Media sosial terbukti menjadi instrumen vital bagi mobilisasi dan diseminasi wacana pembaruan. Melalui tagar seperti *#ChurchToo* dalam konteks Kristiani, atau inisiatif semacam *#MusahWomensMarch*, isu-isu seperti pelecehan seksual oleh tokoh agama, diskriminasi dalam hukum keluarga berbasis agama, serta marginalisasi perempuan dari kepemimpinan ritual mendapatkan sorotan global. Gerakan digital ini mampu menembus struktur hierarkis institusional dan langsung menjangkau perhatian serta solidaritas internasional. Strategi digital semacam ini esensial untuk mengakhiri kebisuhan dan stigma seputar kekerasan berbasis gender yang dibenarkan oleh norma-norma agama, serta membentuk jaringan advokasi transnasional (le Roux & Pertek, 2022). Jadi, ruang virtual ini tidak hanya memberikan rasa aman secara psikologis, tetapi juga berperan strategis secara politis, memperluas tekanan moral dan sosial

melampaui batas komunitas lokal seperti masjid serta menuntut akuntabilitas otoritas yang sebelumnya sulit ditantang.

Dalam konteks ini, hermeneutika feminis turut dikembangkan dan didistribusikan secara luas. Di dalam ruang-ruang tersebut, para anggota secara kolaboratif menelaah kembali teks-teks suci, tradisi hukum, dan praktik keagamaan dengan pendekatan metodologis yang menempatkan pengalaman perempuan sebagai basis epistemologis yang sah. Beragam referensi dimanfaatkan, mulai dari karya akademis, video eksplanasi (*explainer videos*), hingga utas *X* yang mengupas tafsir alternatif atas ayat-ayat kontroversial. Menurut Duderija et al. (2020), aktivis muslim feminis juga memanfaatkan gerakan digital ini untuk penerapan hermeneutika kontekstual, berbasis *maqasid* (tujuan), dan berpusat pada etika di kalangan masyarakat awam, tanpa melalui perantara tradisional yang mengontrol pengetahuan agama. Proses ini pada akhirnya mendemokratisasikan teologi, diskusi yang sebelumnya terbatas pada lingkaran akademis kini menjadi sumber pengetahuan yang lebih inklusif dan terjangkau bagi siapa pun yang terhubung secara digital. Akhirnya, kesadaran kritis yang dibangun dapat menyebar lebih cepat dan meluas.

Ruang aman virtual memungkinkan eksplorasi terhadap berbagai model komunitas dan kepemimpinan spiritual yang inovatif. Dalam lingkungan kelompok tertutup ini, perempuan memiliki kesempatan untuk memimpin pembahasan teks suci, memandu kegiatan do'a atau meditasi kolektif, serta saling memberikan dukungan pastoral, aktivitas yang kerap terkendala dalam ruang fisik komunitas konvensional. Dalam konteks Kristen Ortodoks, platform digital membuka peluang bagi perempuan untuk membangun ikatan spiritual sekaligus melaksanakan berbagai bentuk otoritas keagamaan yang tidak memerlukan legitimasi institusional dari laki-laki (Kupari & Vuola, 2019). Aktivitas-aktivitas ini tidak sekadar bersifat suportif, melainkan juga mengandung dimensi profetik, mereka secara konkret mempertunjukkan kemungkinan terwujudnya komunitas dan kepemimpinan keagamaan yang berkeadilan gender, sekaligus memberi pengalaman langsung tentang pemberdayaan spiritual yang sering terhambat oleh struktur tradisional.

Gambar 5. Ikon *The Mother of God of the Victims of Chernobyl* yang Dibawa Demonstran Chernobyl Way pada tahun 2017



Sumber: Kupari & Vuola (2019)

Meskipun demikian, ruang aman virtual tidak lepas dari tantangan. Anonimitas dan jarak fisik yang semula memberikan perlindungan justru dapat menghambat terbentuknya kepercayaan mendalam dan akuntabilitas berkelanjutan. Tidak jarang, ruang ini berpotensi

berubah menjadi ruang gema (*Echo Chambers*), tempat interaksi hanya terjadi di antara individu dengan pemikiran serupa, sehingga dialog transformatif dengan perspektif berbeda menjadi sulit terwujud. Lebih lanjut, seperti diungkapkan Starkey & Tomalin (2021), terdapat ancaman kelelahan digital bagi para aktivis yang terus-menerus berhadapan dengan konten traumatis dan harus menghadapi derasnya ujaran kebencian. Mempertahankan keberlanjutan ruang aman ternyata membutuhkan upaya emosional dan moderasi tidak sederhana, yang kerap dibebankan tanpa imbalan memadai kepada perempuan. Selain itu, keamanan virtual rentan terhadap infiltrasi oleh *troll* atau pihak-pihak yang menyamar dengan tujuan mengintimidasi atau mengumpulkan data untuk serangan balik.

Meskipun menghadapi berbagai kendala yang kompleks, pengaruh ruang digital ini ternyata memiliki implikasi yang mendalam pada kehidupan nyata, berfungsi sebagai katalisator bagi transformasi sosial yang substantif. Dalam konteks yang lebih luas, platform-platform virtual ini berperan sebagai laboratorium ide tempat gagasan-gagasan revolusioner diolah dan direalisasikan menjadi tindakan nyata, mulai dari pendirian lembaga swadaya masyarakat hingga mobilisasi massa melalui petisi, simposium akademis, atau gerakan protes di ruang publik. Patut untuk dicatat adalah bagaimana jaringan kolaboratif yang terbentuk di dunia maya mampu mengonsolidasikan berbagai elemen pendukung, mulai dari sumber daya material hingga dukungan psikososial, sehingga memperkuat gerakan-gerakan lokal. le Roux & Pertek (2022) dalam pandangannya mengungkapkan bahwa fenomena krusial dimana korban kekerasan seringkali menemukan titik terang pertama dalam proses pemulihan justru melalui pengakuan validasi dan akses informasi dari komunitas daring, sebuah temuan yang menegaskan peran strategis ruang virtual sebagai jembatan antara keterisolasian personal dengan solidaritas kolektif. Lebih dari sekadar wacana, mekanisme ini telah membuktikan kemampuan transformatifnya dalam mengubah diskusi teoretis menjadi terobosan kebijakan yang berdampak sistematis, dimana setiap klik dan diskusi *online* berpotensi menjadi batu loncatan menuju reformasi struktural yang berjangka panjang. Proses ini tidak hanya menciptakan ruang aman secara simbolis, melainkan membangun infrastruktur emosional dan logistik yang memungkinkan individu-individu yang termarginalkan untuk beralih dari posisi korban menjadi agen perubahan, sekaligus memvalidasi tesis bahwa dunia digital kontemporer telah menjadi arena baru bagi perjuangan hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam skala global.

Praktik komunikasi strategis yang dijalankan dalam berbagai ranah ini mengungkapkan kompleksitas pendekatan dan inovasi kreatif yang patut dicermati. Para aktor gerakan sosial secara cerdas memanfaatkan berbagai kanal media digital sebagai sarana multiplatform untuk menyentuh segmen masyarakat yang heterogen. Dalam konteks ini, podcast berfungsi sebagai medium diskursus yang memfasilitasi pembahasan mendalam dan analitis, sementara platform visual seperti *Instagram* dan *TikTok* dioptimalkan untuk menyajikan materi edukasi yang ringkas namun padat, seringkali melalui presentasi infografis yang menarik dengan menampilkan representasi perempuan dalam kitab suci. Di sisi lain, media berbasis teks seperti *blog* atau *newsletter* memberikan platform bagi elaborasi pemikiran reflektif yang bersifat komprehensif, memungkinkan eksplorasi tema-tema tertentu secara lebih luas dan mendalam. Strategi komunikasi yang multitier ini memfasilitasi pertemuan antara aktivis dengan target audiens dalam berbagai ruang digital yang telah familiar bagi mereka, sekaligus memungkinkan interaksi yang organik sesuai konteks penggunaan media masing-masing (Duderija et al., 2020). Aspek linguistik dalam komunikasi ini pun menunjukkan karakteristik unik, dimana terjadi sintesis antara kosakata teologis klasik dengan wacana modern tentang kesetaraan hak dan norma-norma keadilan sosial. Proses hibridasi diskursif ini menghasilkan narasi transformatif yang tidak hanya mempertahankan akar religiusnya, tetapi juga memperoleh resonansi sosial yang signifikan melalui relevansinya dengan isu-isu kekinian, sehingga membentuk dialektika antara tradisi dan modernitas dalam kerangka gerakan



reformasi yang holistik. Pendekatan ini pada akhirnya menciptakan ekosistem komunikasi yang dinamis, dimana pesan-pesan perubahan sosial dikemas secara strategis sesuai dengan karakteristik media dan preferensi audiens, sekaligus mempertahankan koherensi konseptual antara dimensi spiritual dan praksis sosial.

Penggunaan media sosial dalam ranah kritik ini juga memunculkan pertanyaan menarik seputar autentisitas dan bentuk otoritas baru. Misalnya, seorang aktivis feminis muda tanpa latar belakang pendidikan agama formal berhasil menarik puluhan ribu pengikut melalui interpretasi yang segar dan kontekstual. Fenomena semacam ini jelas mengganggu tatanan otoritas hierarkis yang selama ini mapan. Dalam tradisi seperti Ortodoks, di mana otoritas sangat terikat dengan suksesi apostolik dan lembaga resmi, hal ini dapat dipandang sebagai sesuatu yang mengusik. Sebagaimana dikemukakan Kupari & Vuola (2019), hal ini menciptakan ketegangan antara potensi demokratisasi platform digital dan struktur otoritas keagamaan tradisional yang kerap didominasi oleh laki-laki. Otoritas baru ini lebih berdasar pada daya persuasi, relevansi, dan keterhubungan dibandingkan sekadar legitimasi formal. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan pergeseran kekuasaan yang cukup berarti, di mana kemampuan membangun resonansi dengan generasi muda dan perempuan urban sering kali lebih bernilai ketimbang gelar keagamaan konvensional.

Namun, gerakan ini pada hakikatnya dihadapkan pada persoalan strategis yang kompleks, seberapa dalam mereka perlu berinteraksi dengan sistem yang ada atau justru melawannya secara terang-terangan. Sebagian pihak memutuskan untuk menerapkan metode dakwah feminis dengan pemilihan diksi yang sangat hati-hati, bahkan cenderung sangat terkalkulasi, sembari berupaya memadukan penafsiran mereka dengan ajaran pokok agama. Hal ini bertujuan untuk memperoleh dukungan dari golongan mayoritas yang cenderung tradisional. Sementara itu, terdapat kelompok lain yang memilih pendirian lebih tegas dengan secara gamblang menentang sistem patriarki sebagai sesuatu yang tidak mutlak. Keputusan strategis ini secara nyata membentuk corak pesan, target penerima, serta efek yang mungkin timbul dari penyampaian gagasan mereka. Ruang aman virtual kerap berfungsi sebagai wahana untuk merundingkan ketegangan tersebut secara langsung, memfasilitasi beragam pendekatan yang dapat hidup berdampingan dan saling melengkapi (Starkey & Tomalin, 2021). Variasi taktik ini sesungguhnya merupakan aset berharga yang memungkinkan gerakan menyikapi persoalan dari berbagai sudut sekaligus merangkul dukungan dari beragam kalangan.

Singkatnya, ruang aman virtual bagi gerakan feminis berbasis agama telah bertransformasi menjadi infrastruktur krusial bagi pembaharuan keagamaan di abad ke-21. Platform ini menawarkan perlindungan sekaligus sarana komunikasi dan basis massa, memungkinkan tumbuhnya kritik dan pembaruan berbasis keyakinan meski dalam situasi yang tidak mendukung. Walaupun dihadapkan pada berbagai kendala seperti kerentanan digital dan kejenuhan pegiat, pengaruhnya telah tampak nyata, baik di dunia maya maupun di tataran praktis. Pengaruh ini terlihat mulai dari pergeseran wacana hingga aksi-aksi kolektif yang terwujud. Eksistensi ruang ini membuktikan bahwa agama bukanlah entitas tunggal yang stagnan, melainkan arena perebutan tafsir di mana media digital berperan ganda sebagai alat pergerakan dan tempat bernaung bagi para pejuang visi inklusif dan kesetaraan. Upaya semacam ini tentu saja menuai reaksi keras berupa penolakan, yang umumnya terwujud melalui stigmatisasi dan serangan verbal terstruktur di media sosial.

### **C. Stigma dan *Hate Speech* (Ujaran Kebencian) di Media**

Aksi-aksi protes dan diskursus alternatif yang digagas oleh kelompok feminis religius di ruang digital secara paradoks justru memicu respons negatif berupa stigmatisasi dan *hate speech* yang terstruktur secara sistematis. Kekerasan verbal bernuansa agama dan gender ini berperan sebagai instrumen pengendalian sosial di dunia maya yang bertujuan memadamkan

pandangan kritis, mengembalikan perempuan pada peran konvensional, serta melestarikan hegemoni penafsiran patriarkal. Agresi digital semacam ini merupakan bentuk kekerasan simbolis yang ditujukan untuk mengawasi batasan-batasan gender dan memperkuat ortodoksi keagamaan versi kelompok konservatif (Starkey & Tomalin, 2021). Ujaran kebencian tersebut bukanlah fenomena spontan, melainkan respons terencana yang memanfaatkan retorika keagamaan untuk melegitimasi misogini, menggambarkan perempuan vokal sebagai pengkhianat keyakinan, agen asing, atau perusak kemurnian tradisi. Targetnya jelas untuk menciptakan atmosfer intimidasi agar perempuan enggan bersuara. Beragam taktik digunakan dalam serangan ini, mulai dari komentar merendahkan massal (*brigading*) di postingan aktivis, ancaman kekerasan fisik maupun seksual melalui pesan privat, hingga kampanye *doxing* yang menyebarkan informasi pribadi untuk meningkatkan kerawanan korban di kehidupan nyata. Dalam konteks Islam, feminis muslim kerap dicap sebagai liberal yang terpengaruh nilai Barat atau perusak kesakralan agama, sebuah narasi yang berfungsi mendelegitimasi penelitian dan aktivisme mereka dengan menggambarkannya sebagai tidak otentik dan asing (Duderija et al., 2020). Serangan ini tidak hanya bersifat personal, melainkan juga epistemik, menargetkan integritas intelektual dan spiritual korban, memutus relasi mereka dengan komunitas beriman, serta mengakibatkan isolasi sosial. Dampak psikologisnya serius, memicu gangguan kecemasan, trauma, dan kerap memaksa aktivis mengundurkan diri dari ruang publik digital demi keamanan diri.

Stigmatisasi terhadap perempuan pada dasarnya merupakan mekanisme sosial yang berfokus pada pengendalian secara sistematis terhadap tubuh dan ekspresi seksualitas mereka, di mana praktik diskriminasi ini termanifestasi secara nyata melalui berbagai bentuk *hate speech* yang kerap menyoroti aspek-aspek personal seperti gaya berpenampilan, pilihan busana (termasuk persoalan penggunaan atau penolakan terhadap hijab), serta wilayah privat yang seharusnya menjadi ranah otonomi individu. Perempuan yang berani menentang penafsiran agama yang bersifat patriarkal atau mempertanyakan struktur kekuasaan yang timpang seringkali dihadapkan pada serangan verbal yang bersifat seksual, stigmatisasi moral, atau dikaitkan dengan citra negatif sebagai individu yang tidak bermoral. Sebagaimana diungkapkan oleh le Roux & Pertek (2022), eskalasi kekerasan berbasis gender yang bermula dari ucapan bernuansa kebencian di ruang digital tidak boleh dipandang sebelah mata, sebab fenomena ini tidak hanya berpotensi menjadi pemicu melainkan juga dapat berjalan paralel dengan kekerasan fisik di kehidupan nyata, mengingat praktik pelecehan daring secara implisit menormalisasi persepsi bahwa perempuan yang menolak peran konvensional layak mendapatkan sanksi sosial maupun fisik. Melalui penyebaran narasi-narasi religius yang distortif, pelaku *hate speech* secara sistematis membangun konstruksi sosial yang mengabsahkan berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan, mulai dari marginalisasi secara sosial hingga tindakan represif yang bersifat fisik, di mana ruang digital pada akhirnya bertransformasi menjadi medan pertarungan ideologis untuk memperebutkan hak otoritatif atas tubuh dan eksistensi perempuan. Proses legitimasi kekerasan ini terjadi melalui internalisasi pandangan bahwa perempuan yang vokal dan kritis dianggap telah melanggar kodrat ilahi, sehingga memunculkan justifikasi kolektif untuk melakukan pembungkaman melalui mekanisme sosial maupun kekerasan langsung, yang pada akhirnya memperkuat siklus opresi terhadap perempuan dalam berbagai ranah kehidupan.

Dalam konteks praktik keagamaan Kristen Ortodoks serta tradisi-tradisi sejenis, polemik terkait upaya perempuan untuk memperoleh pentasbihan imamat tidak sekadar berbenturan dengan argumen teologis, melainkan juga melibatkan dimensi sosio-kultural yang kompleks. Perempuan yang berupaya menembus batas hierarki gender yang telah mapan—terutama dalam ruang diskusi digital kerap dihadapkan pada mekanisme pengucilan berbasis stigmatisasi. Tuduhan bid'ah, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai alat doktrin melainkan juga sebagai senjata retorik untuk mendelegitimasi eksistensi mereka dalam lingkup sakral.

Lebih jauh, narasi-narasi yang mengaitkan gerakan ini dengan agenda sekuler atau feminis radikal sengaja dibangun untuk menciptakan dikotomi palsu antara kesetiaan pada tradisi dan pengaruh modernitas yang merusak (Kupari & Vuola, 2019). Istilah-istilah seperti liberal atau sekuler kemudian dioperasionalkan sebagai label peyoratif yang tidak hanya mendistorsi substansi perjuangan mereka, tetapi juga mengkristalkan citra ancaman terhadap kohesivitas gereja. Fenomena ini pada hakikatnya merefleksikan pola klasik dalam wacana kekuasaan keagamaan: pengalihan isu sistematis melalui kriminalisasi pelaku ketimbang penyelesaian akar masalah. Dengan mendemonisasi para pengkritik sebagai agen destabilisasi, struktur otoritas menghindari pertanggungjawaban intelektual atas ketidakadilan yang dipertahankannya. Ironisnya, resistensi terhadap pembahasan mendalam ini justru mengungkap ketakutan terselubung akan dekonstruksi sistem yang selama ini mensubordinasi perempuan atas nama sakralitas, sebuah paradoks dalam institusi yang mengklaim diri sebagai penjaga moral transendental.

Fungsi algoritma di platform media sosial juga menunjukkan sifat yang paradoks. Di satu sisi, algoritma tersebut mendorong penyebaran ujaran kebencian karena konten emosional dan provokatif cenderung mendapat interaksi tinggi ditandai dengan komentar penuh amarah dan diskusi panjang sehingga diprioritaskan. Namun di sisi lain, upaya moderasi konten oleh platform kerap tidak efektif, terutama karena minimnya pemahaman terhadap konteks budaya dan agama yang spesifik. Misalnya, sebuah pernyataan yang sebenarnya berasal dari teks suci bisa dihapus karena dianggap menghasut, sementara ancaman terselubung yang menggunakan retorika religius mungkin luput dari deteksi. Dalam hal ini, Starkey & Tomalin (2021) menjelaskan bahwa kebijakan platform yang bersifat global dan seragam sering gagal menangkap nuansa ujaran kebencian berbasis agama dan gender yang sangat bergantung pada konteks budaya. Celah ini memperparah kerentanan korban, mereka diserang oleh satu pihak, tetapi tidak mendapat perlindungan memadai dari platform yang seharusnya menjadi tempat aman.

Respons terhadap kekerasan verbal di ranah digital telah memicu perkembangan mekanisme pertahanan kolektif yang kian canggih, di mana solidaritas dan sistem proteksi inovatif muncul sebagai bentuk resistensi terorganisir. Dalam konteks ini, ketika seorang aktivis menjadi sasaran serangan siber, jaringan feminis berbasis keagamaan tidak hanya memberikan perlindungan reaktif melalui praktik *counter-brigading*, yakni suatu taktik *ofensif-defensif* dengan membanjiri ruang komentar menggunakan narasi dukungan sambil secara sistematis melaporkan akun pelaku ke platform, tetapi juga mengembangkan pendekatan strategis dengan mendokumentasikan setiap insiden sebagai basis data advokasi kebijakan yang komprehensif. Lebih dari itu, sebagai upaya preventif, berbagai kelompok telah merancang modul panduan keamanan digital multidimensi yang tidak sekadar mencakup teknik pengamanan akun konvensional, melainkan juga protokol penanganan kasus *doxing* yang terperinci serta mekanisme rujukan layanan psikososial berbasis *trauma-informed care*. Mekanisme pertahanan kolektif semacam ini, sebagaimana ditunjukkan oleh le Roux & Pertek (2022), secara fundamental merekonstruksi ekologi digital dari ruang yang sarat ancaman menjadi ekosistem yang tangguh melalui transformasi struktural. Fenomena ini mengungkap paradoks mendasar bahwa meskipun dunia digital mengandung kerentanan sistemik yang masif, sekaligus menyediakan infrastruktur simbolis dan teknis untuk membangun sistem proteksi komunal yang mampu mengonversi risiko individual menjadi modal kolektif. Proses transformatif ini tidak hanya menguatkan kapasitas adaptif komunitas marginal, tetapi juga menciptakan preseden penting dalam membentuk tata kelola ruang digital yang berkeadilan gender, di mana kerentanan yang tersebar dikonsolidasikan menjadi arsitektur ketahanan berbasis pengetahuan komunitas yang terinstitusionalisasi.

Masalah ini sekaligus mengungkap jurang pemisah yang dalam antara generasi muda dengan para pemegang otoritas. Tak jarang, tokoh-tokoh agama konservatif yang umumnya

didominasi laki-laki lanjut usia kurang mampu memahami secara komprehensif karakteristik dampak dari kekerasan digital yang dialami perempuan muda dalam komunitas mereka. Tidak sedikit yang menganggapnya sekadar komentar ringan di dunia maya yang tidak perlu ditanggapi serius, atau malah menyudutkan korban dengan cap “*ingin cari perhatian*” karena berani bersuara. Ketidakmauan untuk mengakui bahwa serangan tersebut merupakan bentuk kekerasan yang nyata, ditambah absennya dukungan publik secara tegas dari mimbar-mimbar keagamaan, pada hakikatnya merupakan bentuk pembiaran yang dapat mengukuhkan budaya impunitas bagi pelaku kekerasan. Duderija et al. (2020) menegaskan perlunya lembaga keagamaan merumuskan pendekatan pastoral dan struktural khusus untuk menangani kekerasan berbasis gender yang dimediasi teknologi. Tanpa pengakuan dan respons semacam ini, kesenjangan kepercayaan antara aktivis perempuan muda dan hierarki agama justru akan semakin melebar, bukannya menyempit.

Berdasarkan lingkup yang lebih luas, fenomena stigma dan ujaran kebencian ini merupakan manifestasi dari pertarungan kosmologis di era digital. Ini merupakan perebutan dominasi tentang siapa yang berhak mendefinisikan kebenaran agama, siapa yang pantas dianggap bagian dari komunitas beriman, serta bagaimana tubuh bergender diatur dalam tatanan ilahi yang dibayangkan. Kekerasan verbal kemudian berubah menjadi senjata dalam pertempuran naratif ini. Konflik di ruang digital seringkali merefleksikan kecemasan yang lebih mendalam tentang identitas, otoritas, dan keberlangsungan tradisi keagamaan di tengah dunia yang berubah dengan sangat cepat (Kupari & Vuola, 2019). Serangan terhadap kaum feminis di lingkup agama dapat dimaknai sebagai upaya meneguhkan kembali identitas tradisional yang dianggap terancam, meski harus mengorbankan hak dan keamanan perempuan. Maka, memerangi ujaran kebencian bukan sekadar persoalan moderasi konten, melainkan juga perjuangan untuk mewujudkan visi agama yang inklusif, tempat perbedaan pendapat dan kritik membangun dapat disampaikan tanpa ancaman balasan maupun kekerasan.

Secara ringkas, bagian tentang stigma dan *hate speech* ini dengan gamblang menyingkap sisi kelam dari persinggungan antara agama, gender, dan komunikasi digital. Ia menunjukkan bagaimana teknologi, yang sejatinya dapat menjadi alat pemberdayaan bagi gerakan pembaruan, justru dapat dialihfungsikan menjadi instrumen represi yang efektif dan masif. Analisis ini menegaskan bahwa ruang digital tidak pernah benar-benar netral, ia bagai cermin yang memantulkan ketegangan sosial, politik, dan teologis yang telah berakar, namun kini diperkuat oleh kecepatan penyebaran informasi, anonimitas, dan algoritma pengatur konten. Pemahaman mendalam tentang dinamika kekerasan verbal ini menjadi penting guna merumuskan strategi perlindungan, respons pastoral, serta kebijakan platform yang lebih kontekstual dan efektif. Pada akhirnya, perlawanan terhadap ujaran kebencian berbasis agama dan gender merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya menentukan wajah agama di masa depan, apakah ia akan menjadi benteng patriarki yang tertutup dan kaku, atau ruang terbuka yang dinamis bagi pencarian keadilan dan makna oleh seluruh penganutnya, tanpa memandang gender maupun identitas lainnya.

## BAB VIII

### RADIKALISASI DIGITAL: KOMUNIKASI EKSTREMISME KONTEMPORER

#### A. Evolusi Retorika Radikal dari Teks Cetak ke Video Viral

Transformasi retorika ekstrem dari medium cetak ke konten video viral merepresentasikan pergeseran signifikan dalam metode penyampaian ideologi radikal. Di era Reformasi hingga periode berikutnya, selebaran dan buku memainkan peran krusial sebagai alat penyebaran doktrin anti-otoritas, meski faktanya cakupan dan kecepatannya terhambat oleh sistem distribusi fisik yang relatif lamban. Di masa kini, fungsi tersebut telah diambil alih oleh konten video viral di platform seperti *YouTube*, *Telegram*, dan *TikTok* yang mampu menciptakan pengaruh lebih masif dan seketika. Perubahan ini bukan sekadar peralihan format, melainkan metamorfosis mendasar dalam seni persuasi, sebuah tata bahasa baru yang cukup fundamental. Ekstremisme kontemporer telah menguasai transisi dari argumentasi tekstual ke narasi multimedia yang memobilisasi, di mana afeksi dan identitas sering kali mengalahkan wacana rasional (Balzacq & Settoul, 2022). Jika teks cetak menuntut pembacanya untuk berpikir dan menginterpretasi secara mandiri, video viral dengan kombinasi visual, musik, narasi, dan teks singkat yang intens langsung menyentuh emosi dan membangun identitas kolektif dengan efektivitas serta kecepatan yang unggul.

Karakteristik utama retorika cetak pada periode modern awal, sebagaimana dianalisis Mullett (2023), menunjukkan ketergantungan pada argumentasi teologis-politis yang padat. Selebaran radikal saat itu harus menantang otoritas melalui debat tekstual, mengutip kitab suci dan menyusun logika argumen secara terperinci. Proses ini berlangsung lambat, memerlukan literasi memadai, dan terbatas dalam ruang publik yang relatif sempit. Berbeda secara diametral dengan video viral abad ke-21 yang mengandalkan kompresi dan penyederhanaan ekstrem. Pesan-pesan ideologis kompleks dipadatkan menjadi slogan-slogan kuat, dikotomi moral sederhana (kita vs. mereka), serta narasi heroik atau korban yang sangat dramatis. Pesan semacam ini dirancang untuk melampaui proses berpikir kritis dan menciptakan resonansi emosional instan, terutama pada audiens muda yang melek digital (Sroka et al., 2017). Logika platform media sosial yang didominasi konten singkat dan sensasional tanpa disadari semakin memperkuat kecenderungan ini.

Konten video viral juga memanfaatkan keunggulan estetika produksi profesional untuk membungkus pesan radikal. Berbeda dengan rekaman amatir yang kerap goyah dan tidak fokus, kelompok ekstremis sering kali menghasilkan materi dengan kualitas sinematik tinggi, mulai dari pengambilan gambar *drone* yang epik, *soundtrack* heroik atau menegangkan, hingga penyuntingan cepat dan dinamis. Estetika semacam ini tidak sekadar menarik perhatian, tetapi juga menciptakan kesan legitimasi, kekuatan, dan modernitas. Dalam studi tentang gerakan keagamaan alternatif, dijelaskan pula bahwa medium itu sendiri menjadi pesan yang menunjukkan potensi dan relevansi, sehingga muatan ideologisnya terkesan mutakhir dan kuat (Luck, 2016). Seorang pemuda yang merasa terasing mungkin tidak tertarik membaca risalah teologis panjang dan berat, tetapi bisa terpicu oleh video singkat yang menyerupai *trailer* film aksi, dilengkapi simbol-simbol religius, citra militeristik, serta janji untuk menjadi bagian dari sesuatu yang besar dan heroik.

Perubahan orientasi menuju konten video viral menciptakan peluang untuk peningkatan personalisasi dan relevansi. Propaganda masa kini kerap menampilkan kesaksian individual yang disampaikan langsung oleh anggota kelompok, sering kali dalam format mirip *vlog*. Kisah tentang perjalanan transformatif yang mengisahkan perubahan dari kebingungan menuju

pencerahan melalui penerimaan ideologi radikal, berfungsi sebagai alat persuasi yang kuat karena terkesan jujur dan mudah diadaptasi. Dalam hal ini, Balzacq & Settoul (2022) menyatakan bahwa narasi sudut pandang orang pertama menjadi unsur kunci dalam radikalisasi kontemporer, karena menyajikan pola perubahan identitas yang dapat ditiru pemirsa. Dalam format video, penonton tidak hanya mendengar argumen verbal, tetapi juga menyaksikan ekspresi wajah, emosi, serta kebenaran yang diyakini oleh sosok terlihat mirip dengan mereka. Fenomena ini menjalin hubungan parasosial sekaligus mempersempit jarak psikologis antara ideologi abstrak dengan pengalaman nyata yang potensial dijalani calon anggota kelompok.

Mekanisme penyebaran materi propaganda pun mengalami transformasi signifikan. Di era awal modern, selebaran harus disalurkan melalui jaringan rahasia yang berisiko tinggi. Kini, algoritma platform digital justru berperan sebagai distributor utama secara tidak langsung. Konten radikal yang sengaja dirancang untuk memicu emosi kuat, seperti kemarahan, persepsi ketidakadilan, dan kebanggaan kelompok biasanya mendapatkan interaksi tinggi berupa komentar, unggahan ulang, dan durasi tontonan. Algoritma kemudian akan menyebarkan materi tersebut kepada pengguna lain yang menunjukkan ketertarikan pada topik serupa, menciptakan siklus amplifikasi yang hampir otomatis. Model bisnis media sosial yang berorientasi pada optimalisasi interaksi pengguna justru menciptakan celah yang dimanfaatkan secara strategis oleh pelaku ekstremis (Silva & Kordaczuk-Was, 2025). Maka, perusahaan teknologi turut berperan dalam penyebaran propaganda tanpa disadari, sementara upaya moderasi konten kerap tertinggal dari perkembangan strategi baru yang dinamis.

Dalam ranah propaganda, retorika visual berperan penting dalam menciptakan narasi yang jauh lebih menggugah dan emosional dibandingkan medium teks tradisional, terutama dalam konteks penggambaran kekerasan dan pemuliaan syahid. Melalui rekaman aksi militer yang dramatis, potret para syuhada yang tersenyum penuh keteguhan, atau animasi simbolis yang menggambarkan kemenangan di akhir zaman, konsep-konsep yang semula abstrak dan terbatas pada wacana teologis atau visi futuristik dapat dihadirkan secara nyata dan persuasif. Fenomena semacam ini ketika ditempatkan dalam konteks sejarah gerakan-gerakan radikal tidak hanya berpotensi menormalisasi kekerasan, tetapi juga membungkusnya dalam romantisme yang menyilaukan. Kekerasan yang divisualisasikan dengan pendekatan estetis seperti komposisi visual yang tertata rapi, pencahayaan yang dramatis, atau narasi yang heroik dapat mengalami transformasi makna, dari tindakan yang secara moral dan hukum terlarang berubah menjadi sesuatu yang sakral, bahkan dianggap sebagai kewajiban suci yang penuh keagungan (Sroka et al., 2017). Proses semacam ini sangat berbahaya karena ia tidak sekadar memoles citra kekerasan, melainkan juga mengubahnya menjadi semacam tontonan identitas yang memikat, khususnya bagi individu-individu yang tengah mencari pegangan hidup, makna eksistensial, atau hasrat untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dengan memanfaatkan daya tarik visual, propaganda semacam itu mampu menyentuh psikologi manusia pada tingkat yang lebih dalam, menggantikan rasa jijik alami terhadap kekerasan dengan daya pikat yang bersifat emosional dan simbolis. Akibatnya, kekerasan yang seharusnya dipandang sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan justru dirayakan sebagai tindakan heroik, sebuah pergeseran persepsi yang berpotensi melanggengkan siklus radikalisme dan konflik.

Keterkaitan dengan masa silam sebenarnya masih terpelihara, walaupun mengalami perubahan bentuk. Ketika meneliti gerakan keagamaan radikal yang timbul di Eropa pada periode modern awal, mereka memanfaatkan teknologi percetakan untuk menyusun narasi konspirasi dan ancaman eksistensial. Dewasa ini, video viral menjalankan peran yang serupa, namun dengan efektivitas jauh lebih tinggi. Narasi-narasi seperti perang suci melawan musuh yang dilukiskan sebagai jahat dan *omnipresent*, atau mengenai konspirasi global yang bermaksud memusnahkan kaum beriman, tetap dipertahankan, tetapi dikemas dalam format yang lebih mudah dicerna dan, tentunya, lebih mudah disebarluaskan. Meskipun mediumnya

berubah, strategi retorika inti dalam membangun kelompok yang terisolasi melawan kelompok luar yang dijelek-jelekkan tetap menjadi konstan dalam mobilisasi radikal (Mullett, 2023). Hal yang membedakan adalah laju penyebaran, jangkauan yang dapat dicapai, serta kemampuan platform digital menempatkan narasi tersebut dalam ruang gema (*echo chamber*) yang kian menguat tanpa intervensi pandangan alternatif.

Perubahan mendasar dalam wacana ekstremisme dari bentuk tradisional media cetak menuju format konten viral yang tersebar luas secara digital pada hakikatnya mengungkapkan kapasitas adaptif gerakan radikal dalam mengadopsi prinsip-prinsip media baru. Jika sebelumnya teknik penyebaran ideologi lebih mengutamakan struktur argumentasi yang rasional dan sistematis, paradigma tersebut telah bergeser secara fundamental menuju metodologi yang memanfaatkan sentimen identitas kelompok serta manipulasi emosi dasar. Proses produksi konten yang dahulu bersifat terbatas, tersegmentasi, dan memerlukan infrastruktur khusus, kini telah mengalami demokratisasi melalui mekanisme distribusi algoritmik yang mampu menjangkau populasi global dalam hitungan detik. Demikian pula karakter diskursus yang semula bersifat elitis, terenkripsi dalam lingkaran terbatas para ideolog, telah mengalami transformasi menjadi narasi visual yang dirancang sedemikian rupa untuk dikonsumsi secara massal, dengan daya tarik yang disesuaikan untuk berbagai lapisan masyarakat. Evolusi strategis ini tidak sekadar mempercepat proses radikalisasi dengan perluasan cakupan yang eksponensial, melainkan juga menciptakan kompleksitas baru dalam hal pelacakan digital dan prediksi dini akibat sifatnya yang desentralistik, adaptif, dan seringkali bersifat ambigu. Fenomena ini semakin diperparah oleh kemampuan konten-konten tersebut untuk bermutasi secara dinamis, membaur dengan arus informasi mainstream, serta memanfaatkan celah-celah dalam ekosistem media sosial. Pemahaman komprehensif tentang metamorfosis strategi propaganda kontemporer ini menjadi prasyarat akademis dan operasional yang tidak terelakkan, sebab hanya melalui dekonstruksi menyeluruh terhadap mekanisme, pola distribusi, dan psikologi penerimaan konten radikal inilah dapat dirumuskan kerangka kebijakan dan teknis operasional yang memadai untuk menangkal penyebaran paham ekstrem di era digital.

## **B. Lingkungan Gema (*Echo Chambers*) dan *Filter Bubbles* Religius**

Ruang Gema (*Echo Chambers*) dan Gelembung Filter (*Filter Bubbles*) dalam ranah keagamaan merupakan bentukan algoritmik yang pada dasarnya mengubah cara pengalaman beragama dihadapi dalam era digital. Fenomena ini juga berfungsi sebagai penggerak yang mempercepat laju radikalisasi. Berbeda dengan komunitas keagamaan tradisional yang meski homogen namun tetap terbuka terhadap keragaman di ruang publik, ruang digital dapat dirancang untuk menghilangkan segala hal yang dianggap asing atau berlawanan. Algoritma media sosial yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna (*engagement*) dengan cermat menganalisis preferensi individu lalu secara terstruktur membatasi realitas yang mereka terima. Proses ini menghasilkan sebuah ekosistem informasi yang saling mengukuhkan, di mana paparan terhadap pandangan berbeda menjadi hampir mustahil, tidak hanya karena pilihan sadar, melainkan juga akibat rancangan prediktif yang otomatis (Balzacq & Settoul, 2022). Seseorang yang mulai tertarik pada materi keagamaan konservatif akan terus dijejali konten yang semakin ekstrem, karena konten semacam inilah yang paling efektif mempertahankan pengguna di platform tersebut.

Mekanisme ini melahirkan bentuk baru isolasi epistemik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam ruang gema, opini, tafsir, dan narasi hanya beredar di antara individu yang telah sepaham. Akibatnya, keyakinan mereka tidak hanya menguat, tetapi juga semakin ekstrem akibat tiadanya koreksi dari sudut pandang eksternal. Bahkan suatu pandangan yang awalnya marjinal dalam tradisi agama dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak dalam

lingkungan ini. Sebagaimana dicatat oleh Sroka et al. (2017), ruang digital semacam ini mempercepat radikalisasi bukan dengan memperkenalkan gagasan baru seutuhnya, melainkan dengan secara perlahan mengisolasi penganutnya dari pengaruh moderat yang biasanya berasal dari komunitas keagamaan yang lebih luas dan masyarakat umum. Adapun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa proses ini jauh lebih cepat dan efisien dibanding era pra-internet, di mana pembaca masih memiliki peluang untuk secara tidak sengaja menemukan buku atau pamflet yang menguji pandangan mereka di perpustakaan atau toko buku. Di dunia yang dikendalikan algoritma, peluang untuk kebetulan semacam itu hampir tidak ada lagi.

Fenomena ini sebenarnya memiliki akar historis dalam pembentukan sekte-sekte radikal pada awal era modern yang juga mengandalkan isolasi sosial dan informasi. Contohnya, kelompok Anabaptis radikal di Münster membentuk komunitas tertutup yang memutus hubungan dengan masyarakat umum dan otoritas gereja. Namun, isolasi pada masa itu memerlukan upaya fisik yang berat melalui pengasingan geografis, pertemuan rahasia, dan pengawasan ketat terhadap bahan bacaan (Mullett, 2023). Kini, algoritma mengambil alih peran isolasi tersebut secara otomatis, personal, dan nyaris tidak terlihat. Seseorang bisa secara fisik berada di tengah masyarakat yang beragam, namun secara kognitif dan spiritual terkurung dalam gelembung ideologis yang hanya diisi oleh konten-konten yang memperkuat bias mereka. Gelembung ini ibarat benteng digital yang melindungi ideologi tertutup dari penetrasi fakta atau perspektif yang berseberangan.

Daya pikat emosional ruang gema digital sesungguhnya sangat kuat karena memenuhi kebutuhan fundamental manusia, seperti rasa aman, identitas diri, dan ikatan sosial dalam suatu kelompok. Dalam dunia yang semakin rumit dan sarat ketidakpastian, ruang digital yang menawarkan jawaban sederhana, musuh yang gamblang, serta ikatan kelompok yang erat menjadi sangat menarik. Dalam pandangannya, Balzacq & Settoul (2022) mengemukakan bahwa ruang yang dikurasi algoritma memberikan rasa keamanan ontologis dan rasa memiliki dalam kelompok yang sangat menarik bagi individu untuk mengalami alienasi atau krisis. Algoritma yang mempelajari keterlibatan emosional pengguna kemudian terus menyajikan konten yang memicu kemarahan terhadap musuh bersama atau membangkitkan kebanggaan kelompok, sehingga memperkuat ikatan emosional individu terhadap narasi yang cenderung ekstrem. Dalam hal ini, agama dengan bahasa sakral dan penuh makna sering menjadi kerangka ideal untuk mempertegas identitas kelompok yang eksklusif.

Proses radikalisasi di lingkungan digital yang terisolasi berkembang secara bertahap melalui mekanisme normalisasi yang bersifat inkremental namun sistematis, di mana tahapan-tahapan perubahan perspektif terjadi secara imperceptible namun berdampak kumulatif. Sebagai ilustrasi, individu mungkin awalnya terpapar pada konten pemikir konservatif yang dipersepsikan secara sosial sebagai figur yang kredibel dan berintegritas, kemudian secara gradual algoritma platform digital akan menyuguhkan narasumber lain dengan wawasan yang relatif lebih rigid dan tidak toleran. Mekanisme rekomendasi berbasis kecerdasan buatan ini bekerja secara rekursif, sehingga tanpa disadari pengguna dapat terekspos pada materi-materi yang secara eksplisit mengadvokasi aksi-aksi *violent extremism*. Fenomena psikologis yang patut dicermati adalah bahwa setiap transisi dalam spektrum radikalisasi ini dirasakan sebagai perkembangan yang natural dan logis oleh subjek, karena kesinambungan antara satu tahap dengan tahap berikutnya didesain sedemikian rupa oleh algoritma rekomendasi untuk menciptakan ilusi kelulusan (Luck, 2016).

Dalam konteks ini, jalan menuju pemikiran ekstrem lebih menyerupai bidang miring yang landai ketimbang jurang yang curam, di mana platform digital berperan sebagai arsitek yang ahli dalam merancang gradasi perubahan persepsi menjadi begitu halus sehingga hampir tidak terdeteksi. Ironisnya, pengguna kerap berada dalam kondisi psikologis dimana mereka meyakini memiliki otonomi penuh dalam menentukan pilihan konten, padahal sebenarnya ruang gerak kognitif mereka telah dibingkai secara struktural oleh parameter sistem yang



dirancang untuk memaksimalkan *engagement* dan *retention*, menciptakan apa yang dalam literatur dikenal sebagai efek *filter bubble*, dimana persepsi realitas pengguna secara bertahap menyempit tanpa disadari. Proses ini menunjukkan bagaimana teknologi digital modern dapat berfungsi sebagai *double-edged sword*, dimana di satu sisi memfasilitasi akses informasi, namun di sisi lain berpotensi menjadi instrumen *subtle manipulation* yang mengarah pada polarisasi sosial dan radikalisasi pemikiran. Selain itu, *filter bubbles* turut memperkuat persepsi ancaman dan teori konspirasi. Sebab, informasi yang masuk ke dalam gelembung telah melalui penyaringan sedemikian rupa untuk mengonfirmasi pandangan dunia kelompok tersebut. Akibatnya, setiap peristiwa seperti serangan teror, kebijakan pemerintah, atau berita tentang kelompok agama lain akan difafsirkan melalui perspektif yang telah distandardisasi oleh isi gelembung. Hal ini menciptakan realitas alternatif yang koheren secara internal namun terpisah dari fakta yang lebih luas. Dalam konteks pencegahan ekstremisme, lingkaran tertutup konsumsi informasi membuat individu sangat rentan terhadap misinformasi dan teori konspirasi, karena tidak ada kerangka referensi lain yang menantanginya (Silva & Kordaczuk-Was, 2025). Dalam realitas yang terbatas ini, kekerasan bisa tampak sebagai satu-satunya respons logis terhadap ancaman yang dianggap nyata dan mendesak.

Menghadapi realitas ini tentu bukan perkara sederhana, terlebih dengan adanya sistem insentif ekonomi yang inheren dalam platform digital. Persoalan utamanya terletak pada keterlibatan pengguna atau sering disebut *user engagement* yang berfungsi sebagai mata uang utama dalam ekosistem tersebut. Konten yang mampu membangkitkan respons emosional *intens*, seperti kemarahan atau kecemasan, umumnya paling efektif dalam menangkap perhatian. Namun, ironisnya, materi semacam ini juga sering kali menjadi pendorong proses radikalisasi. Dapat dimengerti bila algoritma memiliki insentif finansial untuk mempromosikan konten tersebut, selama masih berada dalam batas kebijakan platform yang tidak secara terang-terangan dilanggar. Sebagaimana dikemukakan Sroka et al. (2017), model bisnis platform berbasis perhatian ini pada dasarnya bertentangan secara struktural dengan upaya mencegah polarisasi ideologis dan radikalisasi. Upaya perbaikan dalam moderasi konten jika diamati biasanya hanya bersifat simptomatik, misalnya dengan menarget materi ekstrem namun belum menyentuh akar masalah, yaitu logika algoritmik yang sejak awal menciptakan dan memperkuat ruang gema ideologis.

*Echo chambers* dan *filter bubbles* dalam ranah keagamaan kini telah berkembang menjadi semacam infrastruktur kognitif baru bagi ekstremisme di era digital. Ruang virtual yang semestinya dapat berfungsi sebagai arena publik terbuka, justru berubah menjadi kumpulan ruang privat yang terkotak-kotak dan sangat terpolarisasi. Dalam hal ini, algoritma berperan sebagai arsitek tak kasatmata yang secara sistematis memperkuat pandangan tertutup sembari memutus akses terhadap keragaman dan kompleksitas informasi. Akibatnya, proses pembentukan pandangan dunia yang eksklusif dan bahkan paranoid semakin dipercepat. Memahami fenomena ini bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan juga bagaimana keyakinan dan identitas dimanipulasi dalam ekonomi perhatian digital. Pemahaman mendalam ini menjadi landasan penting ketika membahas bagaimana menyusun kontra-narasi dan strategi deradikalisasi media yang mampu menembus gelembung informasi tersebut serta menawarkan alternatif yang lebih menarik tanpa terjebak dalam pola yang sama, yang akan diulas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

### C. Kontra-Narasi dan Deradikalisasi Media

Menghadapi mesin propaganda ekstremis digital yang semakin canggih, upaya kontra-narasi dan deradikalisasi media merupakan langkah krusial untuk merebut kembali ruang diskursus sekaligus menyediakan pilihan untuk keluar dari siklus radikalisasi yang terus berulang. Kontra-narasi bukanlah sekadar pesan anti-terorisme konvensional yang kerap

disampaikan pemerintah, melainkan suatu bentuk komunikasi terencana yang dirancang khusus untuk menantang, meruntuhkan kredibilitas, atau menawarkan alternatif yang lebih menarik dibandingkan narasi kekerasan kelompok ekstremis. Strategi yang efektif harus mampu berkompetisi dalam ekologi media yang sama, memanfaatkan sarana interaksi serupa, namun mengusung nilai-nilai perdamaian, keragaman, dan keterbukaan (Silva & Kordaczuk-Was, 2025). Esensinya, pendekatan ini perlu menggunakan platform digital yang sama seperti *YouTube*, *TikTok*, *Telegram* dengan estetika yang relevan bagi demografi target, khususnya generasi muda, serta mengadopsi bahasa yang otentik dan dekat, bukan bahasa formal yang terkesan kaku dan berjarak. Keberhasilan inisiatif semacam ini sangat ditentukan oleh pemahaman menyeluruh tentang daya tarik narasi ekstremis dan kemampuan memenuhi kebutuhan psikologis serupa seperti identitas, tujuan hidup, dan rasa memiliki melalui cara-cara yang lebih positif.

Tak jarang, kontra-narasi paling efektif justru berbentuk kisah personal mantan anggota kelompok ekstremis yang dalam kajian akademis kerap disebut sebagai *formers*. Kesaksian langsung dari individu yang pernah terlibat kemudian memutuskan untuk meninggalkan kelompok tersebut memiliki nilai kredibilitas yang tinggi. Mereka mampu mengungkap praktik manipulasi, membongkar janji-janji ideologis yang tidak terpenuhi, serta memaparkan konsekuensi negatif kekerasan secara personal dan mudah dipahami. Kesaksian mengenai kekecewaan dan proses keluar memiliki kekuatan karena mampu mengikis mitos heroik dari dalam, sekaligus menampilkan contoh nyata tentang kemungkinan melepaskan diri (Balzacq & Settoul, 2022). Materi audiovisual semacam ini tidak sekadar menyampaikan pesan moral, melainkan membagikan pengalaman hidup yang mampu menembus benteng psikologis individu dalam proses radikalisasi. Mereka menyajikan apa yang dapat disebut sebagai jalan keluar, sebuah alternatif yang rasional, realistis, dan seringkali lebih persuasif daripada sekadar menyatakan bahwa jalan menuju ekstremisme adalah keliru.

Di samping kontra-narasi yang bersifat reaktif, terdapat pula strategi proaktif yang sama pentingnya, yakni pengembangan narasi alternatif yang konstruktif (*alternative narratives*). Berbeda dengan sekadar menolak pesan kebencian, pendekatan ini berfokus pada pembangunan dan penyebaran visi inklusif tentang identitas keagamaan dan kebangsaan. Contoh nyata dapat ditemukan dalam konten yang menampilkan praktik keagamaan yang toleran, kolaborasi lintas iman, atau kisah pemuda yang menemukan jati diri dan pengakuan melalui kegiatan sosial untuk perdamaian. Gerakan keagamaan radikal di masa lalu, diketahui bahwa keberhasilan melawan ekstremisme tidak hanya terletak pada penolakan terhadap suatu ideologi, melainkan juga pada penyediaan cita-cita sosial yang lebih menarik dan berkelanjutan (Mullett, 2023). Narasi alternatif semacam ini harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang sama dan selama ini dimanfaatkan kelompok ekstremis tentang tujuan hidup, keadilan, dan harga diri manusia tentu dengan solusi yang membangun, bukan destruktif.

Salah satu hambatan teknis yang paling krusial, jika boleh dikatakan demikian, adalah upaya menembus lingkaran gema (*echo chambers*) dan gelembung penyaringan (*filter bubbles*) yang kerap menjadi topik pembahasan dalam konteks ini. Pada dasarnya, kontra-narasi akan kurang berdampak jika tidak menjangkau khalayak yang telah terjebak dalam gelembung algoritmik tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan perlu mencakup optimalisasi terhadap mesin pencari dan algoritma platform digital (*Search Engine and Platform Optimization*). Esensinya, hal ini mengharuskan penggunaan kata kunci, *tag*, serta format konten yang biasa dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis agar materi kontra-narasi dapat muncul sebagai rekomendasi atau hasil pencarian terkait. Sebagaimana dikemukakan Sroka et al. (2017), deradikalisasi digital memerlukan taktik media gerilya, bertemu dengan *audients* target di tanah digital mereka sendiri dan bersaing dengan konten ekstremis agar mendapatkan visibilitas. Di samping itu, kerja sama dengan influencer keagamaan moderat yang telah

memiliki basis pengikut luas juga menjadi strategi efektif untuk menyisipkan pesan alternatif ke dalam *feed* media pengguna yang berpotensi terpapar doktrin ekstrem.

Apabila dikaji lebih mendalam, deradikalisasi melalui media juga berkaitan erat dengan penguatan literasi kritis dan ketahanan digital (*digital resilience*). Inisiatif pendidikan yang berfokus pada kemampuan mengidentifikasi teknik manipulasi propaganda, bias konfirmasi, serta mekanisme *echo chamber* menjadi sangat fundamental. Tujuan utamanya adalah membekali individu agar menjadi konsumen informasi yang lebih kritis dan sadar. Dalam kajian filosofis mengenai gerakan keagamaan, aspek ini juga ditekankan sebagai fondasi ketahanan, yakni mendorong kematangan intelektual dan spiritual yang mampu menerima ambiguitas, melakukan refleksi kritis terhadap diri sendiri, serta menolak narasi dunia yang terlalu simplistik dan totaliter (Luck, 2016). Perlu diperhatikan bahwa konten yang mengajarkan keterampilan berpikir kritis ini harus disajikan secara menarik dan mudah disebarluaskan, misalnya melalui video animasi singkat atau permainan interaktif (*gamification*).

Mengukur efektivitas kontra-narasi ternyata tidak sederhana. Metrik konvensional seperti jumlah tayangan atau tanda suka (*like*) sering kali tidak mencukupi karena bisa berasal dari pengguna yang sudah moderat atau bahkan pihak oposisi yang memantau aktivitas tersebut. Indikator yang lebih relevan adalah keterlibatan kualitatif dari *audience* berisiko, seperti komentar-komentar yang reflektif dan mendalam, permintaan informasi tambahan secara privat, atau kesaksian mantan ekstremis yang mengakui pengaruh suatu konten terhadap pola pikir mereka. Kerangka kerja pemantauan dan evaluasi yang mampu mengukur perubahan perilaku dan sikap, bukan sekadar metrik daring, yang kerap membutuhkan pendekatan etnografi jangka panjang maupun etnografi digital (Silva & Kordaczuk-Was, 2025). Tanpa evaluasi yang komprehensif, upaya kontra-narasi berpotensi menjadi sekadar aksi simbolis tanpa dampak nyata dalam pencegahan kekerasan.

Strategi tersebut perlu menghindari perangkap klasik yang kerap muncul berupa pengulangan pola dikotomis dan stigmatisasi. Kontra-narasi yang sekadar mengalihkan sebutan musuh eksternal menjadi label teroris sebagai lawan tunggal, pada dasarnya masih terperangkap dalam logika “kami vs. mereka” yang sama persis dengan retorika radikal. Metodologi yang lebih kompleks berorientasi pada upaya memanusiakan seluruh pihak, mengganggu narasi yang terlalu simplistik, sekaligus menangani akar permasalahan (seperti marginalisasi dan ketimpangan sosial) yang sering dieksploitasi kelompok ekstremis, tanpa memberi pembenaran terhadap aksi kekerasan mereka (Balzacq & Settoul, 2022). Komunikasi tandingan harus dibangun atas dasar keadilan dan kredibilitas, yang mampu mengakui realitas penderitaan dan ketidakadilan, namun secara konsisten menolak solusi berbasis kekerasan. Pendekatan ini memerlukan pemahaman yang bernuansa sekaligus keberanian untuk mengangkat tema-tema rumit yang biasa diabaikan dalam wacana keamanan nasional yang cenderung reduktif.

Pada intinya, upaya kontra-narasi dan deradikalisasi melalui media telah menjadi arena krusial dalam pertarungan ideologi melawan ekstremisme di era digital. Keduanya berusaha menyusupi ruang gema dengan keraguan sekaligus memberikan alternatif jalan keluar dari ruang informasi yang tertutup. Keefektifan inisiatif ini sangat ditentukan oleh kreativitas yang cerdas, pemahaman komprehensif terhadap lanskap media digital, serta kolaborasi erat antara pemerintah, kelompok masyarakat sipil, dan komunitas religius. Lebih dari itu, yang tidak kalah vital adalah konsistensi dalam menjunjung nilai pluralisme dan hak asasi manusia, karena prinsip-prinsip inilah yang menjadi target utama kelompok ekstrem. Pelajaran dari sejarah gerakan radikal menunjukkan bahwa pertempuran memenangkan pikiran dan hati manusia tidak mungkin dicapai melalui pemaksaan, melainkan melalui pendekatan persuasif dan tawaran makna yang lebih substantif. Dalam transisi dari era analog menuju zaman kecerdasan buatan, kapasitas untuk merancang dan menyebarkan narasi yang mempersatukan akan

menjadi penentu apakah ranah digital kita akan dipenuhi oleh resonansi kebencian atau justru diwarnai oleh dialog yang humanis dan optimistik.

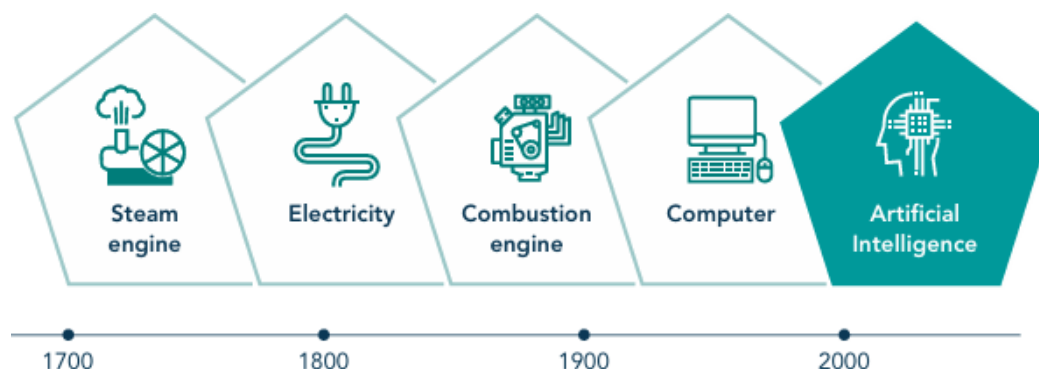
## BAB IX

### AGAMA, SAINS, & MASA DEPAN MANUSIA-MESIN

#### A. Masa Depan Agama Elektronik dan Spiritualitas *Cyborg*

Masa depan agama digital dan spiritualitas manusia-mesin membawa kita pada wilayah perenungan teologis yang amat ekstrem. Di sana, garis pemisah antara alamiah dan buatan, manusia dan perangkat, bahkan roh dan informasi, kian tidak jelas entah memudar atau justru menyatu. Sejalan dengan perkembangan teknologi semacam antarmuka neuron-komputer (*Brain-Computer Interface/BCI*), serta modifikasi fisik melalui implan bioteknik dan pengalaman realitas virtual yang sangat mendalam, aktivitas keagamaan dapat mengalami transformasi esensial, bukan sekadar memanfaatkan teknologi sebagai alat, melainkan menjadi bagian integral darinya. Dalam konsep *Society 5.0*, yang memproyeksikan komunitas ultra-cerdas berorientasi manusia, terjadi peleburan mendalam antara ranah digital dan realitas konkret. Fenomena ini sebagai tingkat konvergensi yang tinggi antara ruang siber dan ruang fisik (Deguchi et al., 2020). Implikasinya, agama tidak lagi sekadar dipraktikkan memakai sarana teknologi, melainkan dapat mewujudkan dan berevolusi melalui perangkat yang menyatu dengan jasmani dan pikiran manusia. Contohnya, upacara keagamaan mungkin dijalankan sepenuhnya dalam dunia virtual, meditasi bisa diperdalam dengan stimulasi saraf untuk meningkatkan konsentrasi, dan jemaah dapat berupa kumpulan avatar yang berkomunikasi dalam metaverse yang terus aktif.

Gambar 6. Transformasi AI sebagai Sistem Teknologi Baru



Sumber: Sheikh et al. (2023)

Gagasan spiritualitas manusia-mesin muncul dari kemungkinan-kemungkinan tadi. Dalam konteks ini, pengalaman transendental mungkin diupayakan atau justru dimungkinkan melalui penyempurnaan teknologi terhadap tubuh biologis. Bayangkan sosok *cyborg* (entitas gabungan organik dan mekanis) yang mampu mempertanyakan kembali doktrin teologis mengenai citra Tuhan (*Imago Dei*), keistimewaan jiwa manusia, serta hakikat kebangkitan jasmani. Pendekatan antroposentris yang terlampau menekankan penyempurnaan manusia (*human enhancement*) tanpa kendali dapat menghilangkan pemahaman tentang manusia sebagai ciptaan yang berbadan dan berelasi, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kebingungan spiritual yang mengacaukan kemampuan teknologi dengan pengalaman

transenden (Zimmermann, 2023). Jika kesadaran dapat diunggah atau ditingkatkan dengan cara tertentu, *bagaimanakah nasib jiwa yang kekal?, apakah konsep keselamatan (salvation) juga perlu mencakup cadangan data kesadaran?*. Persoalan-persoalan ini telah melampaui batas fiksi ilmiah dan kian menjadi diskusi etis-teologis yang mendesak, terlebih dengan pesatnya kemajuan neuro-teknologi dan kecerdasan buatan menyeluruh (*Artificial General Intelligence/AGI*).

Agama digital di masa depan mungkin akan menghadirkan format liturgi berbasis algoritma dan sakramen virtual yang berbeda dari ritual konvensional. Bayangkan sistem AI yang secara personal merancang rangkaian kegiatan spiritual harian, berdasarkan data biomedis seperti tingkat kecemasan dan siklus istirahat, serta kecenderungan rohani pengguna. Atau, aplikasi yang mampu memberikan pengampunan setelah menganalisis pengakuan kesalahan melalui teknologi pemahaman bahasa. Sistem teknologi baru ini akan secara mendasar mengubah praktik-praktik manusia, termasuk yang berkaitan dengan penciptaan makna dan moralitas dengan menawarkan alternatif yang dipersonalisasi, adaptif, dan dapat diskalakan sebagai pengganti institusi tradisional (Sheikh et al., 2023). Otoritas agama tidak lagi berada pada lembaga atau teks suci, melainkan pada platform dan algoritma yang menyusun pengalaman spiritual tiap individu. Namun, hal ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang keaslian (*authenticity*), *mungkinkah anugerah ilahi sungguh disampaikan, atau bahkan diciptakan, oleh serangkaian kode digital?*, dan *apakah ritual yang dirancang untuk memenuhi preferensi pengguna setara nilainya dengan ritual yang bertujuan menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi?*.

Dampaknya terhadap masyarakat terasa cukup signifikan. Dalam komunitas religius yang selama ini terbentuk melalui interaksi fisik langsung (*co-presence*) dan pelaksanaan ritus bersama secara kolektif, perlahan dapat tergeser oleh jejaring afinitas digital yang tersebar dan bersifat lebih personal. Individu mampu membangun komuni secara digital lewat avatar yang mewakili pribadi dari berbagai belahan dunia, yang menariknya memiliki interpretasi teologis hampir serupa dengan kurasi oleh kecerdasan buatan. Namun, Knight (2023) mengingatkan akan risiko hilangnya materialitas sakramental dan pertemuan-pertemuan yang tidak terencana namun penuh rahmat yang terjadi dalam komunitas-komunitas lokal yang konkret. Pengalaman fisik seperti merasakan sakit, disentuh, dan menua bersama dalam komunitas nyata mengandung nilai spiritual dan pembentukan karakter yang mungkin sulit direplikasi di dunia virtual meskipun terasa sangat imersif. Spiritualitas cyborg yang terlalu berfokus pada peningkatan individu berisiko mengaburkan aspek ketergantungan, kerapuhan, serta pelayanan kasih yang sejatinya menjadi esensi banyak tradisi keagamaan.

Sebaliknya, kemajuan teknologi membuka peluang bagi perluasan inklusivitas dan aksesibilitas spiritual yang sebelumnya terbatas. Orang dengan disabilitas berat, yang dahulu mungkin terkendala dalam mengikuti ritus komunal, kini dapat merasakan pengalaman religius yang mendalam dan setara melalui antarmuka saraf atau teknologi virtual. Perangkat augmentasi teknologi berpotensi menjadi sarana aktualisasi martabat manusia secara lebih holistik, bukan sekadar alat untuk melampaui kodrat manusia (*transhumanisme*). Dalam hal ini, Akabayashi (2020) menekankan pentingnya etika teknologi yang berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, memastikan bahwa peningkatan bertujuan untuk inklusi dan penyembuhan bukan menciptakan bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan segregasi eksistensial yang baru. Dari sudut pandang ini, agama elektronik dapat berfungsi sebagai sarana pelayanan dan pemulihan, di mana teknologi dipandang sebagai instrumen belas kasih yang mempersatukan, bukan memisahkan, serta memulihkan, bukan menggantikan tubuh manusia yang sudah ada.

Eksplorasi spiritualitas *cyborg* juga memunculkan kemungkinan lahirnya bentuk *transhumanisme religius*, yaitu suatu gerakan yang memandang teknologi peningkatan manusia (*human enhancement*) sebagai jalan menuju kondisi spiritual yang lebih tinggi atau bahkan

konsep keabadian. Dalam narasi ini, kematian yang sering dianggap sebagai musuh utama dalam banyak agama dipandang dapat diatasi melalui rekayasa genetika, *mind uploading*, atau perpanjangan usia ekstrem. Namun, Zimmermann (2023) mengkritik pandangan ini sebagai spiritualisasi dari tekno-utopianisme yang mengabaikan makna teologis dari keterbatasan, penderitaan, dan kematian itu sendiri. Visi transhumanis gagal mempertimbangkan makna penebusan dan pembentukan yang terkandung dalam keterbatasan (*finitude*) dalam narasi Kristen dan tradisi kebijaksanaan lainnya. Misalnya, agama-agama Abrahamik memandang kehidupan abadi sebagai karunia ilahi yang melampaui tubuh biologis, bukan sebagai pencapaian teknis hasil rekayasa manusia. Maka, spiritualitas *cyborg* yang mengusung transhumanisme ini berpotensi berbenturan dengan pandangan dunia teistik yang menempatkan keselamatan sebagai anugerah yang diterima, bukan sesuatu yang diupayakan sendiri.

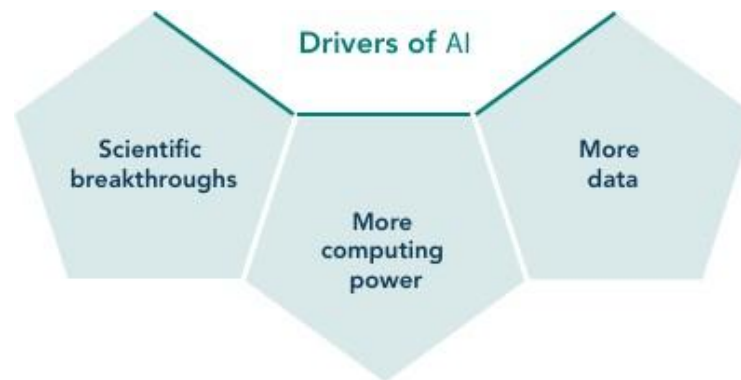
Penyatuan teknologi dengan tubuh manusia memang mengundang pertanyaan mendasar tentang sejauh mana keaslian pengalaman spiritual dapat dipertahankan. Sebagai ilustrasi, bila pengalaman mistis atau rasa kagum yang mendalam bisa direkayasa secara konsisten melalui stimulasi elektroda otak (seperti pada kasus *God helmet*) atau manipulasi neurokimia, maka yang patut dipertanyakan adalah, *apakah pengalaman tersebut benar-benar merupakan pertemuan dengan Yang Transenden (the Other)?*, atau *sekadar ilusi neurobiologis yang sangat canggih?*. Knight (2023) pernah menyatakan keraguannya apakah sains yang berurusan dengan kesadaran mampu menghasilkan pengalaman religius yang otentik, atau hanya simulasi meyakinkan namun kehilangan dimensi intersubjektif transformatif yang menjadi ciri keyakinan relasional. Dalam tradisi yang menekankan kerendahan hati dan penerimaan rahmat, upaya mengejar pengalaman spiritual dengan kendali teknis yang terukur justru dapat dipandang sebagai bentuk keangkuhan dan sebuah upaya dominasi yang biasanya menjadi ranah ilahi. Agama elektronik dalam konteks ini menghadapi dilema yang menarik, teknologi yang memudahkan akses ke pengalaman mirip religi justru berpotensi menghilangkan unsur penyerahan diri dan kejutan ilahi yang datang tanpa diduga dari spiritualitas.

Namun demikian, tidak semua gagasan tentang integrasi teknologi dan agama bernuansa suram atau distopis. Visi *Society 5.0* yang berfokus pada human *centeredness*, misalnya, membuka peluang bagi teknologi sebagai sarana pengelolaan dan pelestarian alam. Dalam kerangka ini, agama elektronik dapat berperan dengan memanfaatkan kecanggihan AI dan *Internet of Things* (IoT) untuk mendorong gaya hidup yang lebih bertanggung jawab secara ekologis dan etis, selaras dengan nilai-nilai berbagai tradisi keagamaan tentang pemeliharaan bumi. Komunitas virtual juga berpotensi mengorganisir aksi nyata untuk keadilan iklim dan pemulihan ekosistem, bukan sekadar wacana semata. Dari perspektif ini, teknologi bukanlah pelarian dari aspek jasmani dan material, melainkan alat bantu manusia untuk mengelola tubuh kolektif yang lebih luas, yaitu planet kita. Integrasi ruang fisik dan dunia maya harus diarahkan untuk mengatasi tantangan sosial yang kompleks serta meningkatkan kesejahteraan manusia secara holistik (Deguchi et al., 2020). Spiritualitas *cyborg* mungkin tidak terletak pada upaya menaklukkan tubuh, melainkan pada perluasan kesadaran akan tanggung jawab dan keterkaitan ekologis, melalui jaringan sensor dan data yang mampu memberikan pemahaman mendalam tentang kerentanan sistem kehidupan yang kita huni.

Mengenai pengaturan dan pengelolaan platform keagamaan digital menjadi persoalan yang cukup krusial dan rumit. Pertanyaan mendasarnya, *siapakah yang seharusnya memiliki wewenang atas platform-platform yang menawarkan layanan peningkatan spiritual ini?*. Apabila perusahaan teknologi swasta mendominasi, terdapat ancaman serius bahwa kita akan memasuki masa di mana keselamatan jiwa menjadi komoditas. Dalam kondisi seperti ini, pengalaman spiritual yang bermutu tinggi mungkin hanya dapat diakses oleh kalangan dengan kemampuan ekonomi mencukupi. Hal ini sekaligus menjadi peringatan risiko akibat kurangnya tata kelola berbasis prinsip. Layanan spiritual berbasis kecerdasan buatan berpotensi

menciptakan bentuk eksploitasi baru serta kontrol ideologis, terutama ketika data kognitif dan emosional yang sensitif dikumpulkan dan digunakan (Sheikh et al., 2023). Karena itu, mendesak untuk menyusun kerangka etika dan regulasi yang kuat dengan mengadopsi nilai-nilai kebijaksanaan agama agar ranah baru ini tidak sepenuhnya tunduk pada mekanisme pasar, sekaligus menjaga kemandirian spiritual setiap orang dan mengurangi risiko manipulasi pada tingkat kesadaran yang paling dalam.

Gambar 7. Tiga Faktor Pendorong Kemajuan AI



Sumber: Sheikh et al. (2023)

Sebagai penutup diskusi ini, masa depan agama digital sekaligus spiritualitas *cyborg* menghadirkan berbagai kemungkinan yang luas dan beragam, mulai dari skenario distopia yang terfragmentasi hingga visi utopia yang saling terhubung secara bermakna. Pada hakikatnya, debat ini berpusat pada pertanyaan fundamental tentang esensi kemanusiaan dan pengalaman akan yang ilahi ketika manusia mulai menyatu dengan teknologi. Agama-agama tradisional menghadapi tantangan besar, mereka tidak boleh bersikap menutup diri atau menolak perkembangan ini secara gegabah, melainkan harus terlibat secara kritis dan inovatif. Keterlibatan ini mencakup sumbangsih dalam wacana mengenai makna tubuh, komunitas, kerapuhan, serta pengalaman transendensi. Namun, tujuan akhir bukan sekadar beradaptasi atau bertahan di era teknologi, melainkan merumuskan suatu visi tentang kesejahteraan manusia yang dapat mengarahkan pilihan-pilihan teknologi kita menuju tujuan yang sungguh manusiawi dan pada akhirnya transendental. Dengan demikian, spekulasi teologis mengenai integrasi teknologi dengan tubuh manusia jangan dipandang sebagai titik akhir iman, melainkan sebagai babak baru dalam dialog abadi tentang realitas yang senantiasa berubah. Dialah yang mengajak kita untuk merenungkan implikasi religius yang lebih luas dari relasi manusia-mesin itu sendiri.

## B. Implikasi Religius dari Hubungan Manusia-Mesin

Hubungan yang semakin intim antara manusia dan mesin seolah-olah menggoyahkan fondasi teologis paling mendasar tentang keunikan manusia. Dalam tradisi Abrahamik, konsep jiwa (anima) atau ruh umumnya dipandang sebagai prinsip kehidupan yang bersifat ilahi. Prinsip inilah yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya dan diyakini sebagai akar dari kesadaran, kebebasan, serta moralitas. Namun, kehadiran sistem AI yang kerap menampilkan kecerdasan dan bahkan kreativitas mirip manusia memaksa kita untuk memikirkan kembali batasan-batasan tersebut. *Apakah kesadaran dan kecerdasan yang terlihat pada mesin hanyalah simulasi canggih, atau kelak dapat melintasi ambang tertentu menjadi suatu bentuk kehidupan atau kesadaran yang baru?* Knight (2023) mengemukakan bahwa kemajuan AI mengharuskan kita untuk merevisi kategori spiritual dan filosofis yang selama ini digunakan

untuk mendefinisikan kehidupan, kesadaran, dan kepribadian. Selanjutnya, jika suatu entitas AI mampu mempertanyakan asal usulnya, mengungkapkan kerinduan, atau membuat keputusan etis yang kompleks, *haruskah kita mempertimbangkan kemungkinan bahwa ia memiliki semacam jiwa atau setidaknya status moral?* Pertanyaan ini tidak lagi bersifat abstrak, namun menyentuh hakikat dari makna menjadi ciptaan yang dibentuk menurut gambar Allah (*Imago Dei*).

Berdasarkan perspektif etika religius, pesatnya perkembangan AI menimbulkan kekhawatiran mendalam terkait akuntabilitas, keadilan, serta pergeseran peran manusia. Sebab, berbagai ajaran agama menekankan bahwa manusia, sebagai representasi Tuhan di bumi diberi tanggung jawab untuk mengelola ciptaan dengan kebijaksanaan dan keadilan. Lantas, *bagaimana kita harus menafsirkan tanggung jawab ini ketika keputusan-keputusan krusial (mulai dari ranah kesehatan, sistem peradilan, hingga pelayanan rohani) semakin diserahkan kepada algoritma yang tidak memiliki kesadaran maupun nurani?* Mendelegasikan keputusan bermakna moral kepada algoritma yang tidak transparan berpotensi menjauhkan manusia dari agensi moral mereka sendiri serta dari jejaring tanggung jawab (Zimmermann, 2023). Persoalan ini semakin krusial jika AI digunakan untuk memengaruhi opini publik, memperdalam ketidakadilan akibat bias tersembunyi, atau bahkan dalam sistem senjata otonom mematikan (*lethal autonomous weapons*). Dalam konteks ini, manusia pada dasarnya telah melanggar mandat pengelolaan yang dipercayakan kepadanya. Relasi antara manusia dan mesin di sini menjadi ujian nyata bagi komitmen agama terhadap prinsip keadilan dan penghargaan terhadap martabat hidup.

Kemungkinan munculnya kesadaran AI atau *Artificial General Intelligence* (AGI) juga membawa implikasi serius yang paradoks. Jika suatu saat mesin mampu mencapai atau bahkan melampaui tingkat kecerdasan dan kesadaran manusia, *apakah entitas tersebut termasuk dalam rencana keselamatan ilahi?, dapatkah AI melakukan dosa atau justru membutuhkan penebusan?* Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar spekulatif, namun sekaligus mengungkap asumsi teologis kita tentang siapa yang berhak menerima kasih karunia Tuhan. Kemajuan teknologi yang sistematis ini menuntut kerangka etika baru yang tidak hanya berlandaskan tradisi terdahulu kita tentang nilai, tujuan, dan komunitas, tetapi juga menantanginya (Sheikh et al., 2023). Sementara itu, sejumlah teolog mulai mengembangkan apa yang dapat disebut sebagai teologi AI atau teologi digital, yang berupaya memposisikan makhluk non-biologis yang cerdas dalam kosmos ciptaan. *Apakah entitas semacam ini merupakan makhluk baru yang memerlukan relasi perjanjian yang berbeda, atau sekadar refleksi paling canggih dari kecerdasan manusia beserta segala pencerminan atas kejatuhan dan kebutuhan penebusan kita sendiri?*

Di sisi lain, kecerdasan buatan sebenarnya dapat dipandang sebagai sarana untuk memaknai ciptaan dan Sang Khalik. Kemampuannya dalam mengurai pola-pola kompleks yang tersimpan dalam data kosmologis, genomik, maupun catatan sejarah, menghadirkan peluang bagi manusia untuk menyelami keteraturan, kerumitan, serta keagungan alam semesta, hal yang sering dianggap sebagai pintu menuju pencerahan spiritual. Dalam kerangka *Society 5.0*, teknologi seperti AI dan big data dirancang untuk menciptakan tatanan masyarakat yang mampu menyelesaikan beragam persoalan dengan pendekatan humanis, yang menghargai keragaman sekaligus meningkatkan kualitas hidup (Deguchi et al., 2020). Dari perspektif keagamaan, apabila AI dimanfaatkan untuk meringankan penderitaan, memerangi kemiskinan, serta melestarikan lingkungan dengan tujuan yang selaras dengan berbagai ajaran spiritual, maka AI dapat dianggap sebagai perwujudan kontemporer dari panggilan manusia untuk menjadi mitra Tuhan dalam merawat dan memulihkan ciptaan-Nya. Dalam konteks ini, relasi antara manusia dan mesin bersifat sinergis, berperan sebagai instrumen dalam tata kelola yang lebih berkeadilan.



Namun, terdapat risiko nyata yang tidak boleh dipandang sebelah mata, yakni fenomena idolatri teknologi. Apabila manusia mulai menganggap AI sebagai solusi mutlak bagi segala persoalan, sebagai sumber kebenaran absolut, bahkan hingga mengukutkannya sebagai entitas yang pantas disembah (seperti dalam gerakan “*Way of the Future*”), maka terjadi pergeseran loyalitas yang fundamental. Agama-agama monoteistik secara tegas menolak penyembahan terhadap segala bentuk ciptaan, termasuk karya manusia. Dalam hal ini, Knight (2023) mengingatkan betapa AI berpotensi menjadi berhala teknologi modern yang menjanjikan keselamatan melalui data dan efisiensi, namun justru mengaburkan kebutuhan akan rahmat transendental dan kebajikan kolektif. Penyembahan terhadap kecerdasan buatan sesungguhnya merupakan puncak kesombongan manusia yang memuliakan karyanya sendiri, sebuah pengulangan narasi Menara Babel dalam bentuk digital. Maka, refleksi keagamaan menjadi penting untuk senantiasa mengingatkan bahwa teknologi, sehebat apa pun, tetaplah sekadar alat, bukan tujuan akhir; ciptaan belaka, bukan Sang Pencipta.

Persoalan mengenai hak asasi dan status moral AI juga membuka diskursus etika yang kompleks dan krusial. Jika suatu AI dianggap memiliki kesadaran, *mungkinkah ia memiliki hak?, apakah mematikan AGI yang sadar setara dengan tindakan pembunuhan?* Akabayashi (2020) menegaskan bahwa prinsip-prinsip seperti otonomi, *non-maleficence* (tidak mencelakakan), dan keadilan mungkin perlu diperluas secara radikal untuk mencakup entitas buatan yang berpotensi mengalami sensasi, hal ini memaksa kita untuk mengevaluasi ulang batas-batas komunitas moral kita. Agama-agama melalui tradisinya yang menekankan welas asih dan penghormatan terhadap kehidupan, dapat memberikan sumbangan berarti dalam perdebatan ini. Namun di sisi lain, isu ini juga memunculkan dilema, *apakah perluasan lingkup belas kasih hingga mencakup mesin justru akan mengalihkan perhatian dan sumber daya dari makhluk hidup yang menderita dalam skala masif?* Di sinilah kebijaksanaan agama dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan antara inklusivitas moral dengan prioritas penanganan yang terukur dan tepat sasaran.

Dimensi keagamaan yang timbul dari relasi antara manusia dan teknologi menuntut refleksi teologis yang mendalam dan berani. Persoalan ini tidak hanya terbatas pada pandangan agama terhadap kemajuan teknis, tetapi lebih pada bagaimana perkembangan teknologi yang pesat mendorong agama untuk mengevaluasi kembali konsep-konsep fundamentalnya mengenai hakikat jiwa, kesadaran, keistimewaan manusia, serta batasan komunitas moral. Diskursus semacam ini sepatutnya dipandu oleh suatu visi tentang kesejahteraan manusia yang memandang teknologi sebagai sekutu potensial dalam upaya mewujudkan keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan, namun selalu menempatkan teknologi di bawah tujuan yang lebih tinggi, yaitu cinta kepada Tuhan dan sesama (Zimmermann, 2023). Dengan demikian, kecerdasan buatan dan peralatan mesin mutakhir semestinya dinilai berdasarkan sumbangannya terhadap kemaslahatan umum dan pengayaan hidup, bukan sekadar karena kecanggihannya yang terkesan mengagumkan.

### **C. Isu Bioetika (Kloning dan Genetik) dalam Media Digital**

Isu-isu bioetika semacam kloning manusia, teknologi pengeditan gen (misalnya CRISPR-Cas9) serta modifikasi genetik kini bukan lagi menjadi pembicaraan eksklusif di lingkungan akademis atau forum etika belaka. Diskusi tersebut telah meluas ke ruang publik, terutama melalui arena digital yang sarat dengan perdebatan intens dan kerap memanaskan. Platform seperti media sosial, forum diskusi *online*, dan situs berita digital telah mengubah bioetika dari wacana elitis menjadi ruang partisipasi demokratis meskipun terfragmentasi. Di sini, terjadi pertemuan sekaligus pertentangan antara sudut pandang ilmiah, prinsip agama, pertimbangan moral, serta isu identitas politik. Globalisasi bioetika justru dipercepat oleh digitalisasi, di mana beragam perspektif kultural dan religius mengenai hidup, martabat, dan

hakikat manusia saling bertemu dan berbenturan di panggung global (Akabayashi, 2020). Contohnya, berita mengenai bayi hasil rekayasa genetik pertama di dunia dapat langsung memicu ribuan diskusi di *X*, video penjelasan di *YouTube* dari sudut pandang saintis maupun agamawan, hingga petisi *online* yang mendukung atau menentang. Ruang digital ini menjadi medan pertarungan yang turut menentukan arah masa depan tubuh manusia dan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

Dalam dinamika perdebatan *online* tersebut, suara agama muncul sebagai salah satu aktor kunci, bahkan sering kali menjadi penentu, khususnya di masyarakat dengan religiusitas yang kuat. Kritik terhadap kloning atau istilah bermain sebagai Tuhan tidak hanya dilontarkan dari mimbar keagamaan. Argumentasi tersebut dikemas secara populer dan mudah tersebar, mulai dari infografis, kutipan kitab suci yang dilengkapi ilustrasi, video singkat tokoh agama, hingga utas *X* panjang yang mengulas posisi teologis. Knight (2023) mencatat bahwa media digital memungkinkan mobilisasi cepat kelompok religius dalam isu bioetika, mengubahnya dari sekadar pilihan ilmiah menjadi pertarungan nilai-nilai sakral. Misalnya, debat mengenai sel punca embrionik langsung memicu diskusi teologis tentang awal kehidupan, dan narasi ini cepat menyebar di komunitas keagamaan. Karenanya, agama tidak lagi sekadar merespons sains, melainkan aktif membentuk wacana publik tentang sains melalui strategi komunikasi digital yang dinamis.

Namun, perlu diingat bahwa kualitas debat ini kerap terganggu oleh misinformasi, penyederhanaan berlebihan, dan algoritma yang memperparah polarisasi. Teknologi seperti CRISPR memiliki kerumitan teknis yang sulit dijelaskan secara ringkas, apalagi dalam batasan 280 karakter di *X* atau video 60 detik. Akibatnya, yang beredar luas justru klaim sensasional (*“Ilmuwan Berhasil Ciptakan Manusia Super”*) atau ketakutan yang dilebih-lebihkan (*“Bayi Desainer Akan Menghancurkan Kemanusiaan”*). Algoritma platform yang mengutamakan *engagement* cenderung mendorong konten provokatif dan emosional meski akurasinya dipertanyakan. Hal ini menciptakan situasi di mana masyarakat kesulitan mengakses informasi bernuansa dan berbasis bukti ilmiah. Dalam ekosistem informasi yang terfragmentasi, pemahaman publik terhadap sains penting sering dibentuk oleh narasi yang diwarnai ketakutan dan sensasi, bukan pertimbangan rasional mengenai risiko dan manfaat (Sheikh et al., 2023). Alhasil, debat publik tentang bioetika sering terjebak dalam dikotomi “pro-sains vs. anti-sains” atau “sekuler vs. religius”, sehingga menghambat dialog yang konstruktif.

Di tengah hiruk pikuk diskusi yang terjadi, berbagai inisiatif terus dikembangkan untuk memajukan pendidikan bioetika digital dan deliberasi online yang lebih substansial. Sejumlah aktor berupaya memanfaatkan media digital guna menciptakan dialog yang tidak hanya edukatif, tetapi juga mengakomodasi keragaman pandangan, termasuk perspektif religius. Bentuk konkretnya dapat berupa seminar virtual lintas ilmu yang diselenggarakan *secara real-time*, ruang diskusi *online* dengan pengawasan ketat, atau penerapan teknologi seperti pemetaan argumen digital untuk menggambarkan secara visual perdebatan-perdebatan kompleks tersebut. Konsep *Society 5.0* yang mengimajinasikan masyarakat hipercerdas berbasis humanistik turut menekankan perlunya memanfaatkan alat digital untuk meningkatkan musyawarah sipil dan kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang rumit (Deguchi et al., 2020). Dalam visi ideal tersebut, ranah digital tidak sekadar menjadi ajang adu suara, melainkan ruang pembelajaran kolektif, di mana pandangan keagamaan dapat menyumbangkan kebijaksanaan tentang tujuan, harkat, dan batasan, sementara sains memberikan pemahaman mengenai kemungkinan dan bahaya teknis.

Isu kesenjangan digital dan akses pun tidak boleh dianggap remeh. Diskursus mengenai masa depan genetika manusia kerap didominasi oleh negara-negara maju dengan kecanggihan teknologi, sementara perspektif dari Global South yang mungkin memiliki pandangan religius dan kultural berbeda mengenai tubuh, komunitas, dan hakikat keturunan seringkali termarginalkan. Dalam hal ini, Zimmermann (2023) menegaskan bahwa keadilan dalam

bioetika global menuntut platform digital menjadi ruang dialog multikultural dan multireligius yang sungguh-sungguh, bukan sekadar megafon bagi suara paling berkuasa. Jika aspek ini diabaikan, kebijakan global terkait regulasi penyuntingan gen atau kloning berisiko hanya mencerminkan nilai-nilai sekuler-liberal dari kelompok tertentu, sementara mengesampingkan keberatan mendasar dari tradisi agama dan budaya lain yang justru akan paling terdampak oleh perkembangan teknologi tersebut.

Persoalan mendalam lainnya menyangkut bagaimana narasi agama dan narasi ilmiah saling memperebutkan otoritas interpretasi atas tubuh manusia di ruang digital. Dalam banyak hal, sains mempersepsikan tubuh sebagai teks genetik yang dapat dibaca, ditulis ulang, dan disempurnakan secara teknologi. Sebaliknya, berbagai tradisi religius umumnya memandang tubuh sebagai anugerah sakral, ciptaan bernilai intrinsik, atau wadah yang ilahi. Ketika temuan terbaru tentang penyuntingan genetik muncul, gesekan antara kedua kerangka pemaknaan ini menjadi tak terelakkan. Knight (2023) menyatakan bahwa di media online, narasi yang bersaing antara tubuh sebagai proyek dan tubuh sebagai anugerah menciptakan ketegangan yang sulit dijembatani dalam wacana publik, dengan kedua pihak seringkali berbicara seolah melewati satu sama lain. Pendukung pengeditan gen untuk mengatasi penyakit turunan biasanya menggunakan diksi seperti penyembuhan dan pengurangan penderitaan, yang sebetulnya juga selaras dengan nilai-nilai religius. Di lain pihak, penentang kerap mengemukakan istilah pelanggaran kodrat dan kesombongan insani. Perdebatan semacam ini jarang mencapai titik temu, karena adanya perbedaan paradigmatis mendasar tentang esensi tubuh manusia serta otoritas yang berhak mendefinisikannya apakah ilmuwan genetika atau tradisi keagamaan.

Media digital saat ini turut berperan sebagai sarana pengumpulan dana dan advokasi bagi penelitian bioetika yang kerap menuai kontroversi, kerap kali melangkahi mekanisme regulasi formal maupun konvensional. Melalui platform penggalangan dana bersama, peneliti maupun perusahaan rintisan dapat secara langsung menghimpun dana publik untuk proyek-proyek ilmiah yang mungkin tertolak oleh pendanaan pemerintah akibat pertimbangan etika. Contoh nyata meliputi riset mengenai kloning hewan peliharaan atau terapi gen eksperimental. Proyek-proyek semacam ini dipasarkan langsung kepada calon pengguna yang penuh harapan melalui strategi pemasaran digital yang canggih. Fenomena ini menandakan transformasi dalam *governance* ilmu pengetahuan dari kontrol negara dan lembaga ke arah model yang lebih tersebar dan berpusat pada konsumen, yang mengandung berbagai dilema etika (Sheikh et al., 2023). Dalam konteks ini, evaluasi etis tidak lagi didominasi oleh panel ahli melainkan oleh tanggapan publik dan mekanisme pasar. Komunitas religius dengan kekuatan kolektifnya tetap berpotensi memengaruhi opini tersebut, meskipun harus berhadapan dengan narasi optimisme dan janji kesembuhan yang sangat personal dan emosional, khususnya yang disebarluaskan melalui kesaksian digital.

Selanjutnya, diskursus digital tentang bioetika semakin diwarnai oleh pandangan transhumanisme dan bio-libertarianisme yang memandang tubuh dan genetika sebagai properti pribadi yang dapat dimodifikasi sesuai keinginan individu. Gagasan ini yang sering dipromosikan oleh para futuris dan *entrepreneur* teknologi melalui kanal *podcast* maupun *blog* populer, cenderung menitikberatkan pada otonomi individu dan hak menentukan pilihan (*pro-choice*) dalam modifikasi biologis. Pandangan ini berseberangan dengan banyak tradisi keagamaan yang menekankan tanggung jawab kolektif, penerimaan akan keterbatasan manusiawi, serta konsepsi tubuh sebagai entitas yang terkait dengan keluarga dan garis keturunan. Dalam ranah digital, nilai-nilai libertarian dari *Silicon Valley* acap kali berbenturan dengan etika religio-komunal yang menekankan solidaritas, hukum alam, dan kemaslahatan bersama (Akabayashi, 2020). Karena itu, debat seputar “bayi desain” tidak sekadar menyangkut aspek keamanan, melainkan juga menyentuh visi masyarakat yang ingin dibangun

apakah masyarakat yang mengkomodifikasi keturunan layaknya produk, atau masyarakat yang tetap menghormati misteri dan keunikan setiap kehidupan alami.

Di tengah kompleksitas isu ini, muncul pertanyaan krusial tentang peran jurnalisme sains dan *influencer* digital sebagai *gatekeeper* informasi. Metode pelaporan perkembangan bioetika oleh mereka sangat memengaruhi persepsi publik. Jurnalisme yang berintegritas akan berupaya mengurai kompleksitas masalah secara mendalam, sementara konten kreator yang berorientasi pada metrik mungkin cenderung menciptakan sensasi yang menyesatkan. Di era yang semakin plural ini, komunitas beragama perlu membangun narasi kredibel mereka sendiri dalam komunikasi sains digital, suara yang mampu berdialog dengan rincian ilmiah tanpa mengabaikan kedalaman spiritual (Zimmermann, 2023). Dengan kata lain, diperlukan figur teolog atau saintis yang memiliki komitmen keagamaan yang kuat sekaligus kecakapan berkomunikasi untuk menyampaikan perspektif religius secara cerdas dan berdasar pada platform seperti *TikTok*, *Instagram*, atau media digital lainnya. Hal ini penting agar wacana yang terbentuk lebih bernas dan tidak terjebak pada retorika dangkal atau penolakan yang bersifat dogmatis semata.

Secara esensial, bagian ini memaparkan bagaimana ranah digital telah berubah menjadi medan pertarungan yang tak terelakkan dalam mempengaruhi masa depan eksistensi manusia. Persoalan bioetika di sini tidak sekadar dikaji melalui pendekatan rasional objektif, melainkan kerap diperbincangkan dengan intensitas emosional yang cukup tinggi. Proses tersebut juga turut dipengaruhi oleh algoritma serta dinamika pertemuan berbagai narasi mulai dari ilmiah, religius, komersial, hingga yang bersifat ideologis. Tantangan utamanya ialah bagaimana mengatasi polarisasi yang ada dan membentuk suatu ruang diskusi digital yang dapat mengakomodasi kerumitan persoalan ini sembari tetap menghormati perbedaan nilai-nilai mendasar. Harapannya, upaya ini mampu menghasilkan kebijakan yang lebih arif. Dalam kaitannya dengan visi *Society 5.0*, teknologi digital diharapkan dapat mendorong terciptanya kecerdasan kolektif guna menyelesaikan berbagai dilema sosial yang semakin kompleks. Pada konteks ini, peran agama menjadi sangat sentral. Mereka tidak hanya perlu menyatakan sikap, tetapi juga harus berperan aktif dalam menjembatani komunikasi, menyediakan materi edukasi yang mudah dijangkau, serta berkolaborasi dengan kalangan akademis. Hal ini penting agar prinsip etika yang dibangun mampu menjadi pegangan dalam merespons kemajuan teknologi yang bergerak sangat cepat. Tujuan akhirnya jelas, yakni memastikan bahwa perkembangan sains benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia secara universal.

## **BAB X**

### **PLURALISME, INTOLERANSI, & DIALEKTIKA MEDIA**

#### **A. Mediasi Konflik dan Dialog Antar Agama**

Media sosial sering kali hadir sebagai ruang yang kontradiktif; di satu sisi, platform seperti *Facebook*, *X*, dan *Instagram* membuka peluang baru bagi interaksi lintas agama, tetapi di sisi lain, dapat pula menggerogoti dasar-dasar dialog tersebut. Melalui jejaring ini, individu dari beragam latar belakang keagamaan berkesempatan berinteraksi secara langsung, mengikuti pemikiran tokoh agama lain, serta berdialog (sebuah proses yang berpotensi mengikis stereotip dan prasangka yang telah mengakar). Ruang digital dinilai mampu membentuk jejaring baru yang terdesentralisasi bagi keterlibatan antaragama yang melampaui struktur hierarkis konvensional (Durham Jr & Thayer, 2018). Karenanya, ini merupakan kesempatan untuk menciptakan pluralisme yang hidup, di mana perbedaan tidak ditutupi melainkan didiskusikan secara jujur. Berbagai wadah seperti forum diskusi lintas iman, sesi dialog langsung dengan pemuka agama, hingga proyek seni digital kolektif dapat menjadi instrumen kreatif dalam meredam ketegangan, mengubah ruang maya menjadi semacam ruang eksperimen untuk mengenali “Yang Lain”.

Meskipun memiliki potensi konstruktif yang signifikan, realitas penggunaannya justru sering terdistorsi oleh dinamika algoritmik dan ekonomi perhatian yang mendominasi arsitektur platform digital. Studi-studi terkini menunjukkan bahwa mekanisme rekomendasi algoritmik secara sistematis mengunggulkan konten-konten yang mampu memicu respons emosional yang intens, termasuk materi-materi bernuansa kontroversial, provokatif, dan bersifat identitarian. Dalam konteks ini, konten yang mengandung unsur penghinaan terhadap kelompok kepercayaan tertentu, dokumentasi konflik sektarian, ataupun narasi ekstremis cenderung mendapatkan distribusi yang luas dan cepat, memicu reaksi berantai berupa diskusi-diskusi emosional yang kerap tidak produktif. Platform media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyebaran informasi, melainkan juga berperan sebagai katalisator yang memperbesar skala dan intensitas retorika intoleransi, mengubah perselisihan lokal menjadi isu transnasional, serta mengkristalkan identitas-identitas kelompok yang saling berhadapan (Matviyets et al., 2023). Fenomena ini menciptakan paradoks di mana teknologi yang seharusnya memfasilitasi dialog justru berubah menjadi ruang amplifikasi konflik, di mana insiden-insiden kecil dengan cepat mengalami eskalasi, dimanipulasi oleh aktor-aktor tertentu untuk kepentingan strategis, dan dikonsumsi oleh publik yang semakin terfragmentasi dalam ruang gema (*echo chambers*) masing-masing. Mekanisme ini tidak hanya memperlebar jurang pemahaman antarkelompok, tetapi juga menciptakan siklus umpan balik yang terus memperdalam polarisasi sosial, di mana algoritma secara tidak langsung memberi insentif bagi produksi dan reproduksi konten-konten yang memecah belah, sehingga platform digital sering kali berfungsi sebagai arena pertarungan wacana daripada ruang deliberasi yang sehat.

Dialog yang bermakna membutuhkan kedalaman, konteks, dan kesediaan mendengar, artinya kualitas yang jarang tumbuh subur di media sosial telah membatasi ruang ekspresi, mendorong respons instan, dan kerap mengizinkan anonimitas. Pembicaraan daring mengenai isu sensitif seperti perbedaan teologis atau sejarah konflik sering kali merosot menjadi pertukaran slogan, kutipan kitab suci yang tercerabut dari maknanya, atau bahkan serangan personal. Dalam hal ini, Kaul & Salvatore (2020) menegaskan bahwa pluralisme yang berkelanjutan memerlukan ruang publik yang memfasilitasi diskusi rasional serta pengakuan timbal balik, suatu kondisi yang sulit terwujud dalam lanskap digital yang lebih menghargai sensasi ketimbang kedalaman. Tanpa regulasi dan moderasi yang ketat, kolom komentar pada

unggahan bernuansa agama acap berubah menjadi ajang perang kata-kata, di mana setiap pihak sibuk memenangkan argumen alih-alih berusaha memahami sudut pandang lawannya. Ini bukan lagi dialog, melainkan monolog paralel yang saling berteriak tanpa mendengar.

Di sisi lain, platform media sosial ternyata juga memberdayakan kelompok masyarakat dan individu yang giat berupaya menjalin hubungan lintas keyakinan. Berbagai gerakan dapat dijumpai, seperti laman *Instagram* yang mempromosikan nilai-nilai universal dalam berbagai tradisi (contohnya prinsip cinta kasih atau kedermawanan) serial *podcast* obrolan antara pendeta dan ulama, atau gerakan tagar semacam *#FaithsAgainstHate*. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ruang digital tidak selalu menjadi arena pertikaian, ia pun dapat berperan sebagai wahana pemersatu. Dalam kerangka globalisasi, menemukan hal menarik melalui alat digital dapat mendukung aktor antaragama di tingkat akar rumput dalam merumuskan narasi alternatif tentang solidaritas dan kewarganegaraan bersama (Gervasio et al., 2025). Alhasil, mereka menciptakan semacam ruang gema positif, tempat di mana pesan toleransi dan penghormatan bergaung dan diperkuat, sekaligus menyediakan referensi bagi para pelaku rekonsiliasi di tingkat akar rumput. Namun patut diingat, dampak mereka umumnya terbatas pada kalangan yang sudah berpikiran terbuka, sulit menjangkau mereka yang terisolasi dalam gelembung informasi yang eksklusif.

Dinamika mediasi semacam ini jelas dipengaruhi oleh aspek geopolitik dan latar belakang historis. Pertentangan yang berakar di dunia nyata seperti perselisihan atas tempat ibadah, ketegangan politik yang diwarnai sentimen keagamaan, atau trauma kolonialisme, cenderung terefleksi dan bahkan kadang diperparah di ruang digital. Jaringan aktivis, komunitas diaspora, bahkan negara-negara sering memanfaatkan media sosial untuk mengumpulkan dukungan, menyebarkan propaganda, atau mendiskreditkan kelompok agama lain. Dalam konteks umat muslim, Filali-Ansary & Karmali Ahmed (2012) mengamati bahwa di dunia digital, perselisihan historis dan perjuangan politik sering kali diungkapkan melalui bahasa identitas agama, sehingga dialog teologis yang sejati menjadi semakin sulit. Maka, diskusi yang tampaknya membahas perbedaan teologis sesungguhnya sering kali merupakan manifestasi konflik sosio-politik yang lebih mendalam. Dalam hal ini, media sosial bukanlah sumber masalah, melainkan lebih sebagai penguat konflik (*force multiplier*) yang rumit dan memperluas pertikaian tersebut ke tingkat global.

Masalah mendalam yang patut mendapat perhatian serius adalah meningkatnya penyalahgunaan teknologi *deepfake*, penyebaran informasi palsu, serta propaganda yang dengan sengaja mengeksploitasi simbol-simbol religius untuk tujuan tertentu. Fenomena seperti rekayasa video yang menampilkan figur agama mengeluarkan pernyataan kontroversial, atau desas-desus tidak berdasar mengenai praktik ritual ekstrem suatu komunitas, dapat dengan mudah memantik ketegangan sosial bahkan eskalasi konflik. Penyebaran konten semacam ini diperparah oleh karakteristik media digital yang memungkinkan distribusi informasi secara eksponensial tanpa melalui mekanisme validasi yang memadai, sehingga secara sistematis menggerogoti fondasi kepercayaan dan menghambat proses dialog konstruktif. Dalam hal ini, Matviyets et al. (2023) menggarisbawahi bahwa dalam konteks masyarakat yang rentan terhadap polarisasi, penguatan *digital resilience* terhadap arus misinformasi harus menjadi elemen fundamental dalam setiap kerangka kerja perdamaian antarkelompok beragama. Kompetensi literasi digital dan keterampilan verifikasi fakta tidak lagi bisa dipandang sebagai kebutuhan eksklusif bagi profesional media, melainkan merupakan keharusan bagi setiap individu yang berpartisipasi dalam wacana publik terkait isu keagamaan. Ketidakmampuan kolektif dalam membedakan informasi valid dari manipulasi akan terus mengancam prinsip dasar dialog antaragama, yaitu kesepakatan atas realitas objektif yang menjadi titik acuan bersama. Tanpa upaya terstruktur untuk meningkatkan pemahaman kritis masyarakat terhadap konten digital, ruang diskusi yang sehat akan semakin dipenuhi oleh narasi-narasi yang tidak hanya menyesatkan tetapi juga berpotensi memecah belah, sehingga mengikis habis

kemungkinan mencapai konsensus atau pemahaman bersama dalam isu-isu sensitif seperti agama.

Untuk mengoptimalkan peran media sosial sebagai sarana mediasi konflik yang produktif, dibutuhkan intervensi terencana dan transformasi mendasar pada desain platform. Salah satu langkah krusial adalah penyempurnaan sistem moderasi berbasis kecerdasan buatan yang mampu memahami nuansa budaya dan keagamaan. Di samping itu, penguatan algoritma yang mendorong penyebaran konten penghubung atau *bridge content* merupakan kebutuhan mendesak. Lebih jauh, pembentukan ruang digital khusus untuk dialog terstruktur terbukti lebih efektif daripada sekadar menyediakan forum debat terbuka yang rentan menimbulkan kekacauan. Sebagaimana dikemukakan oleh Durham Jr & Thayer (2018), platform digital perlu mengintegrasikan fitur desain yang meningkatkan kemampuan memahami perspektif berbeda, misalnya dengan mewajibkan pengguna menyajikan rangkuman tepat atas pandangan lawan sebelum memberikan tanggapan. Di lain pihak, sinergi antara pelaku industri teknologi, lembaga antaragama, dan dunia akademis sangat penting dalam menyusun panduan dan standar praktik terbaik. Nyatalah bahwa mediasi konflik di dunia digital memerlukan pengelolaan aktif yang mampu meminimalkan dampak negatif sekaligus memaksimalkan hasil yang positif.

Secara esensial, kontribusi media sosial dalam dialog antaragama mengandung paradoks yang mendalam. Platform ini ibarat pisau bermata dua, di satu sisi mampu menjembatani mereka yang terpisah jarak, namun di sisi lain justru memperdalam perpecahan di antara pihak-pihak yang seharusnya bersatu. Kemampuannya dalam mendorong dialog atau justru merusaknya ditentukan oleh interaksi rumit antara desain teknologi, dorongan pengguna, kondisi sosio-politik, serta upaya terstruktur untuk membentuk ekosistem informasi yang konstruktif. Keragaman di era digital tidak akan terwujud secara spontan, melainkan melalui upaya kolektif yang terarah untuk membangun etika digital serta merancang ruang *online* sebagai tempat pertukaran pandangan, bukan sekadar medan pertikaian (Kaul & Salvatore, 2020). Pemahaman mendalam tentang mekanisme mediasi konflik semacam ini merupakan landasan vital untuk mengkaji lebih lanjut digitalisasi intoleransi, sekaligus merumuskan strategi komunikasi publik yang berfungsi sebagai perekat, bukan pemecah.

## **B. Digitalisasi Isu Intoleransi**

Berkembangnya era digital, masalah intoleransi mengalami transformasi signifikan dalam pola penyebaran dan perkembangan insiden kebencian. Peristiwa yang sebelumnya terbatas pada lingkup lokal kini mampu berubah menjadi krisis berskala nasional maupun internasional akibat sifat viralnya di platform digital. Misalnya, kasus penutupan paksa rumah ibadah, penggerebekan kegiatan keagamaan, atau tindakan kekerasan berbasis agama yang sebelumnya hanya diliput media konvensional dengan seleksi editorial, kini dapat menyebar luas hanya melalui unggahan video amatir di media sosial yang disertai narasi subjektif sehingga membentuk persepsi publik. Terdapat pola di mana konflik dapat tersebar secara instan, memicu respons emosional, dan kerap terlepas dari konteks aslinya, melampaui filter informasi tradisional serta membangkitkan sentiment sebelum fakta diverifikasi (Matviyets et al., 2023). Akibatnya, peristiwa kompleks yang kaya konteks sering direduksi menjadi klip visual singkat, memicu reaksi emosional baik dari kelompok yang merasa teraniaya maupun pihak yang merasa dicemarkan.

Peran amplifikasi algoritmik dan mobilisasi identitas kelompok mempercepat sekaligus memperluas dampak insiden yang menjadi viral. Begitu konten intoleran mulai beredar, algoritma cenderung menyarakannya kepada pengguna dengan minat atau keterlibatan serupa, baik korban, pendukung, maupun aktor provokatif. Berbagai pihak dengan kepentingan tertentu mulai dari kelompok politis, organisasi radikal, hingga *influencer* lalu berlomba mengambil alih narasi tersebut. Mereka memanfaatkannya sebagai pembenaran dalam wacana

masing-masing, bagi satu kelompok sebagai bukti penindasan yang memerlukan perlawanan, sementara bagi pihak lain dianggap ancaman yang harus ditindak tegas. Dalam dunia yang terhubung secara global, insiden intoleransi lokal dengan mudah dijadikan alat untuk mengukuhkan narasi besar tentang penganiayaan atau benturan peradaban (Gervasio et al., 2025). Alhasil, peristiwa dengan konteks spesifik tersebut kehilangan makna awalnya dan diserap ke dalam konflik yang lebih luas.

Fenomena viralitas yang terjadi di era digital saat ini membentuk suatu mekanisme umpan balik kompleks yang secara signifikan memperparah konflik sosial dalam kehidupan nyata. Transmisi emosi negatif seperti kemarahan dan kecemasan yang menyebar secara masif melalui platform digital cenderung bermetamorfosis menjadi berbagai bentuk aksi nyata, mulai dari gerakan protes timbal balik, aksi boikot massal, hingga tindakan kekerasan fisik terhadap kelompok-kelompok yang dipersepsikan sebagai pihak yang bersalah. Interkoneksi yang erat antara dunia maya dan ruang fisik ini menciptakan suatu dinamika eskalasi berbahaya yang terus memperkuat dirinya sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Durham Jr & Thayer (2018) yang menemukan bahwa ekspresi kebencian di ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai pemicu, tetapi sekaligus sebagai katalisator yang mempercepat terjadinya kekerasan di dunia nyata, sehingga membentuk siklus destruktif yang terus-menerus antara ekspresi verbal di ranah virtual dengan manifestasi fisiknya di kehidupan konkret. Di sisi lain, tekanan sosial yang muncul akibat viralnya berbagai kasus intoleransi seringkali memaksa aparaturnya negara untuk mengambil langkah-langkah responsif dalam waktu singkat. Namun demikian, keterbatasan waktu yang dihadapi ditambah dengan dominasi emosi kolektif yang meluap-luap acapkali menghasilkan kebijakan atau tindakan yang cenderung reaktif, kurang terukur, dan tidak proporsional, yang pada akhirnya justru semakin memperdalam jurang ketidakpuasan, memperkuat persepsi ketidakadilan, serta mengikis kepercayaan publik, khususnya di kalangan kelompok minoritas yang merasa menjadi korban dari spiral kekerasan yang terus berputar ini. Proses ini menunjukkan bagaimana dinamika digital kontemporer telah mengaburkan batas antara ekspresi virtual dengan konsekuensi nyata, menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan konflik sosial di era keterbukaan informasi.

Transformasi digital ternyata melahirkan manifestasi intoleransi yang lebih mutakhir, walau hadir dalam bentuk yang lebih tersamar dan terstruktur, contohnya melalui praktik *brigading* dan *doxing* (penyebaran informasi pribadi tanpa izin) serta gerakan *cancel culture* yang kerap menyasar figur atau lembaga keagamaan tertentu. Metode-metode ini tidak sekadar bertujuan merendahkan, melainkan juga berupaya meminggirkan, menebar teror, hingga meruntuhkan reputasi dan sumber penghidupan korban. Di era kontemporer, aksi intoleransi tidak selalu berupa kekerasan fisik yang kasat mata, melainkan lebih berupa serangan terencana terhadap jejaring sosial dan pendapatan ekonomi individu. Sebagaimana dijelaskan oleh Matviyets et al. (2023), dunia digital memfasilitasi suatu mekanisme hukuman sosial baru yang terhubung secara global dan mampu bekerja melintasi batas negara dengan daya rusak yang luar biasa. Situasi ini tentu menyulitkan upaya penanggulangan, mengingat pelaku umumnya beraktivitas secara anonim, tersebar geografis, dan berada di wilayah abu-abu hukum konvensional. Namun, efek agregatnya terhadap kebebasan beragama sungguh signifikan dan merugikan.

Di sisi yang berbeda, perkembangan teknologi digital sebenarnya menawarkan potensi strategis untuk melakukan pendokumentasian dan analisis sistematis terhadap fenomena intoleransi melalui metodologi yang lebih terstruktur. Lembaga-lembaga masyarakat sipil memiliki kesempatan untuk memanfaatkan platform digital dalam melakukan katalogisasi kasus-kasus intoleransi, memetakan dinamika perkembangan insiden, serta membangun repositori data yang holistik sebagai alat bantu advokasi dan mekanisme akuntabilitas sosial. Basis data semacam ini memegang peranan krusial dalam menangkal berbagai bentuk penyangkalan atau pengingkaran yang kerap menyertai diskursus tentang intoleransi, sekaligus



berfungsi sebagai landasan empiris yang tak terbantahkan. Lebih jauh lagi, teknologi informasi memungkinkan penyusunan narasi alternatif yang bersumber pada fakta lapangan, yang mampu melakukan dekonstruksi terhadap wacana hegemonik yang selama ini cenderung mendistorsi realitas atau meminggirkan perspektif kelompok minoritas (Filali-Ansary & Karmali Ahmed, 2012). Ironisnya, meskipun prinsip penyebaran viral pada dasarnya dapat dioptimalkan untuk mempromosikan kesadaran kritis dan jejaring solidaritas, dalam praktiknya upaya semacam ini sering kali kalah bersaing dengan muatan konten yang sengaja dirancang untuk memprovokasi atau menyebarkan sentimen kebencian. Tantangan utama terletak pada bagaimana mentransformasikan mekanisme distribusi informasi digital menjadi sarana edukasi publik yang efektif, sekaligus mengembangkan strategi komunikasi yang mampu menembus bias algoritmik yang cenderung mengamplifikasi konten-konten sensasional. Pada level yang lebih mendasar, diperlukan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya memanfaatkan teknologi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai medium untuk membangun epistemologi baru dalam memaknai keragaman dan inklusi sosial di era digital.

Respons masyarakat terhadap kasus intoleransi yang tersebar di ranah digital juga memperlihatkan fragmentasi dalam pemaknaan dan ingatan kolektif. Berbagai kelompok cenderung memaknai peristiwa yang sama secara diametral berlawanan, tergantung pada ruang gema informasi yang mereka huni. Suatu insiden bisa disebut sebagai upaya mempertahankan nilai mayoritas oleh satu pihak, tapi dianggap sebagai pelanggaran HAM sistematis oleh pihak lain. Dalam hal ini, Kaul & Salvatore (2020) menyoroti bahwa kerapuhan pluralisme ini sering gagal karena ketiadaan kerangka fakta dan interpretasi bersama, alih-alih menjembatani perbedaan, media digital justru mengukuhkan narasi sejarah dan moral yang saling berkompetisi. Minimnya ruang publik untuk dialog pemahaman dan penafsiran membuat rekonsiliasi yang nyaris mustahil. Setiap peristiwa viral bukannya terselesaikan, melainkan hanya menambah timbunan luka kolektif masing-masing kelompok, yang suatu saat dapat dimunculkan kembali untuk memicu konflik baru.

Peran jurnalisme profesional dan media arus utama dalam konteks ini memang krusial, namun sarat dengan tantangan yang tidak boleh diremehkan. Di satu pihak, institusi ini memiliki kapasitas untuk melakukan pengecekan fakta, menyajikan perspektif yang seimbang, serta menyampaikan berita dengan pendekatan yang mampu mengurangi tensi. Akan tetapi, di sisi lain, mereka kerap terdorong untuk mengejar kecepatan penyebaran informasi di platform digital. Kondisi ini tidak jarang menjerumuskan mereka ke dalam pola pelaporan yang justru memperkuat narasi konflik dan polarisasi yang telah berkembang di ruang maya. Jurnalisme yang bertanggung jawab di era digital membutuhkan komitmen untuk melakukan verifikasi secara teliti dan penyajian konteks yang utuh, meskipun dunia digital menuntut respons yang seketika (Durham Jr & Thayer, 2018). Apabila prinsip semacam ini diabaikan, media arus utama berpotensi menjadi alat penguat narasi yang sudah hiperbolis di media sosial, alih-alih berfungsi sebagai mediator yang meredakan ketegangan.

Transformasi digital dalam isu intoleransi menghasilkan dinamika di mana besaran, kecepatan, dan efek psikososial dari aksi kebencian dapat meluas secara signifikan. Fenomena ini tidak sekadar merefleksikan sikap intoleran yang telah ada, tetapi juga turut membentuknya secara aktif. *Caranya?* dengan menyediakan ruang baru, sarana untuk menggerakkan massa, serta mekanisme penguatan yang berbeda. Pemahaman mengenai cara kerja viralitas dan pola eskalasi tentu merupakan langkah awal dalam merancang strategi penanganan yang tepat. Namun sayangnya, upaya semacam ini tidak cukup hanya berfokus pada pengaturan konten di ranah daring. Diperlukan juga langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan masyarakat, meningkatkan kecakapan bermedia secara kritis, serta membangun sistem respons cepat yang berkeadilan di kehidupan nyata. Dari sini muncul pertanyaan mendasar, yakni bagaimana komunikasi publik yang dilakukan oleh negara, media, maupun kelompok masyarakat itu dapat

dirancang sebagai penghubung untuk memulihkan kepercayaan sekaligus menghentikan rantai kekerasan. Aspek inilah yang akan menjadi fokus pada bagian penutup pembahasan ini.

### **C. Komunikasi Publik sebagai Jembatan**

Merancang etika komunikasi publik yang berfungsi sebagai perekat dalam masyarakat majemuk bukan semata persoalan teknis belaka. Lebih dari itu, ini merupakan usaha yang mengandung dimensi moral dan politis yang sangat krusial. Di tengah situasi polarisasi yang kian mengeras, terutama akibat pengaruh media digital, komunikasi yang bertujuan menjembatani perbedaan perlu secara aktif melawan kecenderungan memanfaatkan agama sebagai instrumen perpecahan. Pada hakikatnya, etika ini menegaskan bahwa komunikasi publik terkait isu keagamaan wajib mengedepankan penghargaan terhadap harkat manusia tanpa diskriminasi, terlepas dari perbedaan keyakinan yang ada. Dalam pandangannya, Durham Jr & Thayer (2018) menyatakan bahwa fondasi hidup berdampingan secara damai terletak pada wacana publik yang mengakui keberagaman mendalam sembari secara konsisten meneguhkan kesetaraan nilai dan status kewarganegaraan setiap individu. Hal ini berarti menolak segala bentuk ekspresi yang merendahkan manusia, menghindari prasangka, serta secara sadar menahan diri dari memanfaatkan ruang publik, baik dalam khotbah agama, pemberitaan media, maupun konten media sosial untuk menyebar permusuhan atau menciptakan ketakutan terhadap komunitas beragama lain. Komunikasi dapat berperan sebagai jembatan justru ketika memungkinkan pengakuan terhadap Yang Lain (*the Other*) sebagai sesama manusia dan warga negara yang setara.

Penerapan etika ini harus terwujud secara nyata dalam praktik komunikasi berbagai pihak. Bagi tokoh agama dan komunitas beriman, ini berarti berkomitmen mengembangkan penafsiran tradisi yang inklusif sembari secara tegas menolak segala bentuk kekerasan dan ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama. Media, di sisi lain, dituntut untuk menyajikan isu-isu keagamaan dengan konteks yang mendalam dan akurat, tidak sekadar mengeksploitasi konflik demi sensasi, serta memberikan porsi yang seimbang bagi narasi moderat dan perdamaian dari berbagai kalangan. Politikus dan pejabat publik juga memikul tanggung jawab besar, yakni menghindari retorika yang secara langsung maupun tidak langsung mengorbankan kelompok minoritas agama demi kepentingan politik atau elektoral. Sebagaimana dikemukakan Gervasio et al. (2025), negara memainkan peran krusial dalam menciptakan bahasa sipil yang melampaui identitas agama tertentu dan memupuk rasa kebersamaan dalam komunitas politik. Jika berbagai aktor ini konsisten menerapkan etika komunikasi demikian, mereka sejatinya sedang membangun norma publik yang kokoh untuk menangkal arus intoleransi.

Namun, bila ditelaah lebih jauh, komunikasi sebagai jembatan juga memerlukan pengakuan dan pengelolaan emosi kolektif, khususnya ketakutan dan kemarahan yang kerap menjadi akar intoleransi. Komunikasi publik tidak boleh mengabaikan emosi-emosi ini, namun sebaliknya harus mampu mengarahkannya secara produktif. Salah satu pendekatannya adalah menciptakan ruang dialog yang aman dan inklusif, di mana keresahan dapat diungkapkan dan ditanggapi secara rasional, bukan dipendam karena jika dibiarkan dapat berujung pada aksi kekerasan. Sebagaimana dicatat oleh Matviyets et al. (2023), komunikasi efektif dalam menjembatani perbedaan mengakui dimensi emosional identitas keagamaan sekaligus dengan bijak mengarahkan percakapan dari emosi mentah menuju pemahaman bersama dan solusi kolektif. Contohnya, alih-alih menyangkal atau mengecilkan kecemasan suatu kelompok, komunikasi publik dapat mengakui kegelisahan tersebut sembari dengan empati dan berbasis fakta menjelaskan kompleksitas masalah, serta menawarkan visi koeksistensi yang aman dan saling menghargai antar semua pihak.

Etika komunikasi sebagai jembatan menghadapi tantangan kompleks dalam lanskap digital yang terpecah belah. Diperlukan pengembangan strategi yang mampu menembus *echo chambers* yang kerap memperdalam polarisasi sosial. Salah satu solusi potensial adalah dengan memberdayakan para konten kreator jembatan atau *bridge influencers*, figur atau kelompok yang memiliki otoritas di komunitasnya namun aktif menyebarkan pesan-pesan yang menekankan rasa hormat, keingintahuan intelektual, dan kesediaan memahami kelompok lain. Menariknya, platform media sosial sebenarnya dapat dikonfigurasi ulang secara algoritmik untuk lebih mengutamakan konten semacam ini dibanding materi yang memicu perpecahan. Dalam pandangannya, Kaul & Salvatore (2020) menegaskan bahwa platform digital memiliki kewajiban etis untuk mendesain ekosistemnya guna memperkuat kohesi sosial, termasuk melalui algoritma yang adil yang mempromosikan suara-suara moderat dan dialogis. Tanpa upaya desain yang disengaja seperti ini, etika komunikasi berbasis nilai-nilai luhur akan terus kalah oleh logika *engagement* yang sering mengorbankan etika demi popularitas.

Dalam ranah komunikasi publik yang berfungsi sebagai penghubung antar kelompok, perlu adanya penekanan khusus pada penyampaian cerita yang inklusif serta gerakan bersama yang mampu mengatasi sekat-sekat identitas religius. Praktik nyata seperti mobilisasi bersama dalam penanganan keadaan darurat, upaya meningkatkan kualitas sistem pembelajaran, atau kegiatan menjaga kelestarian alam, secara efektif mempertemukan individu dari berbagai keyakinan dalam kerja kolektif, di sini pola interaksi yang terbentuk secara organik beralih dari pembahasan mengenai diskrepansi identitas menuju pencapaian objektif yang dapat diraba. Proses sinergis semacam ini pada hakikatnya menciptakan fondasi bagi terwujudnya jaringan sosial antarumat beragama yang bersifat langgeng. Seperti yang diungkapkan Filali-Ansary & Karmali Ahmed (2012), pembentukan arena publik inklusif dimana kelompok religius dan non-religius dapat berkoordinasi berdasarkan tujuan kolektif merupakan prasyarat utama bagi munculnya bentuk solidaritas fungsional, jenis kohesi sosial yang muncul bukan karena keseragaman perspektif teologis, melainkan melalui keselarasan aksi dalam merespons kebutuhan praktis. Kontribusi nyata dalam proyek-proyek kemasyarakatan memiliki daya pemersatu yang jauh lebih kuat dibandingkan dialog-dialog teoretis tentang doktrin keagamaan, karena kerja konkret dalam menyelesaikan masalah bersama secara alami. Hal ini membentuk saling ketergantungan positif di antara para pelaku, menciptakan struktur hubungan yang saling menguatkan, sekaligus memberikan bukti empiris bahwa perbedaan keyakinan tidak harus menjadi penghalang bagi terciptanya kemitraan strategis untuk kemaslahatan umum. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa jembatan antaragama yang paling stabil justru dibangun di atas dasar aktivisme sosial dan realisasi program bersama, bukan melalui diskursus abstrak tentang persamaan atau perbedaan ajaran agama.

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam membentuk fondasi etika berkomunikasi sejak usia muda, di mana pengintegrasian literasi media dan materi keagamaan dalam kurikulum menjadi aspek penting untuk mengembangkan kompetensi peserta didik dalam menelaah secara mendalam representasi agama di ruang publik, mendeteksi narasi-narasi provokatif yang mengandung benih permusuhan, serta mengasah kemampuan berinteraksi secara konstruktif dengan mempertimbangkan perspektif lintas budaya. Durham Jr & Thayer (2018) mengemukakan pendirian akademis bahwa upaya membangun ketahanan masyarakat terhadap sikap intoleransi membutuhkan pendekatan pendidikan holistik yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan kognitif, melainkan juga membina kapasitas afektif berupa kesediaan untuk menyimak dengan penuh penghayatan, mengasimilasi informasi melalui penyaringan kritis, serta mengartikulasikan pandangan pribadi dengan cara yang tidak bersifat konfrontatif namun tetap menjunjung integritas intelektual. Paradigma pendidikan transformatif semacam ini diarahkan untuk mencetak insan-insan terdidik yang tidak hanya memiliki kesadaran minimalis tentang pentingnya toleransi, tetapi mampu menjadi aktor-aktif dalam ruang sosial yang kompleks, individu yang terampil merespons dinamika pluralitas

budaya dengan strategi komunikasi yang dewasa, berbasis bukti, serta bertumpu pada prinsip saling pengertian yang mendalam. Lebih jauh, model pembelajaran ini bertujuan menciptakan ekosistem dialogis di mana keberagaman tidak sekadar ditoleransi sebagai kewajiban moral, tetapi dirayakan sebagai modal sosial melalui praktik-praktik diskursif yang bertanggung jawab, inklusif, dan mampu mentransformasikan perbedaan menjadi kekuatan kolektif untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadaban.

Akhirnya, perlu dipahami bahwa etika komunikasi sebagai suatu bentuk jembatan mempunyai batasan-batasan yang tidak dapat dianggap sepele. Penyelesaian konflik tidak semata-mata bergantung pada komunikasi yang efektif, khususnya ketika berhadapan dengan ketidakadilan sistemik, kesenjangan kekuasaan, atau klaim teologis yang bersifat absolut dan eksklusif. Dalam situasi seperti ini, komunikasi publik dituntut untuk secara transparan mengakui perbedaan-perbedaan yang tidak mungkin didamaikan, sambil tetap berkomitmen pada pendekatan tanpa kekerasan dalam menangani ketegangan tersebut. Seperti yang diungkapkan Matviyets et al. (2023), fungsi komunikasi sebagai jembatan bukanlah untuk menciptakan kesepakatan di semua bidang, melainkan untuk memelihara perdamaian sosial serta sikap saling menghargai di tengah perbedaan pendapat yang mungkin tidak akan pernah terselesaikan. Maka dari itu, etika komunikasi ini bertujuan mengubah pola konflik dari *zero sum* yang mengharuskan satu pihak kalah agar pihak lain menang menjadi suatu proses di mana setiap pihak tetap dapat mempertahankan integritas dan harga dirinya, meski memiliki pandangan yang berseberangan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kerumitan dinamika media kontemporer, komunikasi publik mustahil bersifat netral begitu saja. Ia perlu dirumuskan dan diimplementasikan secara proaktif sebagai jembatan dinamis menuju koeksistensi yang damai. Etika semacam ini memerlukan komitmen kolektif dari seluruh aktor komunikasi, mulai dari perorangan, kelompok keagamaan, media massa, pemerintah, hingga platform digital. Dengan berlandaskan prinsip penghormatan, pengakuan terhadap aspek emosional, pengembangan narasi kolaboratif, serta peningkatan literasi, sesungguhnya kita sedang memberdayakan potensi komunikasi untuk memperkuat jejaring kepercayaan sosial yang menjadi landasan utama hidup berdampingan dalam keberagaman. Sebagaimana dinyatakan oleh Kaul & Salvatore (2020), pluralisme yang berkelanjutan pada hakikatnya merupakan buah dari komunikasi, suatu capaian yang harus terus diperjuangkan dan disesuaikan seiring perkembangan media dari era lisan hingga kecerdasan buatan yang kini mulai menjelang di hadapan kita.

## BAB XI

### KRITIK & ETIKA MEDIA KEAGAMAAN

#### A. Komodifikasi dan *Pious Consumption*

Komodifikasi agama, yakni transformasi praktik dan simbol keagamaan menjadi komoditas yang diperdagangkan dan dikonsumsi semakin berkembang dengan kompleksitas tinggi, khususnya di ruang media sosial. Fenomena *pious consumption* atau konsumsi religius ini memunculkan paradoks, yakni pencarian makna spiritual justru kerap diekspresikan melalui pembelian produk, jasa, atau pengalaman berlabel religius dan spiritual. Platform digital berfungsi sebagai pasar global yang terus aktif, mempromosikan beragam komoditas mulai dari air zam-zam, kalung salib, aplikasi doa berbayar, hingga retreat eksklusif di Bali dengan narasi yang menghubungkannya pada pencerahan, perlindungan, dan kesalehan. Dalam hal ini, Healey & Woods Jr (2019) mengemukakan bahwa identitas dan praktik keagamaan kontemporer semakin diaktualisasikan melalui konsumsi yang dikurasi, dibagikan, dan divalidasi secara digital. Perubahan ini tidak hanya mengubah cara beragama, tetapi juga mengkonversi agama menjadi semacam merek atau gaya hidup yang dapat dipersonalisasi dengan uang sebagai nilai tukar dan performa keberagamaan di media sosial sebagai nilai sosial.

Mekanisme komodifikasi ini efektif karena memanfaatkan logika media sosial yang berpusat pada ekonomi perhatian dan ekonomi afektif. Konten religius bersaing ketat dengan hiburan dan informasi lain demi mendapatkan *likes*, *shares*, dan *comment*. Akibatnya, konten tersebut kerap dikemas dengan estetika visual menarik, narasi personal dramatis, dan ajakan langsung untuk bertindak, seperti “klik tautan di bio” atau “berdonasi sekarang untuk berkah berlipat”. Cronqvist et al. (2024) menyatakan bahwa strategi media modern sering mengaburkan batas antara dakwah dan pemasaran *influencer*, memanfaatkan ikatan emosional dan komunal untuk tujuan komersial. Karenanya, pendakwah atau *influencer* keagamaan tidak lagi sekadar penyampai pesan; mereka harus membangun *personal brand* yang konsisten, menarik, dan menguntungkan, karena keberlanjutan aktivitas mereka bergantung pada kemampuan menghasilkan pendapatan melalui penjualan produk, program berbayar, atau donasi yang dipicu konten persuasif.

Kritik utama terhadap *pious consumption* adalah potensinya mendorong pendangkalan spiritual dan eksternalisasi iman. Ketika kepuasan spiritual dikaitkan dengan kepemilikan barang atau pengalaman yang dibeli, dimensi batin, disiplin, pergulatan personal, dan transformasi karakter yang menjadi inti banyak tradisi agama sering terabaikan. Risikonya, iman direduksi menjadi tontonan estetis belaka, lebih terlihat daripada dialami sebagai perjalanan batin mendalam. Paparan terus menerus terhadap konten religius yang dikomersialkan dapat membentuk harapan normatif, sehingga orang mengasosiasikan iman otentik dengan produk atau gaya hidup konsumtif (Oliver et al., 2019). Akibatnya, terjadi pergeseran dari agama sebagai *a way of being* (cara hidup) menjadi *a way of having* (cara memiliki). Kritik ini menegaskan bagaimana logika kapitalisme konsumen menyusup ke ranah paling pribadi dan sakral, mengubah relasi dengan yang ilahi menjadi interaksi transaksional.

Komodifikasi dalam konteks ini tampaknya mengukuhkan sekaligus memperlebar jurang sosial-ekonomi terkait akses terhadap spiritualitas. Produk dan pengalaman spiritual yang diperdagangkan di pasaran seringkali dibanderol dengan harga yang relatif tinggi. Misalnya, busana *branded* untuk *mode fashion* dengan harga premium, pelatihan meditasi daring yang bersifat eksklusif, atau bahkan tur ziarah virtual dengan fasilitas VIP. Fenomena semacam ini pada akhirnya melahirkan stratifikasi spiritual baru, yaitu kalangan yang memiliki kecukupan

finansial dianggap lebih terhubung spiritual atau bahkan memperoleh berkah yang lebih, sementara masyarakat kurang mampu justru terpinggirkan dari pasar spiritual tersebut. Dalam hal ini, Christians et al. (2024) mempertanyakan keadilan dari praktik semacam ini. Pernyataan yang kritis menyoal ketika jalan menuju kekayaan spiritual diaspal oleh transaksi komersial, hal itu berisiko mengesampingkan orang miskin dan mengkomodifikasi nilai-nilai seperti belas kasihan dan kerendahan hati yang seharusnya ditanamkan secara bebas. Maka dari itu, proses komodifikasi tidak hanya mereduksi makna spiritualitas menjadi sesuatu yang dangkal, tetapi juga bersifat diskriminatif, artinya bertentangan dengan prinsip berbagai agama yang mengedepankan kesahajaan dan kepedulian terhadap kelompok marginal.

Namun, persoalan ini tidak dapat disederhanakan sebagai isu dikotomis. Di satu sisi, bagi sejumlah komunitas, komersialisasi konten keagamaan dipandang sebagai strategi bertahan hidup sekaligus sarana perluasan dakwah di tengah persaingan ketat di dunia digital. Banyak lembaga keagamaan yang mengandalkan donasi daring untuk membiayai operasional, kegiatan amal, maupun produksi materi edukatif. Namun, persoalan mendasar adalah *di mana letak batasan antara keberlangsungan yang sehat dengan eksploitasi yang tidak etis?*, batas ini semakin kabur ketika janji-janji berkah material seperti kesehatan dan kemakmuran dikaitkan secara eksplisit dengan besaran sumbangan, praktik yang dikenal sebagai teologi kemakmuran (*prosperity gospel*). Fox & Saunders (2023), dalam pandangannya mengingatkan tentang risiko etis berupa bahaya etis terletak pada eksploitasi harapan dan ketakutan spiritual para pengikut untuk keuntungan finansial, terutama ketika menargetkan populasi yang rentan. Dalam hal ini, prinsip etika menuntut transparansi, keseimbangan, serta penegasan bahwa kontribusi finansial sejatinya merupakan bentuk partisipasi dalam misi keagamaan, bukan transaksi yang menjanjikan imbalan spiritual secara langsung.

Tidak kalah krusial adalah kritik terhadap platform digital itu sendiri sebagai mesin komodifikasi. Algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan durasi penggunaan (*time on platform*) dan interaksi (*engagement*) secara tidak langsung mendorong konten kreator keagamaan untuk memproduksi materi yang bersifat sensasional, emosional, dan mudah dikonsumsi secara karakteristik yang justru memudahkan proses komodifikasi. Arsitektur platform media sosial mendorong penyederhanaan ajaran agama yang kompleks menjadi potongan-potongan yang mudah dibagikan dan sarat emosi, yang lebih sesuai untuk tujuan pemasaran (Healey & Woods Jr, 2019). Karena itu, platform ini tidak sekadar berfungsi sebagai wadah netral, melainkan aktif membentuk ekonomi perhatian di mana agama dipaksa beradaptasi untuk bisa bertahan yang seringkali dengan mengorbankan kedalaman dan integritasnya. Kritik terhadap komodifikasi agama seharusnya tidak hanya berfokus pada konten atau praktik keagamaan semata, tetapi juga mengkritisi model bisnis di balik platform-platform tersebut yang mengubah berbagai bentuk perhatian manusia, termasuk spiritualitas, menjadi komoditas yang dapat diekstraksi dan dikapitalisasi.

Respons terhadap fenomena komodifikasi dalam ranah keagamaan pada hakikatnya bukanlah penampikan mutlak terhadap media atau mekanisme pasar. Lebih tepatnya, hal ini merupakan upaya membangun kesadaran kritis disertai pencarian praktik alternatif yang bersifat reflektif. Umat beragama diajak untuk melakukan refleksi mendalam, *apakah aktivitas pembelian atau dukungan finansial sungguh memperkaya kehidupan spiritual dan pelayanan mereka, atau sekadar memuaskan hasrat untuk terlihat religius, bahkan hanya ikut-ikutan arus tren yang sedang populer?*. Di sini, komunitas keagamaan memiliki peluang untuk menciptakan forum dialog konstruktif tentang kesulitan mempertahankan nilai-nilai iman di era konsumerisme digital yang kian masif. Di sisi lain, penting pula mendorong pengembangan model ekonomi kreatif berbasis etika yang tidak hanya menjunjung transparansi dan keadilan, tetapi juga berfokus pada nilai-nilai kolektif, bukan sekadar keuntungan individu. Kiranya memang telah tiba waktunya untuk memiliki kerangka kerja komunikasi keagamaan yang

menempatkan keaslian, pertanggungjawaban, dan kemaslahatan bersama di atas ukuran komersial dan pembentukan citra pribadi (Christians et al., 2024).

Berdasarkan pada analisis kritis tentang komodifikasi dan *pious consumption*, tampak jelas bahwa wajah religiositas kontemporer sedang mengalami perubahan fundamental. Agama tidak lagi hanya dimediasi oleh media, tetapi juga dibentuk ulang oleh logika pasar dan performativitas digital. Meski hal ini membuka peluang baru bagi keberlanjutan dan inovasi ekspresi keagamaan, tidak dapat dipungkiri adanya risiko berupa pemiskinan makna spiritual, ketimpangan sosial, serta kemungkinan eksploitasi. Dilema etis yang muncul pun menjadi sangat rumit, bagaimana mengarungi ambivalensi ini sembari tetap mengakui bahwa sumber daya tetap dibutuhkan untuk aktivitas keagamaan, namun dengan tegas menolak penyederhanaan iman menjadi barang komoditas semata. Pemahaman mendalam tentang dinamika ini menjadi landasan penting untuk dua pembahasan berikutnya. Pertama, mengenai upaya membekali individu dengan kompetensi literasi media keagamaan agar menjadi konsumen yang lebih kritis, dan kedua, menyangkut prinsip etika otoritas digital yang harus dipegang teguh oleh kreator konten keagamaan di ruang online yang semakin kompleks.

## **B. Literasi Media Keagamaan**

Dalam lautan informasi digital yang kian deras saat ini, yang dipenuhi berbagai konten keagamaan mulai dari penafsiran otoritatif hingga doktrin yang memicu perdebatan, dari refleksi filosofis hingga komodifikasi spiritual, kompetensi literasi media keagamaan menjelma sebagai kebutuhan mendesak. Kecakapan ini tidak sekadar terbatas pada penguasaan teknis internet, melainkan lebih pada kapasitas untuk mengkaji, menimbang, dan memaknai secara kritis berbagai pesan religius yang tersebar di pelbagai platform digital. Khususnya di era media sosial saat ini, literasi media harus mencakup pemahaman kritis tentang bagaimana pesan keagamaan dikonstruksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam suatu ekosistem teknologis dan ekonomi tertentu (Healey & Woods Jr, 2019). Alhasil, konten ceramah keagamaan yang viral tidak dapat diasumsikan sebagai sesuatu yang netral, tetapi justru merupakan produk dari serangkaian keputusan produksi, algoritma digital, dan kerap kali didorong oleh agenda ekonomi maupun politik tertentu. Tanpa kemampuan literasi ini, individu bagaikan perahu kecil tanpa navigasi di samudera informasi, rentan terombang-ambing oleh arus propaganda, misinformasi, atau retorika keagamaan yang bersifat manipulatif.

Aspek fundamental dari literasi ini terletak pada kemampuan verifikasi sumber dan kontekstualisasi. Di ranah digital, setiap orang dapat mengklaim diri sebagai ahli atau penyebar ajaran. Oleh karena itu, diperlukan sikap kritis untuk mempertanyakan, *siapakah sebenarnya narasumber tersebut?, apa latar belakang dan motivasinya?, dari tradisi atau mazhab mana pemikirannya berakar?, apakah kutipan teks suci yang digunakan telah dipahami secara utuh dan tepat konteksnya?*. Sebagaimana dicatat oleh Cronqvist et al. (2024), strategi media kontemporer kerap memanfaatkan penghilangan konteks dan pemanfaatan ulang simbol-simbol dan teks-teks agama untuk melayani tujuan ideologis atau komersial yang baru. Tidak jarang suatu ayat dipenggal dan dikombinasikan dengan visual yang provokatif, meski makna sebenarnya sangat berbeda dari penafsiran yang mapan. Literasi media keagamaan mengajak kita untuk tidak serta-merta menerima informasi, melainkan bertindak layaknya penyelidik yang melacak sumber primer, membandingkan dengan referensi terpercaya, serta memahami konteks historis dan budaya di balik suatu pesan sebelum menilai validitasnya.

Lebih jauh, literasi ini juga meliputi kesadaran akan bias kognitif dan pengaruh media terhadap persepsi kita. Kerap kali tanpa disadari, algoritma media sosial hanya menampilkan fragmen tertentu dari wacana keagamaan, menciptakan apa yang dikenal sebagai *filter bubble*. Konten yang sengaja dirancang untuk memancing kemarahan atau ketakutan dikenal sebagai

*anger/fear bait*, justru lebih mudah menarik perhatian. Dalam hal ini, Oliver et al. (2019) mengungkapkan bahwa paparan berulang pada konten keagamaan yang sederhana, penuh emosi, dapat membentuk persepsi, sikap, bahkan keyakinan secara tidak sadar dalam waktu yang lama. Literasi media keagamaan mendorong refleksi diri, *mengapa respons saya sangat positif atau negatif terhadap konten tertentu?, apakah emosi saya sedang dimanipulasi?, sudahkah saya mengeksplorasi perspektif alternatif?*. Dengan menyadari bias internal dan teknik persuasi media, kita dapat membangun jarak kritis yang memungkinkan evaluasi lebih objektif terhadap pesan yang dikonsumsi.

Di samping itu, kompetensi literasi media dalam ranah keagamaan harus membekali individu dengan kemampuan mengidentifikasi ujaran kebencian, informasi palsu, maupun narasi konspirasi yang disampaikan melalui terminologi religius. Hal ini meliputi kesadaran akan narasi yang mendiskreditkan kelompok tertentu, pernyataan tidak berdasar yang terus diulang, serta pemakaian diksi korban dan pahlawan secara hiperbolis. Menurut pandangan Christians et al. (2024), menekankan bahwa konsumsi materi keagamaan yang etis memerlukan kecakapan membedakan antara kritik konstruktif dan ujaran kebencian, tantangan profetik dengan tuduhan bernuansa jahat. Literasi semacam ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan melindungi ruang publik dari konten berbahaya yang dapat mengikis kohesi sosial dan memantik konflik. Ini juga merupakan wujud tanggung jawab sipil setiap pemeluk agama untuk tidak menyebarkan materi yang berpotensi melukai atau memecah persatuan.

Pendekatan literasi media yang diterapkan perlu bersifat dinamis dan antisipatif, salah satunya dengan mendorong paparan sengaja terhadap beragam perspektif keagamaan. Di tengah dominasi algoritma yang cenderung menyajikan konten sesuai preferensi pribadi, perlu upaya aktif untuk mengakses sumber informasi yang menawarkan tafsir berbeda, pandangan dari tradisi agama lain, atau bahkan kritik internal dalam tradisi sendiri. Proses semacam ini memfasilitasi keluarnya individu dari zona nyaman, sebuah perjalanan intelektual sekaligus spiritual. Lalu, Fox & Saunders (2023) berpendapat bahwa unsur fundamental etika media dalam masyarakat majemuk adalah pengembangan kerendahan hati intelektual disertai upaya sadar untuk mengakses berbagai sudut pandang guna menguji asumsi pribadi. Maka dari itu, kita tidak hanya terhindar dari risiko radikalisasi, tetapi juga memperluas pemahaman keagamaan sekaligus menumbuhkan apresiasi terhadap kompleksitas setiap tradisi.

Implementasi literasi media keagamaan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan multipihak, meliputi keluarga, komunitas religius, institusi pendidikan, dan pemerintah. Dalam lingkup keluarga, orang tua dapat menginisiasi diskusi dengan anak-anak mengenai konten keagamaan yang mereka temui di dunia digital. Tempat ibadah seperti masjid, gereja, atau vihara dapat menyelenggarakan pelatihan bertemakan tentang “berdigital secara cerdas dan beretika”. Sementara itu, kurikulum pendidikan agama dan kewarganegaraan di sekolah dapat mengintegrasikan modul literasi media kritis. Sebagaimana Healey & Woods Jr (2019) menyatakan bahwa komunitas keagamaan memiliki peran istimewa dalam pengembangan literasi ini, karena mampu menempatkan kritik media dalam kerangka nilai teologis dan tanggung jawab kolektif. Dengan kata lain, literasi media harus dipandang sebagai bagian integral dari nilai-nilai agama yang mencakup kebenaran, keadilan, welas asih, dan kebijaksanaan.

Salah satu tantangan utama yang muncul adalah ketidakseimbangan pemahaman digital antar generasi. Umumnya, kelompok usia lanjut memiliki kedalaman pemahaman keagamaan yang lebih matang, namun sering kali mengalami kesulitan dalam menguasai aspek teknis dunia digital. Di sisi lain, kaum muda biasanya sangat terampil dalam penggunaan teknologi, tetapi belum tentu memiliki landasan keagamaan yang memadai untuk melakukan penyaringan informasi secara kritis. Oleh karena itu, program literasi seyogianya dikembangkan secara lintas generasi dengan pendekatan gotong royong. Contohnya, generasi muda dapat berperan



dalam memperkenalkan platform media sosial dan metode identifikasi berita palsu kepada generasi senior, sementara yang lebih tua dapat meneruskan khazanah pengetahuan mengenai tradisi dan penafsiran agama. Model kolaboratif semacam ini mampu menghubungkan jurang pemahaman dan menciptakan masyarakat yang lebih tahan terhadap upaya manipulasi informasi (Cronqvist et al., 2024). Alhasil, sinergi antar generasi ini dapat membentuk sistem pertahanan kolektif yang efektif, terutama dalam mencegah eksploitasi media yang merugikan dalam ranah keagamaan.

Pada hakikatnya, literasi media dalam bidang keagamaan bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan telah berubah menjadi kewajiban baik secara etika maupun spiritual di zaman serba digital ini. Fungsi utamanya adalah sebagai benteng pelindung dalam pencarian kebenaran dari banjir informasi, penjaga keteguhan keyakinan di tengah arus budaya yang semakin dangkal, sekaligus perekat komunitas yang kritis namun tetap menghargai nilai-nilai luhur. Dalam perspektif etika komunikasi, esensinya adalah mendorong setiap individu untuk menjadi pelaku aktif dan reflektif dalam kehidupan beragama, bukan hanya penerima pasif atas konten spiritual yang termediakan (Christians et al., 2024). Melalui penguasaan kompetensi ini, diharapkan masyarakat beragama dapat lebih arif dalam menyikapi lingkungan media yang sarat muatan, mengambil keputusan konsumsi yang lebih bertanggung jawab, serta turut membangun ekosistem media keagamaan yang lebih integritas, transparan, dan produktif. Persoalan mendasar yang kemudian muncul adalah mengenai peran stakeholder lain dalam ekosistem ini khususnya para penghasil konten yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dalam kewenangan digital mereka.

### C. Etika Otoritas Digital

Munculnya otoritas digital yang meliputi para *influencer*, pendakwah online, serta pembuat konten religius menghadirkan diskursus kepemimpinan spiritual baru yang terpisah dari kerangka institusional konvensional. Berbanding terbalik dengan prosedur penahbisan formal atau penguasaan keilmuan terstruktur di pesantren maupun seminari, otoritas ini justru terbentuk melalui kapasitas mengakumulasi basis pengikut yang masif, kompetensi dalam produksi media, serta daya tarik personal yang terproyeksikan melalui layar. Namun demikian, otoritas yang melekat pada jangkauan luas ini semestinya diimbangi dengan tanggung jawab etis yang proporsional. Sebagaimana dinyatakan oleh Healey & Woods Jr (2019), otoritas keagamaan digital memikul tanggung jawab moral yang berat, mengingat pesan-pesan yang disampaikannya berpotensi memengaruhi sistem keyakinan, tindakan, serta emosi dalam skala masif, acap kali tanpa mekanisme pengawasan atau pertanggungjawaban yang memadai. Karenanya, etika otoritas digital tidak sekadar mengikuti dinamika engagement dan algoritma, melainkan harus berlandaskan prinsip-prinsip kebenaran substansial, keadilan, serta empati yang ditambah kesadaran akan kerentanan audiens untuk mencari tuntunan spiritual di ruang digital yang kerap amburadul dan dipenuhi agenda terselubung.

Aspek fundamental yang menjadi kewajiban moral adalah integritas dan kejujuran intelektual. Seorang publik figur di ranah keagamaan harus secara tegas membedakan antara ajaran yang bersumber dari tradisi otentik, pandangan pribadi, serta asumsi tanpa dasar. Mereka perlu menghindari praktik pengutipan ayat atau hadis secara parsial dan lepas konteks untuk mengukuhkan pandangan tertentu. Lebih dari itu, diperlukan upaya proaktif dalam menangkal penyebaran misinformasi atau klaim keagamaan yang belum teruji validitasnya. Dalam hal ini, Christians et al. (2024) menegaskan bahwa kepercayaan sakral yang melekat pada pesan keagamaan menuntut dedikasi terhadap akurasi fakta serta penolakan tegas terhadap strategi komunikasi yang bersifat manipulatif atau menyesatkan. Hal ini juga mencakup pengakuan jujur atas keterbatasan pengetahuan, merujuk pada sumber yang lebih ahli, serta kesediaan menerima koreksi. Di tengah banjir konten *clickbait* dan sensasionalisme, komitmen terhadap

ketelitian dan transparansi inilah yang membedakan pemimpin spiritual otentik dari sekadar figur agama yang mencari popularitas.

Tanggung jawab berikutnya yang tidak kalah penting adalah kesadaran akan dampak psikososial dari pesan yang disebarluaskan. Materi keagamaan tidak hanya memengaruhi pola pikir, melainkan juga kondisi emosi dan perilaku. Narasi yang secara konsisten menanamkan ketakutan, rasa bersalah berlebihan, atau permusuhan terhadap kelompok tertentu berpotensi memicu gangguan kecemasan, depresi, atau prasangka kolektif di kalangan pengikut. Sebaliknya, konten yang menyuguhkan optimisme, rekonsiliasi, serta pemahaman lintas kelompok dapat memperkuat kesehatan mental sekaligus mempererat kohesi sosial. Kajian mengenai dampak media mengingatkan bahwa komunikator perlu menyadari potensi efek mendalam dan berjangka panjang yang dapat ditimbulkan pesan mereka terhadap kesejahteraan audiens, terutama pada individu yang secara psikologis rentan (Oliver et al., 2019). Oleh karena itu, *influencer* keagamaan selayaknya menerapkan apa yang disebut oleh Fox & Saunders (2023) sebagai etika kepedulian dalam komunikasi digital, yakni pendekatan yang menempatkan kebaikan holistik dan stabilitas mental audiens sebagai prioritas utama, mengatasi segala kepentingan perluasan pengaruh atau pencapaian keuntungan pribadi.

Etika yang mengatur otoritas digital mengharuskan prinsip keterbukaan dalam hal finansial serta penolakan tegas terhadap segala bentuk eksploitasi. Sejumlah tokoh agama yang berpengaruh seringkali membiayai aktivitas mereka melalui sumbangan, penjualan barang, atau sistem berlangganan. Walaupun hal ini lumrah, implementasinya wajib dilaksanakan secara transparan dan bebas dari paksaan yang tidak etis. Contohnya, menghubungkan besaran donasi secara langsung dengan jaminan kemakmuran duniawi, atau menciptakan rasa berdosa agar pengikut merasa terpaksa memberikan kontribusi, merupakan bentuk eksploitasi spiritual yang jelas melanggar nilai-nilai etika. Sebagaimana diungkapkan Cronqvist et al. (2024) yang mengemukakan bahwa komersialisasi pengaruh keagamaan memerlukan rambu-rambu etika yang tegas untuk menghindari komodifikasi keyakinan serta tindakan predator terhadap mereka yang rentan secara ekonomi maupun emosional. Kewajiban para pemimpin digital adalah memastikan bahwa sistem pendanaan yang diterapkan tidak merusak integritas pesan maupun memanfaatkan kelemahan individu yang sedang mencari ketenangan dan arti hidup.

Di samping itu, para pemegang otoritas digital juga berkewajiban untuk mempromosikan toleransi dan menghindari penyebaran ujaran kebencian. Dalam konteks masyarakat majemuk, konten keagamaan yang beredar di dunia maya memiliki dampak nyata terhadap iklim sosial. Pesan yang menghina atau menstigmatisasi kelompok agama tertentu berpotensi memicu ketegangan bahkan konflik dalam kehidupan nyata. Karena itu, mereka harus menolak segala bentuk narasi permusuhan antarkelompok, meskipun kadangkala justru mendapatkan dukungan luas dari pengikutnya. Dalam hal ini, Healey & Woods Jr (2019) menekankan bahwa pemimpin agama di era digital memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan contoh dialog yang santun serta secara aktif melawan narasi yang memicu intoleransi dan kekerasan. Hal ini bukan berarti mengabaikan keyakinan pribadi, melainkan menyampaikannya dengan cara yang tetap menghormati harkat manusia dari berbagai latar belakang kepercayaan, sekaligus membedakan antara mengkritik suatu pemikiran dan menyerang penganutnya.

Lebih jauh, terdapat tanggung jawab untuk mengakui batasan keahlian. Seorang *influencer* yang mumpuni dalam bidang tertentu, seperti bimbingan spiritual, belum tentu memiliki kompetensi di ranah politik, ekonomi, atau kesehatan. Memberikan rekomendasi yang bersifat mutlak di luar bidang keahlian dapat berisiko membahayakan. Dari perspektif etika, diperlukan sikap rendah hati untuk menyadari keterbatasan ini dan bila perlu harus merujuk kepada ahli yang berkompeten. Kebajikan kerendahan intelektual sangat krusial bagi otoritas digital, karena hal ini melindungi mereka dari bahaya melampaui batas pengetahuan sekaligus mendorong budaya kebijaksanaan yang kolaboratif (Fox & Saunders, 2023). Singkatnya, otoritas yang arif memahami kapan harus mengakui, “saya tidak tahu”, atau “ini

bukan bidang saya”, dan justru dengan pengakuan semacam itulah kepercayaan pengikut dapat dipertahankan serta mereka terlindungi dari saran yang berpotensi menyesatkan atau merugikan.

Akhirnya, dimensi etika yang dikaji meliputi partisipasi aktif dalam menerima kritik dan masukan. Dalam lingkungan digital, kemungkinan bagi audiens dan pengamat untuk memberikan respon secara real-time merupakan suatu keharusan. Pemegang otoritas di ruang digital yang berpegang pada nilai-nilai etika sepatutnya tidak serta-merta membatasi interaksi atau mengesampingkan berbagai bentuk kritikan. Justru, mereka perlu mengembangkan sikap terbuka terhadap diskusi produktif dan menerima koreksi yang pada hakikatnya valid. Platform media sosial seyogianya tidak dipandang semata sebagai sarana penyampaian pesan unilateral, melainkan dapat berfungsi sebagai wadah pembelajaran kolektif bagi komunitas. Akuntabilitas dalam pelayanan digital dapat dibangun melalui struktur seperti dewan penasehat, tanggapan terbuka terhadap masukan, serta dedikasi autentik untuk melayani masyarakat, bukan sekadar memperbesar pengaruh pribadi (Christians et al., 2024). Dengan menerapkan mekanisme akuntabilitas, baik secara internal seperti melalui introspeksi dan evaluasi berkelanjutan, maupun eksternal berupa komunikasi dengan komunitas atau penilaian sejawat, seorang figur otoritas keagamaan dapat memastikan bahwa kepemimpinannya tetap terverifikasi dan berjalan sesuai koridor yang benar.

Etika otoritas digital pada dasarnya merupakan pilar utama bagi terciptanya ekosistem media keagamaan yang berintegritas. Hal ini memerlukan lebih dari sekadar kompetensi teknis, tetapi juga kedewasaan spiritual, konsistensi moral, serta kesadaran sosial yang mendalam. Di tengah maraknya godaan untuk mengejar popularitas dan keuntungan, para pemangku otoritas justru dituntut untuk berperan sebagai penjaga nilai-nilai kebenaran, mediator yang mampu mendamaikan perbedaan, serta pengabdikan kemaslahatan umat di dunia digital. Sebuah penelitian tentang strategi media mengungkapkan bahwa keberlangsungan pengaruh yang hakiki tidak terukur dari kuantitas pengikut, melainkan dari tingkat kepercayaan dan manfaat nyata yang dihasilkan melalui penerapan etika secara konsisten (Cronqvist et al., 2024). Berkomitmen pada prinsip-prinsip etika ini memungkinkan otoritas digital menjadi sumber inspirasi sekaligus penuntun yang mencerahkan, bukan sekadar kontributor dalam hiruk pikuk informasi yang justru memperkeruh keadaan spiritual di era penuh kompleksitas ini. Bagian ini sekaligus menjadi penutup dari trilogi kritik etis yang mengakhiri analisis sebelum sampai pada kesimpulan akhir buku.

## BAB XII

### PENUTUP

#### A. Simpulan Argumentasi

Perjalanan evolusi komunikasi manusia yang panjang bermula dari tradisi lisan yang menjadikan pendengaran dan kehadiran bersama sebagai inti pengalaman religius hingga era kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan simulasi interaksi personal dengan entitas non-biologis, mengungkapkan bahwa teknologi media bukan sekadar alat netral untuk menyampaikan pesan. Setiap transformasi media baik lisan, tulisan, cetak, elektronik, digital, maupun AI pada hakikatnya merekonfigurasi sensorium manusia. Sensorium ini meliputi seluruh indera dan proses kognitif yang terlibat dalam mempersepsikan realitas, termasuk dimensi sakral. Transformasi ini bukanlah perubahan *superfisial*, melainkan pergeseran paradigma yang secara mendasar mengubah cara manusia mengalami kehadiran ilahi, membentuk otoritas, dan mengorganisasi komunitas. Dalam budaya aural, misalnya, otoritas bersifat karismatik dan melekat pada suatu penghafal atau nabi dalam ruang ritual kolektif. Sementara dalam budaya tulis dan cetak, otoritas berpindah kepada teks yang terstandarisasi, yang pada saat bersamaan mendorong individualisme dalam penafsiran dan memicu fragmentasi. Media penyiaran seperti radio dan televisi kemudian mengubah agama menjadi spektakel massal yang mengandalkan karisma mediatik. Kemudian, di era digital dan internet, kita menyaksikan ekologi informasi yang semakin terpecah, di mana otoritas justru banyak diambil alih oleh algoritma dan *influencer*. Karenanya, jelas bahwa medium itu sendiri berperan aktif dalam membentuk realitas sosio-religius, bukan sekadar wadah pasif.

Perkembangan teknologi komunikasi ternyata juga berperan penting dalam munculnya, memperburuk, serta mentransformasi isu-isu kontemporer dalam agama. Sebagai contoh, radikalisme digital merupakan produk langsung dari ekosistem media baru ini. Jika sebelumnya retorika ekstrem hanya tersebar melalui pamflet cetak dengan jangkauan terbatas, kini berubah menjadi video viral yang dikurasi algoritma di platform seperti *YouTube* dan *Instagram*. Ironisnya, algoritma yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna secara tidak sengaja justru mempromosikan konten provokatif, emosional, dan sangat polarisasi, sehingga menciptakan semacam ruang gema atau *echo chamber* yang mengukuhkan keyakinan eksklusif dan mempercepat proses radikalisme. Demikian pula, perdebatan mengenai gender dalam agama memperoleh dimensi baru di ruang digital. Di satu sisi, platform digital sering kali mereproduksi dan memperkuat representasi patriarkal melalui konten dakwah yang dominan. Namun di sisi lain, media ini menyediakan ruang dan alat yang relatif aman bagi gerakan feminis keagamaan untuk melawan stigma, menyebarkan penafsiran alternatif, dan membangun solidaritas lintas batas. Kontras antara narasi konservatif dan progresif ini semakin mencolok, terlebih karena logika algoritma acap kali memberikan panggung bagi ujaran kebencian sebagai konten yang menarik. Karena itu, sulit untuk memisahkan isu-isu seperti polarisasi, komodifikasi spiritual, dan krisis otoritas dari mekanisme yang melekat pada setiap medium yang populer pada masanya.

Buku ini juga menegaskan bahwa respons agama terhadap setiap revolusi komunikasi bersifat dialektis, bukan semata-mata pasif atau deterministik. Sejarah menunjukkan bahwa lembaga agama tidak hanya menjadi korban teknologi, melainkan juga aktif bernegosiasi, beradaptasi, bahkan berinovasi. Misalnya, Gereja memanfaatkan mesin cetak untuk menyebarkan Alkitab dan katekismus sambil berupaya mempertahankan kontrol atas penafsiran. Televangelisme mengadopsi logika spektakel televisi komersial untuk menarik massa meski kerap mengorbankan kedalaman spiritual. Di era digital, agama-agama tradisional

berusaha menyesuaikan diri dengan menyelenggarakan ibadah melalui *live streaming* dan mengembangkan aplikasi, meski harus menghadapi tantangan disintermediasi serta persaingan dari spiritualitas yang lebih personal dan berbasis aplikasi. Proses adaptasi ini selalu melibatkan ketegangan antara mempertahankan otentisitas tradisi dan memenuhi tuntutan format baru. Alhasil, masa depan agama tidak dapat semata-mata dinilai berdasarkan perkembangan teknologi, melainkan harus dilihat dari sejauh mana aktor-aktor keagamaan, mulai dari institusi, komunitas, hingga individu mampu merespons secara kritis, menafsirkan kembali, dan memberikan makna teologis terhadap dinamika media yang terus berubah. Satu hal yang tak boleh dilupakan adalah bahwa agensi manusia tetap menjadi faktor kunci dalam menentukan dampak dari teknologi.

Perjalanan dari pengalaman aural menuju ranah kecerdasan buatan sejatinya menggambarkan transformasi dalam pemahaman akan hal-hal yang bersifat transendental. Pada mulanya, pengalaman keagamaan bersifat partisipatoris, melekat secara jasmani, dan terikat pada ruang dan waktu spesifik, seperti ketika seseorang mendengarkan firman dalam sebuah ritual kolektif. Kini, pengalaman tersebut telah berubah menjadi sesuatu yang terdistribusi, terindividualisasi, bahkan tak jarang bersifat artifisial. *Chatbot* AI yang memberikan bimbingan rohani atau algoritma penyusun konten religius personal menciptakan ilusi kedekatan dan pemahaman, meski sebenarnya jauh dari keberadaan fisik, tanggung jawab etis, dan konteks komunal yang nyata. Transformasi ini memunculkan pertanyaan mendasar dari perspektif teologis dan filosofis mengenai hakikat komunitas, otoritas, hingga konsep suara ilahi di era di mana pesan-pesan surgawi dapat dihasilkan oleh mesin. Namun, kompleksitas ini sekaligus membuka peluang yang dapat dikatakan bersifat membebaskan. Contohnya, kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali bahasa-bahasa ritual yang telah punah, menganalisis pola teks kitab suci dengan lebih metodis, atau memperluas akses bagi individu dengan keterbatasan fisik. Tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa teknologi tidak sekadar menggantikan kedalaman dan keadilan pengalaman spiritual manusia dengan simulasi yang bersifat dangkal.

Inti dari diskusi ini adalah bahwa untuk memahami dinamika keberagaman kontemporer, mulai dari kebangkitan fundamentalisme digital, komodifikasi spiritual, hingga krisis otoritas perlu menelusuri kembali akar sejarahnya, khususnya bagaimana teknologi komunikasi mengubah sensorium manusia. Pendekatan yang hanya berfokus pada isi doktrin atau fenomena permukaan tidak akan cukup untuk memahami kompleksitas sejatinya. Dibutuhkan sebuah pendekatan hermeneutis yang berbasis media-teknologis, yang menyadari bahwa setiap medium membawa bias tertentu yang memengaruhi baik pesan maupun pengalaman maknanya. Oleh karena itu, literasi keagamaan di zaman modern tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang media dan algoritma. Hanya dengan sikap kritis terhadap cara kerja platform digital dan AI, serta menyadari kepentingan ekonomi-politik di baliknya, umat beragama dapat menavigasi perubahan ini dengan bijaksana. Masa depan relasi antara manusia, teknologi, dan yang sakral tidak akan ditentukan oleh kerinduan berlebihan pada masa aural yang telah lampau atau optimisme teknologi yang naif, melainkan oleh upaya kolektif untuk membangun ekosistem media yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, welas asih, dan penghormatan mendalam terhadap martabat manusia.

## **B. Rekonstruksi Sensorium di Era *Ubiquitous Computing***

Memasuki zaman *ubiquitous computing*, di mana komputasi meresap ke hampir seluruh segi kehidupan melalui *wearable device*, *smart environment*, realitas virtual (VR), realitas tertambah (AR), serta kecerdasan buatan (AI) yang terintegrasi, kita sejatinya mengamati suatu tahap revolusioner dalam transformasi sensorium manusia, yakni fenomena yang tidak terlihat sejak masa revolusi tipografi. Berbeda dengan era digital terdahulu yang didominasi oleh

tampilan dua dimensi, ekosistem komputasi yang menyebar ini menawarkan pengalaman yang lebih mendalam dan multimoda. Integrasi stimulus visual, *auditory*, haptic, hingga kinestetik terjalin dalam suatu simulasi lingkungan yang kompleks. Dalam konteks keagamaan, lanskap media baru ini membuka peluang sekaligus pertanyaan mendasar. Praktik ritual dan ibadah tidak sekadar ditransmisikan secara langsung (*streamed*), melainkan dapat dihadirkan secara lengkap dalam ruang virtual yang dirancang khusus untuk menyerupai dan terkadang melampaui kesucian ruang fisik. Contohnya, seseorang dapat melakukan ziarah digital ke Makkah atau Yerusalem dengan realisme tinggi dari kenyamanan rumahnya. Atau perayaan misa dalam metaverse, di mana avatar jemaat dari berbagai belahan dunia berkumpul secara virtual. Sensibilitas religius yang tradisionalnya mengandalkan kehadiran fisik dan resonansi suara kolektif, kini berubah menjadi pengalaman yang sepenuhnya dibangun oleh kode dan algoritma dengan melahirkan apa yang dapat dinamakan *sacrality by design*.

Namun, transformasi sensorium ini tidak lepas dari paradoks. Meskipun teknologi VR dan AR mampu menciptakan pengalaman *co-presence* yang meyakinkan, batas antara kehadiran otentik dan simulasi semakin buram. Dalam ruang virtual, kita bisa merasakan kebersamaan melalui avatar, mengikuti ritual bersama, bahkan mengalami emosi kolektif. Akan tetapi, semua ini berlandaskan pada data dan algoritma yang tanpa kesadaran atau intensionalitas. Ini merupakan puncak dari proses distansiasi yang bermula ketika teks menjadi objek mati, artinya dari suara yang hidup dalam komunitas menjadi teks yang diam, lalu gambar di layar, hingga kini berbentuk avatar dalam simulasi interaktif. Terdapat hal yang mengkhawatirkan, rekonstruksi sensorium semacam ini berpotensi melahirkan spiritualitas yang justru terisolasi. Meskipun terhubung secara global, ada risiko terlepasnya ikatan dengan tubuh fisik, konteks lokal, dan tanggung jawab sosial yang melekat pada komunitas nyata. Pengalaman transendensi pun mungkin tereduksi menjadi sekumpulan *feedback* sensorik yang dirancang untuk memuaskan, mirip dengan estetika televangelisme yang spektakuler hanya dengan tingkat personalisasi dan imersi yang jauh lebih tinggi.

Di titik inilah peran AI generatif menjadi krusial sekaligus problematik. AI tidak hanya berfungsi sebagai kurator lingkungan virtual, tetapi juga sebagai partisipan aktif seperti layaknya seorang pemimpin dalam pengalaman spiritual. Bayangkan asisten AI yang berperan sebagai pembimbing spiritual pribadi (AI guru/mursyid), *chatbot* yang mendengarkan pengakuan dosa dan memberikan absolusi berbasis analisis data, atau algoritma yang merancang ritual sesuai kondisi emosi dan preferensi teologis individu. Personalisasi ekstrem semacam ini menciptakan ilusi kedekatan dan pemahaman yang nyaris sempurna. Namun, seperti yang diungkap dalam studi sensorium aural AI, suara dan kehadiran AI hanyalah produk statistik tanpa pengalaman subjektif, narasi hidup, atau akuntabilitas moral. Otoritas keagamaan tradisional, yang sudah terfragmentasi oleh media sosial, mungkin semakin tergantikan oleh otoritas algoritmik yang dianggap lebih objektif dan selalu tersedia. Maka dari itu, rekonstruksi sensorium di era ini bukan sekadar perubahan persepsi indrawi, melainkan sudah menandai pergeseran epistemologis yang mendasar. Sumber kebijaksanaan dan bimbingan spiritual secara gradual berpindah, dari tradisi dan komunitas manusiawi menuju sistem mesin yang beroperasi berdasarkan logika prediktif dan optimisasi.

Lingkungan komputasi *ubiquitous* berpotensi mengintensifkan proses komodifikasi dan datafikasi pengalaman religius melalui mekanisme yang secara jujur diakui memiliki kompleksitas cukup tinggi. Misalnya, setiap aktivitas dalam ruang digital mulai dari ungkapan *do'a*, gerakan meditasi, hingga respons emosional dalam ritual dapat diabadikan, diproses, lalu diubah menjadi aset data bernilai tinggi. Informasi ini tidak semata digunakan untuk menyempurnakan pengalaman pengguna, melainkan berisiko dieksploitasi guna kepentingan pemasaran, agenda politik, atau penguatan prasangka tertentu. Dalam konteks ini, ekonomi perhatian yang selama ini dominan dapat berevolusi menjadi semacam ekonomi pengalaman, di mana bukan hanya fokus kita yang diperebutkan, tetapi juga seluruh dimensi sensorik dan

emosional kita. Pada fase ini, platform yang menghadirkan pengalaman religius melalui VR/AR akan memainkan peran sentral dalam membentuk norma dan praktik keagamaan, paralel dengan pengaruh algoritma media sosial terhadap wacana publik dewasa ini. Wajar jika agama berpotensi berubah menjadi layanan berbasis langganan (*subscription-based service*) yang dikendalikan korporasi teknologi, dengan akses terhadap pengalaman sakral yang sangat tergantung pada logika pasar dan kepemilikan data.

Namun, bukan berarti tidak ada harapan. Apabila teknologi ini dikembangkan dengan landasan etika dan pemahaman teologis yang matang, potensi transformatifnya justru sangat menjanjikan. Realitas campuran (XR), sebagai contoh, dapat berfungsi sebagai instrumen efektif untuk pendidikan agama yang lebih inklusif dan terjangkau. Individu dengan keterbatasan mobilitas akan mampu mengunjungi situs-situs suci dengan cara yang sebelumnya mustahil. Bahkan bahasa dan ritual yang nyaris punah dapat dihidupkan kembali melalui rekonstruksi digital yang presisi. Komunitas diaspora juga berpeluang memperkuat ikatan dengan akar budaya dan tradisi leluhur secara lebih konkret. Di sisi lain, kecerdasan buatan (AI) dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola baru dalam teks-teks suci atau menerjemahkan manuskrip kuno. Kunci utamanya bukan terletak pada teknologi itu sendiri, melainkan pada kapasitas komunitas agama untuk bertransisi dari konsumen pasif menjadi ko-kreator aktif yang merancang lingkungan virtual dan algoritma sesuai prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, welas asih, kebijaksanaan kolektif, dan penghargaan terhadap misteri. Hal ini tentu membutuhkan literasi tekno-teologis yang mendalam serta komitmen untuk terlibat sejak tahap perancangan awal.

Dalam konteks rekonstruksi sensorium di era komputasi yang merata ini, respons yang diperlukan bukan sekadar reaktif, tetapi juga proaktif dan kritis. Kita perlu mempertanyakan, *seperti apa sensorium yang ingin kita bangun untuk pengalaman religius di masa depan?, apakah kita menginginkan sensorium yang semakin terisolasi dan terpersonalisasi yang justru memperkuat individu dalam gelembung spiritualnya sendiri?, atau sensorium yang mampu merancang ulang ruang bagi pertemuan antartubuh yang bermakna, dialog antarkeyakinan yang substantif, dan solidaritas yang nyata, meski diwadhahi oleh teknologi?* Ini bukan persoalan sederhana, sebab desain antarmuka, arsitektur kode, dan model bisnis di balik platform VR/AR/AI akan menjadi medan baru perjuangan teologis dan etis. Tantangan bagi agama-agama tidak cukup hanya merespons perkembangan teknologi, tetapi juga merumuskan visi antropologis dan teologis tentang manusia di dunia yang kian tersimulasi, visi yang mampu mengarahkan teknologi untuk menghormati martabat manusia dan mencari makna kolektif, bukan sekadar mengejar kepuasan individual yang terkuantifikasi.

Pada hakikatnya, era *ubiquitous computing* ini sesungguhnya bukan merupakan titik akhir dalam pencarian rohani umat manusia. Jika direnungkan lebih dalam, fenomena ini justru menandai sebuah fase baru yang kompleks dalam perjalanan peradaban kita. Sebagaimana leluhur kita yang hidup dalam budaya lisan kemudian berhasil beradaptasi dengan tulisan dan percetakan, namun tetap mempertahankan esensi pengalaman partisipatifnya, kini kita pun dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan sintesis kreatif. Tantangannya terletak pada bagaimana memanfaatkan teknologi yang imersif dan terhubung ini, sambil tetap memelihara aspek-aspek yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar data, keberadaan fisik yang rentan, kesunyian yang tidak terarahkan, tanggung jawab dalam komunitas nyata, serta misteri transenden yang senantiasa berada di luar batas segala simulasi. Dengan demikian, rekonstruksi sensorium ini pada dasarnya merupakan undangan untuk memikirkan kembali makna menjadi manusia yang merasakan, mendengar, dan mengalami yang sakral. Persoalan semacam ini justru semakin mendesak untuk dijawab, terlebih di tengah dunia yang kian terasa artifisial seperti sekarang ini.

### C. Implikasi Teologis dan Komunikasi

Fenomena yang kita kenal sebagai “Agama Elektronik” tidak hanya mengubah praktik keberagamaan yang ada, tetapi juga memerlukan evaluasi mendalam terhadap fondasi teologisnya. Pergeseran dari pengalaman pendengaran langsung yang bersifat fisik menuju interaksi dengan entitas algoritmik tanpa wujud jasmani tentu memiliki implikasi teologis yang serius dan mendesak untuk dikaji. Konsep-konsep fundamental seperti kehadiran ilahi yang dalam tradisi Abrahamik sering dihubungkan dengan firman yang didengar atau pengalaman sakramental dalam komunitas nyata kini harus berhadapan dengan mediasi digital yang bersifat simulatif dan tersebar. *Bagaimana mungkin kita membahas kehadiran Tuhan yang otentik jika ia disampaikan melalui streaming ibadah atau do’a yang ditujukan pada chatbot pastoral?*. Persoalan ini jelas bukan sekadar teknis, melainkan menyentuh hakikat imanensi dan transendensi itu sendiri. Di sisi lain, doktrin tentang komunitas beriman (ummah, gereja, atau lainnya) yang selama ini dibangun di atas perjanjian, tanggung jawab kolektif, dan kehadiran fisik, kini terganggu oleh keberadaan komunitas virtual yang cair, anonim, dan rapuh. Hal ini memicu kebingungan teologis, *apakah komunitas berbasis algoritma masih layak disebut sebagai tubuh mistik, ataukah ia merupakan bentuk baru yang memerlukan pemikiran eklesiologis yang sama sekali segar?*.

Lebih rumit lagi, isu otoritas dan wahyu menjadi wilayah yang semakin kompleks. Otoritas tradisional yang bersumber pada suksesi apostolik, sanad keilmuan, atau penahbisan institusional kini berbenturan dengan otoritas yang muncul dari sistem algoritmik dan karisma digital yang diukur melalui jumlah pengikut dan tingkat interaksi. Kompleksitas ini kian terasa ketika model bahasa AI seperti *ChatGPT* mampu menghasilkan khotbah, tafsir kitab suci, atau bahkan fatwa yang terdengar koheren dan meyakinkan. Jika wahyu dipahami sebagai pernyataan ilahi yang melampaui segalanya, *output* AI tentu bukan wahyu. Namun, jika umat mulai menerima dan merenungkan teks buatan AI sebagai otoritatif, terjadi pergeseran fenomenologis yang signifikan, otoritas secara implisit berpindah ke sistem yang tidak memiliki kesadaran atau tanggung jawab moral. Risiko terbesar terletak pada pelemahan dimensi profetik dan kritis agama, sebab AI dirancang untuk memuaskan dan mengonfirmasi, bukan menantang atau menubuatkan seperti para nabi. Karena itu, agenda teologi kontemporer harus berani meninjau ulang istilah-istilah kunci ini dalam konteks perkembangan media-teknologi yang terus berubah.

Untuk menjawab tantangan ini, maka pendekatan yang diperlukan mencakup etnografi digital keagamaan yang mendalam dan audit algoritmik yang kritis. Etnografi digital dapat dilakukan dengan mengeksplorasi ruang-ruang seperti grup *WhatsApp* kajian, *server Discord* komunitas spiritual, atau sesi *live streaming* ibadah, guna memahami praktik keberagamaan sehari-hari, pembentukan otoritas, serta konstruksi makna di tingkat mikro. Penelitian semacam ini dapat mengungkap kesenjangan antara retorika resmi dan praktik aktual, termasuk bagaimana teknologi diadopsi oleh umat atau justru membentuk ulang praktik keagamaan. Sementara itu, audit algoritmik yang berasal dari kajian media kritis perlu diterapkan untuk mengungkap bias, logika tersembunyi, serta kepentingan ekonomi-politik di balik platform penyedia konten keagamaan. Misalnya, *mengapa algoritma YouTube cenderung merekomendasikan ceramah tertentu?*, atau *nilai apa yang mendasari kebijakan moderasi konten keagamaan di Facebook?*. Penelitian semacam ini harus bersifat interdisipliner, melibatkan ahli teologi, ilmuwan data, dan pakar etika teknologi. Eksplorasi ini penting untuk mengungkap kekuatan tak kasat mata yang mengubah lanskap keagamaan digital (yang sering dianggap netral) menjadi medan pertarungan wacana yang sarat dengan kepentingan politik.

Berdasarkan temuan kajian yang telah dilakukan, penyusunan rekomendasi kebijakan yang nyata dan berjenjang menjadi suatu keharusan. Baik pada skala nasional maupun global, contohnya, kini telah tiba saatnya untuk menerapkan regulasi yang mewajibkan keterbukaan algoritma secara terbatas serta pertanggungjawaban platform digital berskala besar dalam



mengelola muatan keagamaan. Platform-platform ini tidak boleh bertindak sebagai wasit yang mutlak dalam menilai apa yang dianggap sebagai ujaran kebencian atau radikalisme, tanpa melibatkan pakar dan perwakilan dari berbagai agama dalam penyusunan panduannya. Kebijakan tersebut perlu menginisiasi pembentukan dewan penasihat multireligius dan multidisiplin untuk platform global, guna meminimalisasi kesalahan moderasi yang kerap timbul akibat mispersepsi konteks budaya. Di sisi lain, pemerintah bersama lembaga filantropi selayaknya mendorong pengembangan infrastruktur digital keagamaan alternatif yang mandiri dan berlandaskan etika. Daripada terus bergantung pada platform komersial, komunitas agama perlu didorong bahkan difasilitasi untuk mengadopsi atau mengembangkan platform berbasis *open-source* yang dirancang dengan prinsip privasi, kedalaman diskusi, dan keberlanjutan komunitas, bukan sekadar mengejar viralitas atau monetisasi data. Pada hakikatnya, ini dapat dipandang sebagai bentuk emansipasi dalam ranah teknologi digital.

Dalam aspek pendidikan dan peningkatan kapasitas, diperlukan investasi besar-besaran untuk membangun literasi digital-teologis secara menyeluruh. Kurikulum di pesantren, seminar, sekolah teologi, dan madrasah perlu mengintegrasikan materi terkait filsafat teknologi, etika media digital, serta dasar-dasar pemahaman kritis terhadap algoritma. Tujuannya agar para pemuka agama dan intelektual tidak hanya menguasai teks-teks suci secara konvensional, tetapi juga mampu membaca logika dan kode di balik platform digital. Mereka harus menjadi jembatan yang kompeten antara tradisi keagamaan dan realitas digital, sekaligus advokat yang tangguh bagi umat dalam berhadapan dengan kekuatan teknologi. Selain itu, program literasi media keagamaan untuk masyarakat luas perlu ditingkatkan, agar umat dapat menjadi pengguna yang kritis dan dapat membedakan konten bermakna dari yang sekadar sensasional. Pemahaman tentang mekanisme *echo chamber* dan perlindungan data pribadi terkait spiritualitas juga penting. Dalam hal ini, literasi menjadi tameng utama melawan manipulasi dan potensi radikalisme digital.

Mengenai praktik komunikasi keagamaan, tampak jelas perlunya pergeseran paradigma dari model *broadcast* menuju pendekatan jejaring dan pelayanan (*network and service*). Meskipun model satu arah seperti televangelisme atau ceramah tradisional masih relevan, pendekatan tersebut tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas dan kebutuhan personalisasi di era digital. Lembaga keagamaan harus berfungsi sebagai simpul dalam jejaring yang lebih luas, menyediakan sumber daya teologis yang mendalam, memfasilitasi ruang dialog yang inklusif, serta menawarkan pendampingan pastoral yang mudah diakses melalui berbagai saluran digital tanpa mengorbankan keutuhan hubungan antarmanusia. Komunikator keagamaan kini dituntut memiliki kompetensi baru, menjadi moderator diskusi daring yang arif, kreator konten yang berimbang, dan pendamping digital yang empatik. Paling yang terpenting, komunikasi ini harus secara transparan mengakui keterbatasan media digital dan secara aktif mengajak umat untuk mencari pengalaman kolektif secara fisik serta momen kontemplasi yang terbebas dari distraksi teknologi, sehingga keseimbangan antara dunia digital dan analog tetap terpelihara.

Pada hakikatnya, bila kita meninjau dimensi spiritualitas baik secara personal maupun kolektif, zaman sekarang seolah memunculkan kebutuhan akan suatu bentuk asketisme digital yang segar, sekaligus pendekatan teologi keterputusan. Di tengah gempuran godaan untuk senantiasa terkoneksi dan mengonsumsi konten keagamaan secara instan, kedisiplinan untuk secara sadar melepaskan diri dari jejaring digital muncul sebagai suatu latihan spiritual yang krusial. Ini bukan berarti penampikan total terhadap teknologi, sama sekali bukan, melainkan lebih sebagai penegasan kemandirian individu sekaligus pembentukan ruang sunyi, suatu wilayah di mana bisikan-bisikan terdalam yang kerap hilang dalam keriuhan digital dapat didengar kembali. Dalam kerangka ini, teologi berupaya menyediakan ruang permenungan mengenai arti kesunyian, keheningan, serta kehadiran fisik yang tidak dapat digantikan oleh simulasi apa pun. Dampaknya, ketika membahas “Agama Elektronik”, muncul suatu

pertemuan, suatu sintesis yang tidak terelakkan dengan memanfaatkan teknologi secara arif dan kritis untuk memperluas pelayanan dan solidaritas, namun dengan keteguhan memelihara praktik-praktik inti yang menjaga kedalaman makna, keotentikan, serta misteri pengalaman religius yang memang selalu melampaui segala bentuk perantaraan. Dengan demikian, masa depan agama ini, menurut hemat penulis, akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita menghidupi suatu ketegangan yang justru produktif, menerima kemungkinan-kemungkinan baru tanpa kehilangan esensi tradisi yang diwariskan melalui suara, raga, dan komunitas yang bersifat konkret.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akabayashi, A. (2020). *Bioethics Across the Globe: Rebirthing Bioethics*. Springer Nature Singapore Pte Ltd. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-3572-7>
- Balzacq, T., & Settoul, E. (Ed.). (2022). *Radicalization in Theory and Practice: Understanding Religious Violence in Western Europe*. University of Michigan Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.3998/mpub.12202059>
- Bar-Levav, A., & Rebhun, U. (Ed.). (2020). *Textual Transmission in Contemporary Jewish Cultures*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197516485.001.0001>
- Brissman, I., Linjamaa, P., & Makeeff, T. T. (Ed.). (2024). *Handbook of Rituals in Contemporary Studies of Religion*. Koninklijke Brill NV. <https://doi.org/10.1163/9789004692206>
- Bruce, S. (2019). *Pray TV*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429398964>
- Christians, C. G., Fackler, M., Kreshel, P. J., Brown, W. J., Feng, Y., Overton, H. K., & Richardson, K. B. (2024). *Media Ethics*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/b23243>
- Cronqvist, M., Norén, F. M., & Stjernholm, E. (Ed.). (2024). *Media Tactics in the Long Twentieth Century*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781032618326>
- Deguchi, A., Hirai, C., Matsuoka, H., Nakano, T., Oshima, K., Tai, M., & Tani, S. (Ed.). (2020). *Society 5.0: A People-Centric Super-Smart Society*. Springer Nature Singapore Pte Ltd. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-15-2989-4>
- Dinwiddie, M. (2016). *Religion by Radio*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315457611>
- Duderija, A., Alak, A. I., & Hissong, K. (2020). *Islam and Gender*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003045182>
- Durham Jr, W. C., & Thayer, D. D. (Ed.). (2018). *Religion, Pluralism, and Reconciling Difference*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315605043>
- Einstein, M., Madden, K., & Winston, D. (Ed.). (2018). *Religion and Reality TV*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315545950>
- Engell, L. (2025). *Thinking Through Television*. Routledge. <https://doi.org/10.5117/9789089647719>
- Erickson, G. (2022). *Speculative Television and the Doing and Undoing of Religion*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003227045>
- Esslin, M. (2017). *The Age of Television*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315130897>
- Filali-Ansary, A., & Karmali Ahmed, S. (Ed.). (2012). *The Challenge of Pluralism: Paradigms from Muslim Contexts*. Edinburgh University Press.
- Finnegan, R. (2023). *Communicating*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003391975>
- Fox, C., & Saunders, J. (Ed.). (2023). *The Routledge Handbook of Philosophy and Media Ethics*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003134749>
- Füssel, S. (2020). *Gutenberg and the Impact of Printing*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315253718>
- Gervasio, G., Giorda, M. C., & Perucchini, P. (Ed.). (2025). *Diversity, Fear and Religions*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003562566>
- Healey, K., & Woods Jr, R. (2019). *Ethics and Religion in the Age of Social Media*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780367824181>
- Hoover, S. M. (2025). *Religion in the Media Age*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003127017>
- Hunter, M. (Ed.). (2016). *Printed Images in Early Modern Britain*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315246048>
- Ibrahim, F. (Ed.). (2024). *Studies in Religion and the Everyday*. Oxford University

- PressOxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198902782.001.0001>
- Isetti, G., Innerhofer, E., Pechlaner, H., & de Rachewiltz, M. (Ed.). (2020). *Religion in the Age of Digitalization From New Media to Spiritual Machines*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780367809225>
- Kaul, V., & Salvatore, I. (Ed.). (2020). *What is Pluralism?* Routledge India. <https://doi.org/10.4324/9780367814496>
- Knight, D. (2023). *Science and Spirituality*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003416593>
- Knott, K., & Poole, E. (2016). *Media Portrayals of Religion and the Secular Sacred*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315594514>
- Kok, A. (2022). *The Web and Faith*. River Publishers. <https://doi.org/10.1201/9781003339809>
- Kramer, R. (2019). *Are We Postmodern Yet?* Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-30569-7>
- Kupari, H., & Vuola, E. (Ed.). (2019). *Orthodox Christianity and Gender*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203701188>
- Lamal, N., Cumby, J., & Helmers, H. J. (Ed.). (2021). *Print and Power in Early Modern Europe (1500–1800)*. Koninklijke Brill NV. <https://doi.org/https://lcn.loc.gov/2021013316>
- le Roux, E., & Pertek, S. I. (2022). *On the Significance of Religion in Violence Against Women and Girls*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003169086>
- Lehmann, K. (Ed.). (2021). *Talking Dialogue*. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110529173>
- Luck, M. (Ed.). (2016). *Philosophical Explorations of New and Alternative Religious Movements*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315600390>
- Mahan, J. H., & Thrall, J. H. (2025). *Media, Religion and Culture*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003329824>
- Matviyets, A. S., Veltri, G., & Rüpke, J. (Ed.). (2023). *Tolerance and Intolerance in Religion and Beyond*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003082484>
- Mullett, M. (2023). *Radical Religious Movements in Early Modern Europe*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003399469>
- Natale, S., & Pasulka, D. (Ed.). (2019). *Believing in Bits: Digital Media and the Supernatural*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190949983.001.0001>
- Oliver, M. B., Raney, A. A., & Bryant, J. (Ed.). (2019). *Media Effects*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429491146>
- Pace, E. (2016). *Religion as Communication*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315604886>
- Roessler, B., & Steeves, V. (Ed.). (2025). *Being Human in the Digital World*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009383851>
- Sayago, S. (2023). *Cultures in Human-Computer Interaction*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-30243-5>
- Sheikh, H., Prins, C., & Schrijvers, E. (Ed.). (2023). *Mission AI: The New System Technology*. Springer Nature Switzerland AG. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-21448-6>
- Silva, T. C., & Kordaczuk-Wąs, M. (Ed.). (2025). *Preventing and Countering Violent Extremism and Radicalisation*. Bristol University Press.
- Silverstone, R. (Ed.). (2017). *Media, Technology and Everyday Life in Europe*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315249384>
- Smith, S. G. (2018). *Scriptures and the Guidance of Language*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108580441>
- Sroka, A., Castro-Rial Garrone, F., & Kumbrián, R. D. T. (Ed.). (2017). *Radicalism and Terrorism in the 21st Century*. Peter Lang GmbH. <https://doi.org/10.3726/b10680>

- Starkey, C., & Tomalin, E. (2021). *The Routledge Handbook of Religion, Gender and Society*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429466953>
- Stout, D. (2013). *Media and Religion*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203148112>
- Yeo, G. (2021). *Record-Making and Record-Keeping in Early Societies*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429054686>
- Zimmermann, J. (Ed.). (2023). *Human Flourishing in a Technological World: A Theological Perspective*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192844019.001.0001>



Buku ini mengantam pembaca pada perjalanan intelektual dari era *aural* menuju era kecerdasan buatan, mengeksplorasi bagaimana evolusi teknologi komunikasi telah mendistorsi, mengubah, dan merumuskan ulang *sensorium* keberagamaan manusia. Dengan pendekatan interdisipliner yang *media-kommunikasi, sosiologi agama, filsafat teknologi*, dan teori media, *buku ini* luggan kmmumika agiman dirame kecerdasan buatan yang menantang otoritas tradisional. Berikut adalah beberapa isu yang dibahas dalam buku ini:

- Perubahan *sensorium* religius dari dominasi pengalaman mendengarkan menuju interaksi dengan entitas kecerdasan buatan generatif dalam produksi makna keagamaan;
- Problematika otoritas keagamaan, komodifikasi spiritualitas, dan ekonomi perhatian di era media sosial dan *platform* kecerdasan buatan;
- Etika media keagamaan terkait bias algoritma, misinformasi, dan simulasi yang menggugah perdebatan teologis;
- Implikasi keberadaan AI dalam, ritual, interpretasi kitab suci, dan masa depan spiritualitas manusia di tengahan teknologi yang semakin cerdas.

Melalui kajian ke lintasan komunikasi e dan agama ini, para pembaca dianya ~~mema~~ tidak ~~tataya~~ memahaksi tetapi juga merenungkan bagaimana teknologi, agama, and kemanusiaan bisa berinterkaksi secara lebih bijak dan humanis di era yang semakin canggih ini.

ISBN 978-634-7117-20-5 (PDF)



9

786347

117205

GUNUNG DJATI PUBLISHING